



DOKUMEN INDUK

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS IKLHSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH IRPJMDI KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
TAHUN 2024





WALI KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan anugrah-Nya sehingga Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengacu pada perturan pemerintah RI Nomor 46 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2018 Tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan utama penyusunan KLHS dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah untuk memastikan bahwa prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Bogor.

Bogor, 13 September 2024
WALI KOTA BOGOR

Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 Pendahuluan	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Tujuan.....	1-2
1.3. Landasan Hukum	1-2
1.4. Ruang Lingkup.....	1-4
1.4.1. Kondisi Umum Daerah.....	1-4
1.4.2. Capaian Indikator TPB.....	1-4
1.4.3. Pembagian Peran.....	1-4
1.5. Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029	1-4
BAB 2 Dasar Teori.....	2-1
2.1. Perkembangan Kota Bogor	2-3
2.2. Perkembangan Kota Bogor Dan Sekitarnya.....	2-5
2.3. Peran dan Fungsi Kota Bogor.....	2-7
2.4. Perkembangan Aktivitas Kota Bogor	2-9
BAB 3 Kondisi Umum Kota Bogor	3-1
3.1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi	3-1
3.2. Batas Wilayah Fungsional.....	3-1
3.3. Kondisi Fisik Wilayah	3-5
3.3.1. Klimatologi	3-5
3.3.2. Topografi	3-8
3.3.3. Morfologi	3-8
3.3.4. Kemiringan Lereng.....	3-9
3.3.5. Geologi.....	3-9
3.3.6. Jenis Tanah	3-10
3.3.7. Daerah Aliran Sungai.....	3-10
3.3.8. Penggunaan Lahan.....	3-18
3.3.9. Rawan Bencana di Kota Bogor.....	3-20
3.3.10. IKLH Kota Bogor	3-29
3.4. Kondisi Sosial.....	3-30
3.4.1. Kondisi Demografi	3-30
3.5. Kondisi Ekonomi	3-31
3.6. Kondisi Lingkungan Hidup (Baseline 6 Muatan KLHS).....	3-36
3.6.1. Bentang Alam dan Vegetasi Alami	3-36



3.6.1.1. Bentang Alam.....	3-36
3.6.1.2. Vegetasi Alami.....	3-37
3.6.2. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	3-40
3.6.2.1. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan.....	3-41
3.6.2.2. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air.....	3-47
3.6.3. Prakiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup.....	3-53
3.6.3.1. Dampak Resiko Timbulan Sampah.....	3-53
3.6.3.2. Dampak Resiko Timbulan Air Limbah.....	3-55
3.6.4. Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem.....	3-59
3.6.4.1. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan.....	3-60
3.6.4.2. Jasa Ekosistem Penyedia Air.....	3-62
3.6.4.3. Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir.....	3-63
3.6.4.4. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim.....	3-64
3.6.5. Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam.....	3-65
3.6.5.1. Efisiensi Pola Ruang Berdasarkan Jasa Penyedia Air.....	3-66
3.6.5.2. Efisien Pola Ruang Berdasarkan Jasa Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir.....	3-67
3.6.6. Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.....	3-69
3.6.6.1. Tingkat Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Bogor.....	3-69
3.6.6.2. Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bogor.....	3-71
3.6.7. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.....	3-73
3.7. Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian TPB.....	3-76
3.7.1. Pendapatan Kota Bogor Tahun 2023.....	3-76
3.7.2. Pendapatan Asli Daerah.....	3-77
BAB 4 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	4-1
4.1. Pelaksanaan TPB di Kota Bogor.....	4-1
4.2. Capaian TPB Berdasarkan Pilar.....	4-6
4.2.1. Capaian Indikator TPB Pilar Sosial.....	4-6
4.2.2. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi.....	4-6
4.2.3. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan.....	4-7
4.2.4. Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	4-7
4.2.5. GAP Capaian TPB.....	4-8
4.3. Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	4-9
4.4. Perumusan Isu PB Strategis dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.....	4-11
BAB 5 Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah.....	5-1
5.1. Hasil Analisis Capaian TPB pada Perangkat Daerah.....	5-1
5.2. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB.....	5-3
5.2.1. Peran Pemangku Kepentingan dar unsur Pemerintah.....	5-3
5.2.2. Peran Pemangku Kepentingan dar unsur Pemerintah.....	5-6
BAB 6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi.....	6-1
6.1. Alternatif Skenario terhadap Daya Dukung Lingkungan.....	6-3
6.1.1. Skenario Daya Dukung Air.....	6-3



6.1.2. Skenario Daya Dukung Pangan.....	6-4
6.2. Alternatif Skenario Capaian TPB	6-5
6.2.1. Perlunya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera	6-5
6.2.1.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	6-6
6.2.1.2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	6-8
6.2.1.3. PDB Per Kapita (TPB 8 pada Indikator 8.1.1(a))	6-10
6.2.1.4. Gini Ratio (TPB 10 pada Indikator 10.1.1*)	6-12
6.2.2. Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing.....	6-13
6.2.2.1. Skor Pola Pangan Harapan (TPB 2 pada Indikator 2.2.(c))	6-14
6.2.2.2. AKBa Per 1000 Kelahiran Hidup (TPB 3 pada Indikator 3.2.1)	6-16
6.2.2.3. TPB 3 Lainnya yang berkaitan dengan SPM Kesehatan	6-17
6.2.2.4. APK PAUD (TPB 4 pada Indikator 4.2.2.(a))	6-20
6.2.3. Akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai.....	6-21
6.2.3.1. Alternatif scenario terhadap upaya penurunan GRK dari sektor energi melalui pembangunan infrastruktur	6-22
6.2.4. Belum terpenuhinya pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi.....	6-23
6.2.4.1. Persentase Air Minum Aman (TPB 6 pada Indikator 6.1.1.(a))	6-24
6.2.4.2. Persentase sanitasi layak (TPB 6 pada indikator 6.2.1.(b))	6-26
6.2.4.3. Persentase sampah tertangani (TPB 6 pada Indikator 11.6.1.(a))	6-28
6.2.5. Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	6-29
6.2.5.1. Persentase RTH (TPB 11 pada Indikator 11.7.1.)	6-30
6.2.5.2. Skenario terhadap isu perubahan iklim.....	6-32
6.2.6. Belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelambagaan pemerintah dan non-pemerintah di Kota Bogor.....	6-36
6.3. Rekomendasi KLHS Terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029	6-38
BAB 7 Kesimpulan	7-1
Daftar Pustaka	a
LAMPIRAN 1. METODE PENYUSUNAN KLHS.....	- 1 -
L1.1. Pembentukan Tim.....	- 2 -
L1.2. Identifikasi, Pengumpulan dan Analisis Data	- 3 -
L1.1.1. Identifikasi.....	- 4 -
L1.1.2. Pengumpulan Data.....	- 5 -
L1.1.3. Analisis Data.....	- 5 -
L1.2. Pengkajian.....	- 5 -



L1.2.1. Kajian Rencana Pembangunan dengan Target TPB.....	- 6 -
L1.2.2. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung.....	- 7 -
L1.2.3. Kajian Pembiayaan pembangunan Daerah	- 7 -
L1.3. Perumusan Skenario	- 8 -
L1.4. Perumusan Rekomendasi.....	- 9 -
L1.5. Penjaminan Kualitas	- 9 -
LAMPIRAN 2. REKAPITULASI CAPAIAN TPB DI KOTA BOGOR	11
LAMPIRAN 3. REKAPITULASI CAPAIAN TPB BERDASARKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	35
LAMPIRAN 4. TABEL D1, D2 DAN D3 BERDASARKAN PEDOMAN PERMENDAGRI 7/2018	86



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Bogor	3-1
Tabel 3. 2 Temperatur Rata-rata Bulanan Kota Bogor 2015-2023	3-5
Tabel 3. 3 Kelembaban Minimum, Rata-rata dan Maksimum di Kota Bogor Tahun 2012- 2022	3-6
Tabel 3. 4 Kecepatan angin rata-rata maksimum di Kota Bogor tahun 2019-2023.....	3-7
Tabel 3. 5 Tekanan udara minimum, rata-rata dan maksimum di Kota Bogor Tahun 2023....	3-7
Tabel 3. 6 Jumlah Curah Hujan di Kota Bogor Tahun 2015-2023	3-8
Tabel 3. 7 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan morfologi	3-8
Tabel 3. 8 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan kemiringan lereng.....	3-9
Tabel 3. 9 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan.....	3-10
Tabel 3. 10 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah di Kota Bogor	3-10
Tabel 3. 11 Luas setiap penggunaan lahan di Kota Bogor.....	3-18
Tabel 3. 12 Kelas Risiko Banjir Kota Bogor	3-20
Tabel 3. 13 Risiko Gerakan Tanah di Kota Bogor	3-22
Tabel 3. 14 Kawasan Risiko Banjir Bandang di Kota Bogor	3-24
Tabel 3. 15 Kawasan Rawan Cuaca Ekstrem di Kota Bogor	3-26
Tabel 3. 16 Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api di Kota Bogor.....	3-26
Tabel 3. 17 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor 2019-2023	3-31
Tabel 3. 18 Analisis LQ Kota Bogor Terhadap Wilayah Jabodetabek	3-33
Tabel 3. 19 Analisis LQ Kota Bogor Terhadap Wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek.....	3-33
Tabel 3. 20 Shift and Share Kota Bogor Tahun 2023	3-35
Tabel 3. 21 Karakteristik Bentang Alam	3-37
Tabel 3. 22 Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor Tahun 2023	3-43
Tabel 3. 23 Daya Dukung Pangan Tahun 2029 di Kota Bogor.....	3-43
Tabel 3. 24 Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas	3-45
Tabel 3. 25 Ketersediaan pangan Kota Bogor Tahun 2018-2022	3-47
Tabel 3. 26 Kebutuhan Air Tahun 2023 di Kota Bogor.....	3-50
Tabel 3. 27 Kebutuhan Air Tahun 2029 di Kota Bogor.....	3-50
Tabel 3. 28 Ketersediaan Air di Kota Bogor	3-50
Tabel 3. 29 Status Daya Dukung Air Terhadap Ambang Batas	3-52
Tabel 3. 30 Potensi Timbulan Sampah Tahun 2023 di Kota Bogor	3-53
Tabel 3. 31 Analisis Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP	3-56
Tabel 3. 32 Analisis Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP Tahun 2029	3-57
Tabel 3. 33 Klasifikasi Jasa Lingkungan	3-59
Tabel 3. 34 Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	3-61
Tabel 3. 35 Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.....	3-62
Tabel 3. 36 Indeks Jasa Ekosistem Pengatur tata Air	3-63
Tabel 3. 37 Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Iklim	3-65
Tabel 3. 38 Jasa Ekosistem Penyedia Air berdasarkan Tutupan Lahan Faktual dan Pola Ruang.....	3-66
Tabel 3. 39 Efisiensi Pola Ruang berdasarkan Jasa Penyedia Air	3-66



Tabel 3. 40 Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir berdasarkan Tutupan Lahan Faktual dan Pola Ruang.....	3-68
Tabel 3. 41 Efisiensi Pola Ruang berdasarkan Jasa Pengatur Iklim	3-68
Tabel 3. 42 Total Emisi CO ₂ e di Kota Bogor Tahun 2017-2021.....	3-72
Tabel 3. 43 Total Net Emisi CO ₂ e di Kota Bogor Tahun 2017-2021	3-73
Tabel 3. 44 Hutan Kota di Kota Bogor	3-75
Tabel 3. 45 Jenis Pendapatan Kota Bogor	3-76
Tabel 3. 46 Realisasi Pendapatan Kota Bogor	3-77
Tabel 3. 47 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor	3-77
Tabel 4. 1 Analisis GAP Capaian TPB di Kota Bogor.....	4-8
Tabel 4. 2 Hubungan/ keterkaitan antar TPB di Kota Bogor.....	4-10
Tabel 4. 3 Pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan	4-12
Tabel 4. 4 Perumusan Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029	4-17
Tabel 5. 1 Analisis Capaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah di Kota Bogor	5-1
Tabel 5. 2 Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pencapaian TPB	5-3
Tabel 5. 3 Laporan Pendanaan TJSPL 2016-2023	5-7
Tabel 5. 4 Laporan Pendanaan Kegiatan TJSPL Tahun 2023	5-7
Tabel 5. 5 Dukungan Para Pihak Non Pemerintah Pada Tahun 2023	5-9
Tabel 6. 1 Sintesa keterkaitan isu RPJPD, Rantrek RPJMD dan KLHS RPJMD Kota Bogor	6-1
Tabel 6. 2 Rekomendasi program dalam mempertahankan daya dukung air Kota Bogor	6-4
Tabel 6. 3 Analisis Gap indikator yang belum mencapai target pada TPB 1, TPB 8 dan TPB 10	6-5
Tabel 6. 4 Skenario pencapaian target pada indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.....	6-7
Tabel 6. 5 Rekomendasi program pencapaian target penurunan penduduk miskin.....	6-8
Tabel 6. 6 Skenario pencapaian target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.....	6-9
Tabel 6. 7 Rekomendasi program pencapaian target air minum layak.....	6-9
Tabel 6. 8 Skenario pencapaian target laju pertumbuhan PDB per Kapita	6-10
Tabel 6. 9 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan PDB per kapita	6-11
Tabel 6. 10 Skenario pencapaian target koefisien gini	6-12
Tabel 6. 11 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target koefisien gini.....	6-13
Tabel 6. 12 Analisis Gap indikator yang belum mencapai target pada TPB 2, TPB 3 dan TPB 4	6-13
Tabel 6. 13 Skenario pencapaian target pola pangan harapan.....	6-15
Tabel 6. 14 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan skor PPH	6-16
Tabel 6. 15 Skenario pencapaian target Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	6-16
Tabel 6. 16 Rekomendasi program pencapaian target penurunan angka kematian balita	6-17
Tabel 6. 17 Rekomendasi program mempertahankan target pelayanan kesehatan.....	6-20
Tabel 6. 18 Skenario pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	6-20
Tabel 6. 19 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target peningkatan APK PAUD	6-21
Tabel 6. 20 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target penurunan GRK dari sektor energi.....	6-23
Tabel 6. 21 Analisis Gap indikator yang belum mencapai target pada TPB 6 dan TPB 11	6-24



Tabel 6. 22 Skenario pencapaian target Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.....	6-25
Tabel 6. 23 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan persentase air minum aman	6-25
Tabel 6. 24 Skenario pencapaian target Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.....	6-27
Tabel 6. 25 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan sanitasi layak	6-27
Tabel 6. 26 Skenario pencapaian target Persentase sampah perkotaan yang tertangani.....	6-28
Tabel 6. 27 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan sampah tertangani	6-29
Tabel 6. 28 Analisis Gap indikator yang belum mencapai target pada TPB 11	6-29
Tabel 6. 29 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target peningkatan RTH 6-31	
Tabel 6. 30 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.....	6-35
Tabel 6. 31 Rekomendasi program pencapaian target kontribusi mitra pembangunan melalui kegiatan TJSPLP	6-37
Tabel 6. 32 Rekomendasi terhadap KLHS arah kebijakan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029	6-38
Tabel 6. 32 Rekomendasi KLHS terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029	6-44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Pikir Pengkajian dalam KLHS RPJMD.....	1-7
Gambar 2. 1 Perkembangan Kota Tipe Under Bounded City.....	2-3
Gambar 2. 2 Perkembangan Kota Tipe Over Bounded City.....	2-4
Gambar 2. 3 Perkembangan Kota Tipe True Bounded City.....	2-4
Gambar 2. 4 Keterkaitan Kota Bogor dengan Sekitarnya.....	2-7
Gambar 2. 5 Perkembangan Kota Bogor Tahun 1994 - 2020.....	2-10
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Bogor.....	3-3
Gambar 3. 2 Peta Batas Wilayah Fungsional.....	3-4
Gambar 3. 3 Peta Curah Hujan Kota Bogor.....	3-12
Gambar 3. 4 Peta Morfologi Kota Bogor.....	3-13
Gambar 3. 5 Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor.....	3-14
Gambar 3. 6 Peta Jenis Batuan Kota Bogor.....	3-15
Gambar 3. 7 Peta Jenis Tanah Kota Bogor.....	3-16
Gambar 3. 8 Peta DAS Kota Bogor.....	3-17
Gambar 3. 9 Peta Penggunaan Lahan Kota Bogor.....	3-19
Gambar 3. 10 Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2020.....	3-20
Gambar 3. 11 Peta Risiko Banjir.....	3-21
Gambar 3. 12 Peta Risiko Longsor Kota Bogor.....	3-23
Gambar 3. 13 Peta Risiko Banjir Bandang Kota Bogor.....	3-25
Gambar 3. 14 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Bogor.....	3-27
Gambar 3. 15 Peta Risiko Bahaya Gunung Api Kota Bogor.....	3-28
Gambar 3. 16 IKLH Kota Bogor.....	3-29
Gambar 3. 17 Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	3-30
Gambar 3. 18 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (miliar rupiah), 2018–2022.....	3-32
Gambar 3. 19 Peta Bentang Alam Lahan Kota Bogor.....	3-38
Gambar 3. 20 Peta Vegetasi Lahan Kota Bogor.....	3-39
Gambar 3. 21 Peta Distribusi Penduduk Grid 90m x 90m.....	3-41
Gambar 3. 22 Peta Kebutuhan Energi Pangan Kota Bogor.....	3-44
Gambar 3. 23 Peta Ketersediaan Energi Pangan Kota Bogor.....	3-44
Gambar 3. 24 Status Daya Dukung Pangan Kota Bogor.....	3-45
Gambar 3. 25 Peta Ambang Batas Pangan Kota Bogor.....	3-46
Gambar 3. 26 Tingkat Kemandirian Pangan Kota Bogor Tahun 2022.....	3-46
Gambar 3. 27 Peta Kebutuhan Air Kota Bogor.....	3-51
Gambar 3. 28 Peta Ketersediaan Air Kota Bogor.....	3-51
Gambar 3. 29 Peta Status Daya Dukung Air Kota Bogor.....	3-52
Gambar 3. 30 Peta Ambang Batas Air Kota Bogor.....	3-53
Gambar 3. 31 Peta Potensi Timbulan Sampah Kota Bogor.....	3-54
Gambar 3. 32 Potensi beban pencemar BOD, COD, TP dan TN per Kecamatan hingga 2029.....	3-57
Gambar 3. 33 Peta Analisis Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP.....	3-58
Gambar 3. 34 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kota Bogor.....	3-61



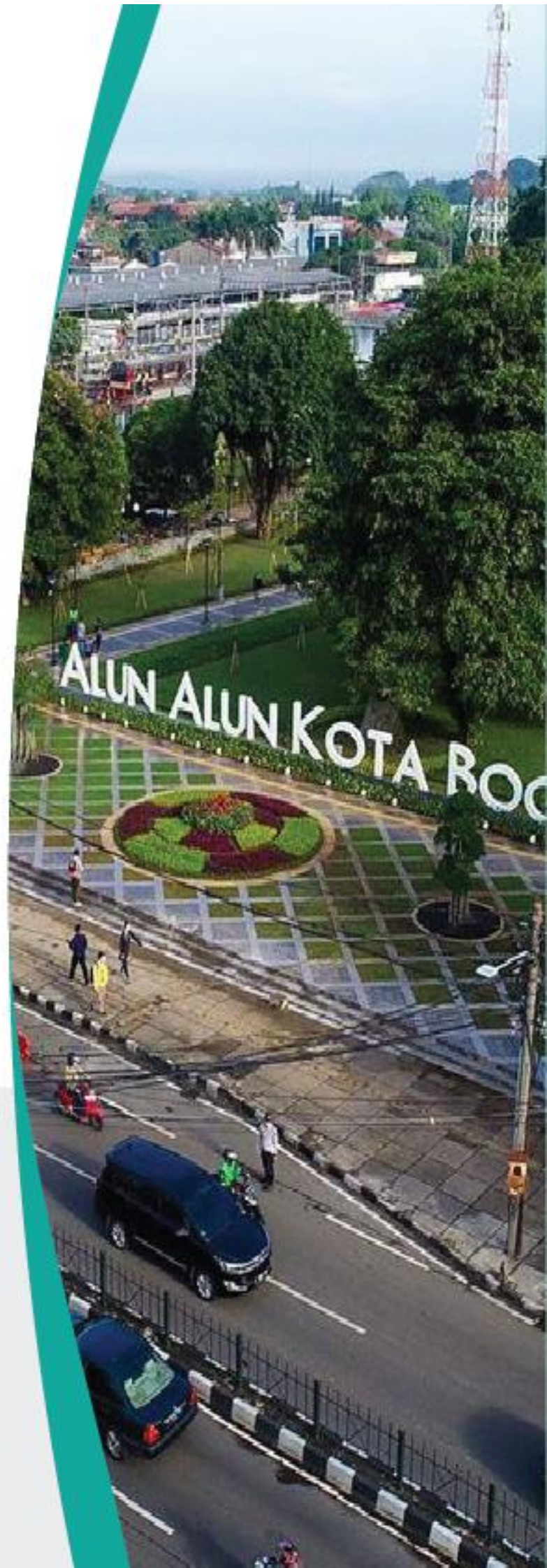
Gambar 3. 35 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Bogor.....	3-63
Gambar 3. 36 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Tata ALiran Air Kota Bogor	3-64
Gambar 3. 37 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Bogor	3-65
Gambar 3. 38 Peta Efisiensi Jasa Ekosistem Penyedia Air	3-67
Gambar 3. 39 Peta Efisiensi Pemanfaatan Pola Ruang terhadap Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air	3-69
Gambar 3. 40 indeks kapasitas adaptif Kota Bogor.....	3-70
Gambar 3. 41 Indeks kapasitas dan sensitivitas Kota Bogor	3-70
Gambar 3. 42 Indeks kerentanan Kota Bogor	3-71
Gambar 3. 43 Grafik Total Emisi CO2e di Kota Bogor Tahun 2013-2022	3-72
Gambar 3. 44 Peta daerah yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi di Kota Bogor	3-75
Gambar 3. 45 Peta Shape Indeks Kota Bogor	3-76
Gambar 3. 46 Komposisi Pendapatan Asli Daerah	3-78
Gambar 5. 1 Presentase Capaian TPB Setiap Dinas di Kota Bogor.....	5-3
Gambar 5. 2 Persentase kegiatan TJSLP yang berkaitan dengan RPJMD.....	5-8
Gambar 6. 1 Tahapan Pembangunan Pada Rancangan Akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045	6-1
Gambar 6. 2 Skenario tanpa upaya tambahan	6-2
Gambar 6. 3 Skenario dengan upaya tambahan.....	6-3
Gambar 6.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Bogor tahun 2029.....	6-4
Gambar 6.5 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis Ke-1 (Pelunya peningkatan optimalisasi terhadap sektor- sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera).....	6-5
Gambar 6. 6 Skenario pencapaian target penurunan penduduk miskin.....	6-7
Gambar 6. 7 Alternatif skenario pemenuhan air minum layak.....	6-9
Gambar 6. 8 Skenario pencapaian PDB per Kapita.....	6-10
Gambar 6. 9 Skenario pencapaian target Koefisien Gini.....	6-12
Gambar 6. 10 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis 2 (Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing)	6-13
Gambar 6. 11 Alternatif skenarip peningkatan skor PPH	6-15
Gambar 6. 12 Alternatif skenario penurunan Angka Kematian Balita.....	6-16
Gambar 6. 13 Alternatif skenario peningkatan APK PAUD.....	6-21
Gambar 6. 14 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis 3 (Akses terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai).....	6-22
Gambar 6. 15 Alternatif skenario penurunan emisi GRK hingga 2029 dari sektor energi.....	6-23
Gambar 6. 16 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis 4 (Belum terpenuhinya pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh)	6-24
Gambar 6. 17 Alternatif skenario peningkatan persentase air minum aman.....	6-25
Gambar 6. 18 Alternatif skenario persentase sanitasi layak.....	6-27
Gambar 6. 19 Skenario target sampah tertangani	6-28



Gambar 6. 20 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis 5 (Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan)	6-29
Gambar 6. 21 Alternatif skenario peningkatan RTH.....	6-31
Gambar 6. 22 Rata-Rata Suhu Udara Tahunan 30 Tahun 1987-2017 Di Stasiun Meteorologi Dramaga, Bogor	6-32
Gambar 6. 23 Proyeksi Perubahan Iklim Masa Depan Untuk Periode 2021-2050 Yang Dimulai Oleh CSIRO Dan Model Iklim MIROC Berdasarkan Skenario RCP4.5	6-33
Gambar 6. 24 Distribusi Spasial Perubahan Curah Hujan Hasil Simulasi Model Iklim CSIRO (Kiri) Dan MIROC (Kanan) Periode 2021-2050.....	6-34
Gambar 6. 25 Distribusi Spasial Yang Diproduksi Dari Bahaya Terkait Iklim Untuk Periode Dasar (1991-2020) Dan Masa Depan (2021-2050).....	6-35
Gambar 6. 26 Tren pendanaan TJSLP dan proporsi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan RPJMD.....	6-36
Gambar 6. 27 Skenario kontribusi mitra pembangunan melalui kegiatan TJSLP.....	6-36



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
TAHUN 2024



BAB 1

PENDAHULUAN

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHSI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH IRPUMDI
KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029**



BAB 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kota Bogor telah menyusun RPJPD periode tahun 2025-2045. Pada RPJPD tersebut tertuang visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Kota Bogor untuk 20 tahun ke depan.

Terkait dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 -2024, Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, maka akan disusun RPJMD yang baru sebagai dokumen perencanaan. Penyusunan RPJMD ini juga tidak terlepas dari adanya agenda pemilihan kepada daerah serentak. Dimana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Wali Kota) tanggal 27 November 2024.

Dengan akan disusunnya RPJMD Kota Bogor tahun 2025-2029, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 ayat 2 bahwa pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan jangka menengah. Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintah wajib yang bukan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup bertujuan agar pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



Terkait dengan penyusunan KLHS sebagai amanat dari UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada Pasal 17 ayat 1 PP Nomor 46 tahun 2016 dijelaskan bahwa pembuatan KLHS pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kota Bogor menyusun KLHS RPJMD dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, terdapat 4 tahapan pembangunan yang akan ditempuh selama periode tersebut. Pada tahap awal (tahun 2025-2029) rencana pembangunan (RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029) akan berfokus pada Penguatan fondasi pembangunan dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan. Guna tujuan tersebut maka Penyusunan KLHS RPJMD Ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.

1.2. Tujuan

Tujuan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2024-2029;
2. Sebagai instrumen untuk menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD; dan
3. Memanfaatkan hasil KLHS RPJMD dalam penyusunan dokumen RPJMD.

1.3. Landasan Hukum

Berikut ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan perundang-undangan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
15. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 tentang perubahan ke dua kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
16. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.
17. Surat Edaran Kemendagri Nomor: 660/5113/Bangda tentang Pembuatan KLHS RPJMD & RPJPD
18. Surat Edaran Kemendagri Nomor: 600.11.2/2505/Bangda tentang monitoring pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
19. Surat Edaran Kemendagri Nomor: 600.11.2/8755/Bangda tentang Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD



20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan cakupan analisis yang dilakukan dalam pembuatan laporan KLHS-RPJMD yaitu:

1.4.1. Kondisi Umum Daerah

Lingkup wilayah ialah seluruh wilayah Kota Bogor yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan dengan luas wilayah 11.138,58 Ha. Adapun secara lebih lanjut dalam Bab 2 akan disajikan mengenai kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah.

1.4.2. Capaian Indikator TPB

Secara umum terdapat 220 indikator TPB untuk level Kota, namun demikian untuk Kota Bogor terdapat 210 indikator TPB yang relevan untuk Kota Bogor. Secara lebih eksplisit disajikan pada Bab 4.

1.4.3. Pembagian Peran

Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah. Secara lebih lanjut mengenai pembangunan peran dibahas pada Bab 5 dan bab 6.

1.5. Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029

Sistematika penyusunan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 terdiri 4 bagian, yakni:

1. Pembentukan tim penyusun KLHS: Penyusunan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Pokja yang dibentuk melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor: 600.4/Kep.363-DLH/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2025-2029
2. Pengkajian pembangunan berkelanjutan: Pengkajian pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menghasilkan gambaran kondisi pencapaian



tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan terdiri atas: a) identifikasi dan pengumpulan data; b) analisis data; c) uji publik.

a) Identifikasi dan pengumpulan data

Identifikasi dan pengumpulan data berupa rapat koordinasi antar OPD yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data, laporan rapat, notulensi.

b) Analisis data

Analisis data terhadap kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, geografis, demografis dan keuangan daerah serta analisis kondisi pencapaian indikator tujuan pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bogor Kegiatan berupa rapat koordinasi antar OPD yang bertujuan untuk menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data, laporan rapat, notulensi.

c) Konsultasi publik

Konsultasi publik berupa rapat koordinasi antara Tim Pembuat KLHS RPJMD dengan para pihak terkait yang bertujuan untuk menyepakati isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian TPB. Pelaksanaan uji publik terdiri atas 3 sesi, yaitu:

Sesi 1	Paparan kondisi existing isu utama, tantangan, dan pencapaian TPB di daerah
Sesi 2	Diskusi terkait isu utama, tantangan, dan pencapaian TPB di daerah: <ul style="list-style-type: none">• Masukan dari pemerintah• Masukan dari nonpemerintah Arahan, pertimbangan, dan dasar teori dari narasumber
Sesi 3	Menyepakati prioritas isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian TPB

Keluaran dari konsultasi publik ini berupa foto acara, laporan, berita acara, notulensi.

3. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan (Alternatif Proyeksi, Konsultasi Publik II dan Pembuatan Laporan)

Pembangunan skenario pembangunan berkelanjutan terdiri atas: a) penyusunan alternatif proyeksi; b) konsultasi publik; c) pembuatan laporan.

a) Penyusunan alternatif proyeksi

Perumusan skenario berupa rapat koordinasi Tim Pembuat KLHS RPJPD yang bertujuan untuk menyusun alternatif proyeksi pencapaian TPB. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data, laporan rapat, notulensi.

b) Konsultasi publik

Konsultasi publik berupa rapat koordinasi antara Tim



Pembuat KLHS RPJMD dengan para pihak terkait yang bertujuan untuk menyepakati rekomendasi hasil perumusan skenario. Pelaksanaan uji publik terdiri atas 3 sesi, yaitu:

Sesi 1	Paparan alternatif skenario dan rekomendasi
Sesi 2	Diskusi terkait rekomendasi hasil perumusan skenario: <ul style="list-style-type: none">• Masukan dari pemerintah• Masukan dari non pemerintah Arahan dan pertimbangan dari narasumber
Sesi 3	Menyepakati rekomendasi dari perumusan skenario

Keluaran dari konsultasi publik ini berupa foto acara, berita acara, notulensi dan pembuatan laporan. Pembuatan laporan berupa rapat koordinasi Tim Pembuat KLHS RPJMD yang bertujuan untuk membuat laporan KLHS RPJMD. Keluaran dari kegiatan ini berupa laporan induk dan ringkasan eksekutif.

4. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian (Penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi dan penelaahan)

Penjaminan kualitas dan pendokumentasian terdiri atas: a) penjaminan kualitas; b) pendokumentasian.

a) Penjaminan kualitas

Penjaminan kualitas berupa rapat koordinasi Tim Pembuat KLHS RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kualitas laporan KLHS RPJMD agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluaran berupa form penjaminan kualitas.

b) Pendokumentasian

Pendokumentasian berupa rapat koordinasi Tim Pembuat KLHS RPJMD yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumentasi dari setiap tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD. Keluaran dari kegiatan ini berupa checklist kelengkapan dokumentasi pembuatan KLHS RPJMD.

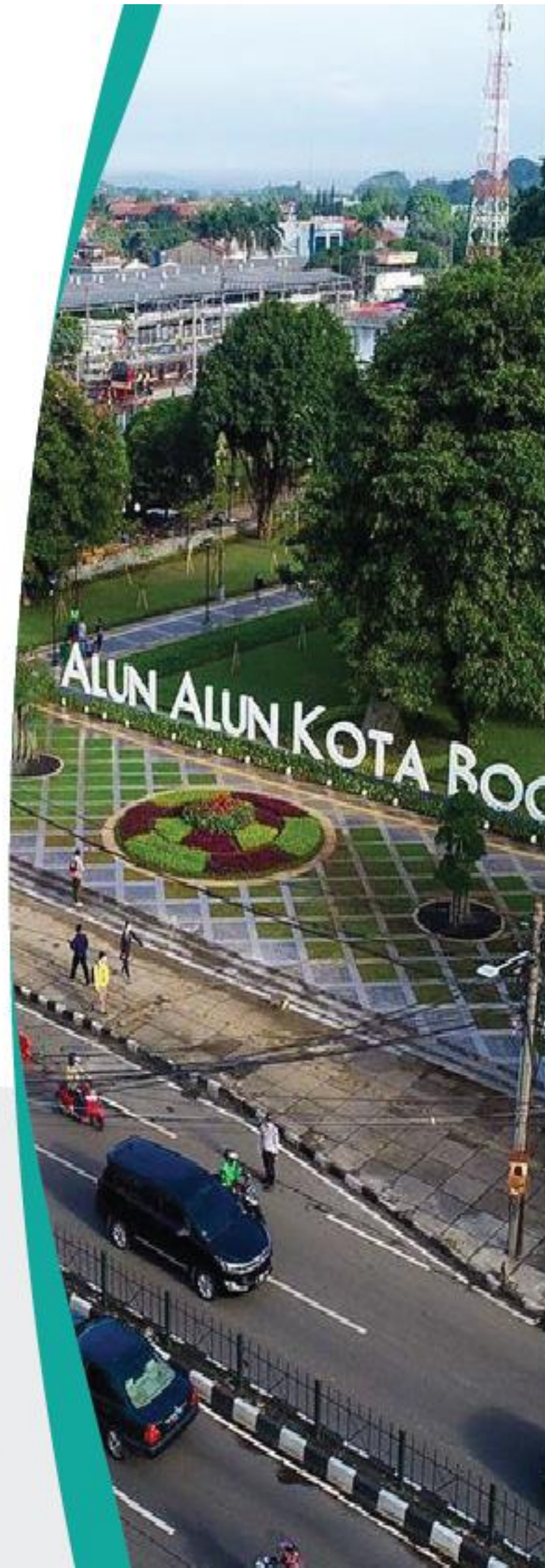
Tahapan pelaksanaan KLHS sebagaimana diatur dalam Permendagri 7/2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Alur Pikir Pengkajian dalam KLHS RPJMD



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
TAHUN 2024



BAB 2

DASAR TEORI

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHSI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029**



BAB 2 Dasar Teori

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Negara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai bentuk domestifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan presiden ini, menegaskan sasaran nasional periode tahun 2030. Implementasi TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembanguan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS.

Dalam UU 32/2009 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di definisikan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam konteks penyusunan KLHS untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam pasal 2 (1) Permendagri 7/2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Maka dari itu KLHS menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.



Berdasarkan waktu pelaksanaannya KLHS terbagi dalam dua pendekatan, yaitu KLHS *Ex-Poste* (KLHS dilakukan setelah KRP ada) dan *Ex-Ante* (KLHS dilakukan sebelum KRP ada). KLHS *Ex-Poste* berlaku untuk KLHS RTR (Rencana Tata Ruang) sedangkan KLHS *Ex-Ante* berlaku untuk KLHS RPJMD. KLHS RTR yang bersifat *Ex-Poste* memiliki karakteristik:

- Isu strategis adalah isu KRP yg memiliki dampak Lingkungan Hidup
- Fokus pada Lingkungan Hidup
- Mengakomodir isu lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial

KLHS RPJMD yang bersifat *Ex-Ante* memiliki karakteristik:

- Isu strategis adalah isu SDGs
- Fokus pada pencapaian target SDGs
- Mengakomodir isu:
 - ✓ SDGs: LH, Ekonomi, Sosial, Hukum dan Tata Kelola
 - ✓ Termasuk integrasi berbagai kebijakan strategis pembangunan nasional

KLHS RPJMD yang bersifat *Ex-Ante*, memberikan masukan sebelum dokumen RPJMD disahkan, sehingga diharapkan konsep, arah, prinsip, dan usulan program yang disampaikan dalam dokumen KLHS dapat diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD yang sedang dibuat. KLHS RPJMD disusun untuk memastikan rencana pembangunan ke depan telah menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memiliki 4 pilar yaitu (1) peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (2) keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, (3) kualitas lingkungan hidup, dan (4) pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang baik.

Dokumen KLHS RPJMD menggunakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai dasar analisis dan tolok ukur tercapainya agenda pembangunan di daerah. Hal ini merupakan langkah strategis, sebagai bukti bahwa daerah berkomitmen melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan Perpres Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Nawacita yang telah diterjemahkan dalam RPJMN 2019-2024.

Dokumen KLHS merupakan hasil kerjasama seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) KLHS dan juga seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam proses FGD dan uji publik. Dokumen KLHS diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia untuk menjalankan transformasi peradaban masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan.

Untuk lebih memberikan pemahaman terhadap KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029, diperlukan pemahaman terhadap fungsi dan perkembangan aktivitas wilayah Kota Bogor. Maka dari itu pada bab ini turut disajikan teori mengenai fungsi dan



perkembangan aktivitas wilayah Kota Bogor pada sub bab 2.1. sampai dengan sub bab 2.4.

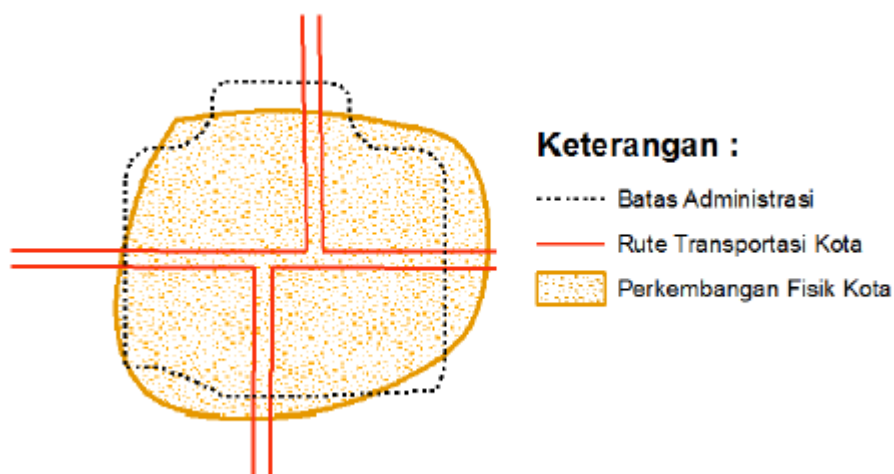
2.1. Perkembangan Kota Bogor

Kota selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara morfologi perkembangan kota didasarkan pada areal fisiknya. Percepatan perkembangan fisik kota tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, hal ini terkait dengan batas administrasi kota dengan batas fisik kotanya.

Yunus (2005) mengungkapkan kemungkinan bentuk pola fisik yang terjadi akibat eksistensi hubungan tersebut antara lain :

a) *Under Bounded City*

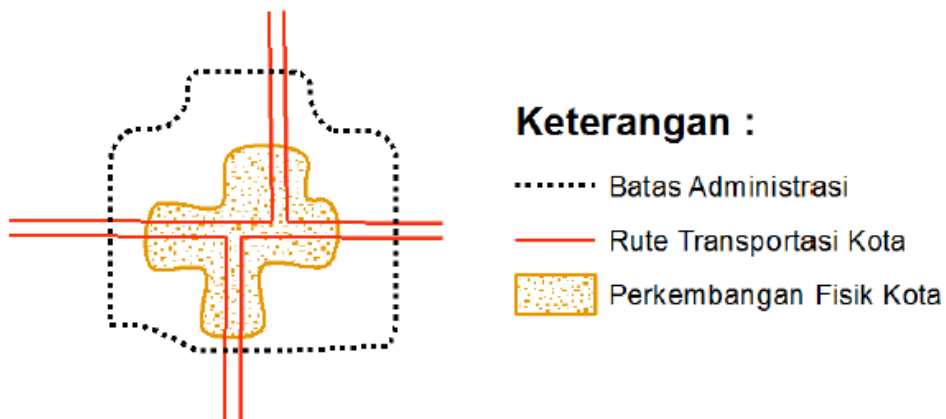
Pengertiannya adalah sebagian fisik kekotaan berada jauh diluar batas administrasi kota. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan terhadap pengaturan wilayah.



Gambar 2. 1 Perkembangan Kota Tipe Under Bounded City
Sumber : Northam dalam Yunus (2000)

b) *Over Bounded City*

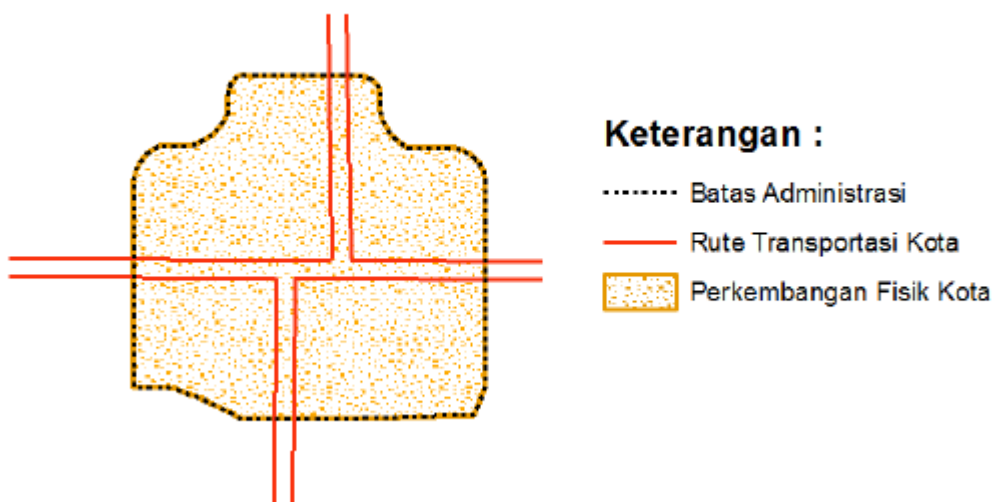
Kota Memiliki kenampakan fisik yang lebih kecil dari batas administrasinya. Masih terdapat area-area yang kurang memiliki kekhasan kenampakan kota. Menurut Yunus (2000) perencanaan tata ruang kota dan kemungkinan perluasannya masih dalam wewenang pemerintah kota. Hal yang perlu untuk diperhatikan ialah mengenai konservasi dari lahan-lahan terbuka dan lahan-lahan pertanian yang tersisa di kota tersebut menjadi lahan terbangun. Karena belum tentu dengan mengubahnya menjadi lahan terbangun akan meningkatkan kualitas kota itu sendiri dengan bertambahnya luasnya kenampakan fisik kekotaannya.



Gambar 2. 2 Perkembangan Kota Tipe Over Bounded City
Sumber : Northam dalam Yunus (2000)

c) *True Bounded City*

Batas Kota koinciden dengan batas administrasi kota. Dalam hal perencanaan kota, kategori perkembangan fisik ini sangat baik karena ketekaitan penataan ruang yang baik menyebabkan sinkronisasi perencanaan tata ruang yang rapi dan tertata.



Gambar 2. 3 Perkembangan Kota Tipe True Bounded City
Sumber : Northam dalam Yunus (2000)

Perkembangan kota secara umum menurut Branch (1995) sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi internal yang menjadi unsur terpenting dalam perencanaan kota secara komprehensif. Namun beberapa unsur eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi perkembangan kota.

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kota adalah :

a. Keadaan geografis

Keadaan geografis mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota. kota yang berfungsi sebagai simpul distribusi, misalnya perlu terletak di simpul jalur



transportasi, dipertemuan jalur transportasi, dipertemuan jalur transportasi regional atau dekat pelabuhan laut. Kota Pantai, misalnya akan cenderung berbentuk setengah lingkaran, dengan pusat lingkaran adalah pelabuhan.

b. Tapak (site)

Tapak (*site*) merupakan faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Salah satu yang dipertimbangkan dalam kondisi tapak adalah topografi. Kota yang berlokasi di dataran yang rata akan mudah berkembang ke semua arah, sedangkan yang berlokasi di pegunungan biasanya mempunyai kendala topografi.

c. Fungsi kota

Fungsi kota merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kota yang memiliki banyak fungsi, biasanya secara ekonomi akan lebih kuat dan akan berkembang lebih pesat dari pada kota berfungsi tunggal, misalnya kota pertambangan, kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, biasanya juga berkembang lebih pesat dari pada kota berfungsi lainnya.

d. Sejarah dan kebudayaan

Sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat masyarakat kota. Kota yang sejarahnya direncanakan sebagai ibu kota kerajaan akan berbeda dengan perkembangan kota sejak awalnya tumbuh secara organisasi. Kepercayaan dan kultur masyarakat juga mempengaruhi daya perkembangan kota. Terdapat tempat-tempat tertentu yang karena kepercayaan dihindari untuk perkembangan tertentu. Unsur-unsur umum seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, ketersediaan unsur-unsur umum akan menarik kota ke arah tertentu.

2.2. Perkembangan Kota Bogor Dan Sekitarnya

Kota Bogor secara geografis terletak di kawasan Jabodetabek di mana secara struktur Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam PKN Bodebek. Posisinya yang strategis sebagai bagian dari metropolitan Jakarta maka dalam perkembangan kotanya banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan kegiatan dari sistem metropolitan Jabodetabek. Perencanaan Kota Bogor tidak mungkin hanya melihat Bogor sebagai suatu kota tunggal namun harus diperhatikan pula posisinya dalam lingkup regional.

Sebagai bagian dari PKN Bodebek, Kota Bogor merupakan salah satu penyangga Jakarta yang bersama dengan Kota/Kab Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor harus dapat berbagi peran dalam pengembangan PKN ini. Keterkaitan Kota Bogor dengan kota/kab di sekitar Jakarta ini meliputi sistem jaringan jalan terutama menyangkut jalan tol dan arteri primer serta menyangkut sistem kota dan pola ruang. Sebagai penyangga Jakarta beberapa fungsi penunjang Jakarta dilimpahkan pula di kawasan penyangga tersebut termasuk di Kota Bogor.

Dalam hal kependudukan, diproyeksikan penduduk Kota Bogor akan mencapai 1 juta jiwa pada tahun 2011 maka secara klasifikasi kota Kota Bogor akan meningkat dari Kota Besar menjadi Metropolitan. Sebagai Kota Metropolitan maka konsentrasi penduduk



akan berpusat pada kota tersebut. Di mana dengan berubahnya menjadi Kota Metropolitan maka kebutuhan pengembangan dan kegiatan yang harus diwadahi di Kota Bogor mengalami perubahan pula. Hal ini perlu diantisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang untuk masa 20 tahun ke depan ini.

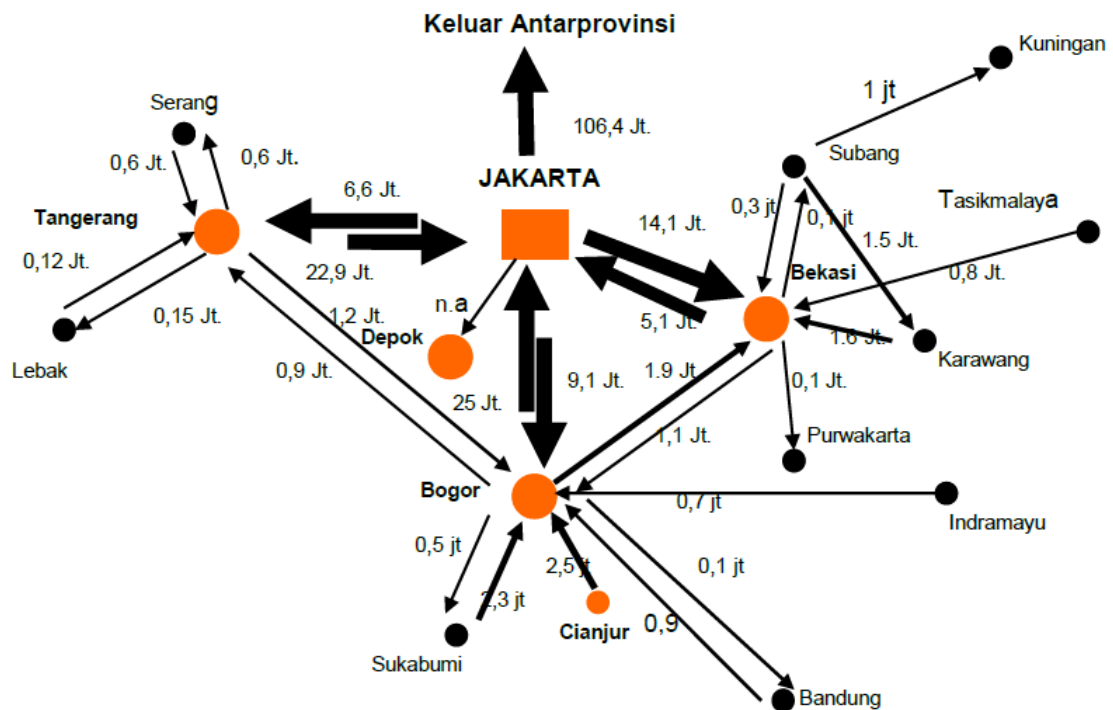
Keterkaitan struktur dan ketergantungan Kota Bogor dalam lingkup regional meliputi:

1. Sistem kota, sebagai bagian dari PKN Bodebek maka Kota Bogor merupakan kota satelit Jakarta yang diarahkan pengembangannya menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan dan jasa. Beberapa fasilitas minimum dari PKN dapat disediakan oleh Kota Bogor, namun demikian perlu adanya koordinasi dengan kawasan Bodebek lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih fasilitas yang disediakan.
2. Jaringan jalan, dalam merencanakan sistem jaringan jalan Kota Bogor maka sistem regional perlu dipertimbangkan dan dijadikan masukan dalam rencana terutama dalam hal jaringan jalan Tol, arteri primer dan kolektor primer. Beberapa jaringan jalan yang perlu dipertimbangkan diantaranya Rencana Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), Rencana Jalan Bogor Outer Ring Road (BORR), rencana Tol Ciawi-Sukabumi, dan Bogor Inner Ring Road.
3. Kereta api, merupakan salah satu moda yang digunakan oleh para komuter dalam menempuh perjalanannya ke Jakarta. Frekwensi perjalanan kereta api dalam sehari sangat tinggi dengan jumlah penumpang harian rata-rata 30.000 penumpang. Kondisi saat ini perlintasan jaringan jalan kereta api dan jalan raya kebanyakan masih sebidang, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan lalu lintas Kota Bogor pada beberapa titik perlintasan. Pengembangan moda kereta api menjadi penting guna menunjang pergerakan penduduk Kota Bogor dan kawasan sekitarnya menuju Jakarta namun perlu pula diperhatikan kondisi perlintasan yang ada. Di masa mendatang perlintasan kereta api dan jalan raya sebaiknya tidak sebidang.
4. Sebagai kota satelit Jakarta, maka perkembangan pola ruang Kota Bogor lebih banyak diarahkan kepada perumahan dan mulai pula berkembang kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang perumahan. Perumahan yang dibangun di Kota Bogor terutama yang berlokasi di bagian utara lebih untuk memenuhi kebutuhan perumahan baik para pekerja di Jakarta. Saat ini perkembangan perumahan untuk pasar pekerja di Jakarta mulai merambah ke bagian timur dan selatan, hal ini perlu diantisipasi aspek transportasinya karena seringkali perumahan hanya merencanakan pembangunan di dalam areal perumahan tanpa memikirkan sistem transportasi penunjang keluar dari perumahan menuju tempat kerja (dalam hal ini ke arah Jakarta).
5. Dalam lingkup Bogor Raya, Kota Bogor akan tetap menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi, pusat layanan transportasi dan pusat perdagangan khususnya terhadap wilayah-wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor. Mengingat hal tersebut maka dalam perencanaan fasilitas pelayanan terutama di



kawasan pinggiran penduduk kawasan pinggiran perlu diperhatikan serta akses menuju fasilitas dari kawasan pinggiran.

6. Dalam hal utilitas, Kota Bogor memiliki ketergantungan kepada Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sumber air dan TPA. Agar kebutuhan akan sumber air serta lahan untuk TPA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penduduk Kota Bogor maka dalam merencanakan sistem utilitas kota, perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor.



Gambar 2. 4 Keterkaitan Kota Bogor dengan Sekitarnya
Sumber: Ranwal RPJMD Kota Bogor 2019-2024

2.3. Peran dan Fungsi Kota Bogor

Dalam konteks Jabodetabek Puncur, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai kota satelit, pemanfaatan ruangnya diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam.

Sebagai kawasan yang berada di bagian hulu, Bopunjur diarahkan sebagai kawasan lindung. Dengan peran Bopunjur yang demikian, Kota Bogor dalam pengembangannya



perlu mempertimbangkan tersedianya daerah-daerah resapan air berupa waduk, ruang terbuka hijau dan lain-lain yang mampu menampung limbah air permukaan.

Peningkatan pemanfaatan jalur KA yang menghubungkan Kota Bogor dengan DKI Jakarta serta peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Citayam Depok dengan jalan lingkar luar Jakarta (JORR) akan meningkatkan interaksi antara DKI Jakarta dengan Kota Bogor. Peningkatan aksesibilitas antara Jakarta dengan Bogor harus dimanfaatkan oleh Kota Bogor sebagai peluang membangun kesalingtergantungan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang sosial ekonomi.

Dalam sistem kota-kota di Jabodetabekpunjur, Jakarta diposisikan sebagai kota inti dan Bodetabek serta kota lainnya seperti BSD sebagai satelit. Hal ini tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki kota-kota tersebut. Berdasarkan potensi dan posisi geografis yang dimilikinya, kota-kota dalam lingkup Bodetabek selayaknya dapat menjadi kota yang mandiri yang pada akhirnya menumbuhkan interaksi yang positif dan saling menguntungkan.

Potensi yang dimiliki Kota Bogor memungkinkan untuk tidak sepenuhnya menjadi satelit Jakarta karena apabila ini berlangsung terus justru akan saling merugikan. Yang perlu diciptakan adalah kesalingtergantungan sehingga di antara keduanya tercipta interaksi yang positif dan saling menguntungkan. Kota Bogor perlu menggunakan potensinya (dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekologis) untuk menampung limbah perkembangan Kota Jakarta sehingga kegiatan ekonominya lebih berkembang, tercipta lapangan kerja yang lebih banyak, dan terwujud kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan.

Pemanfaatan ruang Kota Bogor dan Kota Depok sebagai kota satelit diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Kawasan permukiman kepadatan tinggi di Kota Bogor perlu dipertimbangkan hanya di kawasan-kawasan tertentu mengingat fungsinya sebagai kawasan resapan air dalam ekosistem Jabodetabek Punjur.

Pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam. Arahan pemanfaatan ruang bagi kedua kabupaten ini memberi peluang bagi Kota Bogor untuk berperan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi. Kota Bogor dengan posisi geografis dan akses yang dimilikinya juga memungkinkan untuk berperan sebagai pusat perdagangan berskala regional.



2.4. Perkembangan Aktivitas Kota Bogor

Kota Bogor memiliki aktivitas yang tersebar di beberapa kecamatan hal ini merefleksikan Kota Bogor sebagai suatu sistem perkotaan yang mempunyai banyak pusat (*multi centered theory*). Bentuk Kota Bogor yang seperti ini lebih mengarah kepada bentuk kota "*multiple nuclei theory*" atau "pusat kegiatan banyak yang dikemukakan oleh C.D Harris dan F.L Ullmann. Selain itu perkembangan bentuk Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan daya tarik kota-kota sekitar (Jabodetabek), serta faktor lain yang juga berperan sebagai pembatas perkembangan bentuk Kota Bogor yaitu faktor geologi dan faktor kebijakan RTRW Kota Bogor.

Perkembangan jangka panjang menunjukkan bahwa **urban sprawl** teridentifikasi di pinggiran Kota Bogor yang ditandai oleh terintegrasinya area terbangun Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dan mengaburkan batas fungsional perkotaan. Beberapa kecamatan bagian dari Kabupaten Bogor berkembang sangat cepat karena lokasinya berbatasan langsung dengan Kota Bogor.

Perkembangan kegiatan kota cenderung berkembang menuju ke segala arah, terutama pada Wilayah perluasan dengan mengalih fungsikan lahan pertanian yang kurang produktif dan kebun campuran. Gambaran arah perkembangan fisik Kota Bogor.

1. **Bagian Selatan** : Yaitu Kecamatan Kota Bogor Selatan berpotensi sebagai daerah permukiman dengan KDB rendah dan ruang Terbuka Hijau.
2. **Bagian Utara** : Yaitu Kecamatan Bogor Utara berpotensi sebagai daerah industri Non-Polutan dan sebagai Penunjangnya adalah permukiman serta perdagangan dan jasa dan kecamatan Tanah Sareal cenderung berpotensi Sebagai permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas pelayanan kota.
3. **Bagian Barat** : Yaitu kecamatan Bogor Barat berpotensi sebagai daerah permukiman yang ditunjang oleh objek Wisata.
4. **Bagian Timur** : Yaitu Kecamatan Bogor Timur berpotensi sebagai daerah permukiman.
5. **Bagian Tengah** : Yaitu Kecamatan Bogor Tengah berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang ditunjang oleh perkantoran dan wisata ilmiah.

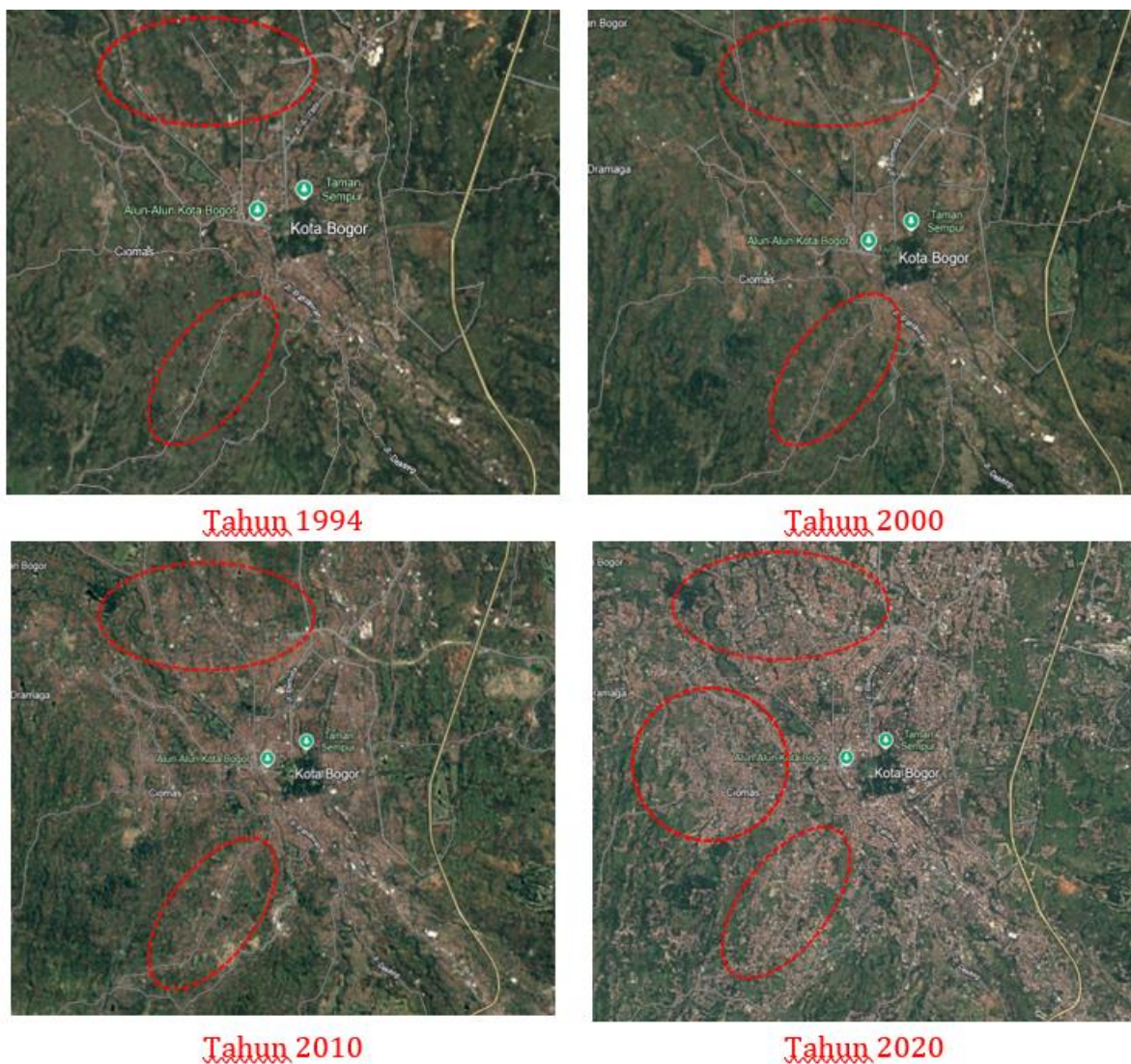
Perkembangan Kota Bogor cenderung bergerak ke arah barat dan timur, beberapa Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kota Bogor.

- **Pertumbuhan Penduduk**: Urbanisasi yang tinggi mendorong kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur.
- **Kebijakan Pemerintah**: Rencana tata ruang kota dan kebijakan investasi mempengaruhi arah perkembangan.
- **Lingkungan**: Faktor lingkungan, seperti ketersediaan lahan, risiko bencana, dan keberadaan area hijau, juga berperan penting.

Secara keseluruhan, meskipun perkembangan Kota Bogor terjadi di kedua arah, tren saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ke arah barat dan timur cukup signifikan, dengan masing-masing arah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda.



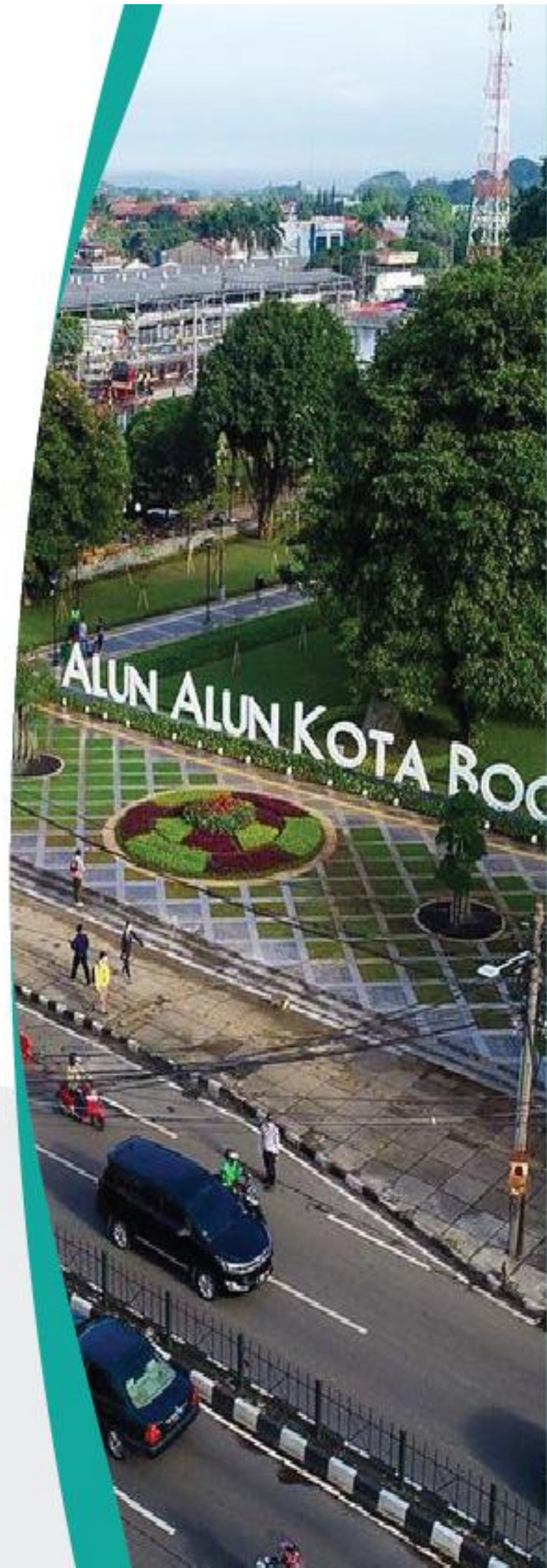
Kota Bogor, yang dikenal dengan sebutan "Kota Hujan," telah mengalami dinamika perubahan pola ruang dan struktur ruang yang signifikan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Sebagai salah satu kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, pertumbuhan populasi telah membawa tantangan dan peluang yang kompleks dalam perencanaan kota. Akibat pertumbuhan ini, pola ruang di Kota Bogor telah berubah secara signifikan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan lahan pertanian dan terbuka hijau kini telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, perumahan, dan pusat bisnis. Perubahan ini seringkali terjadi tanpa perencanaan yang matang, sehingga mengakibatkan terjadinya fragmentasi ruang yang dapat berdampak negatif pada lingkungan. Berdasarkan pengamatan dari tahun 1994 – 2020 terlihat perkembangan Kota Bogor dari arah utara, timur, dan barat perkembangan yang sangat pesat yang mengakibatkan perubahan terhadap Kawasan terbangun dengan berkembangnya jumlah penduduk sehingga perkembangan Kota Bogor terus berkembang ke arah timur dengan terlihatnya Kawasan terbangun di tahun 2020.



Gambar 2. 5 Perkembangan Kota Bogor Tahun 1994 - 2020



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
TAHUN 2024



BAB 3

GAMBARAN UMUM

LAPORAN AKHIR

*KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029*



BAB 3 Kondisi Umum Kota Bogor

3.1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Bogor tercatat 11.138,42 Ha. Secara astronomis terletak pada 106° 43'30" BT dan 6°30'30" LS dengan batas-batas secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Sebelah Timur : Kec. Sukaraja dan Ciawi, Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan : Kec. Cijeruk, Taman Sari dan Caringin, Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : Kec. Kemang, Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor

Secara administratif Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan dan 68 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bogor Selatan dengan luasan 3.050,21 Ha sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Bogor Tengah 836,67 Ha. Rincian mengenai luas dan batas wilayah secara administratif disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas (ha)
1	Kec. Bogor Barat	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	836,67
4	Kec. Bogor Timur	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	1.812,14
6	Kec. Tanah Sereal	2.060,01
Total		11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor

Penetapan wilayah Kota Bogor dalam RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551), serta penyempurnaan batas-batasnya di lapangan sejak Tahun 2014.

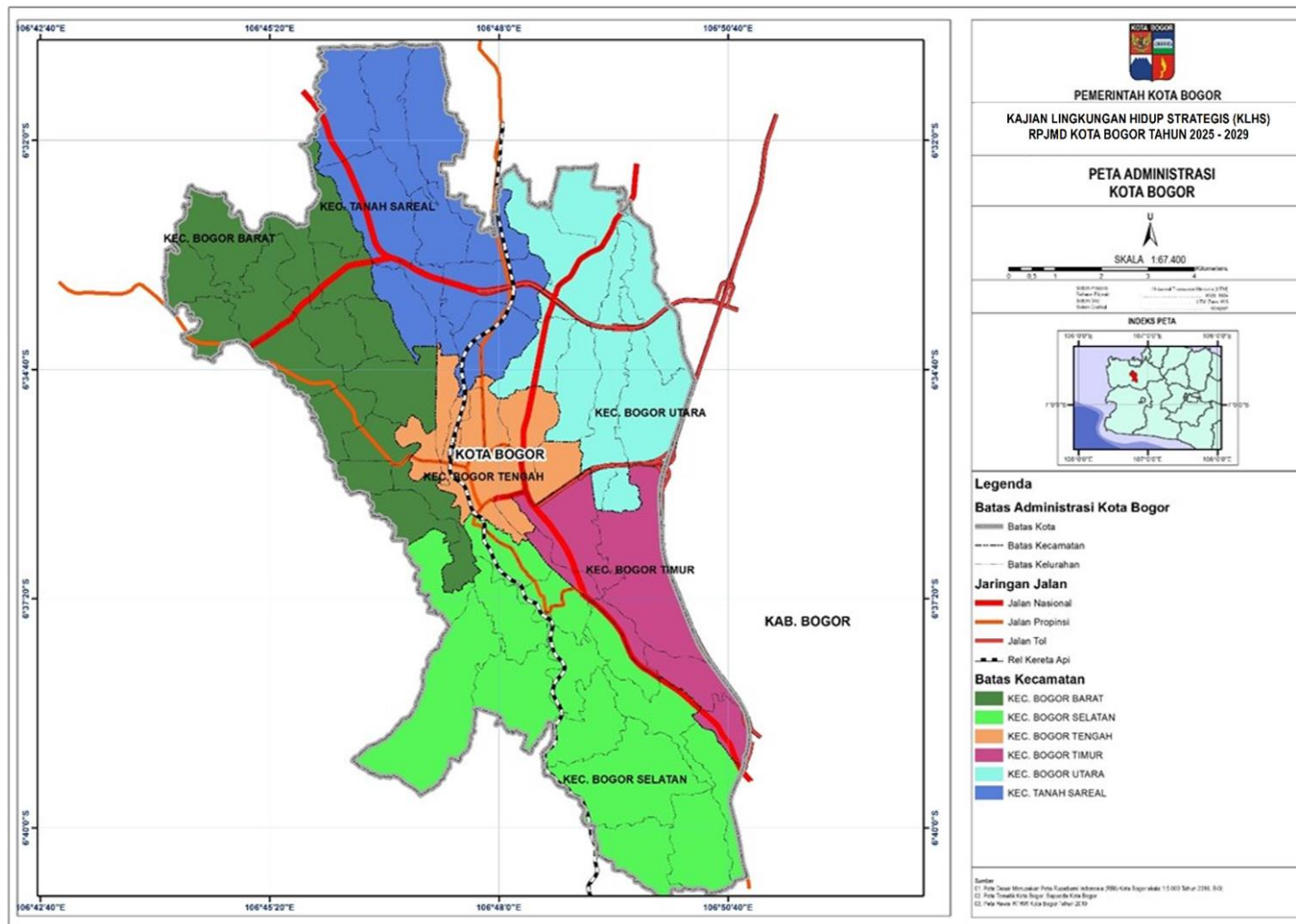
3.2. Batas Wilayah Fungsional

Batas fungsional dalam KLHS ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk karakteristik lingkungan, pola penggunaan lahan, dan potensi dampak dari rencana pembangunan yang akan dievaluasi. Penentuan batas ini tidak hanya

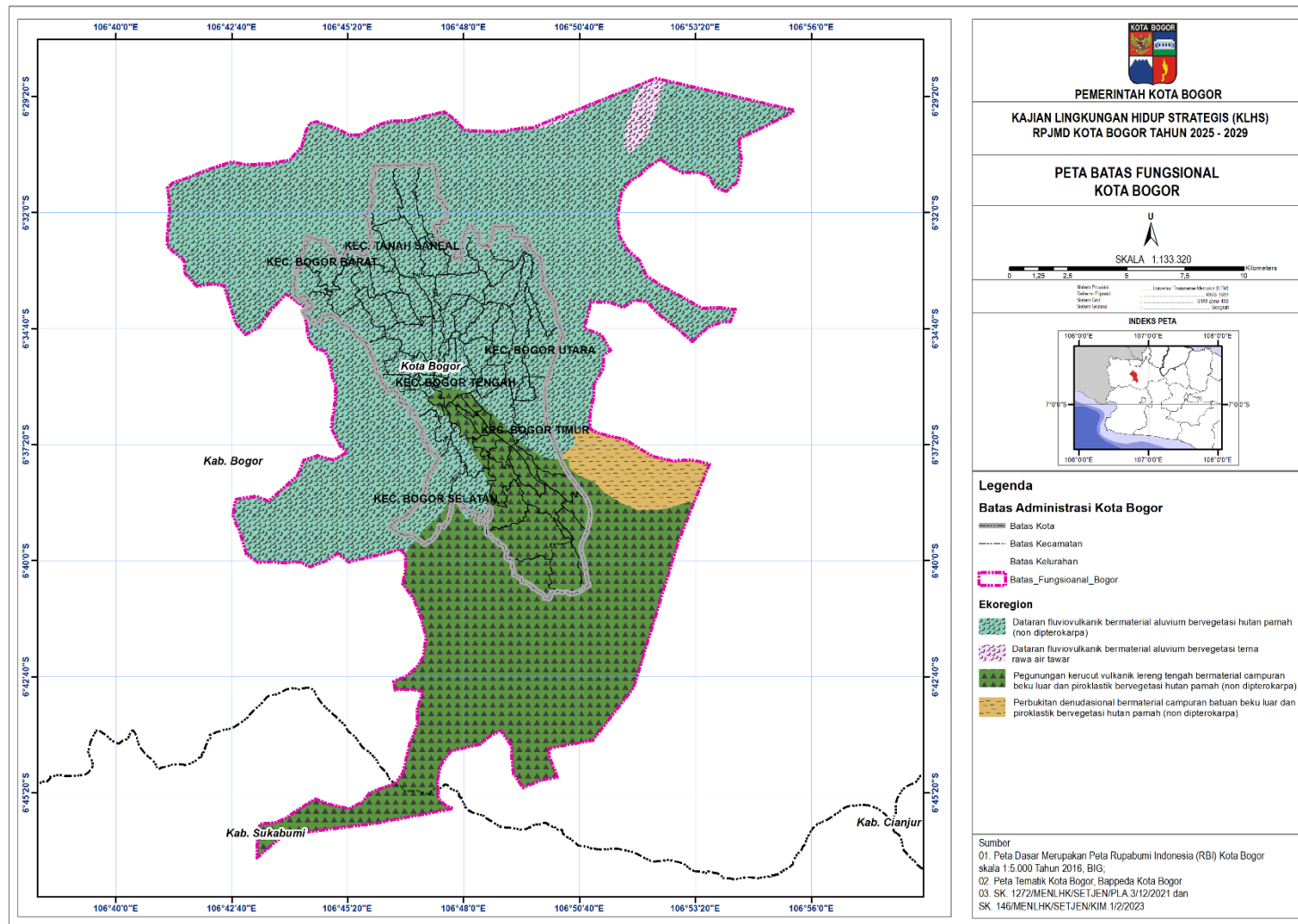


mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan atau rencana yang sedang dikaji.

Salah satu tujuan utama dari menetapkan batas fungsional adalah untuk memastikan bahwa semua elemen yang relevan diidentifikasi dan dianalisis. Dengan demikian, batas fungsional berperan sebagai kerangka kerja yang menuntun proses pengambilan keputusan, mengarahkan perhatian pada interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat, serta mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Batas Fungsional di Kota Bogor seluas 40.681,18 ha yang berdasarkan pada batas ekoregion di wilayah Kota Bogor. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Bogor
 Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031



Gambar 3. 2 Peta Batas Wilayah Fungsional
Sumber: Diolah dari Peta Ekoregion, 2024



3.3. Kondisi Fisik Wilayah

3.3.1. Klimatologi

a. Suhu

Suhu udara adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya udara. Ini adalah parameter cuaca yang paling sering diukur. Lebih khusus lagi, suhu menggambarkan energi kinetik, atau energi gerak, dari gas-gas yang membentuk udara. Suhu udara juga mempengaruhi hampir semua parameter cuaca lainnya. Misalnya, suhu udara mempengaruhi laju penguapan, kelembaban relatif, kecepatan dan arah angin, dan pola dan jenis presipitasi.

Data temperatur dan kelembapan Kota Bogor dari tahun 2012-2023 didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Temperatur rata-rata tahunan Kota Bogor berkisar dari 26,0°C -27,20°C. Pada tahun 2023, suhu rata-rata di Kota Bogor berkisar antara 25,50°C -27,70°C. Suhu rata-rata terendah sebesar 25,50 °C terjadi pada bulan Desember dan suhu tertinggi 26,8°C terjadi pada bulan Juni. Temperatur rata-rata bulanan di Kota Bogor tahun 2012-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Temperatur Rata-rata Bulanan Kota Bogor 2015-2023

Bulan	Temperatur (°C)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Januari	27,4	27,9	25,9	26	25,8	26	25,2	26,1	25,90	
Februari	26,2	27,1	25	25	25,9	25,7	24,6	26	25,50	
Maret	27,3	27,9	25,7	26	26	26,3	25,9	26,4	25,90	
April	27,7	28,4	26,1	26	26,5	26,7	26,7	26,4	26,90	
Mei	27	28,4	26,4	27	27	27	26,8	26,6	27,30	
Juni	26,7	27,5	26,3	26	26,4	27	25,8	26,8	26,80	
Juli	26,6	27,4	26	26	25,9	26,4	26	26,6	26,70	
Agustus	26,2	27,5	26,2	26	25,7	26,8	26	26,4	26,90	
September	27,2	27,5	26,6	25	25,3	26,6	26,3	26,1	27,00	
Oktober	27,8	27,1	26,5	27	26,7	26,1	26,4	25,9	27,70	
November	28	27,4	26,3	26	26,9	26,4	26,4	25,9	27,70	
Desember	27,2	27	25,9	25	26,1	25,8	26,1	25,6	26,80	
Rata-rata	27,1	27,6	26,0	26,0	26,2	26,4	26,0	26,0	27,20	

Sumber: BMKG, 2013-2024

b. Kelembaban

Kelembapan udara adalah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Jumlah uap air yang ada dalam udara ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari seluruh atmosfer. Uap air dalam atmosfer bisa berubah bentuk menjadi cair atau padat, yang pada akhirnya bisa jatuh ke bumi atau dikenal sebagai hujan. Kelembapan udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan petunjuk bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah.



Kelembapan rata-rata tahunan Kota Bogor berkisar dari 72,40% - 84,00%. Pada tahun 2023, temperatur rata-rata di Kota Bogor berkisar antara 72% - 86%. Kelembapan rata-rata terendah sebesar 72% terjadi pada bulan September dan kelembapan tertinggi 86% terjadi pada bulan Maret. Kelembapan rata-rata bulanan di Kota Bogor tahun 2012-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Kelembapan Minimum, Rata-rata dan Maksimum di Kota Bogor Tahun 2012-2022

Bulan	Kelembapan (%)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Januari	82,40	80,90	83,00	81,00	86,00	88,80	88,00	84,40	84,80	
Februari	49,30	85,60	85,00	83,00	82,00	89,30	86,00	84,50	85,80	
Maret	84,30	81,60	85,00	83,00	85,00	86,30	85,00	84,00	86,30	
April	85,10	79,70	85,00	84,00	85,00	85,40	84,00	85,10	82,90	
Mei	82,40	78,20	84,00	81,00	81,00	84,10	84,00	84,80	82,60	
Juni	91,70	79,50	80,00	79,00	77,00	82,30	86,00	85,60	83,40	
Juli	77,30	78,60	81,00	76,00	75,00	81,20	80,00	81,70	79,00	
Agustus	76,70	78,00	76,00	74,00	74,00	77,70	82,00	83,00	75,50	
September	40,10	78,40	74,00	72,00	71,00	80,10	81,00	83,90	72,00	
Oktober	72,20	81,40	81,00	79,00	76,00	84,80	83,00	86,50	74,90	
November	44,10	81,70	82,00	83,00	77,00	83,70	84,00	86,50	85,10	
Desember	83,10	79,00	82,00	81,00	87,00	83,90	85,00	86,70	81,40	
Rata-rata	72,40	80,20	82,00	82,00	79,70	84,00	84,00	84,00	81,14	

Sumber: BMKG, 2013-2024

Kelembapan berdampak pada pembentukan dan penyebaran polutan udara. Udara lembab memerangkap polutan di dekat tanah, mencegahnya menyebar ke atmosfer. Hal ini meningkatkan konsentrasi polutan di udara, terutama di perkotaan. Pada saat yang sama, kelembapan yang tinggi dapat mempengaruhi reaksi kimia yang terjadi di atmosfer, yang dapat berdampak pada pembentukan polutan tertentu seperti ozon. Hal ini dapat memainkan peran penting dalam pembentukan dan reaksi kimia polutan udara, yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas udara dan kesehatan manusia.

c. Kecepatan Angin

Kecepatan angin, atau velositas gelombang angin, adalah sebuah kuantitas atmosferik fundamental. Kecepatan angin disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, biasanya karena perubahan suhu. Data kecepatan angin diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kota Bogor dari tahun 2019-2023. Kecepatan angin rata-rata di Kota Bogor dari tahun 2019-2023 berkisar antara 1,3 - 4,3 km/jam. Pada tahun 2023, kecepatan angin rata-rata berkisar antara 1,3 - 2,4 km/jam. Data kecepatan angin rata-rata bulanan Kota Bogor pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 4 Kecepatan angin rata-rata maksimum di Kota Bogor tahun 2019-2023

Bulan	Kecepatan Angin (km/jam)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	3,8	1,34	1,5	1,8	1,7
Februari	3,8	1,23	2,1	2,0	2,2
Maret	3,6	1,15	1,5	1,9	1,7
April	3,6	1,30	2,1	1,7	1,6
Mei	3,1	1,48	1,5	1,5	1,4
Juni	3,2	1,49	1,5	1,6	1,3
Juli	3,9	1,42	1,5	1,7	1,5
Agustus	4,3	1,78	2,1	1,8	1,8
September	3,4	1,58	2,1	1,8	2,3
Oktober	2,9	1,46	1,5	1,7	2,1
November	3,4	1,47	1,5	1,7	2,4
Desember	3,9	1,49	1,5	2,0	2,1
Rata-rata	3,6	1,4	1,7	1,7	1,8

Sumber: BMKG, 2020-2024

Jika dilihat dari data kecepatan angin diatas, dimana rata-rata berkisar antara 1,4 – 3,6 km/jam, berdasarkan pada skala beaufort termasuk dalam kategori angin lemah.

d. Tekanan Udara

Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfer. Berdsarkan data BPS tahun 2024, tekanan udara rata-rata pada tahun 2023 berkisar antara 990,66 mb. Berikut merupakan data tekanan udara di Kota Bogor Tahun 2023.

Tabel 3. 5 Tekanan udara minimum, rata-rata dan maksimum di Kota Bogor Tahun 2023

No	Bulan	Tekanan udara minimum (mb)	Tekanan udara rata2 (mb)	Tekanan udara maksimum (mb)
1	Januari	984,5	989,6	998,2
2	Februari	985,8	989,9	994,1
3	Maret	985,7	990,6	1.012,4
4	April	984,8	989,4	993,3
5	Mei	984,6	990,7	994,6
6	Juni	987,0	990,6	993,5
7	Juli	987,0	991,4	994,9
8	Agustus	987,4	992,0	996,1
9	September	987,0	991,4	1.012,3
10	Oktober	986,4	991,8	995,1
11	November	985,9	990,3	998,9
12	Desember	986,0	990,3	1.011,0

Sumber: BMKG, 2024

Perubahan tekanan udara akan menyebabkan perubahan pada suhu udara dan curah hujan. Tekanan udara berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat. Daerah yang suhu udaranya tinggi akan bertekanan rendah dan daerah yang bersuhu udara rendah, tekanan udaranya tinggi.



e. Curah Hujan

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, run off, maupun evaporasi.

Pada tahun 2023, curah hujan rata-rata setiap bulan sekitar 315,65 mm/bln dengan curah hujan rata-rata terbesar adalah 1.068 mm yang terjadi pada bulan November, curah hujan terkecil yaitu 62,20 mm terjadi pada bulan september. Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan di Kota Bogor tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Jumlah Curah Hujan di Kota Bogor Tahun 2015-2023

Bulan	Curah Hujan (mm)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	250	422	130	190	309	399,8	304,3	106,6	211,10
Februari	350,8	610	526	364	297	525,4	486,8	145,8	258,30
Maret	374,3	644	349	119	260	705,3	233	112,1	325,80
April	205,7	546	284	357	671	478,5	505,1	316,6	312,80
Mei	204,6	330	319	296	358	422,5	510,3	226,5	294,20
Juni	90,2	373	410	260	138	246,2	311,1	463,7	310,70
Juli	1,6	298	401	68	51	186,3	115,6	358,9	134,40
Agustus	112,4	312	179	77	170	89,1	399,5	384,9	144,70
September	79,8	439	619	173	152	333,7	317,3	344,2	62,20
Oktober	110,6	398	331	488	382	583,7	566,5	499,6	102,10
November	854,9	343	207	383	330	189,5	183,6	321	1.068,00
Desember	579,7	117	181	302	540	149,7	279,1	225,5	563,60
Rata-Rata	267,9	402,7	328,0	256,4	304,8	359,1	351,0	352,0	315,65

Sumber: BMKG, 2015-2023

Jika dilihat dari rata-rata curah hujan bulanan di Kota Bogor selama periode 2015-2023, maka curah hujan Kota Bogor terkatogori dalam klasifikasi menengah dan tinggi.

3.3.2. Topografi

Topografi di Kota Bogor membujur dari utara ke selatan, tepatnya berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Ketinggian rata-rata Kota Bogor adalah 190-330 mdpl.

3.3.3. Morfologi

Morfologi Kota Bogor terdiri dari dataran, landai, perbukitan sangat terjal, perbukitan sedang dan perbukitan terjal. Morfologi paling dominan berupa dataran seluas 4.145,12 Ha, sedangkan morfologi berupa perbukitan sangat terjal hanya sebagian kecil dengan luasan 0,23 Ha.

Tabel 3. 7 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan morfologi

No	Kecamatan	Dataran	Landai	Perbukitan Sangat Terjal	Perbukitan Sedang	Perbukitan terjal	Total
1	Kec. Bogor Barat	986,79	1.317,53	0,22	21,18	5,83	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	848,50	2.137,03		56,70	7,83	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	276,36	542,24	0,01	14,70	3,36	836,67
4	Kec. Bogor Timur	372,15	665,44		9,40	1,01	1.048,00



No	Kecamatan	Dataran	Landai	Perbukitan Sangat Terjal	Perbukitan Sedang	Perbukitan terjal	Total
5	Kec. Bogor Utara	755,90	1.049,80		6,06	0,39	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	905,44	1.150,19		3,06	1,33	2.060,01

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Jika dilihat dari data morfologi diatas, sebagian besar wilayah Kota Bogor berada pada morfologi dataran dan landai. Pada kondisi morfologi tersebut mendukung untuk kegiatan pembangunan perkotaan. Sedangkan pada morfologi perbukitan terjal dan sangat terjal menjadi kendala/ limitasi dalam pembangunan.

3.3.4. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–8%, untuk luasan lahan datar seluas 10.415,03 Ha dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 651,57 Ha merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 9–15%, seluas 63,88 Ha merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 16–25%, seluas 7,10 Ha merupakan lahan curam dengan kemiringan 26–40% dan kelas kemiringan lereng >40% seluas 0,84 Ha.

Tabel 3. 8 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan kemiringan lereng

No	Kecamatan	>40%	0 - 8%	16 - 25%	26 - 40%	9 - 15%	Total
1	Kec. Bogor Barat	0,31	2.196,91	16,73	2,98	114,62	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	0,25	2.709,11	29,96	2,61	308,13	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	0,25	750,93	8,41	1,18	75,89	836,67
4	Kec. Bogor Timur	0,02	993,14	5,19	0,27	49,37	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara		1.754,85	2,17	0,05	55,08	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	0,01	2.010,08	1,42	0,00	48,49	2.060,01

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Jika dilihat dari kondisi kemiringan lereng pada tabel diatas, wilayah Kota Bogor dominan pada klasifikasi kemiringan lereng 0-25%. Pada Suatu lahan dengan kemiringan lereng 0-25% mendukung untuk kawasan permukiman dan perkotaan.

3.3.5. Geologi

Menurut A.C. Efendi , dkk (1998) Kota Bogor secara geologi berada dalam Peta Geologi Lembar Bogor Skala 1 : 100.000, yang tersusun umumnya oleh produk batuan vulkanik dari G. GedePangrango dan G. Salak, dan endapan alluvium yang membentuk bentang alam kipas (Aluvial Fans). Batuan produk gunung api tersebut umumnya menempati bagian selatan Kota Bogor, sedangkan ke bagian utara yang membentuk bentang alam kipas tersusun oleh material hasil pelapukan batuan vulkanik dengan penyebaran cukup luas hingga ke wilayah Depok dan Bekasi. Batuan di sekitar aliran sungai utama membentuk endapan limpas banjir berupa endapan aluivium yang terdiri dari kerikil, kerakal hingga pasis umumnya bersifat pas. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran formasi batuan di wilayah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3. 9 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan

No	Jenis Batuan	Luas (ha)
1	Batuan Gunung Api Pangrango	3.338,88
2	Batuan Gunung Api Salak	1.812,90
3	Breksi dan Lava Gunung Kencana dan Limo	49,42
4	Formasi Bojonmanik	42,09
5	Formasi Jatiluhur	39,21
6	Kipas Aluvium	5.855,92

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

3.3.6. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kota Bogor cukup bervariasi. Jenis tanah ini sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan dikembangkan di Kota Bogor. Dari jenis tanah inipun dapat diketahui kesesuaian pemanfaatan lahan. Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar.

Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial. Kedalaman efektif tanah di Kota Bogor terdiri dari 3 macam, yaitu:

- Kedalaman 20-75 cm : Kecamatan Bogor Barat, Bogor Tengah dan Bogor Selatan
- Kedalaman 75-100 cm : Kecamatan Bogor Selatan
- Kedalam >100 cm : Kecamatan Bogor Selatan, Tanah Sareal, Bogor Barat dan Bogor Utara

Tabel 3. 10 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah di Kota Bogor

No	Kecamatan	Andosol	Latosol	Regosol	Total
1	Kec. Bogor Barat		2.132,86	198,69	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	247,77	2.772,60	29,69	3.050,06
3	Kec. Bogor Tengah		836,67		836,67
4	Kec. Bogor Timur		1.048,00		1.048,00
5	Kec. Bogor Utara		1.812,14		1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal		2.060,01		2.060,01

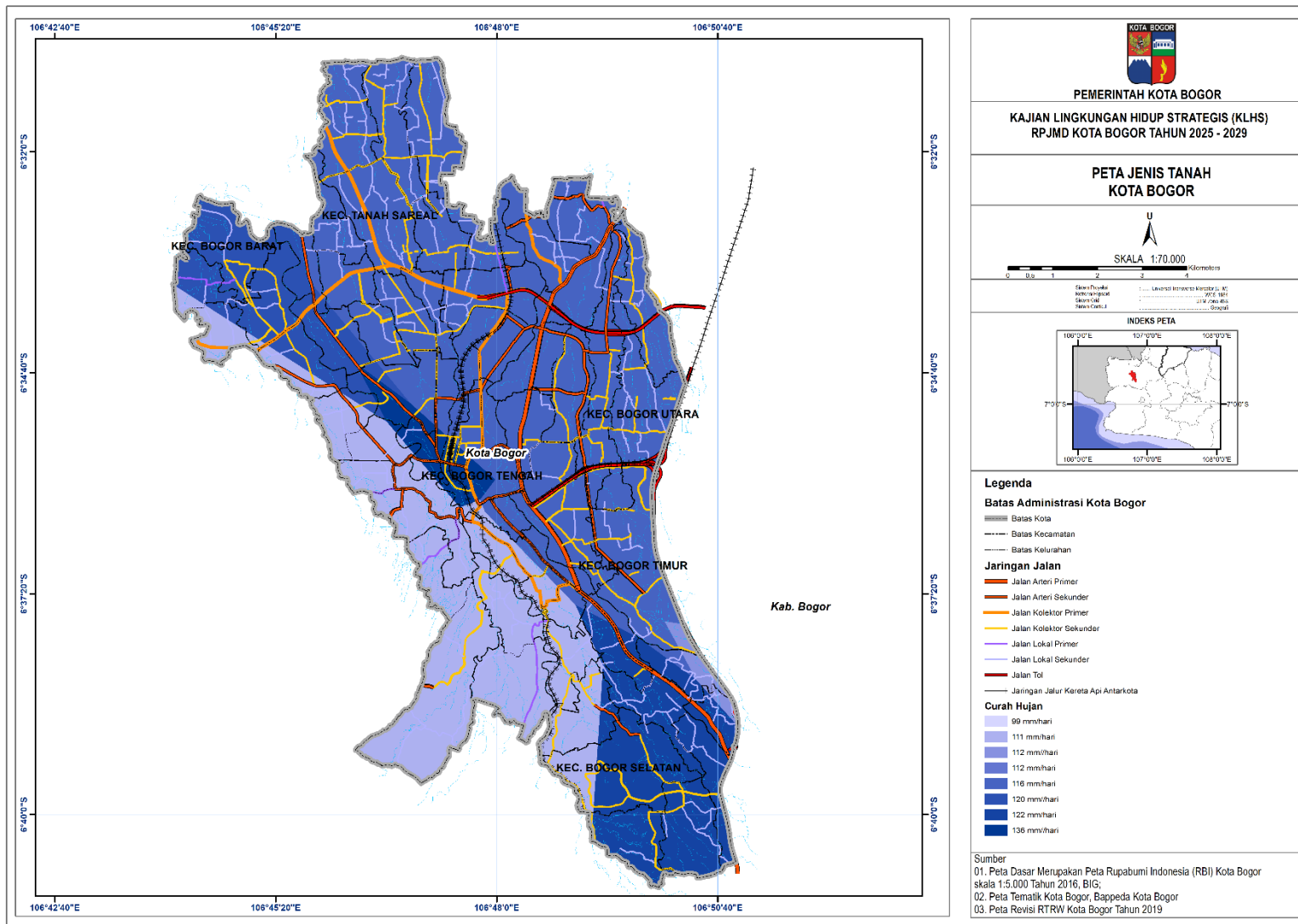
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

3.3.7. Daerah Aliran Sungai

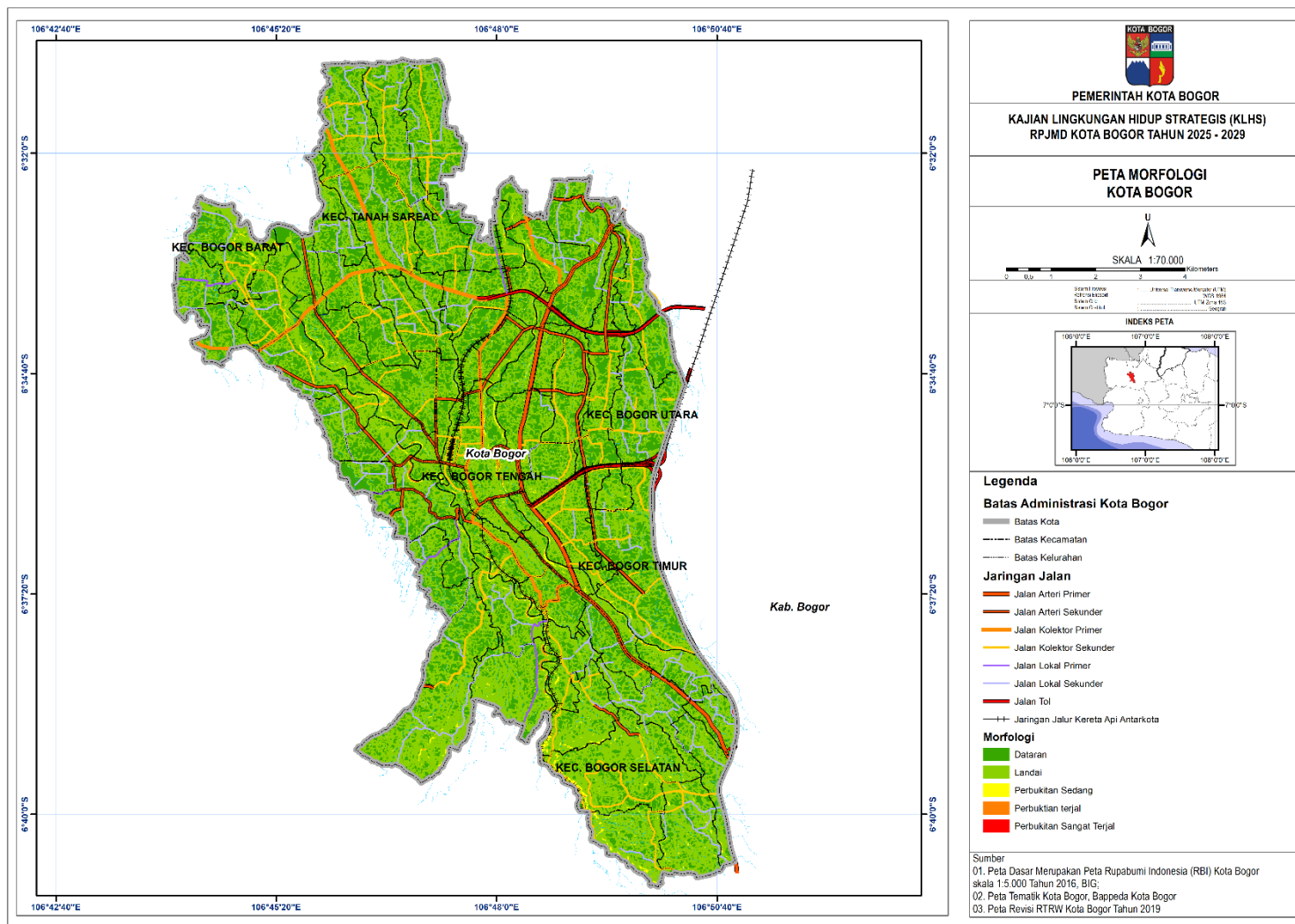
Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane bersumber dari dataran tinggi kawasan pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Barat, yang mengalir ke arah Utara melewati dataran relatif landai, hingga bermuara di Laut Jawa. Kota Bogor memanfaatkan kedua sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum.



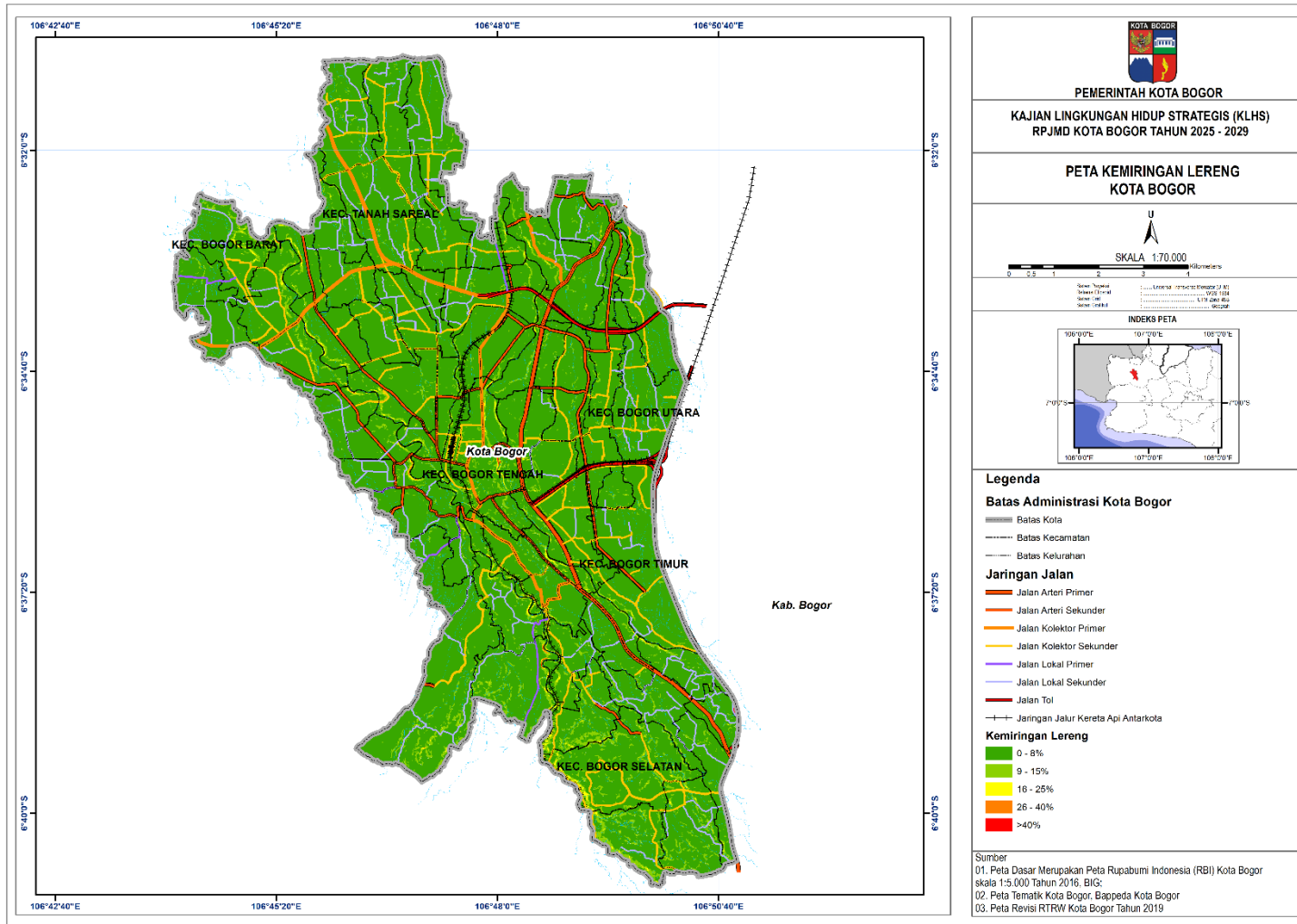
Keadaan penggunaan lahan di sekitar DAS Ciliwung dan Cisadane di wilayah Kota Bogor sebagian besar merupakan kawasan terbangun. DAS Ciliwung dan Cisadane di Kota Bogor merupakan bagian kota yang terus berkembang, oleh karena itu terjadi perubahan pemanfaatan lahan yang awalnya lahan tersebut sebagai ruang terbuka hijau menjadi areal terbangun (perumahan, perdagangan, perkantoran dan industri).



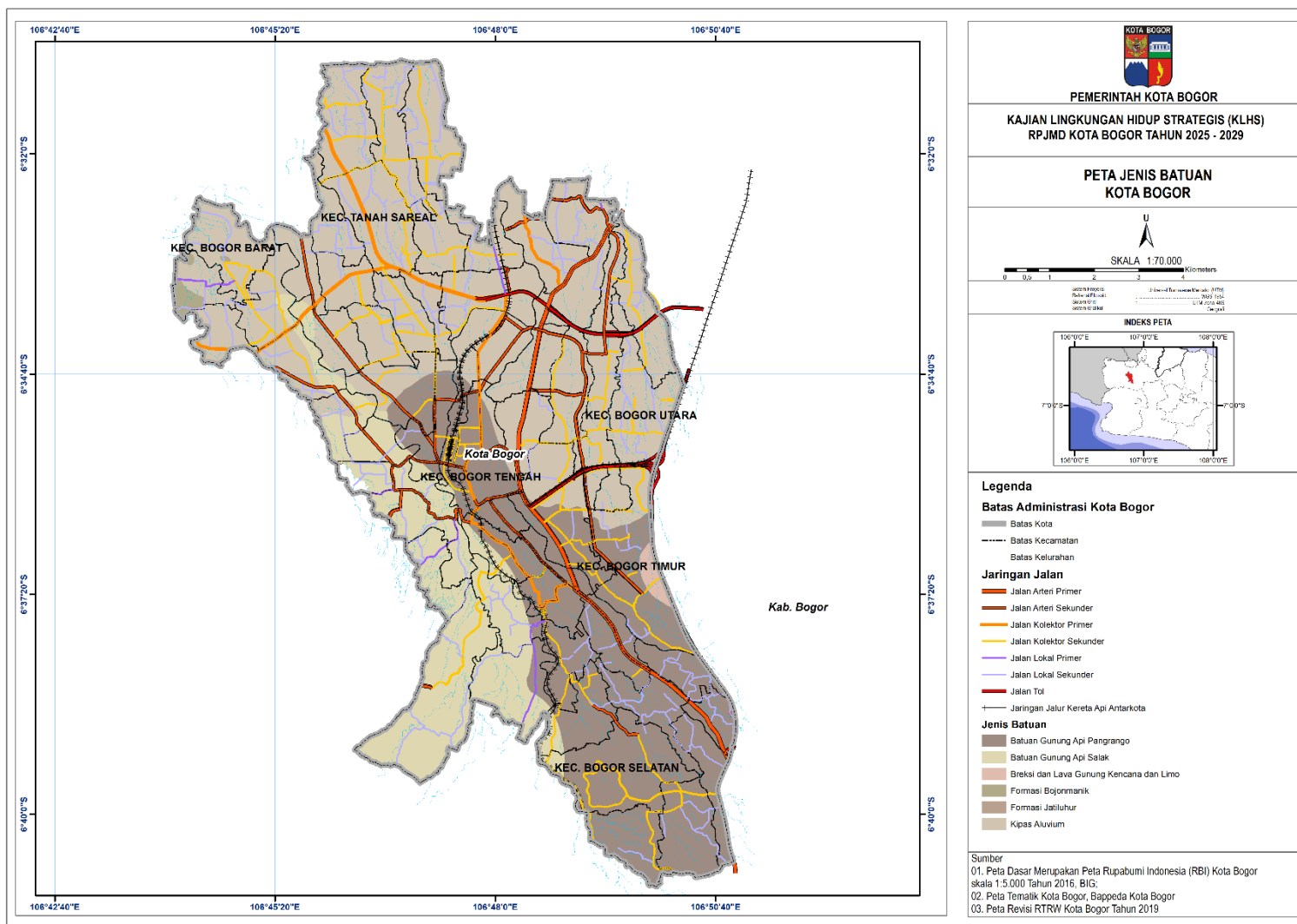
Gambar 3.3 Peta Curah Hujan Kota Bogor
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031



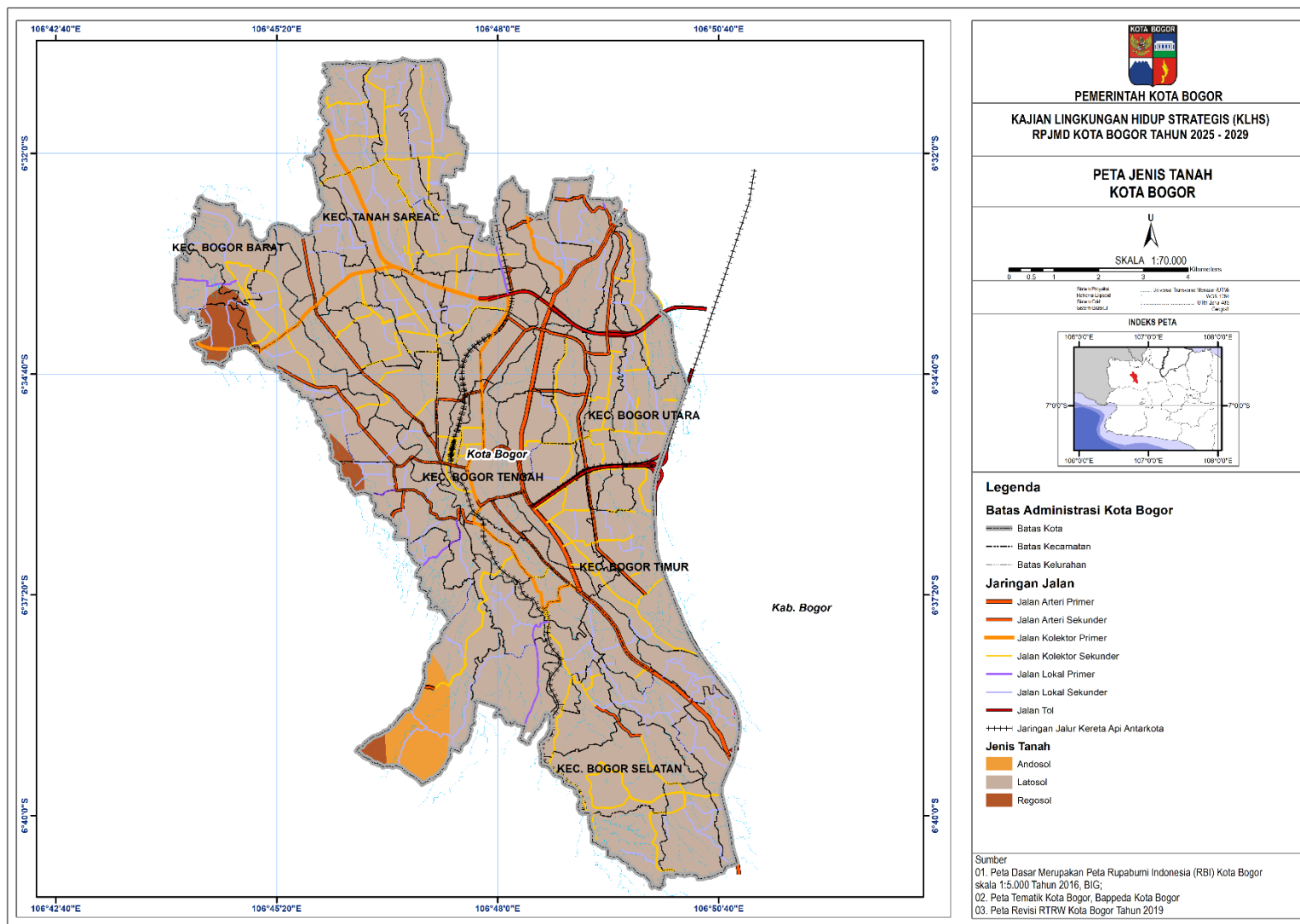
Gambar 3. 4 Peta Morfologi Kota Bogor
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031



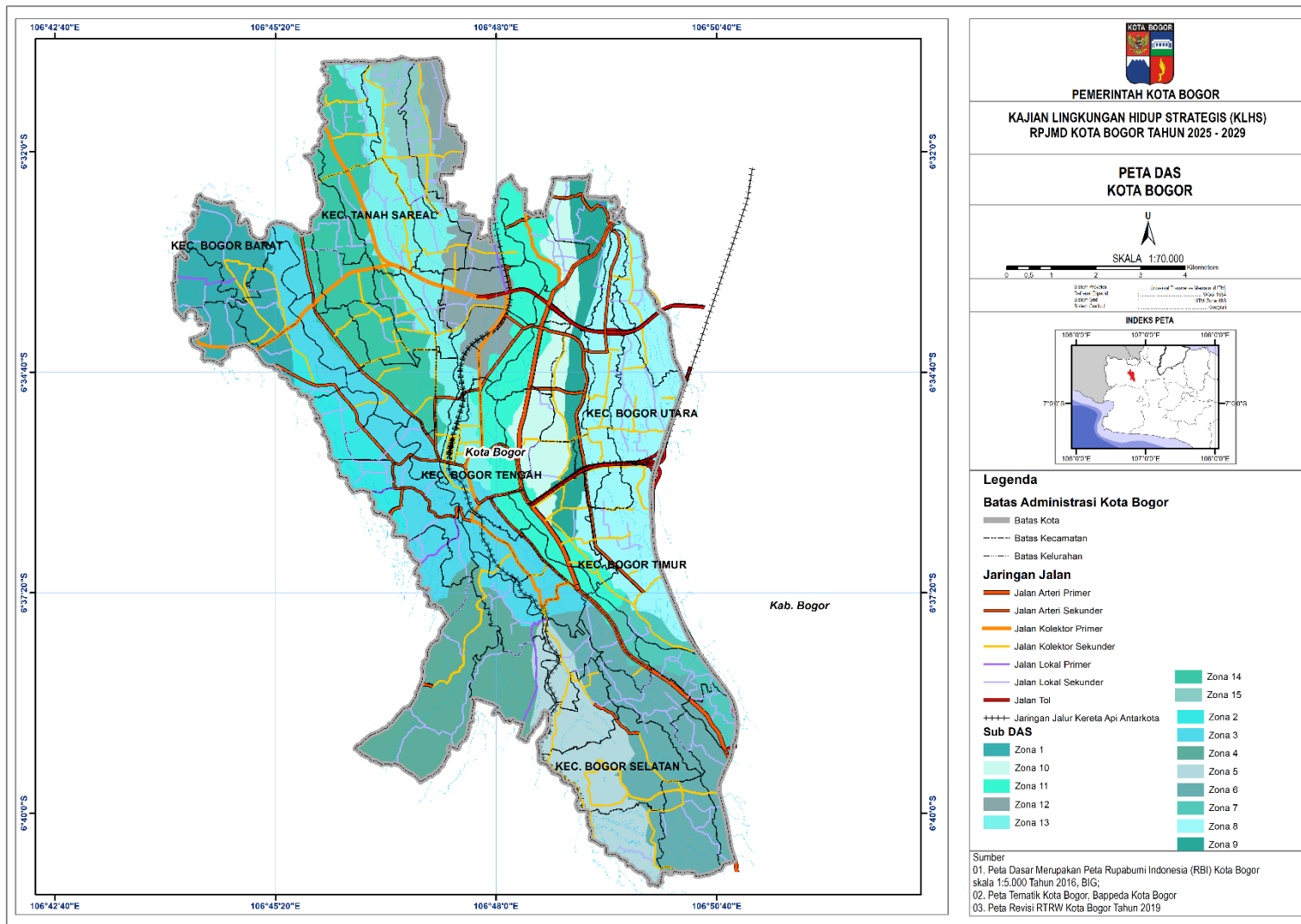
Gambar 3.5 Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor
 Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031



Gambar 3. 6 Peta Jenis Batuan Kota Bogor
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031



Gambar 3. 7 Peta Jenis Tanah Kota Bogor
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031



Gambar 3. 8 Peta DAS Kota Bogor
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031



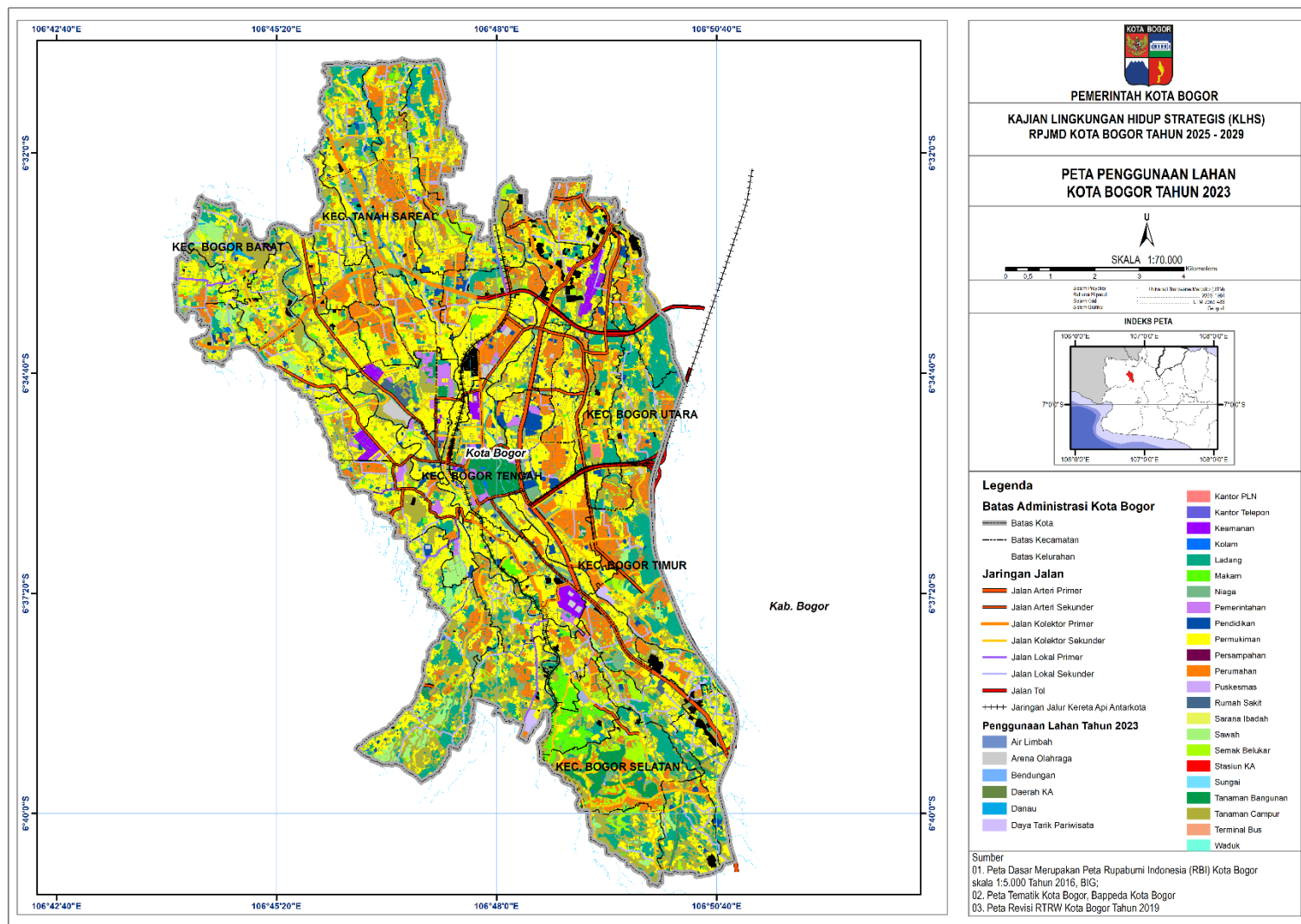
3.3.8. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Bogor sebesar 3.366,14 hektar atau 30,22 persen lahan Kota Bogor sudah menjadi kawasan permukiman. Sedangkan sisanya dipergunakan antara lain perumahan seluas 1.218,09 hektar (10,93%), lahan Tanaman Campur seluas 1.980,47 hektar (17,780%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.11

Tabel 3. 11 Luas setiap penggunaan lahan di Kota Bogor

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persen (%)
1	Air Limbah	0,99	0,009
2	Arena Olahraga	60,96	0,547
3	Bendungan	0,22	0,002
4	Daerah KA	19,01	0,171
5	Danau	7,31	0,066
6	Daya Tarik Pariwisata	24,56	0,221
7	Industri	161,20	1,447
8	Jalan	669,63	6,012
9	Kantor Air Minum	8,99	0,081
10	Kantor PLN	9,89	0,089
11	Kantor Telepon	2,29	0,021
12	Keamanan	100,92	0,906
13	Kolam	60,78	0,546
14	Ladang	1.109,58	9,962
15	Makam	195,08	1,751
16	Niaga	576,14	5,172
17	Pemerintahan	124,69	1,119
18	Pendidikan	193,36	1,736
19	Permukiman	3.366,14	30,221
20	Persampahan	0,66	0,006
21	Perumahan	1.218,09	10,936
22	Puskesmas	1,59	0,014
23	Rumah Sakit	32,43	0,291
24	Sarana Ibadah	31,92	0,287
25	Sawah	191,22	1,717
26	Semak Belukar	415,85	3,733
27	Stasiun KA	5,86	0,053
28	Sungai	190,84	1,713
29	Tanaman Bangunan	369,31	3,316
30	Tanaman Campur	1.980,47	17,780
31	Terminal Bus	6,35	0,057
32	Waduk	2,21	0,020
Total (ha)		11.138,56	100,000

Sumber: RBI skala 1:5.000 dan Interpretasi FU tahun perekaman 2018 BIG



Gambar 3. 9 Peta Penggunaan Lahan Kota Bogor
 Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

3.3.9. Rawan Bencana di Kota Bogor

Berdasarkan kejadian kebencanaan di Kota Bogor pada Tahun 2020, bencana yang paling banyak terjadi di Kota Bogor ialah tanah longsor, bangunan ambruk dan pohon tumbang. Untuk kejadian kekeringan tercatat nihil pada Tahun 2020, namun kejadian tanah longsor dan tanah amblas meningkat. Sedangkan untuk kejadian banjir lintasan yang menjadi penyumbang terbanyak dalam jumlah KK terdampak di tahun 2020.



Gambar 3.10 Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2020
Sumber: BPBD Kota Bogor Tahun 2021

a. Risiko Banjir

Tingkat risiko banjir diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana banjir di Kota Bogor, yang ditunjukkan pada Tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.12 Kelas Risiko Banjir Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	528,21	883,62	39,87	1.451,70	Sedang
2	Bogor Selatan	483,12	434,52	22,05	939,69	Rendah
3	Bogor Tengah	149,40	224,28	15,66	389,34	Sedang
4	Bogor Timur	148,86	254,88	13,14	416,88	Sedang
5	Bogor Utara	349,29	561,06	20,61	930,96	Sedang
6	Tanah Sareal	413,37	533,07	29,52	975,96	Sedang
	Kota Bogor	2.072,25	2.891,43	140,85	5.104,53	Sedang

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Jika dilihat pada tabel di atas maka secara keseluruhan wilayah di Kota Bogor memiliki tingkat risiko yang sedang dengan luas 5.104,53 Ha atau 45,83% dari luas wilayah Kota Bogor. Namun jika dilihat per kecamatan, terdapat satu kecamatan dengan risiko bencana banjir rendah, yaitu Kecamatan Bogor Selatan dengan luas 939,69 ha. Adapun lima kecamatan lainnya memiliki kelas risiko banjir sedang, yaitu Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal dengan luas tertinggi di



b. Risiko Gerakan Tanah

Tingkat risiko bencana tanah longsor diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas tanah longsor di Kota Bogor, yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.13 Risiko Gerakan Tanah di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	141,03	670,95	21,87	833,85	Sedang
2	Bogor Selatan	80,82	2.075,04	215,46	2.371,32	Sedang
3	Bogor Tengah	7,92	418,59	45,81	472,32	Sedang
4	Bogor Timur	15,93	437,58	128,34	581,85	Sedang
5	Bogor Utara	60,93	245,79	0,09	306,81	Sedang
6	Tanah Sareal	17,91	83,25	17,73	118,89	Sedang
	Total	324,54	3.931,20	429,30	4.685,04	Sedang

Sumber : Sumber : Kajian Risiko bencana Kota Bogor 2023-2027

Jika dilihat pada Tabel diatas, maka seluruh wilayah di Kota Bogor memiliki tingkat risiko bencana tanah longsor sedang dengan luas total adalah 4.685,04 Ha. Kecamatan dengan luas kelas risiko terbesar adalah Kecamatan Bogor Selatan yaitu seluas 2.371,32 Ha atau sekitar 50,61% dari total luas risiko keseluruhan. Adapun kecamatan dengan luas kelas risiko terendah adalah Kecamatan Tanah Sareal, yaitu seluas 118,89 Ha (2,54%). Luasnya wilayah Bogor Selatan yang berisiko bahaya tanah longsor ini tidak terlepas dari kondisi topografi wilayah tersebut yang lebih bervariasi daripada kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Bogor. Sebaliknya, Kecamatan Tanah Sareal tergolong wilayah yang relatif datar diantara lima kecamatan lainnya.



c. Risiko Banjir Bandang

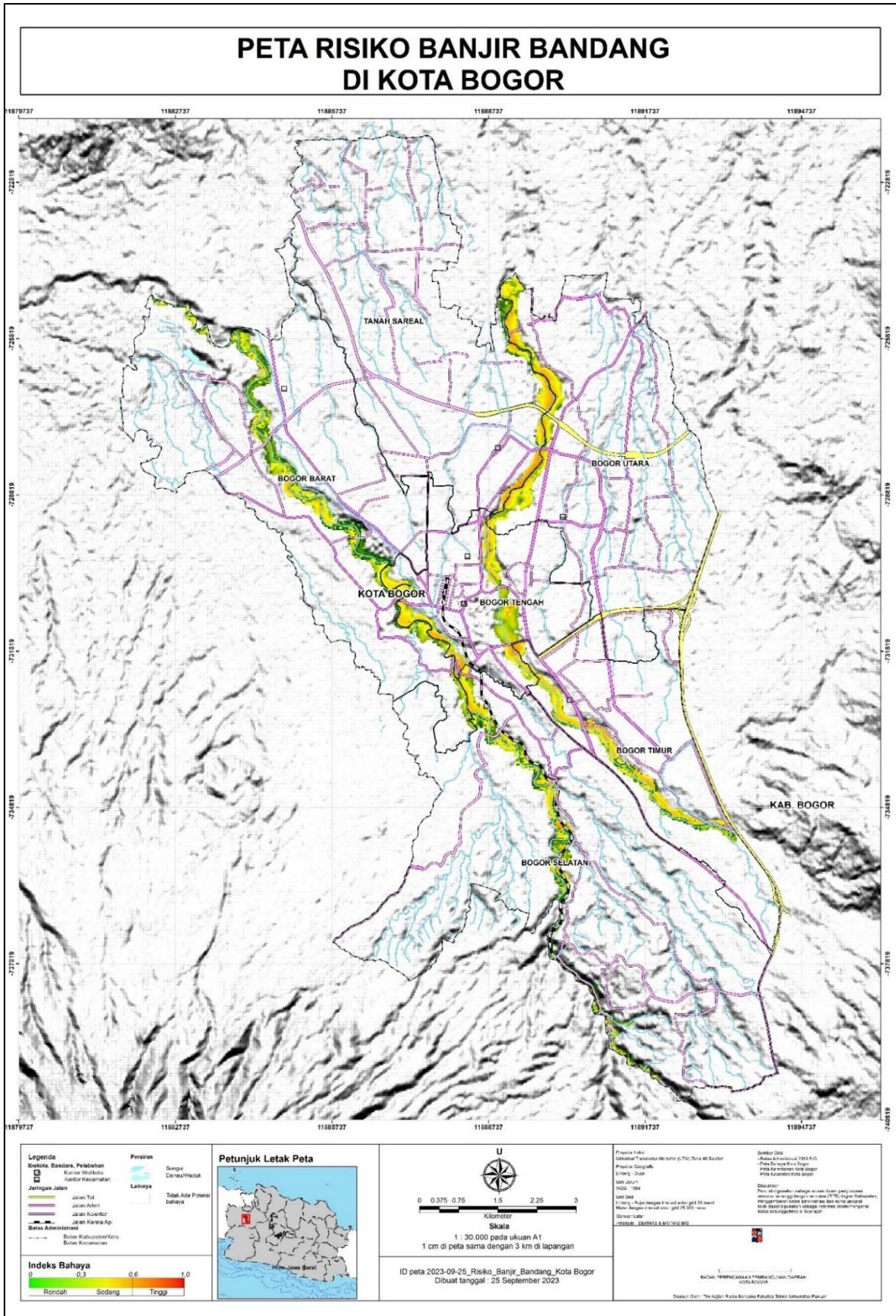
Tingkat risiko banjir bandang diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana banjir bandang di Kota Bogor, yang ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Jika dilihat pada Tabel tersebut maka Kota Bogor yang tergolong dalam risiko banjir bandang sedang dengan potensi luas risiko 778,99 Ha. Meskipun demikian, jika dirinci per kecamatan, hanya terdapat empat kecamatan dengan kelas risiko banjir bandang sedang, yaitu Kecamatan Bogor Tengah (130,98 Ha), Bogor Timur (108,19 Ha), Bogor Utara (105,54 Ha), dan Tanah Sareal (58,92 Ha). Hal ini dikarenakan keempat kecamatan tersebut dilalui oleh Sungai Ciliwung Sementara itu dua kecamatan lainnya, yaitu Bogor Barat dan Bogor Selatan hanya memiliki risiko banjir bandang dengan kategori rendah.

Tabel 3. 14 Kawasan Risiko Banjir Bandang di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	113,44	92,37	2,86	208,66	Rendah
2	Bogor Selatan	91,20	72,30	3,20	166,70	Rendah
3	Bogor Tengah	28,16	91,18	11,64	130,98	Sedang
4	Bogor Timur	27,25	75,06	5,88	108,19	Sedang
5	Bogor Utara	23,61	74,79	7,13	105,54	Sedang
6	Tanah Sareal	18,22	26,86	13,84	58,92	Sedang
	Kota Bogor	301,88	432,56	44,55	778,99	Sedang

Sumber : Kajian Risiko bencana Kota Bogor 2023-2027



Gambar 3. 13 Peta Risiko Banjir Bandang Kota Bogor
 Sumber : Kajian Risiko bencana Kota Bogor 2023-2027



d. Risiko Cuaca Ekstrim

Tingkat risiko bencana cuaca ekstrem diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana cuaca ekstrem di Kota Bogor, yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 3. 15 Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	20,88	1.646,02	737,01	2.403,91	Sedang
2	Bogor Selatan	234,99	2.194,02	581,22	3.010,23	Sedang
3	Bogor Tengah	0,09	541,44	295,38	836,91	Sedang
4	Bogor Timur	0,09	393,48	638,82	1.032,39	Tinggi
5	Bogor Utara	15,30	1.011,33	770,76	1.797,39	Sedang
6	Tanah Sareal	1,53	996,84	1.048,50	2.046,87	Tinggi
	Kota Bogor	272,88	6.783,13	4.071,69	11.127,70	Sedang

Sumber : Sumber : Kajian Risiko bencana Kota Bogor 2023-2027

Jika dilihat pada Tabel diatas, maka secara umum Kota Bogor memiliki tingkat risiko cuaca ekstrem sedang. Meskipun demikian, tidak berarti semua kelurahan di kecamatan-kecamatan ini memiliki risiko cuaca ekstrem sedang. Kecamatan Bogor Timur dan Tanah Sareal memiliki risiko cuaca ekstrem tinggi, sedangkan empat kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, dan Bogor Utara memiliki risiko cuaca ekstrem sedang.

e. Risiko Bahaya Gunung Api

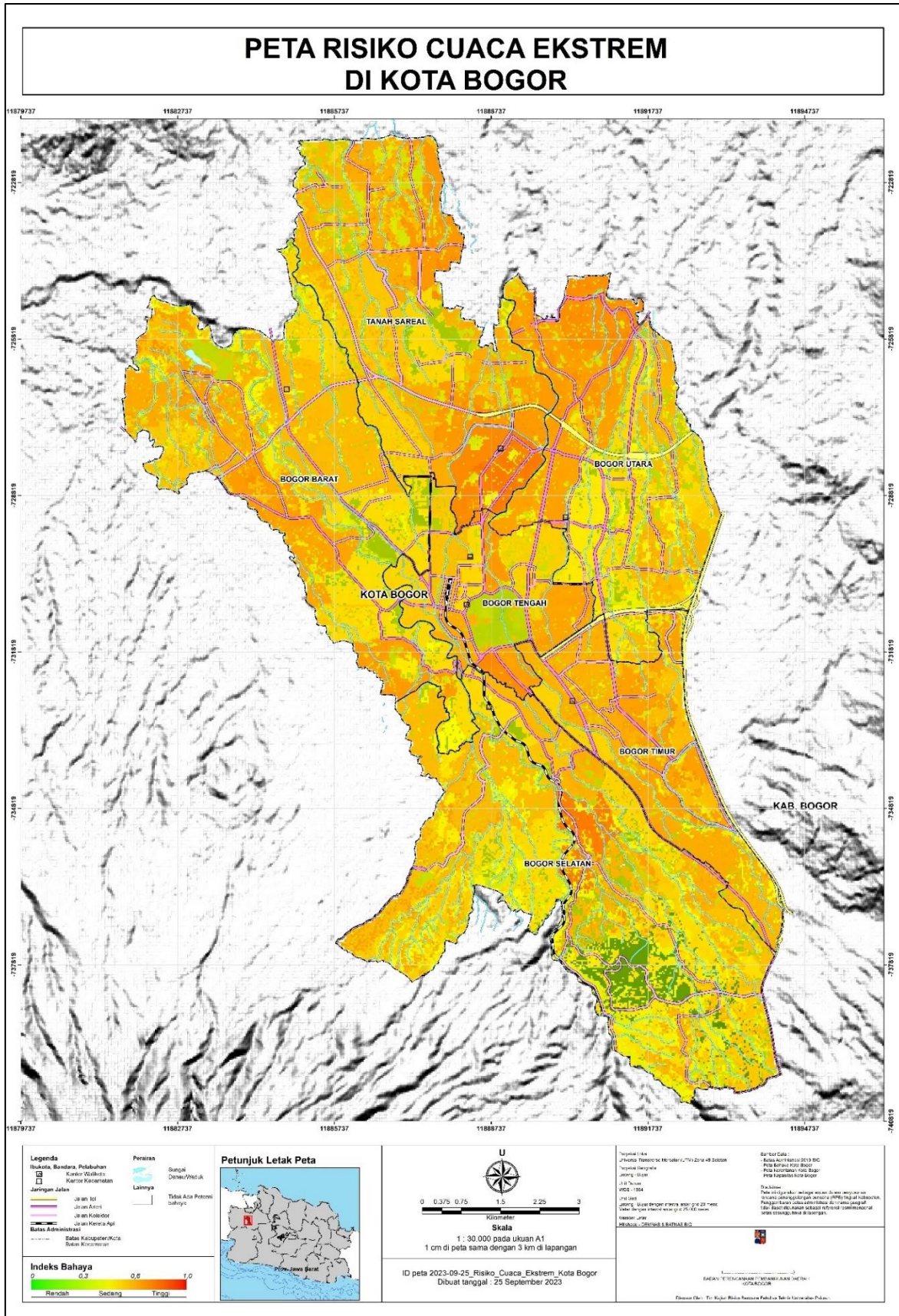
Tingkat risiko bencana letusan gunung api diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas letusan gunung api di Kota Bogor, yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 3. 16 Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api di Kota Bogor

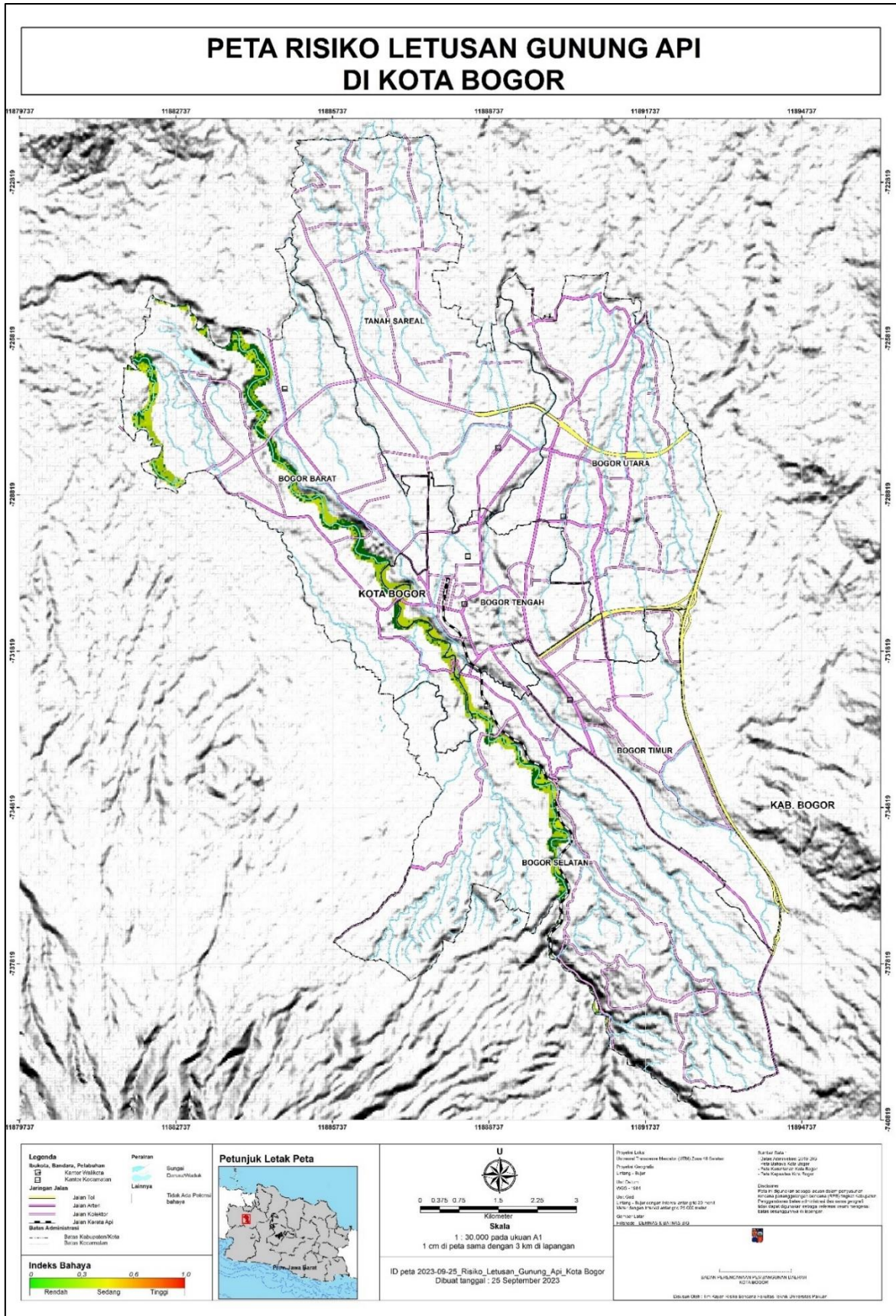
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	143,28	95,04	0,00	238,32	Rendah
2	Bogor Selatan	49,50	44,28	0,00	93,78	Rendah
3	Bogor Tengah	2,43	25,92	0,00	28,35	Sedang
4	Bogor Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendah
5	Bogor Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendah
6	Tanah Sareal	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendah
	Total	195,21	165,24	0,00	360,45	Rendah

Sumber : Sumber : Kajian Risiko bencana Kota Bogor 2023-2027

Jika dilihat dari tabel diatas, seluruh wilayah di Kota Bogor memiliki tingkat risiko bencana letusan gunung api rendah.



Gambar 3. 14 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Bogor
 Sumber : Kajian Risiko bencana Kota Bogor 2023-2027

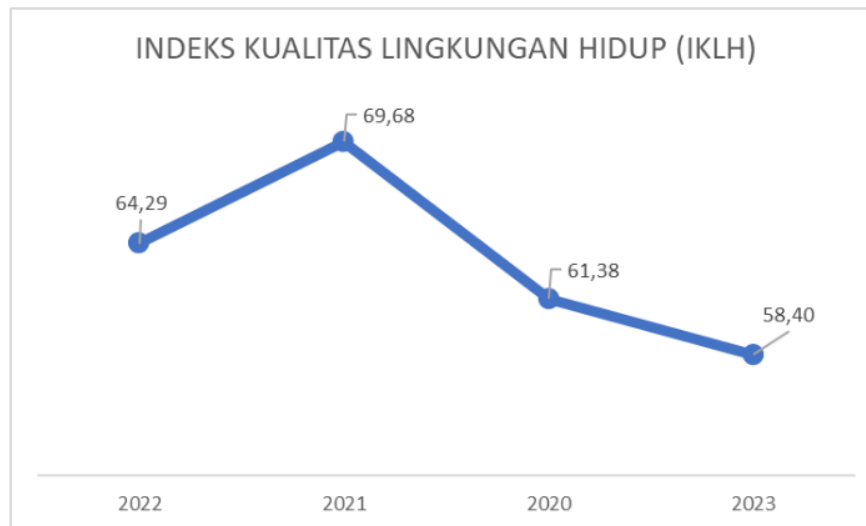


Gambar 3. 15 Peta Risiko Bahaya Gunung Api Kota Bogor
Sumber : Kajian Risiko bencana Kota Bogor 2023-2027



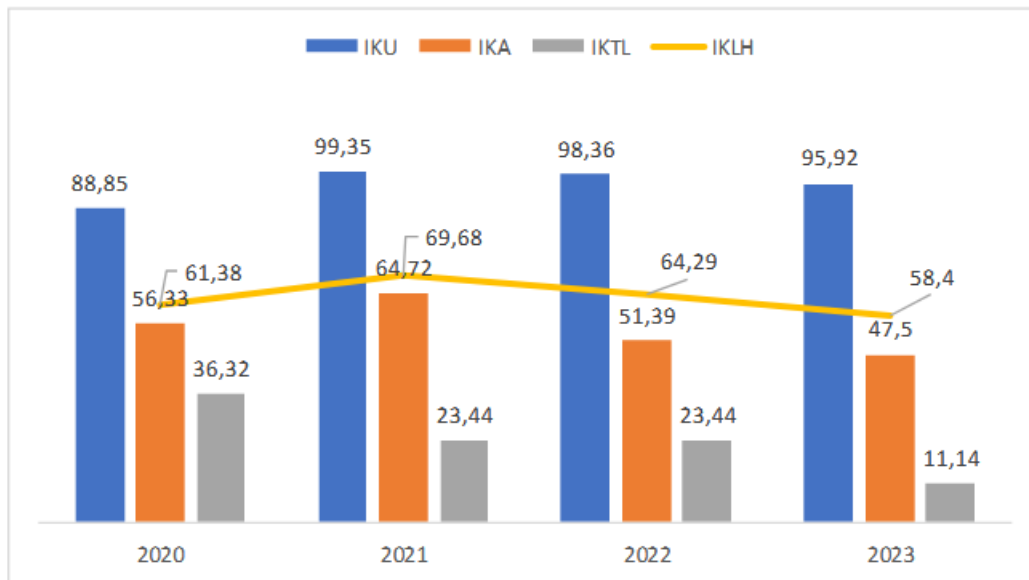
3.3.10. IKLH Kota Bogor

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Bogor menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun analisis isu prioritas lingkungan hidup karena Kota Bogor memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem Jabodetabek. Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bogor memberikan gambaran yang penting terhadap kondisi tata kelola pemerintahan lingkungan di wilayah tersebut. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2023, IKLH Kota Bogor mencapai 58,40, menunjukkan kategori sedang dalam penilaian kualitas lingkungan. Angka ini menggambarkan seberapa baik atau buruk kondisi lingkungan hidup di Kota Bogor pada tahun tersebut.



Gambar 3. 16 IKLH Kota Bogor
Sumber: DIKPLHD Kota Bogor Tahun 2024

Adapun jika dilihat secara lebih mendetail pada komponen IKA, IKU dan IKTL, data indikator kualitas lingkungan Kota Bogor menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun 2020 hingga 2023. Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan dari 88,85 pada 2020 menjadi 99,35 pada 2021, namun menurun bertahap menjadi 95,92 pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan polusi udara, mungkin disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan penurunan dari 56,33 pada 2020 menjadi 47,5 pada 2023. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami penurunan drastis dari 36,32 pada 2020 menjadi 11,14 pada 2023, mencerminkan alih fungsi lahan hijau yang signifikan. Secara lebih terperinci mengenai IKA, IKU dan IKTL dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 17 Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sumber: DIKPLHD Kota Bogor Tahun 2024

3.4. Kondisi Sosial

3.4.1. Kondisi Demografi

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Penduduk Kota Bogor terdiri dari beragam latar belakang etnis, budaya, dan agama menciptakan keragaman etnis dan budaya yang kaya. Mayoritas penduduk Kota Bogor adalah suku Sunda dan memeluk agama Islam. Namun, tidak sedikit pula penganut agama lainnya seperti Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Tionghoa. Hal ini tercermin dari adanya berbagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan di Kota Bogor.

Angkatan kerja di Kota Bogor tahun 2023 mencapai 556.541 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 89,22% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,78%. Jumlah pencari kerja di Kota Bogor pada tahun 2023 cenderung lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah pencari kerja di Kota Bogor sebanyak 3.632 orang, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya sebanyak 3.220 orang dengan tingkat pendidikan pencari kerja terbanyak adalah lulusan SMK/Sederajat sebanyak 2.298 orang. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif meskipun angka jumlah pencari kerja sudah menurun. Menurunnya jumlah pencari kerja dapat menjadi salah satu pertanda peningkatan lapangan pekerjaan di Kota Bogor seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2023 terdapat sebanyak 1.070.719 jiwa yang terdiri dari 542.408 orang laki-laki dan sebanyak 528.311 orang perempuan. Kota Bogor memiliki luas wilayah 118,5 Km² dengan kepadatan penduduk di Kota



Bogor pada tahun 2022 mencapai 9.548 jiwa/Km². Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah penduduk 239.980 jiwa. Untuk rincian jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 17 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor Selatan	201.593	204.030	206.217	208.774	210.552
2	Bogor Timur	103.582	104.327	105.188	106.234	106.884
3	Bogor Utara	187.935	186.724	188.240	190.085	191.223
4	Bogor Tengah	106.150	96.258	96.180	96.262	96.001
4	Bogor Barat	238.830	233.637	235.770	238.318	239.980
5	Tanah Sareal	210.520	218.094	220.764	223.840	226.079
Jumlah		1.048.610	1.043.070	1.052.359	1.063.513	1.070.719

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2024

Ciri-ciri daerah perkotaan adalah kepadatan penduduk per kilometer persegi sangat tinggi diatas 5.000 jiwa/km², untuk Kota Bogor rata-rata per kilometer ditempati sebanyak 9.613 jiwa penduduk. Kepadatan tertinggi ada di kecamatan Bogor Tengah yaitu sebesar 11.474 jiwa/km² dan terendah ada di kecamatan Bogor Selatan 6.903 jiwa/km².

3.5. Kondisi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

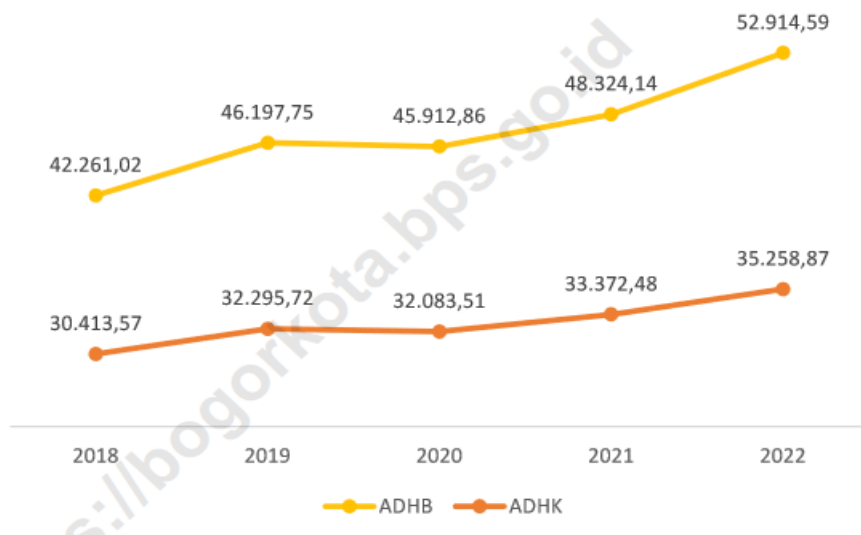
Perekonomian Kota Bogor pada periode 2018-2019 tumbuh di atas 5%, yakni berturut-turut sebesar 6,33 persen dan 5,45 persen, sedangkan pada 2020 mengalami penurunan pada level -3,31 akibat pandemi Covid-19. Perekonomian Kota Bogor mulai mengalami pertumbuhan positif kembali pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,11 persen karena diselenggarakannya berbagai program pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 cukup terkendali. Pada tahun 2022 pertumbuhan kembali menguat hingga mencapai angka 5,80 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side).

Pada Tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan sebesar 4.588,95 miliar Rupiah. Peningkatan PDRB ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan



harga yang harus dibayarkan serta peningkatan volume pada setiap komponen PDRB. Begitu juga dengan perubahan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018-2019 yang meningkat cukup signifikan, akibat pengaruh perubahan harga dan perubahan volume. Pada tahun 2020 penurunan nilai PDRB disebabkan oleh turunnya volume, sedangkan tahun 2021 meskipun nilai PDRB sudah meningkat namun peningkatan volume produksi masih belum kembali pada kondisi normal karena dampak pandemi Covid-19 yang masih signifikan.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. pada tahun 2022 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 1.886,39 miliar Rupiah. Peningkatan yang terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini mencerminkan terjadinya peningkatan volume pengeluaran yang terjadi selama 2022 tanpa adanya pengaruh perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor mengalami peningkatan, yakni dari 3,76 persen pada tahun 2021 naik hingga 5,65 persen pada tahun 2022.



Gambar 3. 18 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor (miliar rupiah), 2018–2022

Analisis LQ

Sektor Basis di Kota Bogor jika dilihat berdasarkan wilayah terdekat seperti Kota Jakarta dan Kota Bekasi adalah sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, sampah, dan limbah, konstruksi, transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan jasa lainnya. 8 sektor di Kota Bogor menjadi sektor basis di wilayah Jabodetabek, sektor – sektor tersebut diharapkan masih menjadi basis ekonomi dimasa yang akan datang di Kota Bogor. Sektor basis terbesar dan memiliki daya saing sedikit adalah Perdagangan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan. Sektor basis yang memiliki daya saing sedikit adalah jasa lainnya, penyediaan



akomodasi dan makanan minum. Berikut merupakan hasil analisis LQ tahun 2024 di Kota Bogor.

Tabel 3. 18 Analisis LQ Kota Bogor Terhadap Wilayah Jabodetabek

No	Lapangan Usaha	Kota Bogor	Kota Depok	Kota Bekasi	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bogor	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Utara
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,13	1,62	0,75	0,26	8,31	1,44	6,63	0,08	0,11	0,10	0,01	0,18
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	0,13	3,24	11,00	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	0,83	1,28	1,50	0,33	1,58	3,50	2,38	0,06	1,19	0,23	0,04	1,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,52	0,90	3,20	0,31	4,34	1,45	0,51	0,29	1,06	0,49	0,56	0,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,48	1,73	1,93	0,98	1,76	0,60	2,71	0,56	1,21	0,90	0,30	1,24
6	Konstruksi	1,04	2,05	1,05	1,30	1,34	0,54	0,90	0,97	0,95	1,16	0,76	1,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,28	1,40	1,44	1,07	0,78	0,39	0,84	0,98	1,11	1,11	1,04	1,16
8	Transportasi dan Pergudangan	3,18	0,89	2,72	0,77	0,80	0,29	0,88	0,59	1,57	1,35	0,61	1,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	0,87	0,96	0,74	0,40	0,14	0,65	1,02	1,21	1,22	1,33	1,16
10	Informasi dan Komunikasi	0,85	0,35	0,37	1,67	0,58	0,18	0,35	1,63	0,74	2,19	1,09	0,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,47	0,31	0,15	0,60	0,10	0,06	1,64	0,20	0,80	2,86	0,21
12	Real Estat	0,45	0,38	0,36	3,46	1,67	0,12	0,20	1,38	0,93	1,16	1,07	1,00
13	Jasa Perusahaan	0,30	0,04	0,07	0,53	0,14	0,02	0,04	1,85	0,94	1,07	1,55	1,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,76	0,76	0,53	0,36	0,52	0,23	0,49	1,63	1,00	0,37	2,18	0,43
15	Jasa Pendidikan	0,88	0,78	0,62	1,72	0,60	0,30	0,54	0,95	1,61	1,19	1,23	0,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,63	0,69	2,37	0,28	0,14	0,28	1,34	1,24	1,25	1,15	0,97
	Jasa Lainnya	1,05	1,19	0,92	0,75	0,42	0,19	0,58	1,71	0,91	0,96	1,10	1,08

Sumber: hasil analisis, 2023

7 sektor menjadi sektor basis (mantap) Kota Bogor berdasarkan analisis terhadap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan wilayah Jabodetabek. Sektor pengadaan listrik dan gas, transportasi & pergudangan, dan akomodasi makanan minimum menjadi sektor yang paling tinggi. Di sektor jasa terdapat sektor jasa lainnya yang menjadi daya Tarik Kota Bogor seperti di bidang pariwisata dan perhotelan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3. 19 Analisis LQ Kota Bogor Terhadap Wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek



Sektor Basis Kota Bogor	Kota Bogor dalam Wilayah Jabar		Kota Bogor dalam Wilayah Jabodetabek	
Sektor Lap Usaha	Nilai LQ	Keterangan	Nilai LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0,11	Non Basis	1,13	Basis
Pertambangan & Penggalian	-	Non Basis	-	Non Basis
Industri Pengolahan	0,44	Non Basis	0,83	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	6,89	Basis	7,52	Basis
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1,31	Basis	2,48	Basis
Konstruksi	1,31	Basis	1,04	Basis
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,32	Basis	1,28	Basis
Transportasi & Pergudangan	2,6	Basis	3,18	Basis
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,82	Basis	1,20	Basis
Informasi & Komunikasi	1,55	Basis	0,85	Non Basis
Jasa Keuangan & Asuransi	2,59	Basis	0,73	Non Basis
Real Estate	1,72	Basis	0,45	Non Basis
Jasa Perusahaan	4,39	Basis	0,30	Non Basis
Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos	1,28	Basis	0,76	Non Basis
Jasa Pendidikan	1,17	Basis	0,88	Non Basis
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,00	Basis	0,87	Non Basis
Jasa Lainnya	1,7	Basis	1,05	Basis

Analisis Shift Share

Analisis Shift Share merupakan teknik dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai perubahan atau peningkatan suatu indikator pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai faktor di suatu daerah dalam kaitannya dengan ekonomi nasional (Tarigan, 2004).

Berdasarkan komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) terdapat 7 sektor dengan kondisi nilai komponen PP terkategori cepat di Kota Bogor Seperti Industri Pengolahan, Transportasi & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Berdasarkan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Terdapat 9 sektor yang berdaya saing baik di Kota Bogor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor,



Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Real Estate, Jasa Pendidikan, Kesehatan, dan Jasa Lainnya.

Sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan di Kota Bogor adalah sektor yang berada pada kuadran I yaitu sektor yang memiliki daya saing yang baik dan tumbuh pesat (Sektor Prima) seperti Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Selain itu terdapat sektor potensial yang saat ini berkembang pesat dan 20 tahun kedepan akan menjadi sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat yaitu sektor yang berada pada kuadran ke II yaitu **Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Real Estate, Jasa Pendidikan, Pengadaan Listrik dan Gas**. Sehingga ke depan perlu diantisipasi terkait sektor – sektor potensial sebagai upaya dalam peningkatan perekonomian di Kota Bogor dan sebagai masukan dalam penyusunan arahan sektor dalam rencana jangka panjang.

Tabel 3. 20 Shift and Share Kota Bogor Tahun 2023

Sektor Lap Usaha	Nilai PP	Keterangan	PPW	Keterangan	Nilai PB	Keterangan	Kuadran
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-1,046	Lambat	-1,04	Kurang Bersaing	-2,09	Lamban	IV
Pertambangan & Penggalian	-5,812	Lambat	-	Kurang Bersaing	-	Lamban	IV
Industri Pengolahan	1,549	Cepat	-1,92	Kurang Bersaing	-0,37	Lamban	III
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,036	Lambat	4,4	Daya Saing Baik	4,37	Maju	II
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	-2,86	Lambat	4,12	Daya Saing Baik	1,26	Maju	II
Konstruksi	-5,915	Lambat	0,82	Daya Saing Baik	-5,09	Lamban	II
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-1,238	Lambat	1,16	Daya Saing Baik	-0,07	Lamban	II
Transportasi & Pergudangan	5,637	Cepat	-1,23	Kurang Bersaing	4,41	Maju	III
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,829	Cepat	0,55	Daya Saing Baik	-6,38	Lamban	I
Informasi & Komunikasi	0,637	Cepat	-0,98	Kurang Bersaing	0,34	Maju	III
Jasa Keuangan & Asuransi	-6,149	Lambat	-0,28	Kurang Bersaing	-6,43	Lamban	IV
Real Estate	-1,102	Lambat	2,54	Daya Saing Baik	1,43	Maju	II
Jasa Perusahaan	7,282	Cepat	-1,44	Kurang Bersaing	5,85	Maju	III
Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos	-7,242	Lambat	-0,31	Kurang Bersaing	-7,55	Lamban	IV
Jasa Pendidikan	-2,662	Lambat	6,25	Daya Saing Baik	3,59	Maju	II
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,365	Cepat	4,29	Daya Saing Baik	4,65	Maju	I
Jasa Lainnya	4,619	Cepat	1,79	Daya Saing Baik	6,41	Maju	I

Sumber: hasil analisis, 2024



Keterangan :

Kuadran I : Pertumbuhan cepat dan daya saing baik;

Kuadran II Pertumbuhan lambat dan daya saing baik;

Kuadran III : Pertumbuhan cepat dan daya saing kurang baik;

Kuadran IV : Pertumbuhan lambat dan daya saing kurang baik.

3.6. Kondisi Lingkungan Hidup (Baseline 6 Muatan KLHS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.6.1. Bentang Alam dan Vegetasi Alami

3.6.1.1. *Bentang Alam*

Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion dipahami sebagai karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan faktor pembatas (constraints) potensi lahan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Bentang Alam di Kota Bogor didominasi oleh dataran fluviovolkanik bermaterial alluvium, Dataran ini mempunyai relief relatif rata (flat), tersusun atas material aluvium dari hasil proses fluvial dengan material yang berasal dari produk vulkanik. Bentuklahan ini dapat disebut sebagai dataran laharik karena dihasilkan oleh aliran lahar, yaitu aliran yang tersusun atas air dan material piroklastik.

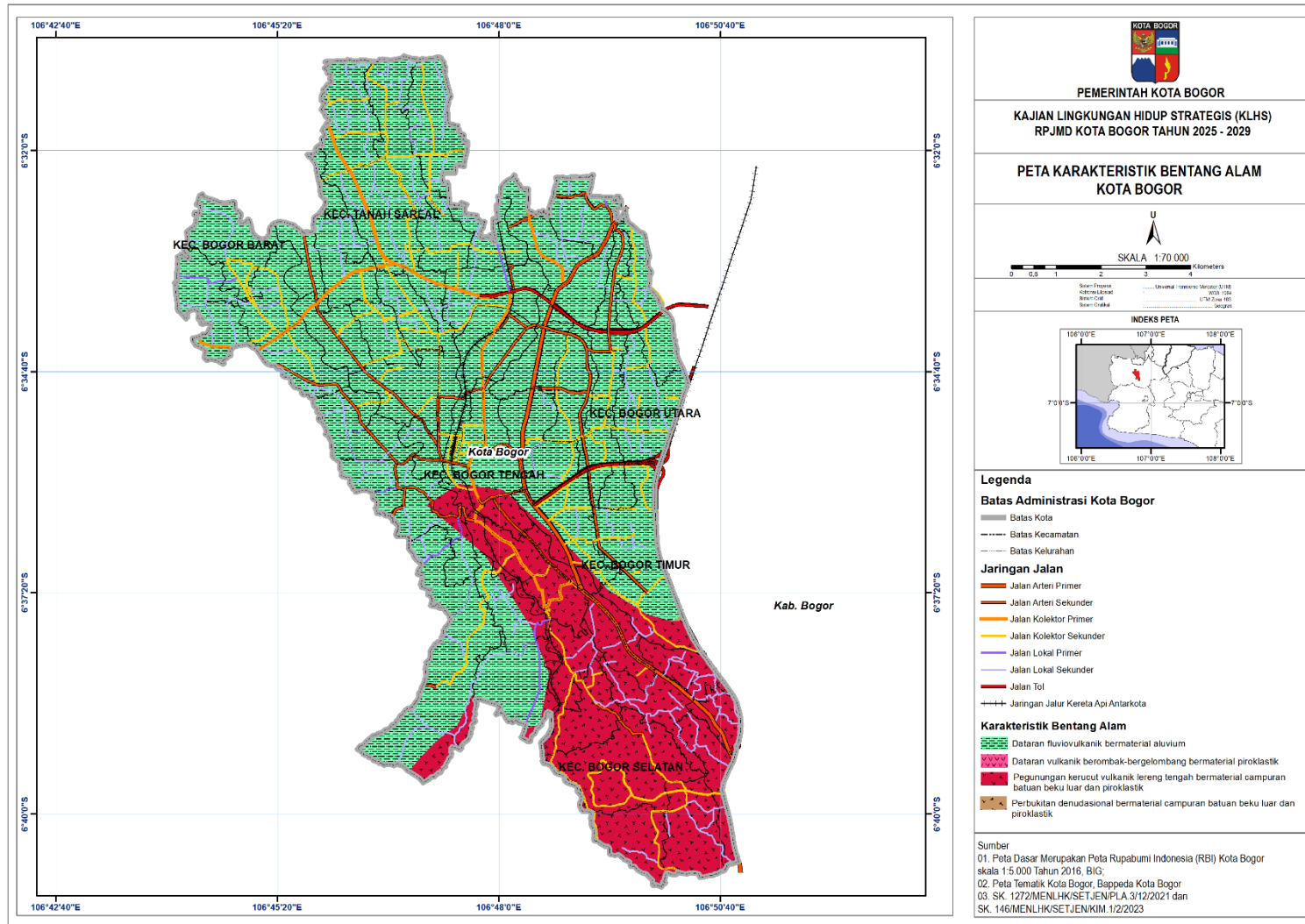


Tabel 3. 21 Karakteristik Bentang Alam

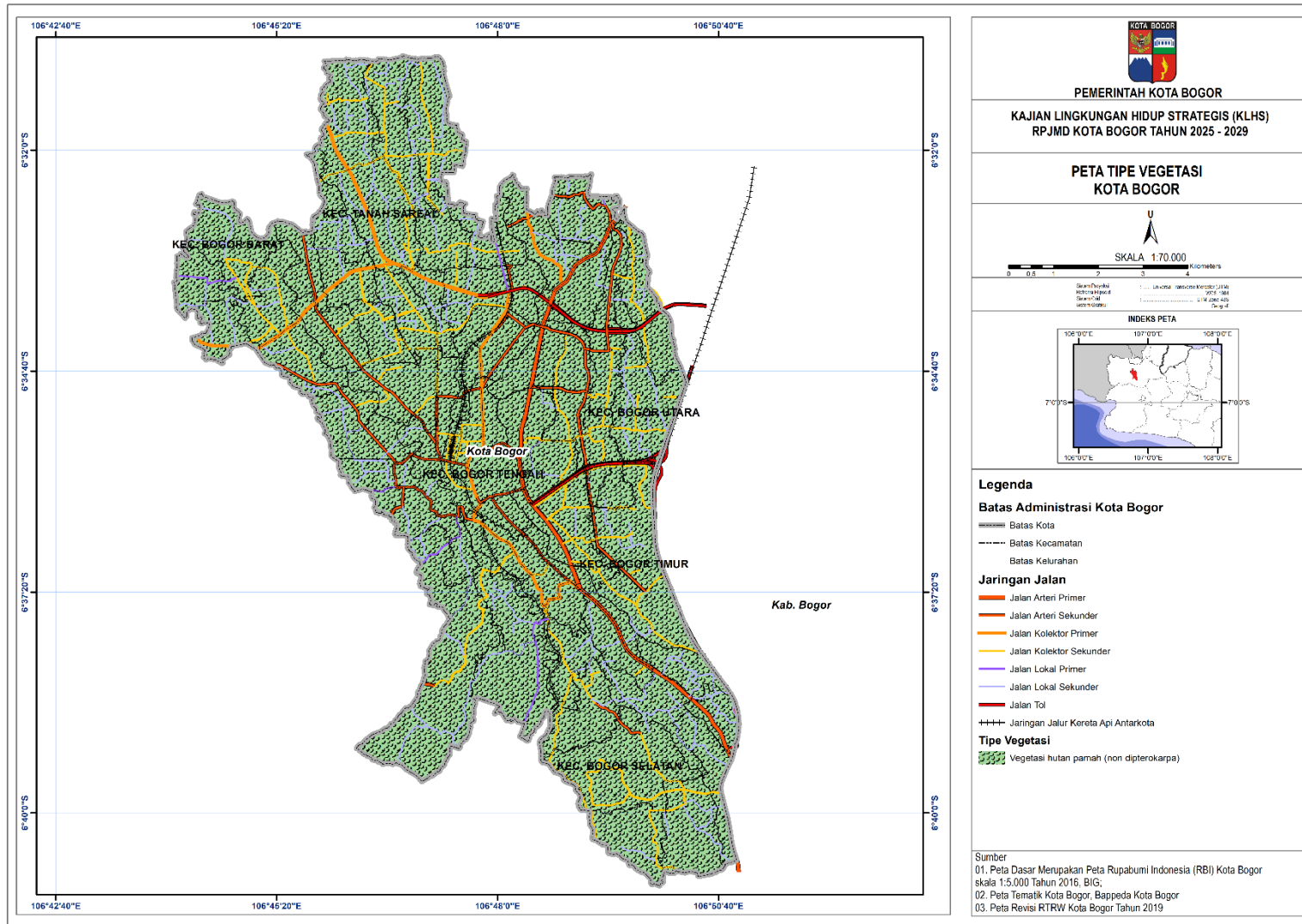
No	Kecamatan	Karakteristik Bentang Alam				Total (ha)
		Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	
1	Kec. Bogor Barat	2.286,57	0,22	44,76		2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	937,32		2.112,82		3.050,13
3	Kec. Bogor Tengah	722,94		113,73		836,67
4	Kec. Bogor Timur	571,41		474,58	2,00	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	1.812,15				1.812,15
6	Kec. Tanah Sareal	2.060,01				2.060,01
Total (ha)		8.390,40	0,22	2.745,89	2,00	11.138,51

3.6.1.2. Vegetasi Alami

Tipe vegetasi yang dominan di Kota Bogor didominasi oleh tipe vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa), Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada tanah pada tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah yang beraneka (kompleks) pada elevasi 0 - 1000 m, Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok Dipterocarpaceae.



Gambar 3. 19 Peta Bentang Alam Lahan Kota Bogor



Gambar 3. 20 Peta Vegetasi Lahan Kota Bogor



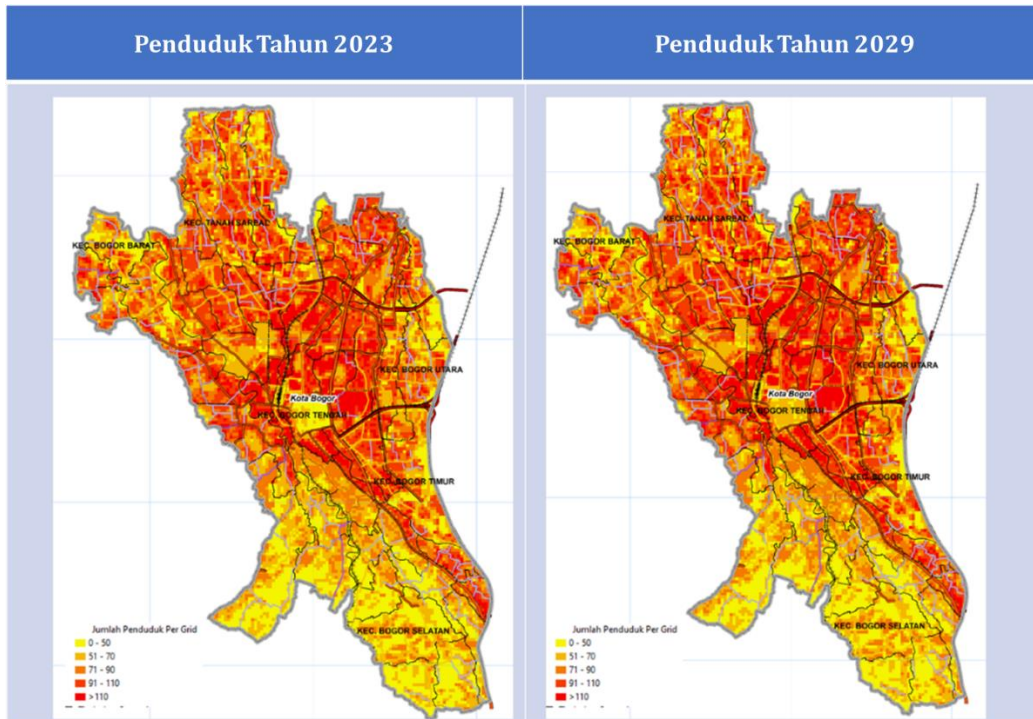
3.6.2. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Analisis kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan buku pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah, dalam pendekatan daya dukung dan daya tampung menggunakan dua pendekatan yaitu pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Bogor menggunakan pendekatan jasa ekosistem memanfaatkan grid skala ragam dengan resolusi 90m x 90m. Datum geodetik yang digunakan adalah DGN95 yang memiliki nilai-nilai parameter ellipsoid sama dengan datum WGS 84. Titik asal sistem koordinat geodetik berada pada 900BT, 150 LS dengan titik batas ujung timur dan ujung utara grid adalah 1440BT dan 80 LU (Riqqi, 2008).

Peta sebaran jumlah penduduk dalam setiap luasan atau grid 90m x 90m dapat dilihat pada Gambar. Jumlah penduduk terbesar dalam 1 grid mencapai 134 jiwa yang sebagai besar ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Tanah Sereal. Sedangkan Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah penduduk atau kepadatan penduduk yang lebih rendah dalam setiap luasan gridnya.

Nilai sebaran jumlah penduduk akan menjadi dasar dalam setiap perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan terkait dengan kebutuhan penduduk, baik itu kebutuhan energi pangan maupun kebutuhan air.



Gambar 3. 21 Peta Distribusi Penduduk Grid 90m x 90m

3.6.2.1. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norvyani, 2016). Perhitungan DDLH penyedia pangan dilakukan pada peta dengan resolusi 5"x5" ($\approx 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$) dalam bentuk grid, sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya. Alur pemodelan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dapat dilihat pada diagram berikut.



- (i) Perhitungan ketersediaan pangan ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kota Bogor dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kcal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPPB) sebagai bobot pendistribusian. Perhitungan ketersediaan pangan di setiap grid menggunakan persamaan:



$$KH_i = \frac{IJEPP_i}{IJEPP_{kab}} \times KH_{kab}$$

dengan:

- KH_i : ketersediaan bahan pangan pada grid i dalam satu tahun (kkal),
- $IJEPP_i$: IJE penyedia bahan pangan pada grid i ,
- $IJEPP_{kab}$: total IJE penyedia bahan pangan di setiap kabupaten, dan
- KH_{kab} : ketersediaan bahan pangan di setiap kabupaten dalam satu tahun (kkal).

- (ii) Perhitungan kebutuhan pangan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari (Kementerian Kesehatan, 2013). Barirotuttaqiyah (2015) menggunakan persamaan berikut untuk menghitung kebutuhan pangan di setiap grid.

$$KB_i = P_i \times AKE \times 365$$

dengan, KB_i adalah kebutuhan pangan di grid ke- i selama setahun (kkal); P_i adalah jumlah penduduk grid ke- i (orang); dan AKE adalah angka kecukupan energi per kapita (kkal/orang/hari)

- (iii) Penentuan status DDLH penyedia pangan Status DDLH penyedia pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”.

Mengingat wilayah kota bogor sebagai daerah perkotaan dan tergolong sebagai metropolitan tentu saja kota ini sudah tidak lagi fokus sebagai wilayah pemasok pangan untuk masyarakat di wilayah bogor itu sendiri. Meskipun demikian cukup penting untuk mengetahui kondisi daya dukung pangan tersebut sebagai baseline awal dalam menentukan sebuah kebijakan.

Analisis perhitungan kebutuhan pangan di Kota Bogor 2.150 kkal/orang/hari berdasarkan Kementerian Kesehatan. Sedangkan jumlah penduduk eksisting menggunakan jumlah penduduk tahun 2023 dan di lakukan proyeksi sampai tahun 2029 dengan produktivitas padi tahun 2023 sebesar 723,03 kg/ha. Perbandingan ketersediaan energi pangan di Kota Bogor untuk setiap kecamatannya cukup berbeda jauh. Ketersediaan energi pangan dalam jumlah besar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan yaitu mencapai 8.000 Juta Kkal/tahun. Kebutuhan pangan terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 91.673 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 37.769 juta Kkal. Adapun selisih ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sereal mencapai 80.000 juta Kkal.



Tabel 3. 22 Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Juta Kkal)	Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)
Kec. Bogor Barat	233.637	91.673	8.477	-83.196
Kec. Bogor Selatan	204.030	80.056	8.073	-71.984
Kec. Bogor Tengah	96.258	37.769	-	-37.769
Kec. Bogor Timur	104.327	40.935	3.318	-37.617
Kec. Bogor Utara	186.724	73.266	775	-72.491
Kec. Tanah Sereal	218.094	85.575	3.052	-82.522

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2024

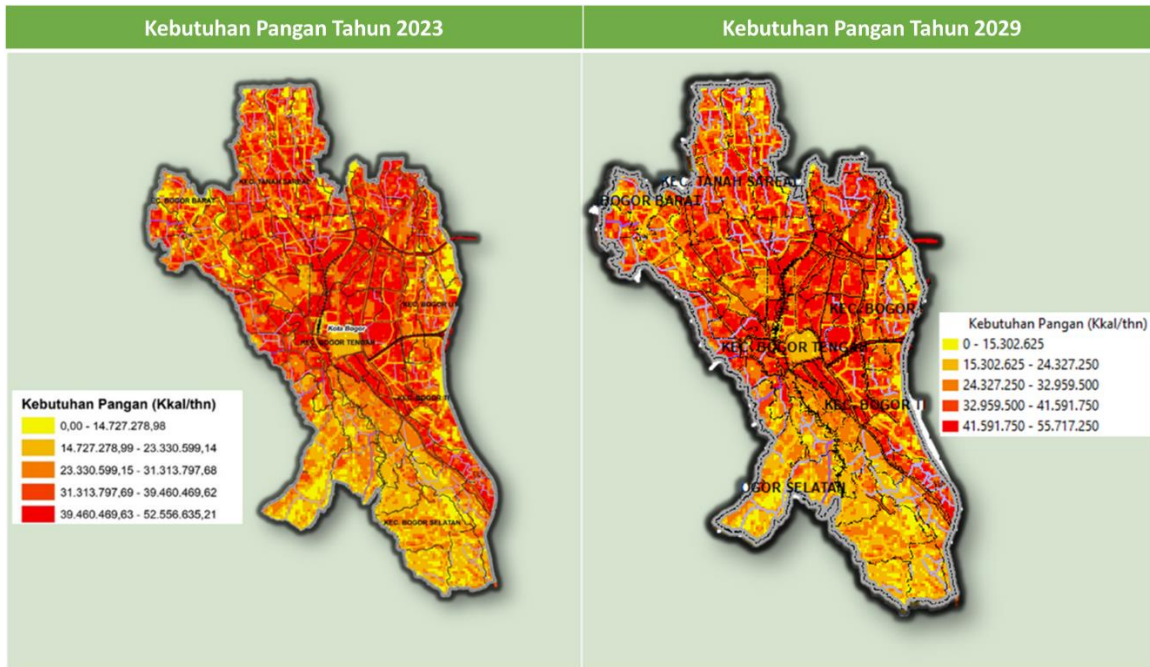
Prediksi kebutuhan pangan tahun 2029 terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 92.957 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 38.298 juta Kkal. Adapun selisih ketersediaan pangan terbesar di tahun 2029 terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sereal mencapai > 80.000 juta Kkal. Hal itu akibat dari jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut tergolong paling besar. Peta kebutuhan, ketersediaan, dan selisih pangan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 3. 23 Daya Dukung Pangan Tahun 2029 di Kota Bogor

No	Kecamatan	Penduduk 2029 (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Juta Kkal)	Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)
1	Kec. Bogor Barat	236.908	92.957	8.477	-84.480
2	Kec. Bogor Selatan	206.886	81.177	8.073	-73.104
3	Kec. Bogor Tengah	97.606	38.298	0	-38.298
4	Kec. Bogor Timur	105.788	41.508	3.318	-38.190
5	Kec. Bogor Utara	189.338	74.292	775	-73.517
6	Kec. Tanah Sereal	221.147	86.773	3.052	-83.721

Sumber: Hasil Analisis, 2024

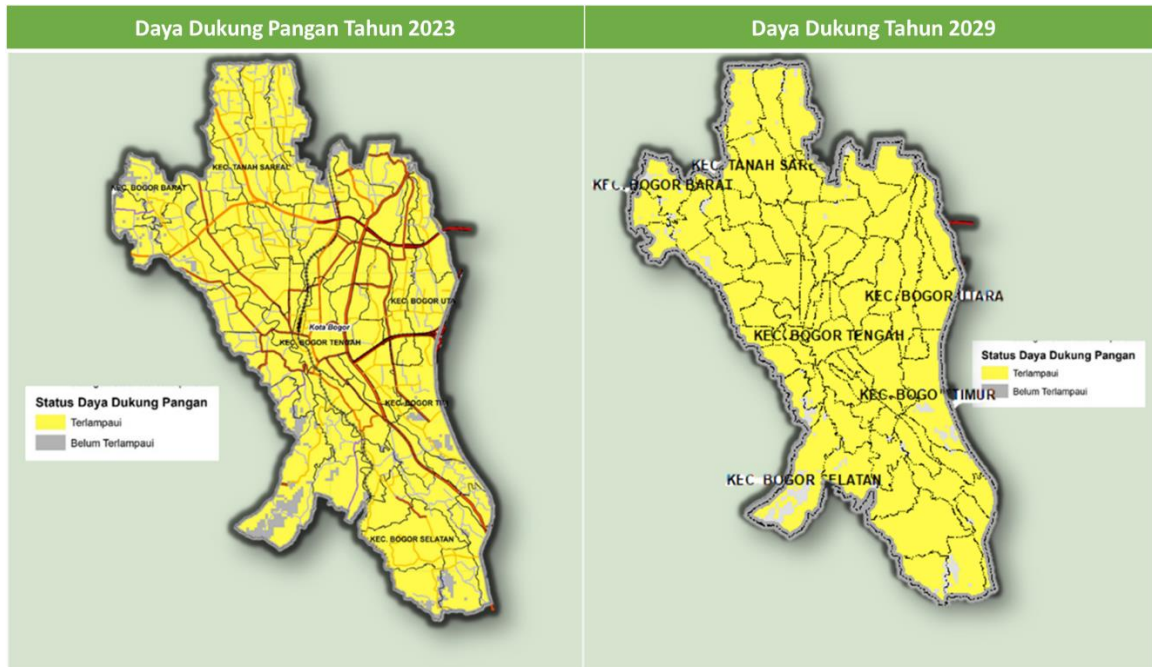




Gambar 3. 22 Peta Kebutuhan Energi Pangan Kota Bogor



Gambar 3. 23 Peta Ketersediaan Energi Pangan Kota Bogor



Gambar 3. 24 Status Daya Dukung Pangan Kota Bogor

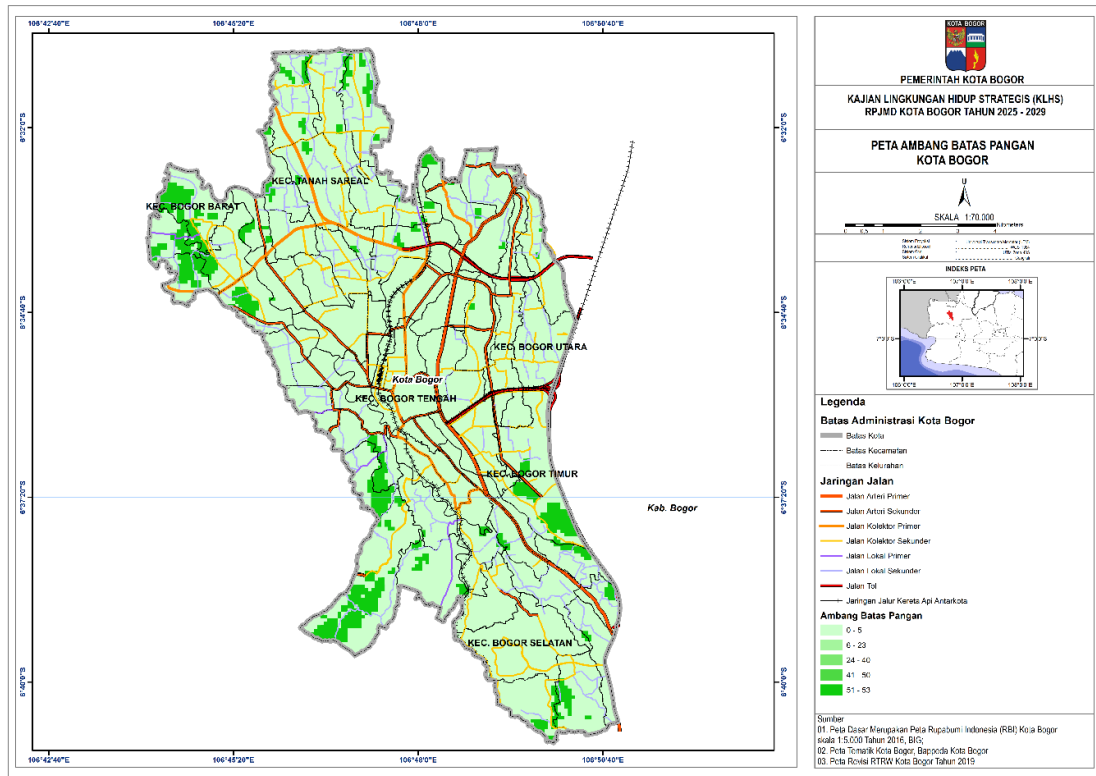
Ambang batas penduduk terhadap ketersediaan pangan dapat dilihat pada Tabel diatas. Ambang batas pangan menunjukkan batas penduduk yang dapat ditampung sesuai dengan kapasitas penyedia pangan di wilayah itu sendiri. Berdasarkan analisis diperoleh bahwa Kecamatan Bogor Barat dapat menampung penduduk sesuai kondisi pangan sebesar 21.605 jiwa sedangkan Kecamatan Bogor Selatan menampung sampai pada 20.574 jiwa. Sementara Kecamatan Bogor Tengah memiliki nilai ambang batas nol untuk pangan berupa

Berdasarkan jumlah penduduk dan ambang batas pangan di setiap kecamatan di Kota Bogor maka diperoleh bahwa seluruh kecamatan telah memiliki status daya dukung pangan terlampaui dengan nilai terlampaui terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Tabel 3. 24 Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas

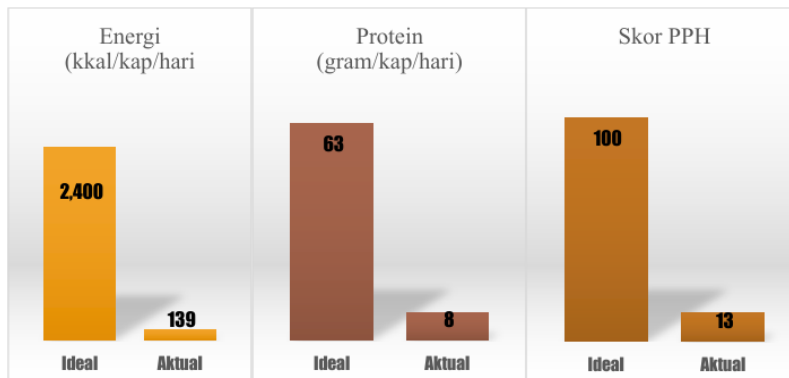
Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Daya Dukung Pangan
Kec. Bogor Barat	236.908	21.605	-215.303	Terlampai
Kec. Bogor Selatan	206.886	20.574	-186.312	Terlampai
Kec. Bogor Tengah	97.606	0	-97.606	Terlampai
Kec. Bogor Timur	105.788	8.456	-97.332	Terlampai
Kec. Bogor Utara	189.338	1.975	-187.363	Terlampai
Kec. Tanah Sareal	221.147	7.779	-213.368	Terlampai

Sumber: Hasil analisis, 2024



Gambar 3. 25 Peta Ambang Batas Pangan Kota Bogor

Lebih lanjut jika dilihat dari kajian Neraca Bahan pangan Kota Bogor Tahun 2023, Produksi pangan di Kota Bogor secara keseluruhan hanya dapat memenuhi 5,8% kecukupan energi ideal (139 kkal/kap/hari) dan 13% dari kecukupan protein (8 gram/kap/hari). Produksi pangan Kota Bogor hanya dapat memberikan kontribusi 13% (skor PPH 13) dari keragaman ketersediaan pangan ideal. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan impor Kota Bogor terhadap wilayah lain untuk memenuhi ketersediaan pangan penduduknya sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3. 26 Tingkat Kemandirian Pangan Kota Bogor Tahun 2022

Namun demikian, jika ditinjau dari segi ketahanan pangan, Kota Bogor memiliki ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya (ketersediaan pangan lebih dari 90% kecukupan energi ideal). Sebagian besar



ketersediaan pangan di Kota Bogor diperoleh dari pasokan pangan dari luar daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 25 Ketersediaan pangan Kota Bogor Tahun 2018-2022

Ketersediaan		2018	2019	2020	2021	2022
Energi	kcal/kap/hr	2.593	2.375	2.230	2.403	2.318
	Tingkat kecukupan (%)	117,9	108,0	92,9	100,1	96,6
Protein	Gram/kap/hr	110,3	68	63,6	81,2	76,4
	Tingkat kecukupan (%)	193,5	119,3	100,9	128,9	121,2

Keterangan:

1. Tahun 2018-2019: AKE = 2200 kkal/kap/hari, AKP = 57 gram/kap/hari

2. Tahun 2020 -2022: AKE = 2400 kkal/kkap/hr, AKP = 63 g/kap/hari

3.6.2.2. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik. sehingga pada akhirnya diperoleh kebutuhan air secara total.

Kebutuhan Air untuk Domestik mengacu kepada Permen Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 dengan perhitungan sebagai berikut.

$$KA_i = P_{ij} \times KHL_i$$

Keterangan:

KA_i : Kebutuhan air domestik untuk grid ke-i (m^3 /tahun)

P_{ij} : Jumlah penduduk pada grid ke-i di kabuapaten j (jiwa)

KHL_i : Nilai kebutuhan hidup layak pada grid ke-i (m^3 /tahun/jiwa)

Kebutuhan air non-domestik diasumsikan sebesar 30% dari kebutuhan domestik dengan kategori Bogor sebagai kota metropolitan. Faktor kehilangan air selama pemakaian diasumsikan sebesar 15% dari total pemakaian air secara domestik dan non-domestik.

Selanjutnya kebutuhan air untuk lahan dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$KLi = A_i \times I \times q$$

Dimana:

KLi : Kebutuhan air lahan untuk grid ke-I (m^3 /tahun)

A_i : Luas area untuk grid ke-i (hektar)

I : Intensitas tanaman musim per tahun (%)

q : Standar penggunaan air sesuai lahan (1liter/detik/Ha)

q : $0,001 m^3$ /detik/ha $\times 3600 \times 24 \times 120$ hari per musim

Angka Perbandingan Umum untuk Padi: Tebu : Palawija adalah 4 : 1,5 : 1

Asumsi perbandingan persawahan: perkebunan : kebun campuran : tegalan/ladang adalah 4 : 1,5 : 1,5 : 1 (Siswanto,2014).



Untuk kebutuhan industri atau area yang digunakan untuk pabrik atau industri yang berupa kawasan industri atau perusahaan : (0,2 – 0,8 liter/detik/ha Triatmodjo (2008) menggunakan 0,4 liter/detik/ha).

Perrhitungan ketersediaan air menggunakan metode rasional yang juag mengacu kepada Permen Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 dengan persamaan sebagai berikut.

$$SA(i) = 10 \times Ci \times Ri \times Ai$$

Dimana:

SA(i) : ketersediaan air (m³/tahun)

Ci : Koefisien limpasan penggunaan lahan grid ke-i

Ai : luas penggunaan lahan grid ke-i (Ha)

Ri : rata-rata aljabar curah hujan tahunan grid ke-i (mm/tahun)

Ai : luas wilayah untuk grid ke-i (ha)

10 : faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Dengan mendapatkan hasil perhitungan kebutuhan dan ketersediaan maka dapat diketahui selisih air melalui persamaan berikut.

$$\text{Selisih Air} = \text{Ketersediaan Air} - \text{Kebutuhan Air}$$

Jika nilai selisih pangan bernilai negatif (-) maka telah terjadi defisit Air

Jika nilai selisih pangan bernilai positif (+) maka memiliki kondisi surplus air

Jika nilai selisih pangan bernilai nol (0) maka sumberdaya air telah mencapai ambang batas.

Selanjutnya dilakukan perhitungan ambang batas air menunjukkan jumlah penduduk (kapita) yang dapat ditampung sesuai kemampuannya dalam menyediakan air di wilayah tersebut.

$$ABA_{\text{Air}} = \frac{SA(i) - q_i}{\text{Kebutuhan Air Hidup Layak}}$$

SA(i) : Ketersediaan air total (m³/tahun)

qi : Kebutuhan air untuk pertanian (m³/tahun/kapita)

ABA_{Air} : Ambang Batas Air untuk grid ke-i (Kapita)

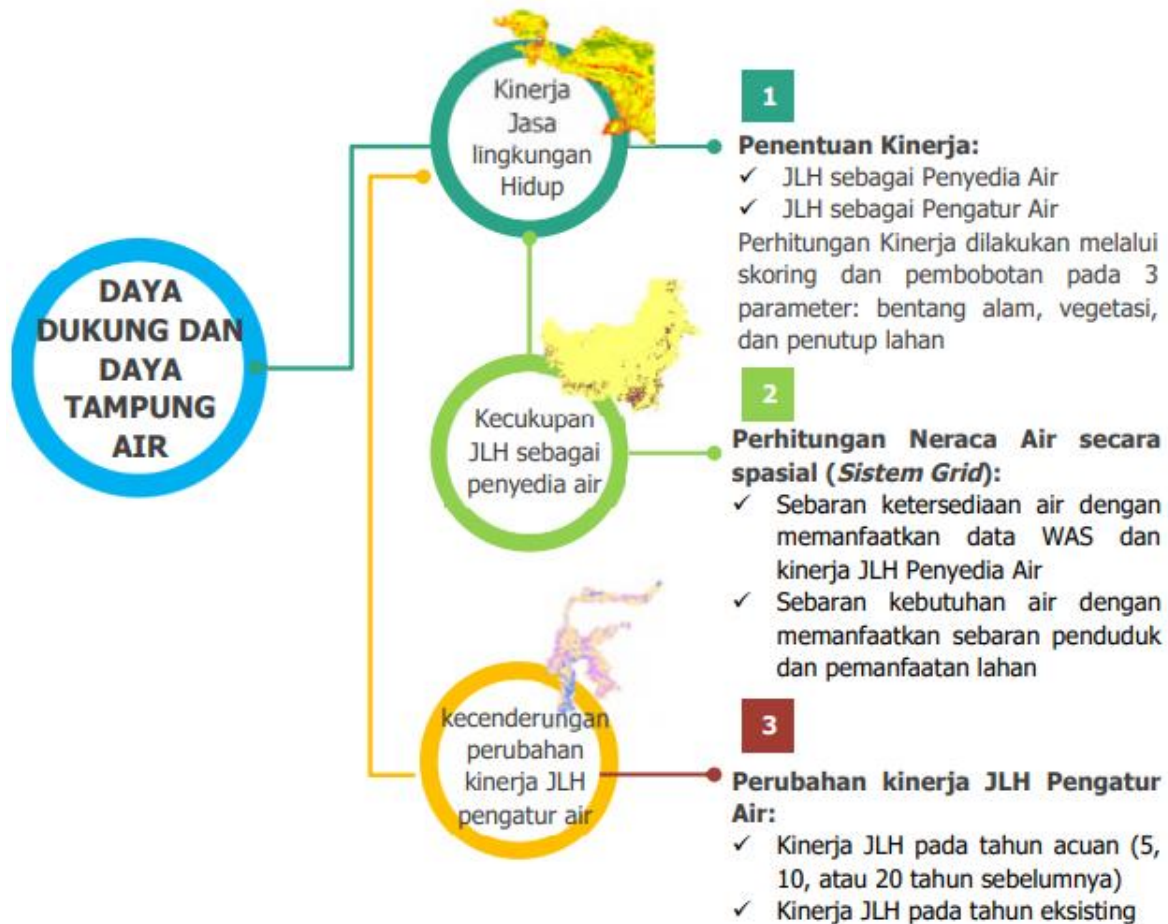
Selanjutnya dapat dihitung daya dukung air terhadap status ambang batas air yang menunjukkan kondisi penduduk apakah sudah/belum melewati kemampuan air dalam menyediakan sumber daya air dalam kehidupan sehari-hari.

$$\text{Status AB Air} = \text{AB Air (kapita)} - \text{Jumlah Penduduk(kapita)}$$

Jika status AB Air bernilai positif (+) maka penambahan jumlah penduduk (kapita) dalam jumlah tertentu masih dapat didukung oleh ketersediaan air

Jika status AB Pangan bernilai negatif (-) maka jumlah penduduk saat ini sudah tidak dapat didukung oleh ketersediaan air

Jika status AB Pangan bernilai nol (0) maka jumlah penduduk sudah mencapai ambang batas untuk ketersediaan air.



Asumsi yang digunakan dalam proses perhitungan kebutuhan air domestik adalah dengan cara mengkalikannya dengan angka KHL sebesar 43,2 m³/tahun/kapita (standar kebutuhan air hidup layak) dan angka 2 sebagai factor koreksi. Kebutuhan air non-domestik diasumsikan sebesar 30% dari kebutuhan domestik dengan kategori Bogor sebagai kota metropolitan. Faktor kehilangan air selama pemakaian diasumsikan sebesar 15% dari total pemakaian air secara domestik dan non-domestik.

Total kebutuhan air di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.15 dimana Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 29.433.430 m³/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 27.909.799 m³/tahun dan Kecamatan Tanah Sereal sebesar 24.464.734 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7.998.770 m³/tahun.

Berdasarkan analisa kebutuhan air diatas, memang secara populasi penduduk menunjukkan bahwa kebutuhan di Kecamatan Bogor Barat lebih besar dibandingkan Kecamatan Bogor Selatan, namun pada Kecamatan Bogor Selatan juga dibutuhkan air dalam jumlah yang lebih besar tidak hanya untuk keperluan domestik dan non-domestik tetapi juga untuk mengairi lahan pertanian yang masih ada di kecamatan tersebut.



Tabel 3. 26 Kebutuhan Air Tahun 2023 di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Non-Domestik (m ³ /Tahun)	Kehilangan Air (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Untuk Lahan (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	12.791.626	3.837.488	2.494.367	8.786.319	27.909.799
Kec. Bogor Selatan	204.030	11.170.643	3.351.193	2.178.275	12.733.319	29.433.430
Kec. Bogor Tengah	96.258	5.270.126	1.581.038	1.027.674	119.933	7.998.770
Kec. Bogor Timur	104.327	5.711.903	1.713.571	1.113.821	3.643.664	12.182.959
Kec. Bogor Utara	186.724	10.223.139	3.066.941	1.993.512	5.721.953	21.005.546
Kec. Tanah Sareal	218.094	11.940.647	3.582.194	2.328.426	6.613.468	24.464.734

Sumber: Hasil analisis, 2024

Total kebutuhan air di Kota Bogor tahun 2029 sebesar 120.426 ribu m³/thn, Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 28.930 m³/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 27.334 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7.761 m³/tahun.

Tabel 3. 27 Kebutuhan Air Tahun 2029 di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Non-Domestik (m ³ /Tahun)	Kehilangan Air (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Untuk Lahan (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)
Kec. Bogor Barat	236.908	12.970.709	3.891.213	1.686.192	8.786.319	27.334.432
Kec. Bogor Selatan	206.886	11.327.031	3.398.109	1.472.514	12.733.319	28.930.974
Kec. Bogor Tengah	97.606	5.343.907	1.603.172	694.708	119.933	7.761.720
Kec. Bogor Timur	105.788	5.791.870	1.737.561	752.943	3.643.664	11.926.038
Kec. Bogor Utara	189.338	10.366.263	3.109.879	1.347.614	5.721.953	20.545.709
Kec. Tanah Sareal	221.147	12.107.816	3.632.345	1.574.016	6.613.468	23.927.644

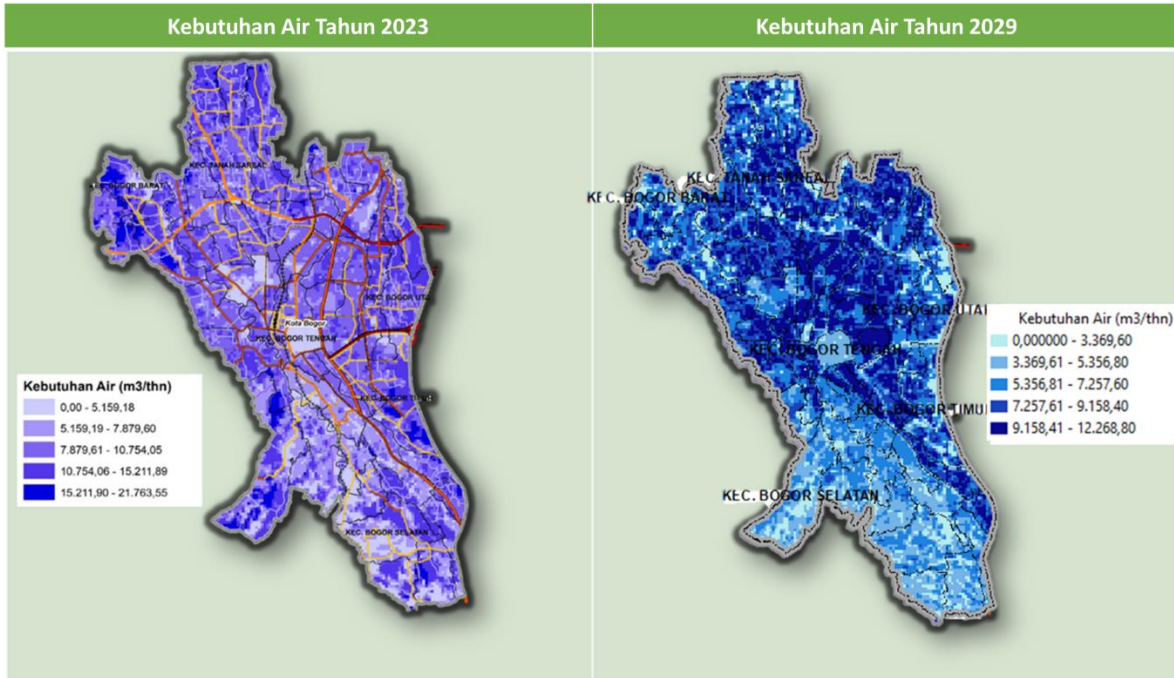
Sumber: Hasil analisis, 2024

Ketersediaan air di Kota Bogor diperoleh melalui analisis ketersediaan air berbasis zona DAS dan berbasis jasa ekosistem di Kota Bogor. Hasil perhitungan ketersediaan air dapat dilihat pada tabel 3.23 berikut. Ketersediaan air terbesar dari seluruh kecamatan di Kota Bogor dalam satu tahun terdapat di Kecamatan Bogor Selatan yaitu 42.120.077 m³. Sedangkan ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 11.690.708 m³/tahun.

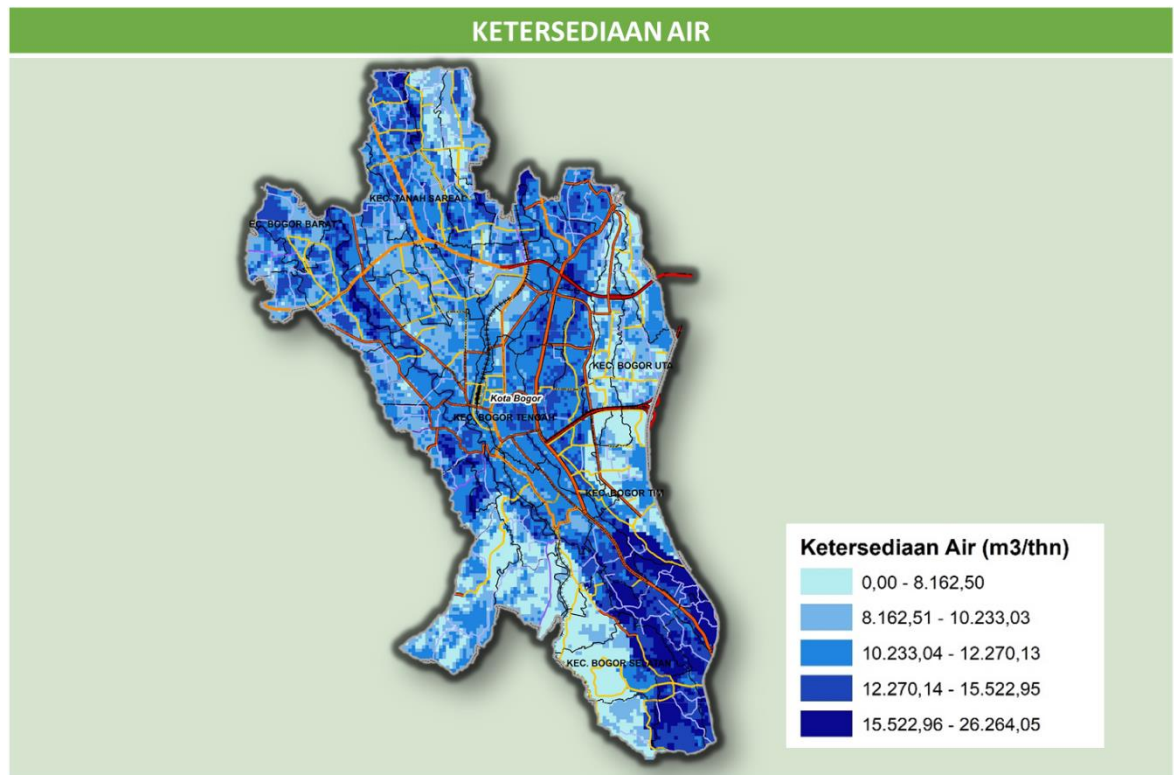
Tabel 3. 28 Ketersediaan Air di Kota Bogor

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)
Kec. Bogor Barat	33.368.580
Kec. Bogor Selatan	42.120.077
Kec. Bogor Tengah	11.690.708
Kec. Bogor Timur	16.472.101
Kec. Bogor Utara	23.532.315
Kec. Tanah Sareal	28.215.326

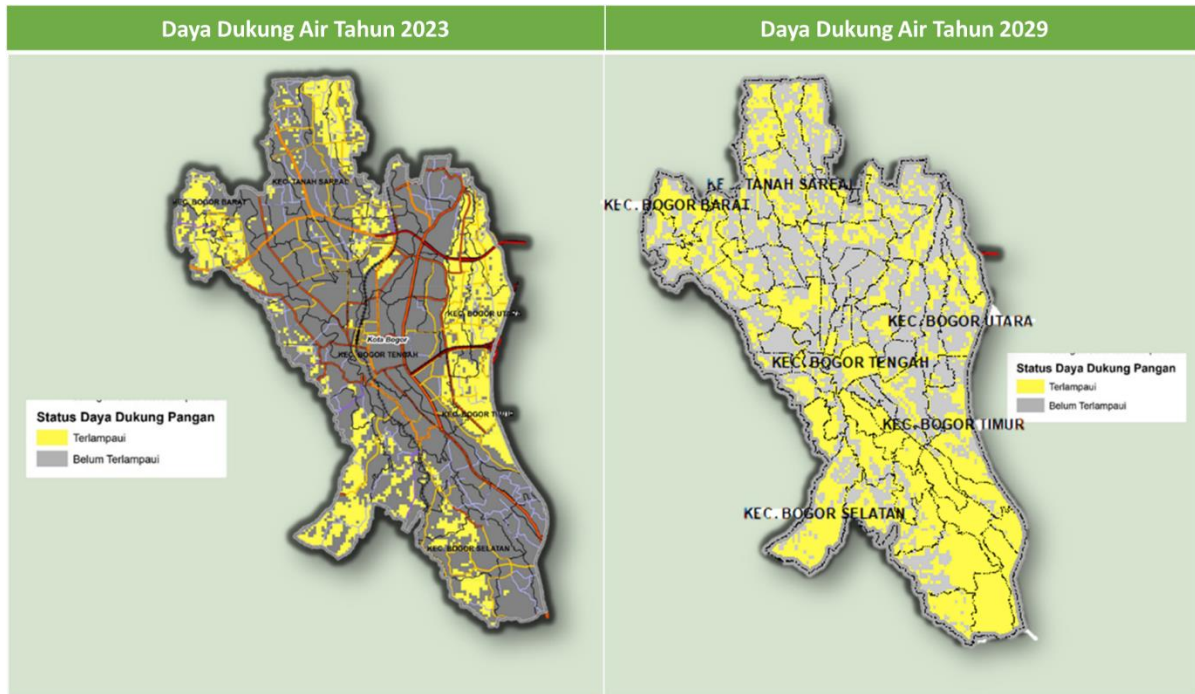
Sumber: Hasil analisis, 2023



Gambar 3. 27 Peta Kebutuhan Air Kota Bogor



Gambar 3. 28 Peta Ketersediaan Air Kota Bogor



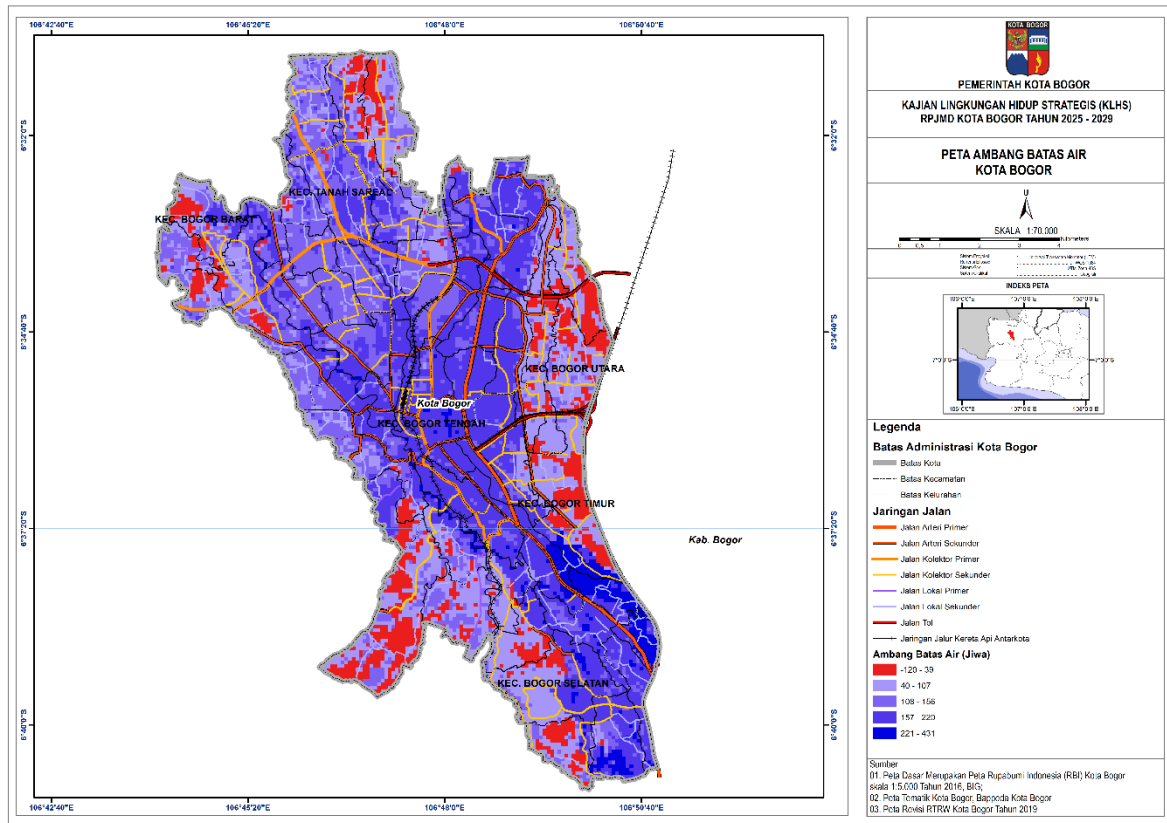
Gambar 3. 29 Peta Status Daya Dukung Air Kota Bogor

Selanjutnya, status daya dukung air tahun 2023 secara keseluruhan di Kota Bogor masih belum terlampau, dengan penambahan penduduk sampai tahun 2029 dan berbanding lurus dengan kebutuhan domestik dan non domestik. Terlihat selisih ketersediaan air sampai tahun 2029 belum terlampau. Total kebutuhan paling banyak adalah kecamatan Bogor Selatan sebesar 28.930.974,04 m³/thn, namun ketersediaan juga termasuk pada kecamatan yang paling besar sebesar 42.120.077,12 m³/thn.

Tabel 3. 29 Status Daya Dukung Air Terhadap Ambang Batas

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /thn)	Tahun 2023		Tahun 2029	
			Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)	Selisih Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)	Selisih Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)
1	Kec. Bogor Barat	33.368.579,70	27.909.798,89	5.458.780,81	27.334.432,17	6.034.147,53
2	Kec. Bogor Selatan	42.120.077,12	29.433.429,65	12.686.647,48	28.930.974,04	13.189.103,08
3	Kec. Bogor Tengah	11.690.708,47	7.998.770,43	3.691.938,04	7.761.720,38	3.928.988,09
4	Kec. Bogor Timur	16.472.101,29	12.182.959,14	4.289.142,15	11.926.037,95	4.546.063,34
5	Kec. Bogor Utara	23.532.314,84	21.005.545,82	2.526.769,02	20.545.709,01	2.986.605,83
6	Kec. Tanah Sareal	28.215.325,56	24.464.733,65	3.750.591,91	23.927.644,24	4.287.681,32
Total		155.399.107	122.995.238	32.403.869	175.439.706	120.426.517,79

Sumber: Hasil analisis, 2024



Gambar 3. 30 Peta Ambang Batas Air Kota Bogor

3.6.3. Prakiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

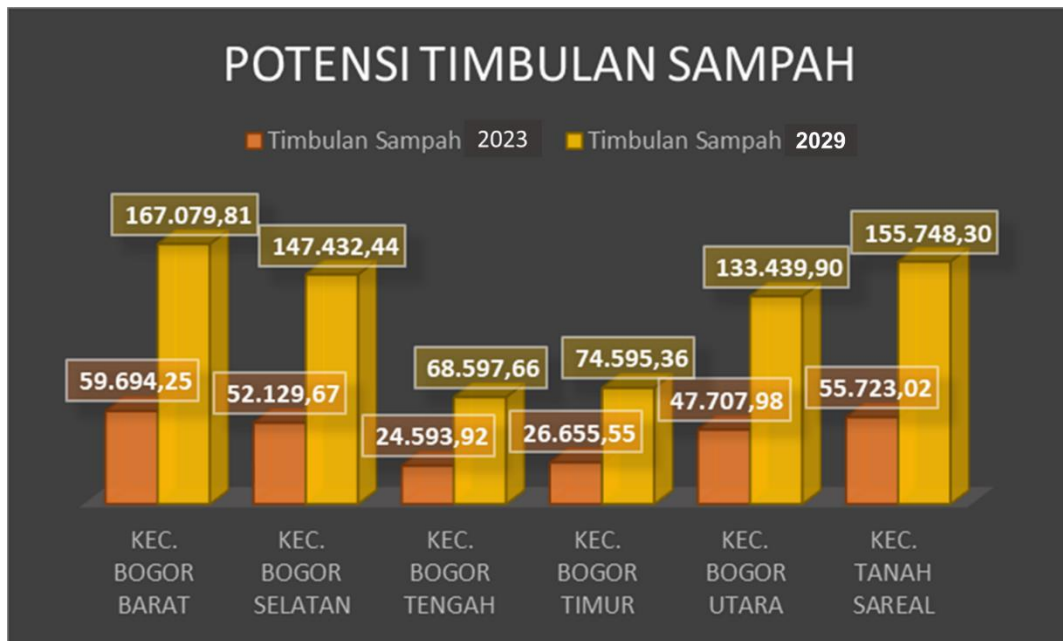
3.6.3.1. Dampak Resiko Timbulan Sampah

Kota Bogor sebagai kota besar tentunya tidak akan terlepas dari masalah sampah mengingat jumlah dan kepadatan penduduknya tinggi. Perhitungan potensi timbulan sampah menggunakan standar 0,7 kg/orang/hari dan distribusi jumlah penduduk tahun 2021 dalam setiap kecamatan dalam satu tahun. Sampah Kota Bogor secara eksisting diangkut ke TPA Galuga. Kondisi capaian tahun 2022 sebesar 81,32% telah memenuhi target sampah perkotaan tertangani Potensi timbulan sampah di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel berikut

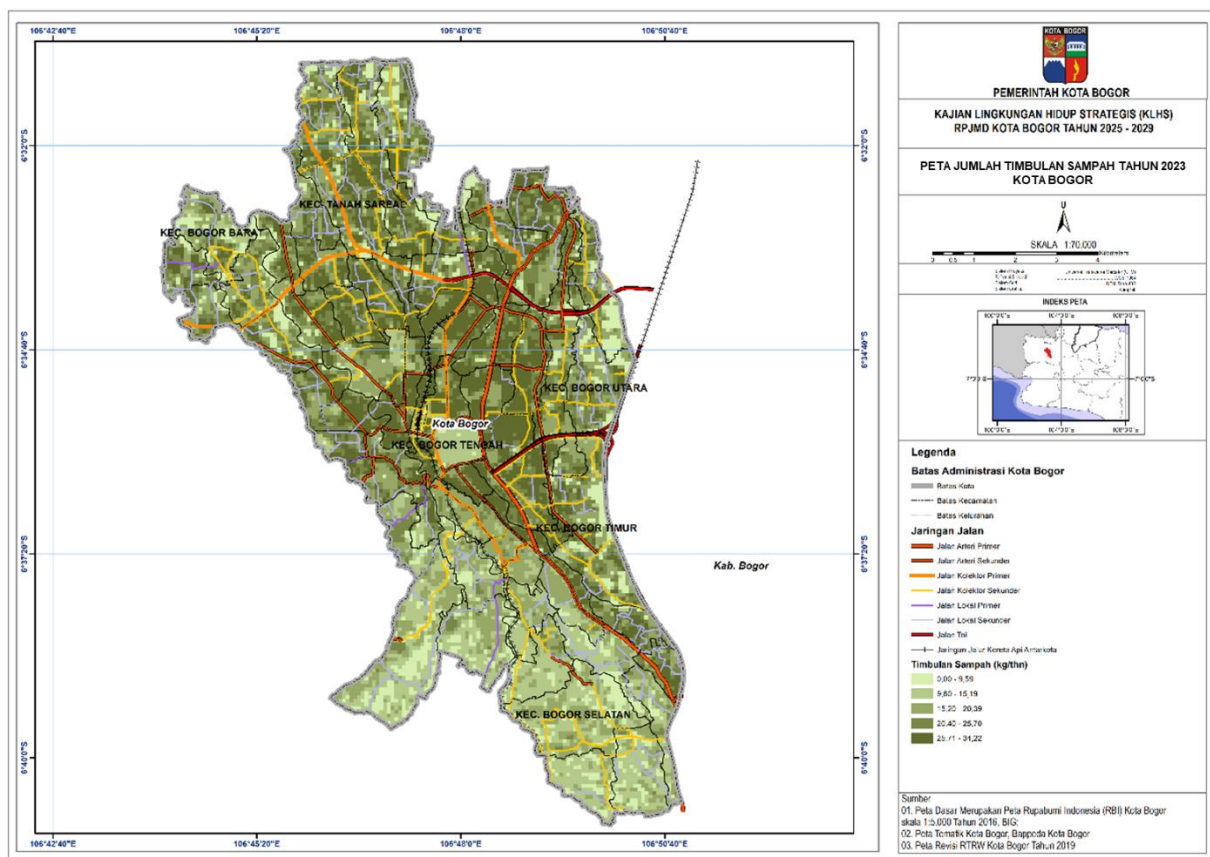
Tabel 3. 30 Potensi Timbulan Sampah Tahun 2023 di Kota Bogor

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	59.694
Kec. Bogor Selatan	204.030	52.130
Kec. Bogor Tengah	96.258	24.594
Kec. Bogor Timur	104.327	26.656
Kec. Bogor Utara	186.724	47.708
Kec. Tanah Sareal	218.094	55.723

Sumber: hasil analisis, 2024



Potensi timbulan sampah terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat sebesar 59.694 ton/tahun. Sedangkan timbulan sampah terkecil dari seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Tengah sebesar 24.594 ton/tahun. Distribusi sumber timbulan sampah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3. 31 Peta Potensi Timbulan Sampah Kota Bogor



3.6.3.2. Dampak Resiko Timbulan Air Limbah

Analisis dampak risiko lingkungan hidup dihitung berdasarkan potensi pencemar yang dihasilkan oleh penduduk yang terdapat di Kota Bogor. Pada analisis perhitungan secara spasial berdasarkan analisis distribusi penduduk yang telah diperoleh pada bagian sebelumnya. Dalam menghitung beban pencemaran menggunakan referensi dari Permen Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2010 untuk parameter BOD, COD, Total Nitrat (TN), dan Total Posfor (TP).

Potensi beban pencemar air sungai yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS dengan mempertimbangkan potensi beban pencemar domestik, pertanian, dan lahan. Dalam perhitungannya, potensi beban pencemar mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jarak lokasi terhadap sungai, kondisi lingkungan seperti daerah perkotaan atau pinggiran kota, dan jenis tutupan lahan. Potensi beban pencemar total merupakan hasil dari akumulasi beban pencemar domestik, beban pencemar pertanian, dan beban pencemar penggunaan lahan di suatu wilayah. Persamaan berikut menunjukkan perhitungan potensi beban pencemar total.

$$PBP_{total} = PBP_{dom} + PBP_{tani} + PBP_{lahan}$$

Dengan PBP_{total} adalah nilai potensi beban pencemar total, PBP_{dom} adalah nilai potensi beban pencemar domestik; PBP_{tani} adalah nilai potensi beban pencemar pertanian; dan PBP_{lahan} adalah nilai potensi beban pencemar penggunaan lahan.

Potensi Beban Pencemar Domestik

Pada perhitungan potensi beban pencemar domestik, jumlah dari populasi di suatu kawasan sangat berpengaruh. Nilai potensi tersebut dihitung dengan menggunakan persamaan berikut

$$PBP_{dom} = P_i \times F_e \times R_e \times \alpha$$

Dengan, PBP_{dom} adalah besar beban pencemar domestik pada grid i ; P_i adalah jumlah populasi pada grid i ; F_e adalah faktor emisi penduduk terhadap jenis beban pencemar; R_e adalah rasio ekivalen suatu wilayah; dan α adalah koefisien transfer beban yang nilainya bergantung pada jarak terhadap sungai. Nilai koefisien dari F_e , R_e , dan α untuk domestik tercantum pada tabel berikut.

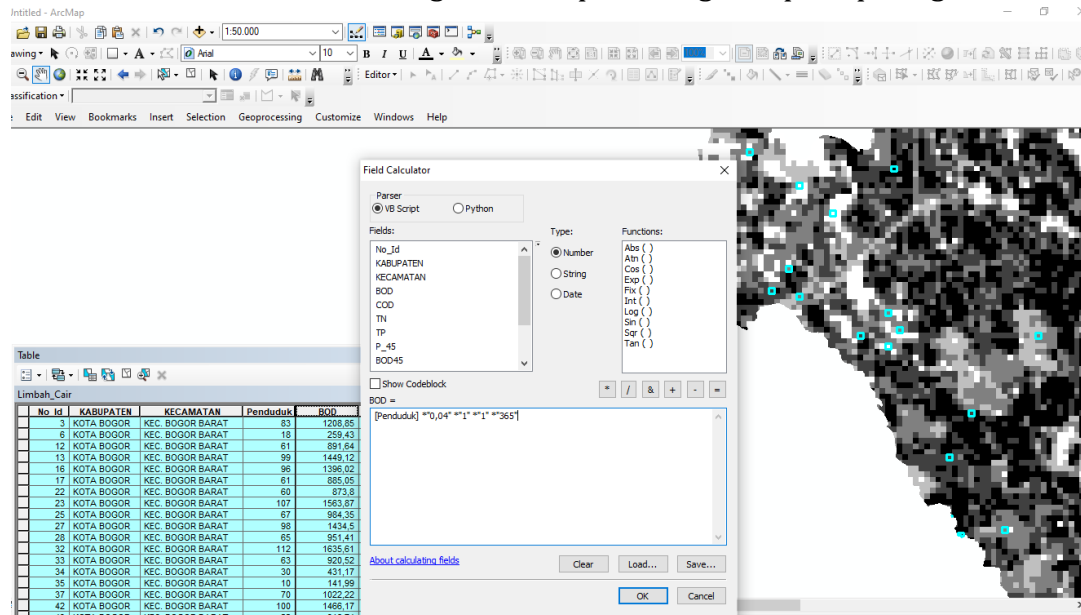
Faktor Emisi		Rasio Ekivalen Wilayah		Jarak Terhadap Sungai	
Zat Pencemar	Fe (kg/org/hr)	Jenis	Re	Jarak (m)	α
BOD	0,04	Kota	1	0-100	1
COD	0,055	Pinggiran Kota	0,8125	100-500	0,85
TSS	0,038	Pedalaman	0,625	>500	0,3

Sumber : Ananda (2017)

Perhitungan di lakukan dalam software Arcmap dihitung persatuan grid penduduk, nanti hasil perhitungan dilakukan perjumlahan setiap grid



berdasarkan batas administrasi kecamatan untuk menghasilkan nilai dari total BOD, COD, TN dan TP. Sebagai contoh perhitungan seperti pada gambar berikut :



Keterangan : Grid yang menyala warna biru merupakan contoh grid yang dihitung di Kecamatan Bogor Barat, grid tersebut merupakan penjabaran penduduk di wilayah tersebut.

Parameter pencemar pada limbah cair yang dianalisis dalam kajian ini adalah Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total nitrogen (TN) dan total posfor (TP). Dasar analisis perhitungan terhadap parameter pencemar limbah cair berdasarkan jumlah penduduk sehingga diperoleh bahwa Kecamatan Bogor Barat memiliki potensi yang besar dibandingkan kecamatan lain dalam menghasilkan limbah cair. Dalam satu tahun untuk Kecamatan Bogor Barat, jumlah BOD adalah 4.519.708 kg, jumlah COD adalah 8.664.195 kg, jumlah TN adalah 1.935.799 Kg dan Jumlah TP adalah 324.055 kg. Sedangkan Kecamatan Bogor Tengah memiliki tingkat potensi beban pencemar lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

Tabel 3. 31 Analisis Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP

Kecamatan	Penduduk 2023 (Jiwa)	BOD (Kg/Tahun)	COD (Kg/Tahun)	Total Nitrogen (Kg/Tahun)	Total Posfor (Kg/Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	4.519.708	8.664.195	1.935.799	324.055
Kec. Bogor Selatan	204.030	3.946.960	7.566.249	1.690.491	282.990
Kec. Bogor Tengah	96.258	1.862.111	3.569.632	797.546	133.510
Kec. Bogor Timur	104.327	2.018.206	3.868.862	864.401	144.702
Kec. Bogor Utara	186.724	3.612.176	6.924.473	1.547.102	258.986
Kec. Tanah Sareal	218.094	4.219.028	8.087.798	1.807.018	302.496

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dari hasil analisis, wilayah Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan dengan potensi timbulan beban pencemar paling tinggi, dimana potensi beban pencemar BOD sebesar 4.617.370 kg/th, COD sebesar 8.851.411 kg/th, TN sebesar

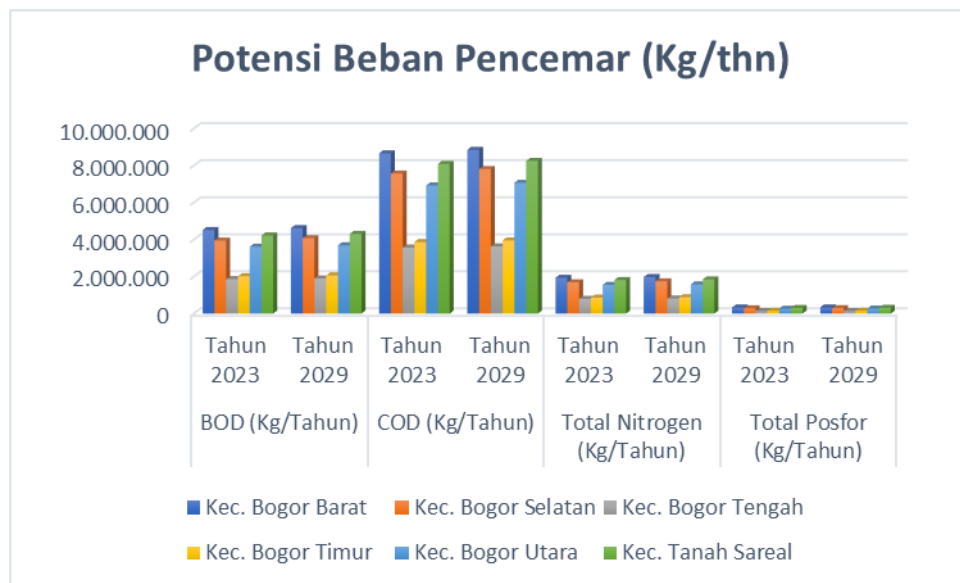


1.977.628 Kg/th dan TP sebesar 331.057 kg/th. Sedangkan Kecamatan Bogor Tengah memiliki tingkat potensi beban pencemar lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

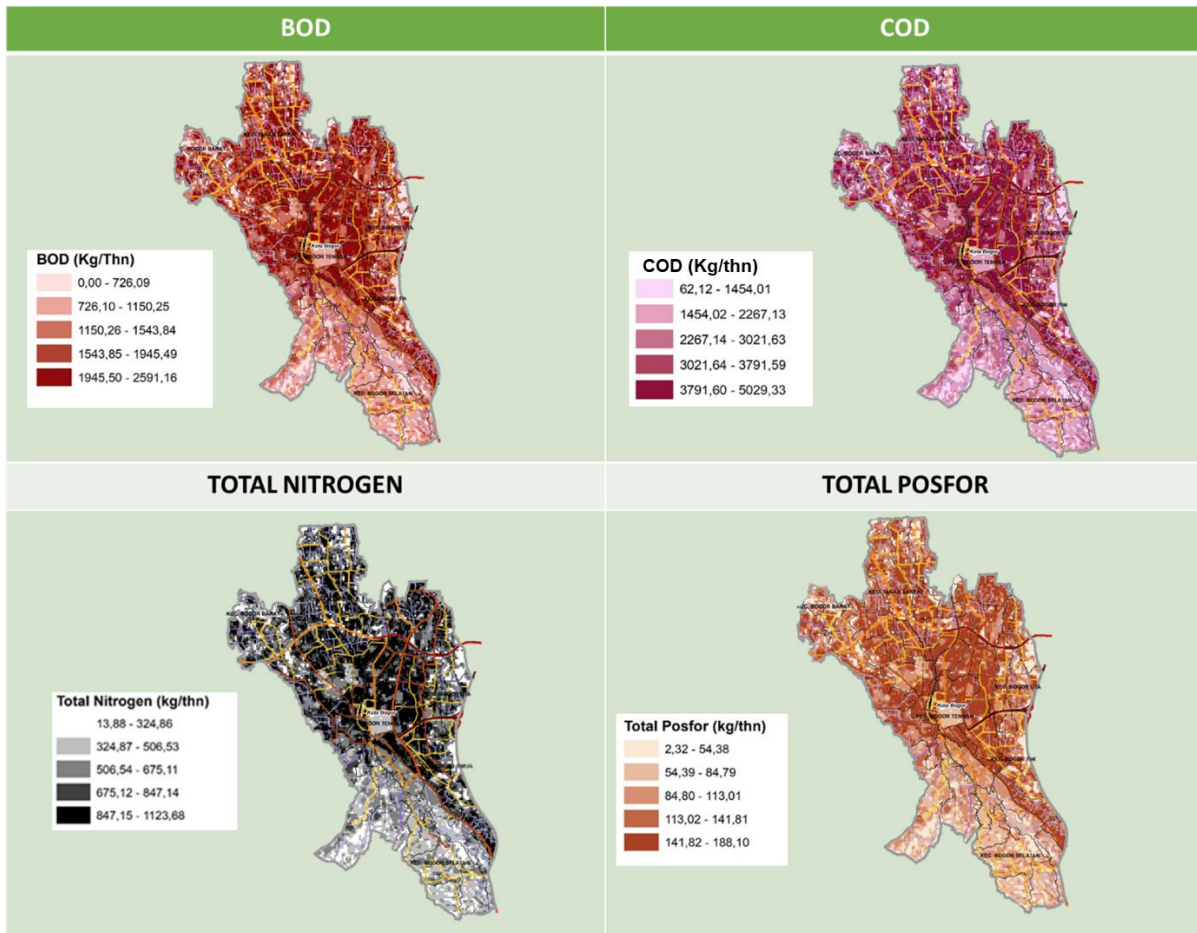
Tabel 3. 32 Analisis Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP Tahun 2029

Kecamatan	Penduduk Tahun 2045 (Jiwa)	BOD (Kg/Tahun)	COD (Kg/Tahun)	Total Nitrogen (Kg/Tahun)	Total Posfor (Kg/Tahun)
Kec. Bogor Barat	238.685	4.617.370	8.851.411	1.977.628	331.057
Kec. Bogor Selatan	210.618	4.074.401	7.810.550	1.745.074	292.127
Kec. Bogor Tengah	97.997	1.895.745	3.634.108	811.951	135.921
Kec. Bogor Timur	106.565	2.061.496	3.951.849	882.943	147.805
Kec. Bogor Utara	190.628	3.687.707	7.069.265	1.579.452	264.402
Kec. Tanah Sareal	222.498	4.304.216	8.251.100	1.843.504	308.604

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3. 32 Potensi beban pencemar BOD, COD, TP dan TN per Kecamatan hingga 2029



Gambar 3. 33 Peta Analisis Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP

Jika dilihat dari hasil analisis diatas, salah satu yang perlu menjadi perhatian terkait beban pencemar ialah pada parameter BOD. Hal tersebut mengingat penetapan daya tampung beban pencemar wilayah sungai Ciliwung-Cisadane yang melintasi wilayah Kota Bogor. Penetapan daya tampung untuk sungai Ciliwung dan Cisadane yang melintasi Kota Bogor telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 298/2017 dan No 299/2017.

Untuk Sungai Ciliwung yang melintasi Kota Bogor, pada Lampiran III Kepmen LHK No: SK.298/Menlhk/Setjen/PKL.1/ 6/2017 tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Ciliwung. Wilayah Kota Bogor ditetapkan dalam Segmen 2. Didalam Lampiran I disampaikan bahwa daya tampung beban pencemar BOD untuk Sungai Ciliwung yang melintasi Kota Bogor adalah sebesar 121,88 kg/hari.

Sedangkan untuk Sungai Cisadane yang melintasi Kota Bogor, pada Lampiran III Kepmen LHK No: SK.299/Menlhk/Setjen/PKL.1/ 6/2017 tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Cisadane. Wilayah Kota Bogor Ditetapkan dalam Segmen 2. Didalam Lampiran I disampaikan bahwa daya tampung beban pencemar BOD untuk Sungai Cisadane yang melintasi Kota Bogor adalah sebesar 1.036,80 kg/hari.



Jika dilihat dari kedua SK tersebut, maka daya tampung secara keseluruhan untuk beban pencemar BOD ialah sebesar 1.158,68 kg/hari. Sedangkan potensi beban pencemar BOD yang dihasilkan pada akhir tahun rencana (2029) ialah sebesar 56.862,08 kg/hari. maka dari itu diperlukan upaya-upaya perbaikan terhadap tata kelola air limbah guna meminimalisir beban pencemar dan mencapai target baku mutu air kelas II untuk sungai Ciliwung dan Cisadane yang melintasi Kota Bogor.

3.6.4. Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu: jasa ekosistem penyedia, pengaturan, kultural, dan pendukung; yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-jenis/kelompok (Tabel 2.37).

- a. Layanan penyedia (provisioning services): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll.
- b. Layanan pengaturan (regulating services): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.
- c. Layanan kultural (cultural services): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan pendukung (supporting services): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Tabel 3. 33 Klasifikasi Jasa Lingkungan

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami



No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar "kampung halaman" yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (Supporting)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2011

Adapun dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029, akan lebih difokuskan pada:

- Jasa Ekosistem Penyedia Pangan
- Jasa Ekosistem Penyedia Air
- Jasa Ekosistem Tata Aliran air dan Banjir
- Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

3.6.4.1. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan kinerja ekosistem dalam menyediakan kebutuhan energi pangan di Kota Bogor. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di setiap kecamatan cukup beragam. Jika dilihat secara keseluruhan, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Barat memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi dengan luasan mencapai 226,81 ha dan 147,24 ha dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, hal ini terkait dengan jenis penggunaan lahan sawah yang masih produktif di dua kecamatan tersebut.

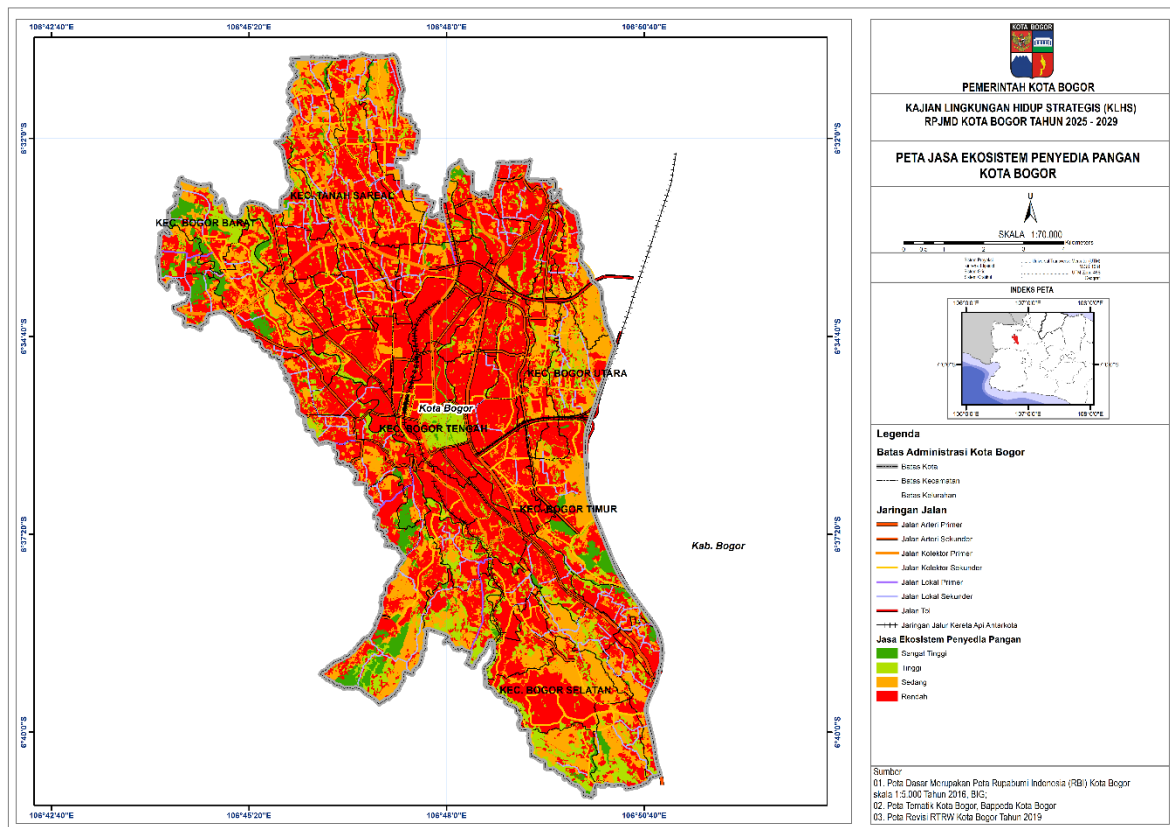


Sementara itu, Kecamatan Bogor Tengah hanya memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi hanya seluas 15,06Ha. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan dan masing-masing luasannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 34 Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan				Total (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Bogor Barat	1.366,42	493,64	244,68	226,81	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	1.524,02	866,77	512,11	147,24	3.050,13
3	Kec. Bogor Tengah	661,53	23,29	136,79	15,06	836,67
4	Kec. Bogor Timur	648,48	220,25	109,07	70,20	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	1.102,87	492,96	179,66	36,65	1.812,15
6	Kec. Tanah Sareal	1.331,52	536,78	139,49	52,23	2.060,01
Total (ha)		6.634,83	2.633,68	1.321,81	548,19	11.138,51

Peta nilai sebaran tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 3.29. Secara umum dapat diketahui bahwa jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Bogor dalam kelas rendah.



Gambar 3. 34 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kota Bogor



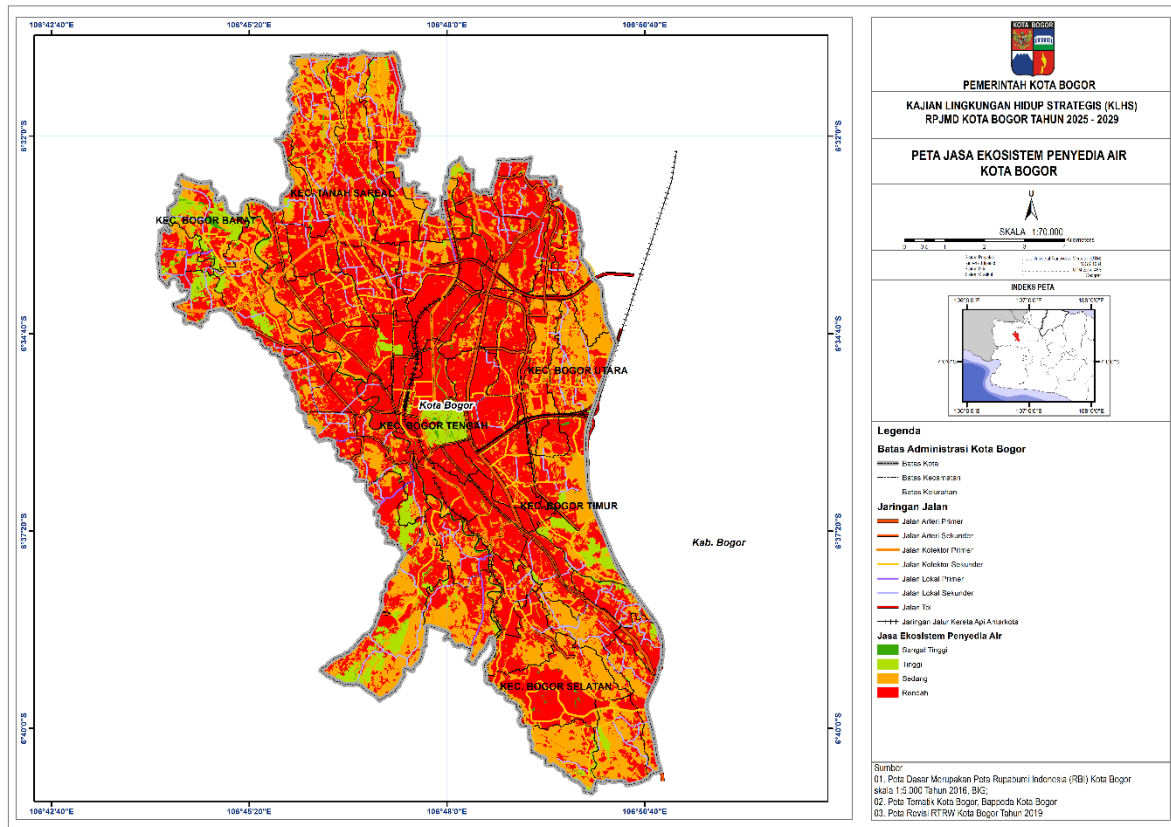
3.6.4.2. Jasa Ekosistem Penyedia Air

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan kemampuan atau kinerja ekosistem dalam menyediakan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan dengan cakupan wilayah berkisar 74,81 dan 44,64 Ha. Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan maka kelas jasa ekosistem penyedia air di Kota Bogor tergolong tinggi terkait dengan tingginya potensi hujan di kota tersebut. Meskipun demikian potensi hujan yang tinggi juga akan membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga potensi yang ada tidak menjadi sebuah bencana berupa banjir.

Tabel 3. 35 Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih				Total (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Bogor Barat	1.366,42	671,37	218,95	74,81	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	1.524,02	1.324,45	157,02	44,64	3.050,13
3	Kec. Bogor Tengah	661,53	48,14	108,17	18,83	836,67
4	Kec. Bogor Timur	648,49	289,95	93,26	16,30	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	1.102,87	653,54	28,45	27,30	1.812,15
6	Kec. Tanah Sareal	1.331,52	657,62	45,95	24,92	2.060,01
Total (ha)		6.634,84	3.645,07	651,80	206,80	11.138,51

Luas wilayah berdasarkan nilai indeks jasa ekosistem penyedia air bersih di setiap kecamatan di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.31. Sedangkan peta sebaran tingkat jasa ekosistem penyedia air dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 35 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Bogor

3.6.4.3. Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir

Ekosistem dapat berfungsi sebagai pengatur tata aliran air sehingga fungsi-fungsi aliran alami dari ekosistem sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengaruh penggunaan lahan pun tidak bisa dihindari yang akan berdampak pada kinerja ekosistem dalam menjaga tata aliran air. Fungsi ekosistem yang rendah dalam mengatur tata aliran air akan memberikan potensi yang besar untuk terjadinya banjir jika kondisi hidrometeorologinya mendukung.

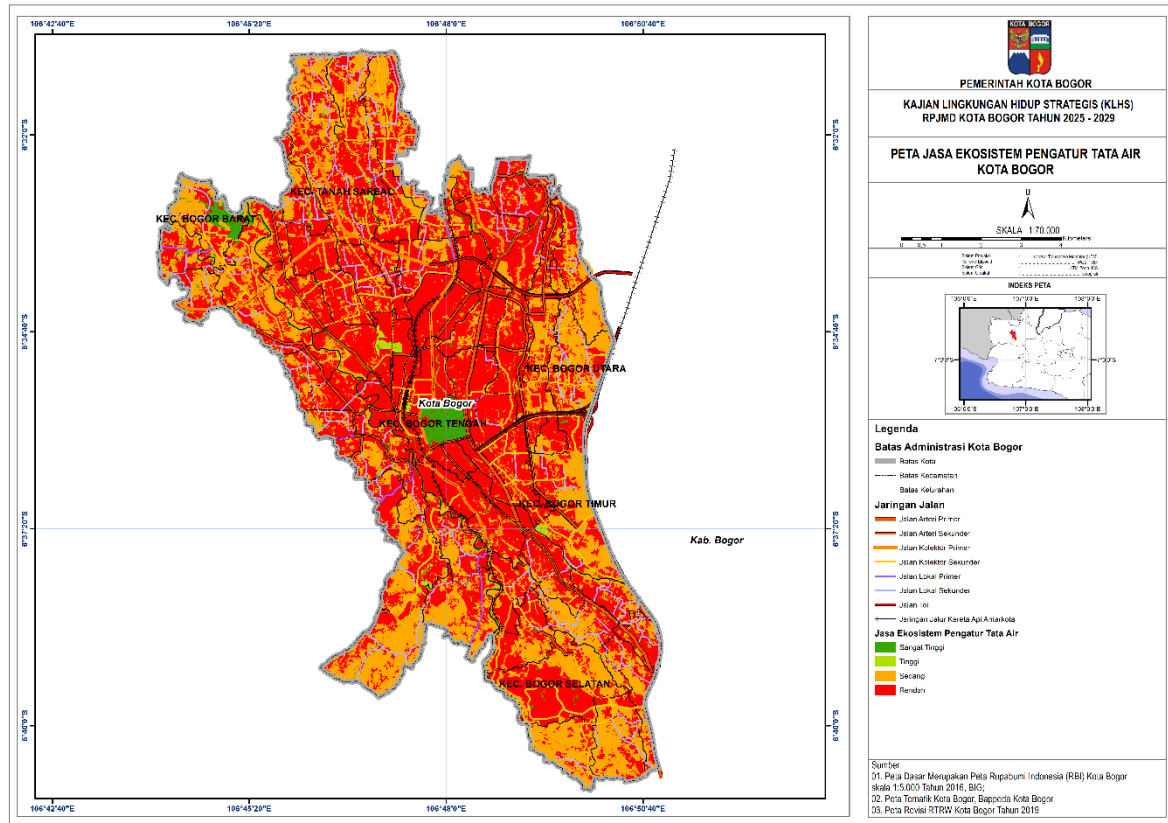
Tabel 3. 36 Indeks Jasa Ekosistem Pengatur tata Air

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir				Total (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Bogor Barat	1.366,42	826,15	19,10	119,87	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	1.524,02	1.460,99	20,48	44,64	3.050,13
3	Kec. Bogor Tengah	661,53	48,14	12,11	114,89	836,67
4	Kec. Bogor Timur	648,28	355,38	28,03	16,30	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	1.102,87	662,90	19,09	27,30	1.812,15
6	Kec. Tanah Sareal	1.331,52	684,92	18,65	24,92	2.060,01
Total (ha)		6.634,64	4.038,48	117,45	347,93	11.138,51

Kota Bogor memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi sehingga sangat menjadi perhatian penting untuk mengetahui kondisi jasa ekosistemnya dalam mengatur tata aliran air dan mencegah banjir. Berdasarkan hasil analisis, jasa



ekosistem pengatur tata aliran air di Kota Bogor didominasi oleh tingkat jasa ekosistem yang sangat rendah dalam mengatur tata air dan mencegah banjir. Detail kelas jasa ekosistem ini dalam setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.32. Sedangkan peta sebaran jasa ekosistem pengatur air dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 36 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air Kota Bogor

3.6.4.4. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Jasa ekosistem pengatur iklim merupakan fungsi ekosistem dalam menjaga kondisi iklim dari perubahan iklim secara ekstrim akibat pemanasan global. Tutupan vegetasi merupakan salah satu faktor dominan yang akan menentukan apakah ekosistem memiliki fungsi yang baik dalam mengatur iklim dengan salah fungsinya adalah menyerap karbon sebagai salah satu faktor terjadinya peningkatan suhu udara secara global.

Kota Bogor sebagai wilayah perkotaan akan berpotensi besar dalam memberikan pengaruh pemanasan global akibat meningkatnya fungsi lahan terbangun dan aktivitas masyarakat kota dalam penggunaan energi yang pada akhirnya menghasilkan emisi dan buangan.

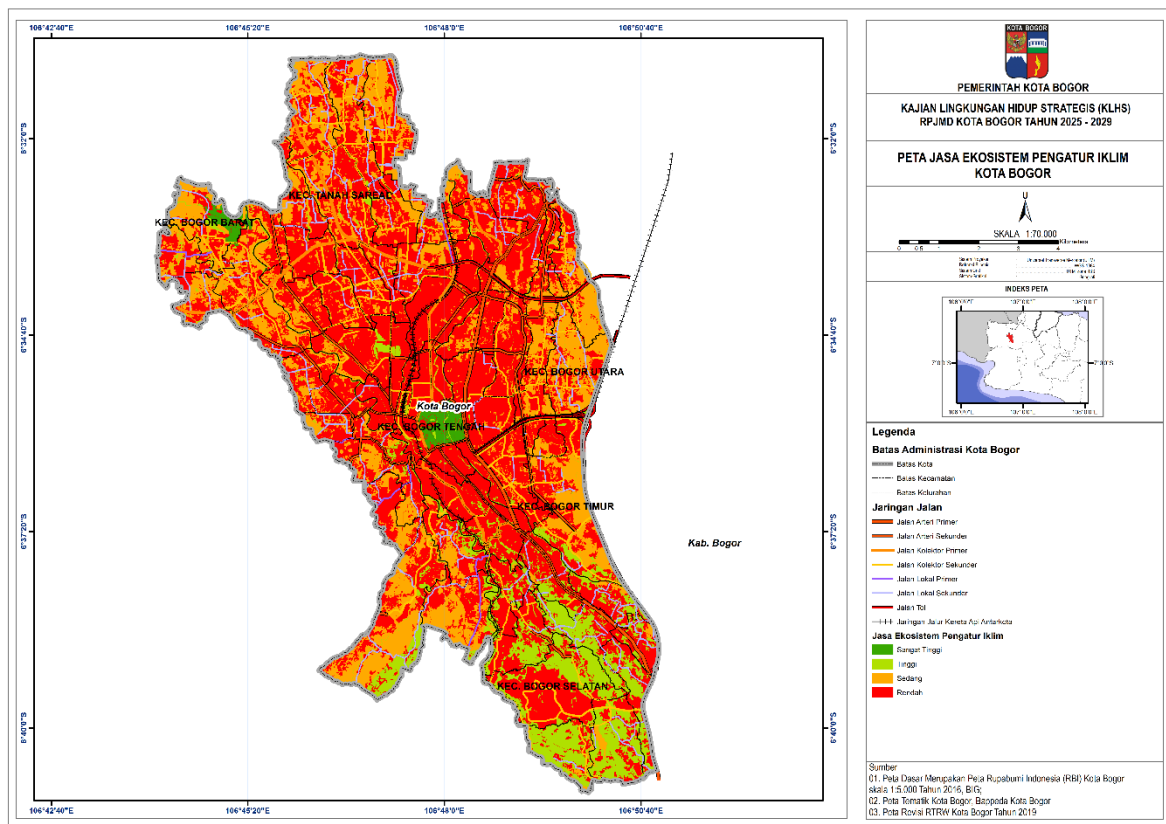
Jasa ekosistem pengatur iklim berdasarkan tingkatannya di setiap kecamatan di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.33. Secara umum, tingkat jasa ekosistem pengatur iklim di kota bogor adalah sangat rendah seluas **6.634,64** Ha selanjutnya diikuti oleh tingkat jasa ekosistem sedang seluas **2.966,44** Ha.



Tabel 3. 37 Indeks Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Pengatur Iklim				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Bogor Barat	1.366,42	815,79	104,28	45,07	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	1.524,02	517,16	1.008,95		3.050,13
3	Kec. Bogor Tengah	661,53	44,58	34,49	96,07	836,67
4	Kec. Bogor Timur	648,28	241,09	158,62		1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	1.102,87	662,90	46,39		1.812,15
6	Kec. Tanah Sareal	1.331,52	684,92	43,57		2.060,01
Total (ha)		6.634,64	2.966,44	1.396,30	141,13	11.138,51

Jasa ekosistem pengatur iklim dengan tingkat sangat tinggi hanya ditemukan pada dua kecamatan di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Barat seluas 45,07 Ha dan Kecamatan Bogor Tengah 96,07 Ha. Jika dilihat dari luasannya ini tergolong rendah untuk dua kecamatan tersebut.



Gambar 3. 37 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Bogor

3.6.5. Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dianalisis dari efisiensi rencana pemanfaatan ruang berdasarkan tutupan lahan faktual. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien berarti memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi dari ekosistem di dalamnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah



dengan melihat perubahan dari nilai fungsi jasa ekosistem itu sendiri pada tutupan lahan eksisting/faktual akibat adanya perencanaan atau peruntukan ruang.

3.6.5.1. Efisiensi Pola Ruang Berdasarkan Jasa Penyedia Air

Perbandingan nilai jasa ekosistem pada tutupan lahan faktual dan jasa ekosistem rencana pola ruang untuk menyediakan air dapat dilihat pada Tabel 3.34. Berdasarkan analisis diperoleh bahwa terjadi peningkatan persentase luasan untuk jasa ekosistem pada kelas sangat rendah dan rendah. Peningkatan terbesar terjadi pada kelas rendah sebesar 10% dengan adanya rencana pola ruang. Sementara itu untuk jasa ekosistem penyedia air dengan kelas sedang, tinggi, sampai dengan sangat tinggi mengalami penurunan luasan dengan adanya rencana pola ruang. Penurunan terbesar terdapat pada kelas tinggi sebesar 12% dari total luasan Kota Bogor.

Tabel 3. 38 Jasa Ekosistem Penyedia Air berdasarkan Tutupan Lahan Faktual dan Pola Ruang

Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air	Persentase Luasan (%)	
	Tutupan Lahan Faktual	Rencana Pola Ruang
Sangat Rendah	5%	9%
Rendah	67%	77%
Sedang	2%	1%
Tinggi	23%	11%
Sangat Tinggi	4%	2%

Selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dengan menghitung nilai jasa ekosistem penyedia air pada tutupan lahan faktual yang terdapat pada setiap rencana pola ruang di Kota Bogor. Rata-rata efisiensi jasa ekosistem penyedia air untuk setiap pola ruang dapat dilihat pada tabel 15. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3.35 diperoleh bahwa efisiensi penyedia air mencapai 15,35%.

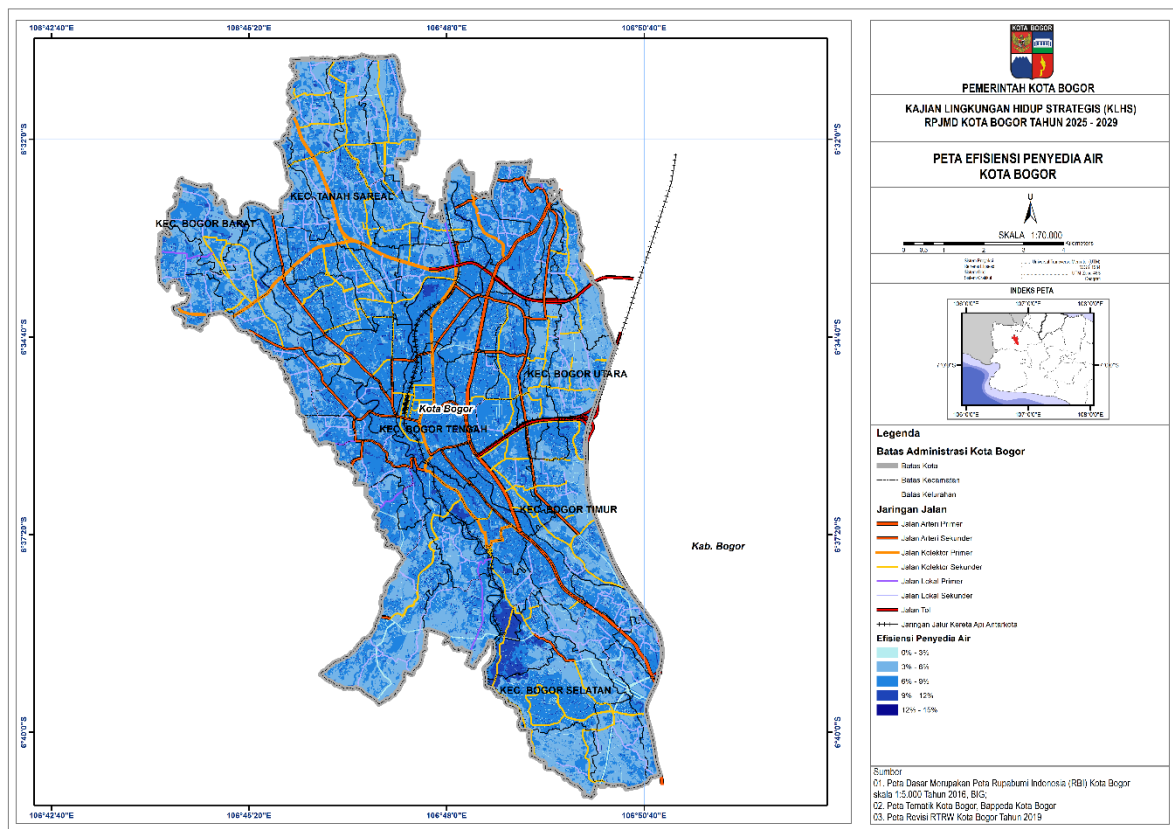
Tabel 3. 39 Efisiensi Pola Ruang berdasarkan Jasa Penyedia Air

Rencana Pola Ruang	Rata-Rata Efisiensi Penyedia Air
Badan Air	3,22%
Badan Jalan	1,32%
Kawasan Campuran	4,51%
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	3,12%
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	6,97%
Kawasan Pariwisata	6,32%
Kawasan Pelestarian Alam	8,44%
Kawasan Perdagangan dan Jasa	2,81%
Kawasan Perkantoran	3,97%
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	3,58%
Kawasan Perumahan	1,64%
Kawasan Peruntukan Industri	5,29%
Kawasan Peternakan	13,58%
Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	8,30%
Kawasan Tanaman Pangan	15,13%



Rencana Pola Ruang	Rata-Rata Efisiensi Penyedia Air
Kawasan Transportasi	15,35%
Ruang Terbuka Hijau	2,19%
Sempadan Sungai	2,11%

Sementara itu, peta sebaran nilai efisiensi untuk setiap rencana pola ruang dapat dilihat pada Gambar 3.32. Pada gambar tersebut diperoleh informasi bahwa Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan memiliki beberapa wilayah dengan tingkat efisiensi nilai efisiensi tinggi dengan luasan lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya.



Gambar 3. 38 Peta Efisiensi Jasa Ekosistem Penyedia Air

3.6.5.2. Efisien Pola Ruang Berdasarkan Jasa Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir

Perbandingan nilai jasa ekosistem antara tutupan lahan faktual dan jasa ekosistem rencana pola ruang dalam mengatur tata aliran air dan banjir dapat dilihat pada Tabel 3.36. Berdasarkan analisis diperoleh bahwa terjadi peningkatan persentase luasan untuk jasa ekosistem pada kelas sangat rendah sebesar 28% dengan adanya rencana pola ruang. Selain itu juga terjadi peningkatan persentase luasan pada kelas sangat tinggi, namun tidak signifikan. Sebaliknya, untuk jasa ekosistem pengatur iklim dengan kelas rendah sampai tinggi mengalami penurunan luasan dengan penurunan terbesar terdapat pada kelas sedang mencapai 18%.



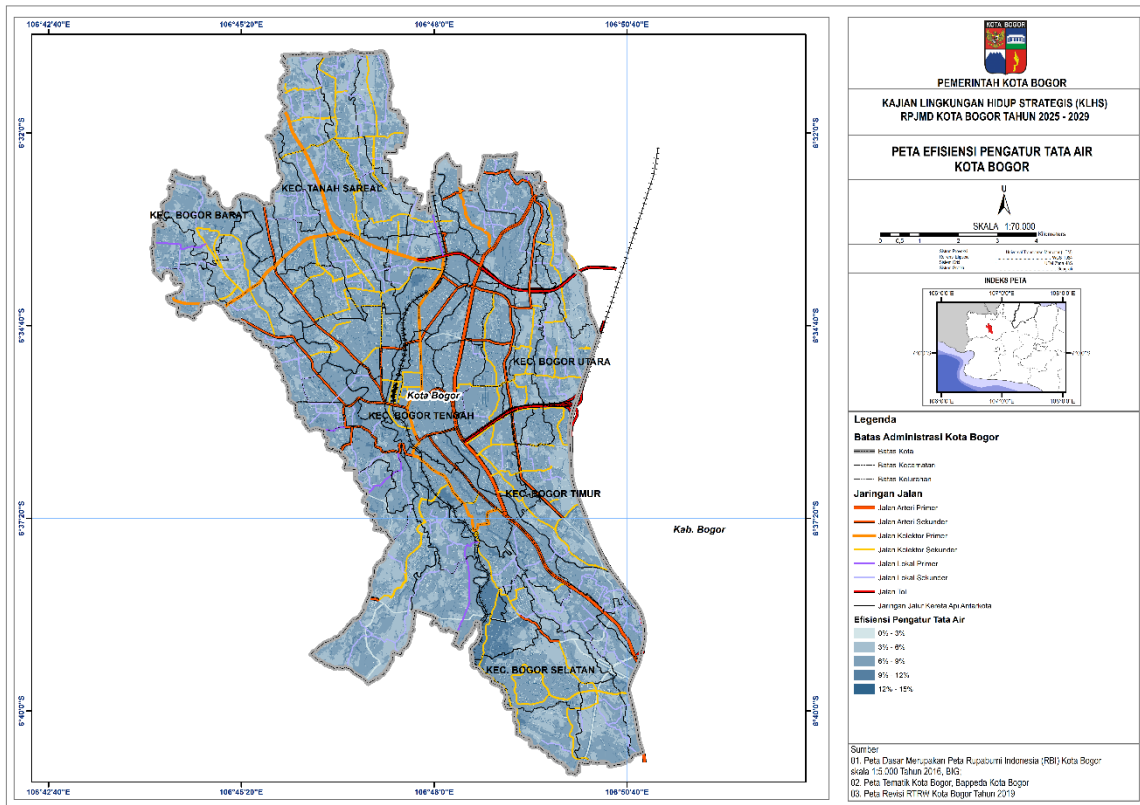
Tabel 3. 40 Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir berdasarkan Tutupan Lahan Faktual dan Pola Ruang

Kelas Jasa Ekosistem Tata Aliran Air dan Banjir	Persentase (%)	
	Tutupan Lahan Faktual	Rencana Pola Ruang
Sangat Rendah	60%	88%
Rendah	10%	0%
Sedang	24%	6%
Tinggi	2%	1%
Sangat Tinggi	5%	5%

Analisis efisiensi berdasarkan jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir pada setiap rencana pola ruang di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel 3.39. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi pengatur iklim pada pola ruang memiliki nilai efisiensi mencapai 12,31%. Terdapat tiga jenis rencana pola ruang yang tergolong tinggi dibandingkan dengan pola ruang lainnya, antara lain kawasan peternakan, tanaman pangan dan transportasi. Sementara itu, peta sebaran nilai efisiensi untuk setiap rencana pola ruang dapat dilihat pada Gambar 21 dimana Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah memiliki beberapa wilayah yang memiliki nilai efisiensi tinggi dengan luasan lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya.

Tabel 3. 41 Efisiensi Pola Ruang berdasarkan Jasa Pengatur Iklim

Rencana Pola Ruang	Efisiensi Pengatur Tata Air dan Banjir
Badan Air	3,07%
Badan Jalan	1,12%
Kawasan Campuran	3,59%
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	2,75%
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	5,38%
Kawasan Pariwisata	5,80%
Kawasan Pelestarian Alam	9,42%
Kawasan Perdagangan dan Jasa	2,42%
Kawasan Perkantoran	3,49%
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	3,18%
Kawasan Perumahan	1,35%
Kawasan Peruntukan Industri	4,76%
Kawasan Peternakan	11,91%
Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	6,79%
Kawasan Tanaman Pangan	10,15%
Kawasan Transportasi	12,31%
Ruang Terbuka Hijau	1,90%
Sempadan Sungai	1,82%

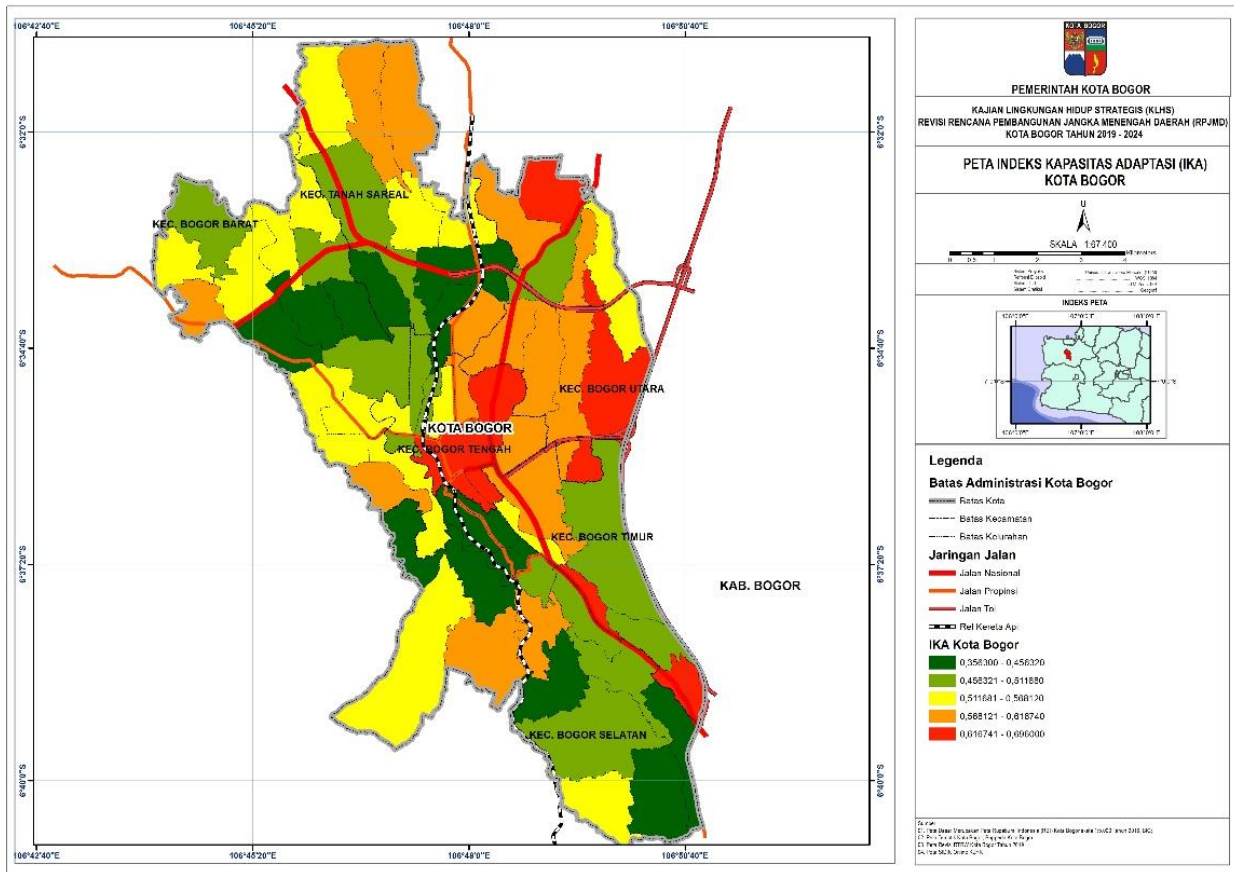


Gambar 3. 39 Peta Efisiensi Pemanfaatan Pola Ruang terhadap Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air

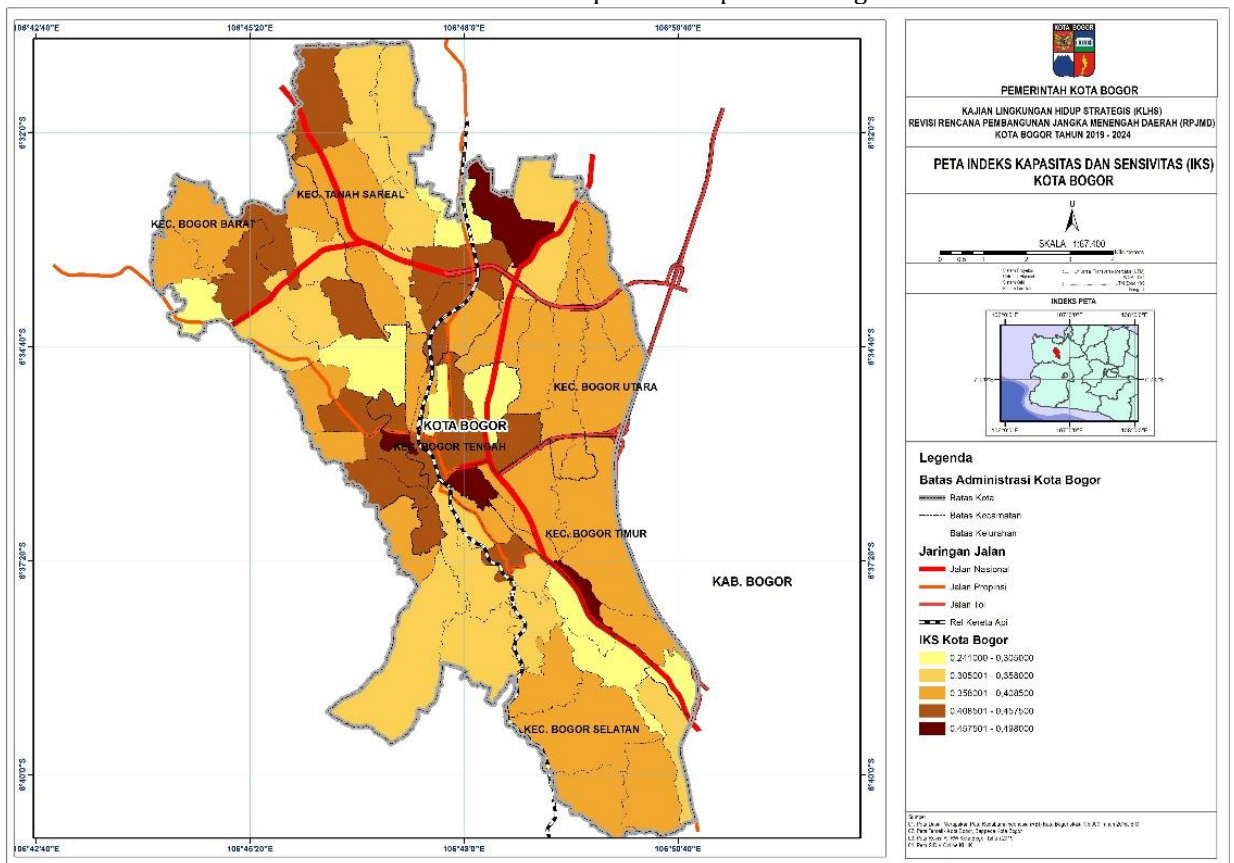
3.6.6. Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

3.6.6.1. Tingkat Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Bogor

Berdasarkan data SIDIK pada tahun 2018, diketahui bahwa nilai indeks kapasitas adaptasi (IKA) terhadap perubahan iklim di Kota Bogor adalah 0,6960 dari nilai tertinggi 1. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bogor dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik berupa kekeringan dan banjir berada pada level/tingkatan sedang. Sedangkan untuk nilai indeks kerentanan dan sensitivitas (IKS) di Kota Bogor terhadap perubahan iklim adalah 0,4980 dari nilai tertinggi 1, artinya tingkat kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap adanya perubahan iklim jika terjadi kekeringan dan banjir berada pada level sedang.



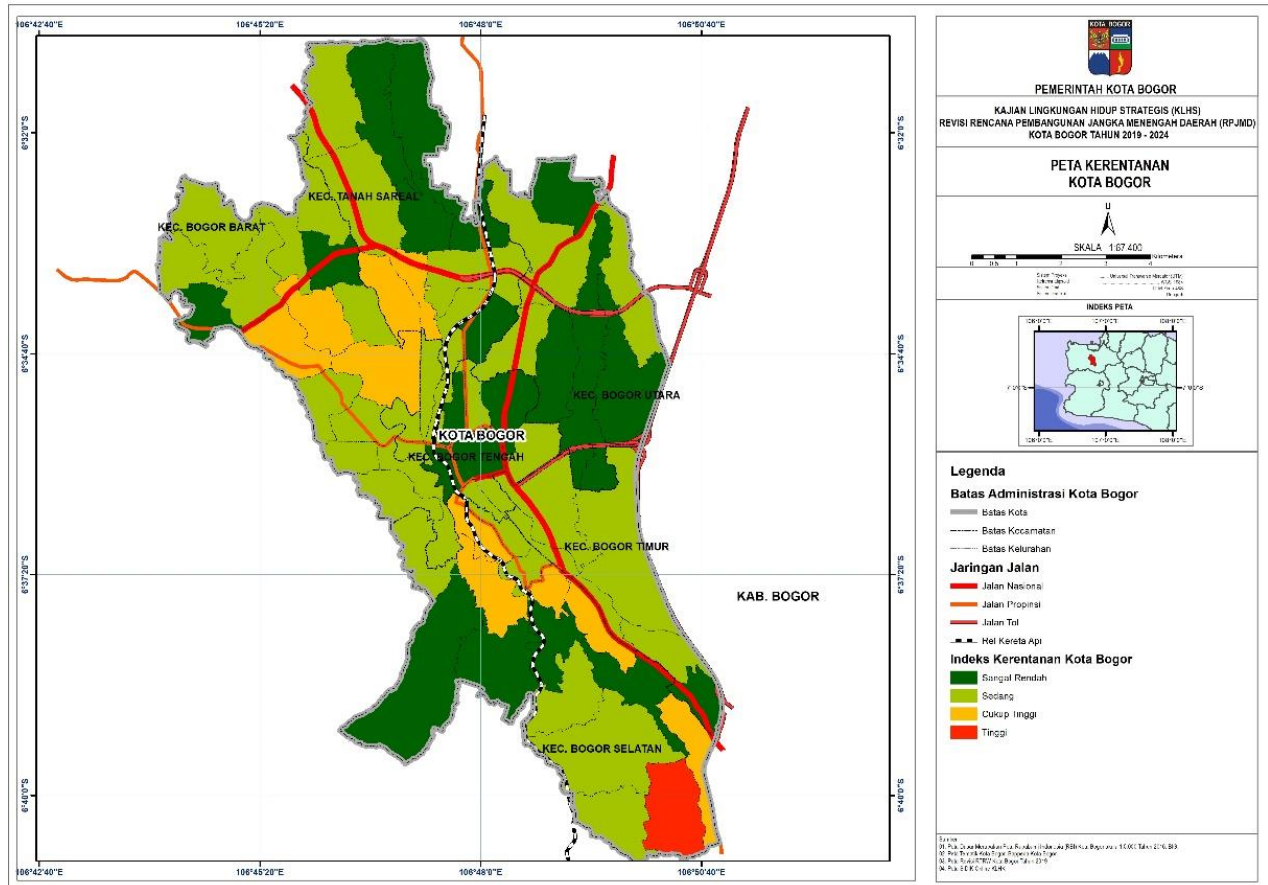
Gambar 3. 40 indeks kapasitas adaptif Kota Bogor



Gambar 3. 41 Indeks kapasitas dan sensitivitas Kota Bogor



Kota Bogor memiliki empat klasifikasi tingkat kerentanan yaitu kerentanan sangat rendah, sedang, cukup tinggi, dan kerentanan tinggi. Jumlah kelurahan yang berada pada kerentanan sangat rendah berjumlah 19 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan sedang berjumlah 38 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan cukup tinggi berjumlah 10 kelurahan, dan untuk yang berada pada kerentanan tinggi berjumlah 1 kelurahan yaitu Kelurahan Bojongkerta.



Gambar 3. 42 Indeks kerentanan Kota Bogor

3.6.6.2. Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bogor

Berdasarkan hasil inventarisasi GRK di Kota Bogor, pada tahun 2022 total emisi GRK adalah 2.870.822,84 ton CO₂e. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 6,27% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 2.701.324,46 ton CO₂e. Jumlah emisi CO₂e dan persentase dari masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

- Sektor energi adalah sekitar 2.634.695,51 ton CO₂e atau sekitar 91,77% dari total emisi
- Sektor peternakan dan pertanian adalah sekitar 12.110,93 ton CO₂e atau sekitar 0,42% dari total emisi
- Sektor limbah adalah sekitar 224.016,40 ton CO₂e atau sekitar 7,80% dari total emisi.

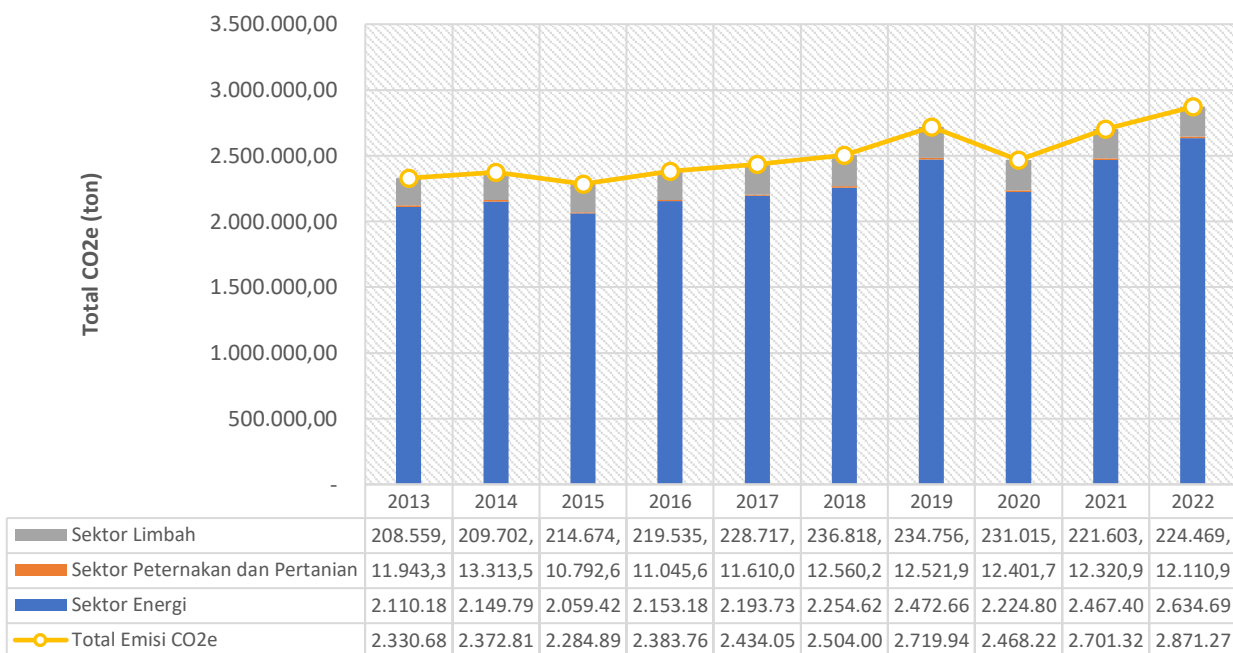
Hasil perhitungan total emisi dari tahun 2013-2022 menunjukkan rata-rata kenaikan emisi GRK di Kota Bogor adalah 2,50 per tahun. Emisi GRK Kota Bogor dari tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.



Tabel 3. 42 Total Emisi CO₂e di Kota Bogor Tahun 2017-2021

Tahun	Sektor Energi (ton)	Sektor Peternakan dan Pertanian (ton)	Sektor Limbah (ton)	Total Emisi CO ₂ e (ton)
2013	2.110.180,92	11.943,32	208.559,75	2.330.683,99
2014	2.149.794,82	13.313,57	209.702,27	2.372.810,66
2015	2.059.429,55	10.792,64	214.674,63	2.284.896,82
2016	2.153.186,65	11.045,60	219.535,83	2.383.768,08
2017	2.193.730,02	11.610,09	228.717,16	2.434.057,27
2018	2.254.624,31	12.560,21	236.818,09	2.504.002,61
2019	2.472.669,78	12.521,92	234.756,93	2.719.948,63
2020	2.224.809,18	12.401,73	231.015,07	2.468.225,97
2021	2.467.400,25	12.320,93	221.603,28	2.701.324,46
2022	2.634.695,51	12.110,93	224.469,40	2.870.822,84

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 3. 43 Grafik Total Emisi CO₂e di Kota Bogor Tahun 2013-2022

Hampir 90% dari total emisi GRK di Kota bogor didominasi oleh emisi dari sektor energi. Adanya tren kenaikan emisi CO₂e dari tahun ke tahun salah satunya bersumber dari adanya kenaikan jumlah penggunaan listrik dari tahun 2013 hingga tahun 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 6,1% per tahun. Selain itu, jumlah penggunaan BBM dan penggunaan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun adanya peningkatan penggunaan listrik dan penggunaan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk.

Serapan emisi karbon di Kota Bogor didominasi berasal dari lahan hutan dan kebun. Data tutupan lahan di Kota bogor bersumber dari RTRW 2015. Hingga saat



laporan ini dibuat, belum etrdapat pembaharuan data terkait tutupan lahan sehingga perubahan simpanan karbon bersumber dari pertumbuhan biomassa. Nilai serapan karbon dari tata guna lahan pada tahun 2022 adalah sekitar 378.146,68 ton. Sehingga total net emisi Kota Bogor pada tahun 2021 adalah sekitar 2.492.676,16 ton. Tren net emisi CO₂e di Kota Bogor tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3. 43 Total Net Emisi CO₂e di Kota Bogor Tahun 2017-2021

Tahun	Serapan Karbon (ton)	Total Emisi CO ₂ e (ton)	Net Emisi (ton)
2013	-377769,22	2.330.683,99	1952914,772
2014	-377769,22	2.372.810,66	1995041,441
2015	-377769,22	2.284.896,82	1907127,596
2016	-377769,22	2.383.768,08	2005998,858
2017	-364420,93	2.434.057,27	2069636,342
2018	-363342,48	2.504.002,61	2140660,135
2019	-377769,00	2.719.948,63	2342179,632
2020	-377769,22	2.468.225,97	2090456,755
2021	-378065,80	2.701.324,46	2323258,659

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.6.7. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Jenis ekosistem yang dominan di Kota Bogor adalah ekosistem alami, sedangkan ekosistem buatan relative kecil. Ekosistem buatan, antara lain dalam bentuk taman dan hutan kota. Dapun untuk jumlah kawasan konservasi di Kota Bogor mencapai 22 unit, terdiri atas

- Cagar Biosfir ;
- Hutan Kota;
- Kawasan Lindung;
- Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah; serta
- Taman Kota.

Jenis Tumbuhan

Jenis tumbuhan (flora) yang ada di Kota Bogor, mencapai 1,624 jenis yang terdiri atas:

- Tanaman hias 77 jenis;
- Tanaman air 51 jenis;
- Tanaman buah 92 jenis;
- Tanaman merambat 50 jenis;
- Tanaman obat 801 jenis;
- Tanaman pangan 41 jenis;
- Pohon dan pelindung 422 jenis;
- Sayuran 9 jenis;
- Tanaman Perkebunan 20 jenis; serta
- Pakan Ternak 61 Jenis

Jenis Satwa



Jenis satwa (fauna) yang ada di Kota Bogor, mencapai 176 jenis yang terdiri atas :

- Ternak 6 jenis;
- Burung 53 jenis;
- Mamalia liar dan peliharaan 10 jenis;
- Reptil dan Amphibi 13 jenis;
- Keong 5 jenis;
- Insekta 36 jenis;
- Ikan Air Tawar 40 jenis;
- Ikan Hias 13 jenis;

Jenis Endemik

Dari hasil kajian terhadap 1,624 jenis tumbuhan dan 176 jenis satwa, diketahui bahwa tidak ada satwa endemic Kota Bogor. Sedangkan tumbuhan endemic Bogor adalah Talas. Kalaupun ada jenis endemic, jenis tersebut adalah endemic pada daerah lain misalnya endemic Maluku dan dibawa ke Kota Bogor, dalam rangka penelitian atau perdagangan (khususnya untuk tanaman hias dan satwa peliharaan)

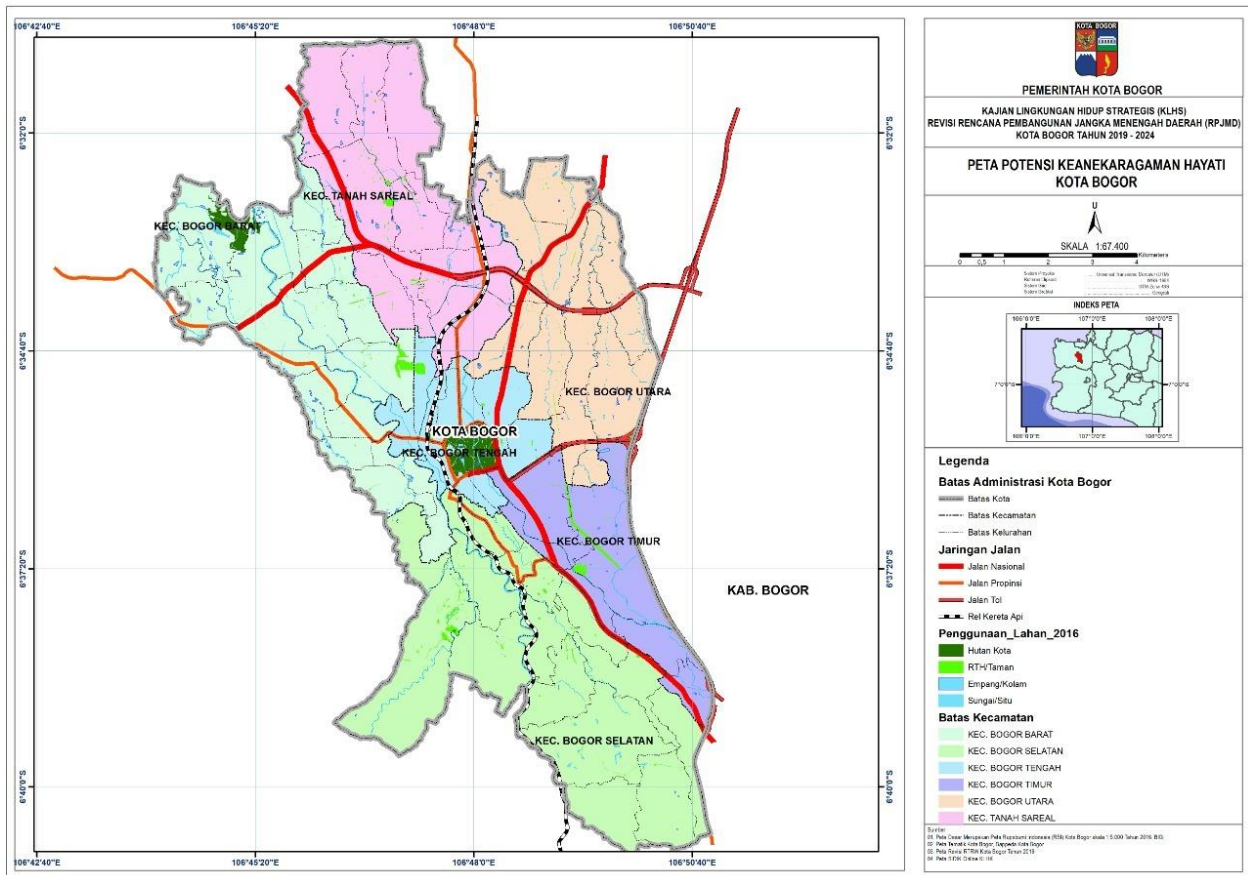
Jenis Dilindungi

Jumlah satwa yang dilindungi sebanyak 13 jenis, terdiri atas 12 jenis burung dan satu jenis rusa. Sedangkan Flora dilindungi sebanyak 2 jenis, salah satunya adalah Raflesia yang telah ditetapkan sebagai Pusapa Bangsa (bunga bangsa).

Jenis Introduksi

Tumbuhan intoduksi, mencapai 33 jenis, umumnya berasal dari bangsa anggrek (Orchidaceae), dan beberapa jenis pohon. Sedangkan satwa jenis intoduksi hanya dua yaitu Rusa Totol dan Keong Racun.

Adapun daerah yang berpotensi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 44 Peta daerah yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi di Kota Bogor

Adapun Berdasarkan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, Kota Bogor memiliki luas Hutan Kota sebesar 45,07 ha yang tersebar di 7 (tiga) lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan Hutan Kota yaitu: (1) Hutan Kota Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, (2) Hutan Kota Cifor, Kecamatan Bogor Barat, (3) Hutan Kota Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat.

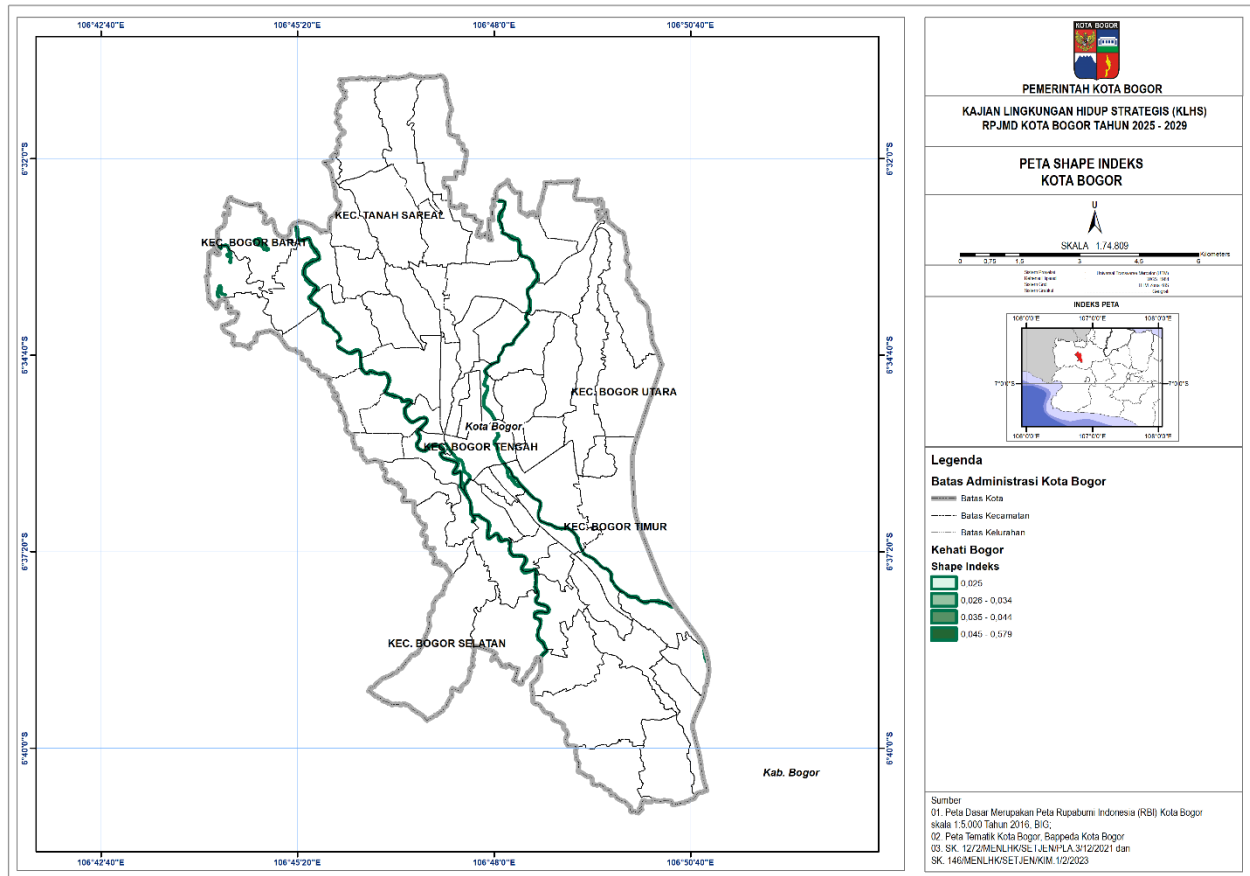
Tabel 3. 44 Hutan Kota di Kota Bogor

No	Nama Lokasi	Alamat		Jenis Tanaman
		Kelurahan	Kecamatan	
1	Hutan Pinus	Gunung Batu	Bogor Barat	Beragam
2	Hutan Kota Tanah Baru	Tanah Baru	Bogor Utara	Beragam
3	Kebun Raya Bogor	Sempur	Bogor Tengah	Beragam
4	Hutan Cifor	Sindang Barang	Bogor Barat	Beragam Jenis Tanaman
5	Hutan Kota A. Yani	Tanah Sareal	Tanah Sareal	Beragam Jenis Tanaman
6	Hutan Kota Situ Gede	Situ Gede	Bogor Barat	Beragam Jenis Tanaman
7	Puslitbang Hasil Hutan	Pasir Jaya	Bogor Barat	Berbagai Jenis Tanaman

Sumber, DLH, 2019

Analisis Shape Indeks

Analisis Shape Indeks Kehati dilakukan di beberapa kawasan dengan tujuan untuk mengevaluasi kondisi habitat dan potensi keanekaragaman hayati di masing-masing lokasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan dengan Shape Indeks yang tinggi memiliki struktur habitat yang lebih kompleks, yang mendukung populasi spesies yang lebih beragam. Sebaliknya, area dengan Shape Indeks rendah cenderung mengalami penurunan keanekaragaman hayati akibat degradasi habitat dan fragmentasi yang tinggi. Untuk lebih jelas terkait peta shape indeks di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 45 Peta Shape Indeks Kota Bogor

3.7. Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian TPB

3.7.1. Pendapatan Kota Bogor Tahun 2023

Pendapatan Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.059.704.221.734. dengan rincian pendapatan asli daerah Rp 1.403.260.832.834 dan Pendapatan Transfer Rp 1.656.443.388.900. Rincian kenaikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 45 Jenis Pendapatan Kota Bogor

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1	Pajak Daerah	973.102.231.105
1.2	Retribusi Daerah	54.039.453.685
1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	33.539.076.644
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah	342.580.071.400
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.403.260.832.834



No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)
2	Pendapatan Transfer	
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.257.214.575.777
2.2	Transfer Antar Daerah	399.228.813.123
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.656.443.388.900
	Jumlah Pendapatan	3.059.704.221.734

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah Rp.2.957.571.067.181,80 atau terealisasi 96,66% dari target sebesar Rp.3.059.704.221.734,- Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 46 Realisasi Pendapatan Kota Bogor

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.403.260.832.834	1.337.749.753.710	95,33
2	Pendapatan Transfer	1.656.443.388.900	1.619.821.313.471	97,79
	Total	3.059.704.221.734	2.957.571.067.181	96,66

Realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.957.571.067.181,80 atau terealisasi 96,66% dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80 atau 99,72% dari target Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 sebesar Rp. 1.403.260.832.834,- dan Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 97,98% atau sebesar Rp. 1.619.821.313.471,- dari target sebesar Rp. 1.656.443.388.900,. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kota Bogor pada tahun 2023 Rasio Kemandirian Daerah dengan besarnya persentase 45,86% dikategorikan kemampuannya rendah dan menuju Kota yang mandiri, sedangkan rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat sebesar 54,14% artinya memiliki tingkat ketergantungan sangat tinggi. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal.

3.7.2. Pendapatan Asli Daerah

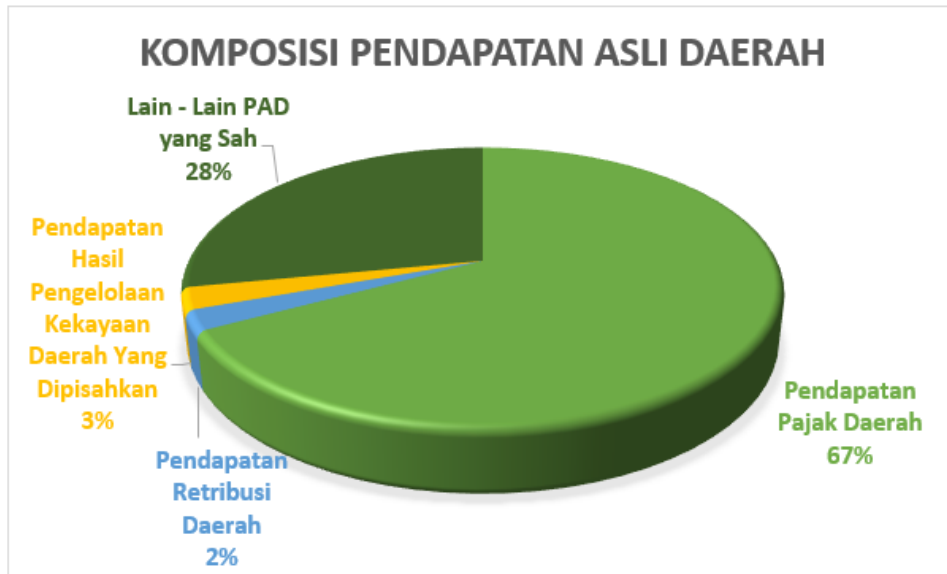
Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 seperti diuraikan pada Tabel dibawah berikut:

Tabel 3. 47 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	973.102.231.105	897.753.380.910	92,26
2	Pendapatan Retribusi Daerah	54.039.453.685	31.081.390.548	57,52
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	33.539.076.644	33.960.776.435	101,26
4	Lain - Lain PAD yang Sah	342.580.071.400	374.954.205.817,80	109,45
	Jumlah	1.403.260.832.834	1.337.749.753.711	95,33



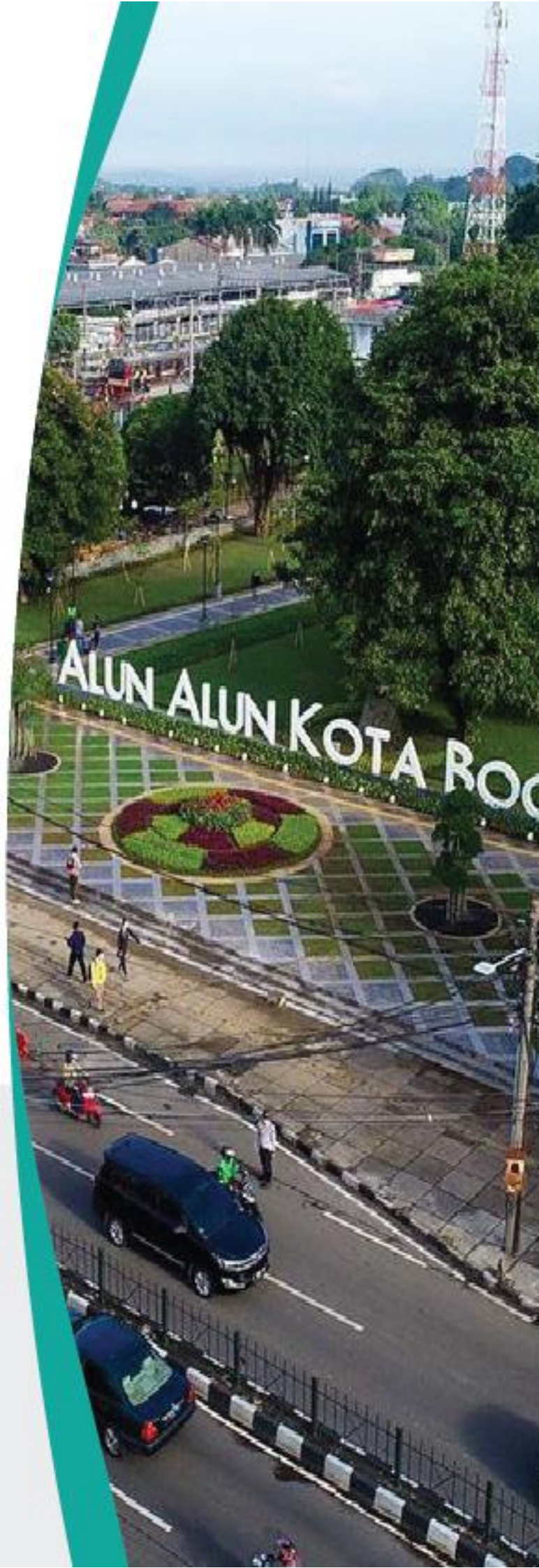
Dari tabel di atas, terlihat bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD, yaitu sebesar Rp. 897.753.380.910. Proporsi sumber pendapatan daerah didominasi oleh pajak daerah sebesar 67%, dan Lain – Lain PAD yang sah 28%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 46 Komposisi Pendapatan Asli Daerah



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
TAHUN 2024



BAB 4

ANALISIS TPB

LAPORAN AKHIR

*KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS IKLHSI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH IRPUMDI
KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029*

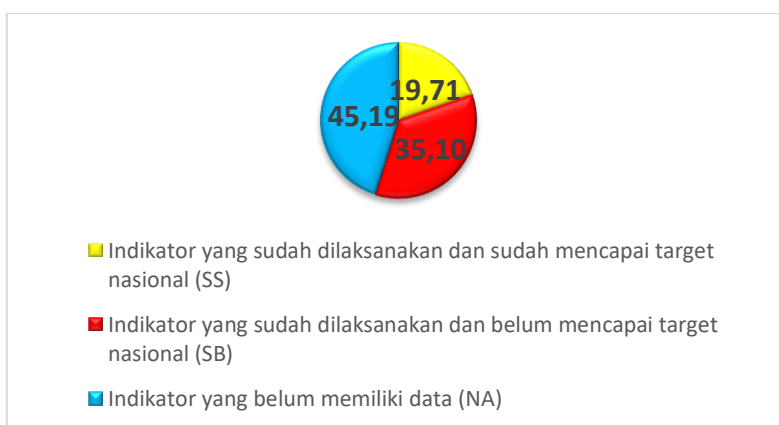


BAB 4 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

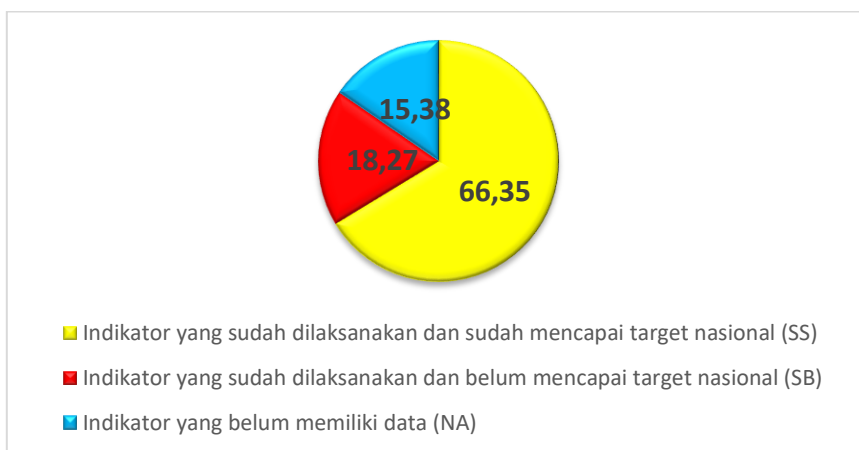
4.1. Pelaksanaan TPB di Kota Bogor

Secara umum pelaksanaan TPB di Kota Bogor pada tahun 2019 capaian data yang dapat diisi sekitar 54,81%, indikator TPB yang sudah mencapai target nasional 35,10%, 19,71% belum mencapai target nasional, dan 45,90% belum ada datanya. Capaian TPB pada tahun 2021 terdapat sekitar 84,62% dari 208 indikator TPB yang relevan untuk Kota Bogor yang telah diisi. Sementara 15,38% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Dari banyak Indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kota telah dilaksanakan oleh Kota Bogor sebanyak 208 indikator, dimana 138 indikator atau sekitar 66,35% telah mencapai target nasional, Sedangkan 38 indikator atau sekitar 18,27% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 32 indikator atau 15,38% belum ada datanya.

Capaian TPB Tahun 2024 terdapat sekitar 92,38% atau 193 indikator data yang sudah dapat diisi dari 210 indikator yang relevan di Kota Bogor, dan sekitar 7,62% atau sekitar 16 indikator yang belum terisi. dimana 144 indikator atau sekitar 68,57% telah mencapai target nasional. Sedangkan 49 indikator atau sekitar 23,3% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 16 indikator atau 7,62% belum ada datanya. Berdasarkan hasil pelaksanaan TPB setidaknya indikator yang sudah diisi dan mencapai target masih lebih banyak dibandingkan dengan indikator yang belum mencapai target dan tidak terisi. Hal ini juga menunjukkan perkembangan yang baik perihal capaian dan ketersediaan data SDGs dari yang dilakukan sebelumnya. Dimana pada tahun penyusunan yang dilakukan tahun 2019, 2021, 2023 pada tahun 2024 peningkatan terhadap data yang sudah diisi dari 54,81 pada tahun 2019, 84,62% pada tahun 2021, 89,52% tahun 2023, dan Tahun 2024 terisi sekitar 92,38% dari 210 indikator TPB yang relevan untuk Kota Bogor yang telah diisi. Sementara 7,62% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Untuk lebih jelas persentase capaian TPB dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Proporsi Capaian TPB Kota Bogor Tahun 2019
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor (2019)



Gambar 4.2 Proporsi Capaian TPB Kota Bogor Tahun 2021
Sumber: Hasil analisis, 2021



Gambar 4.3 Proporsi Capaian TPB Kota Bogor Tahun 2023
Sumber: Hasil analisis, 2023



Gambar 4.4 Proporsi Capaian TPB Kota Bogor Tahun 2024
Sumber: Hasil analisis, 2024

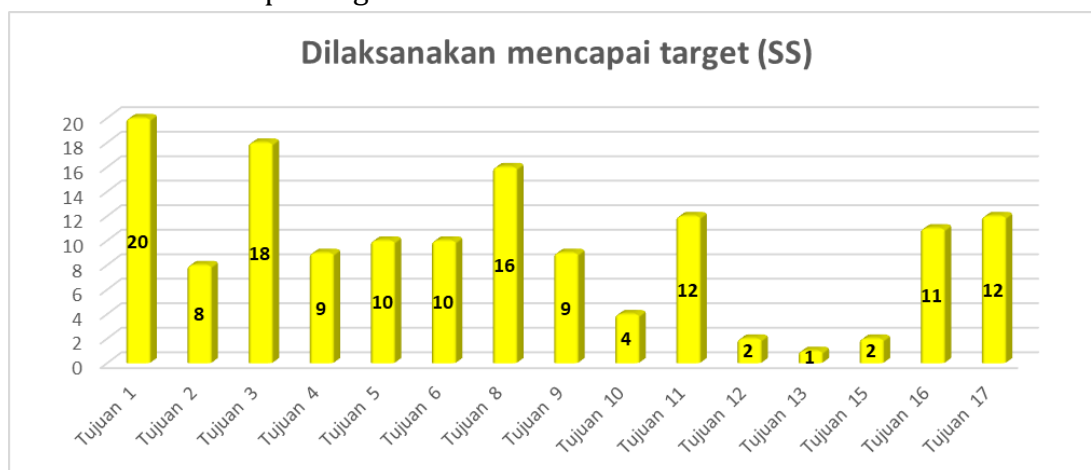


Indikator TPB yang tidak relevan di Kota Bogor terdapat 10 indikator seperti indikator (7.2.1*) Bauran energi terbarukan, (7.3.1*) Intensitas energi primer, (9.1.2. b) Jumlah dermaga penyeberangan, (9.1.2. c), Jumlah pelabuhan strategis dan lain- lain, untuk lebih lengkap untuk table secara keseluruhan indicator yang tidak relevan terdapat pada tabel lampiran.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Bogor. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak ada datanya. Capaian indikator TPB Kota Bogor terhadap target nasional diperoleh masing-masing capaian sebagai berikut.

1. Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)

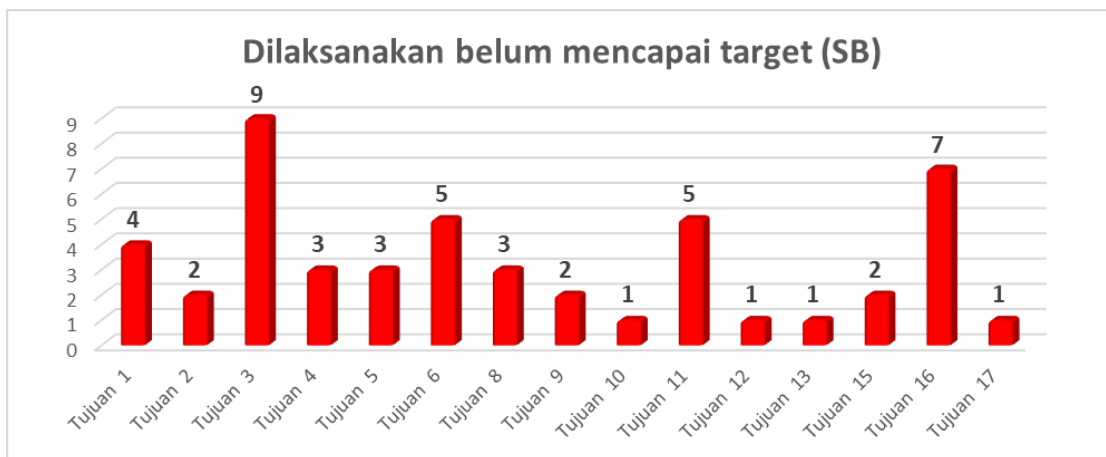
Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 143 indikator atau 68,10% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah kota. Berikut grafik indikator capaian masing-masing tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.



Gambar 4.5 Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS)
Sumber: Hasil analisis, 2024

2. Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)

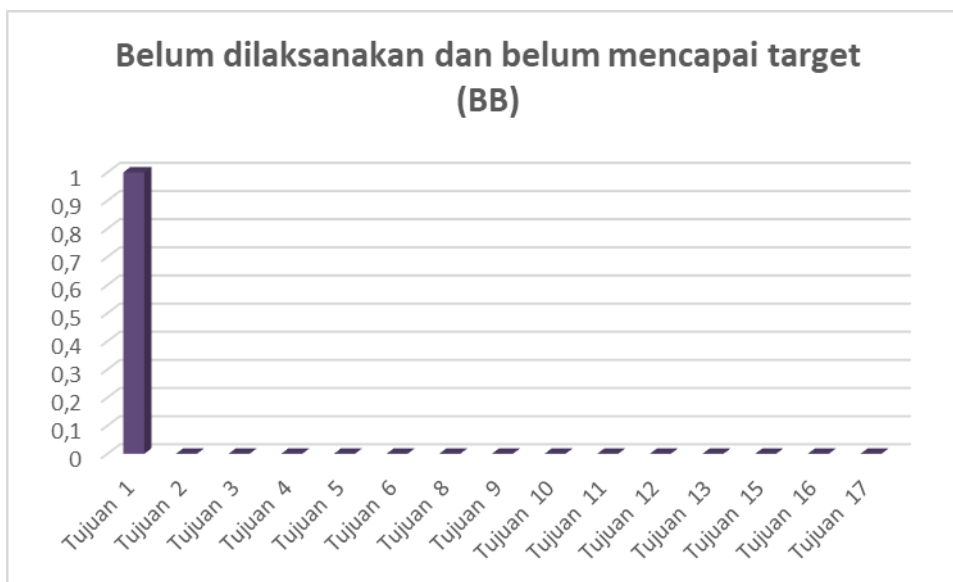
Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 45 indikator atau 21,43% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kota. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian TPB kategori sudah dilaksanakan tetapi blum mencapai target (SB) Kota Bogor dapat di lihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 4.6 Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)
Sumber: Hasil analisis, 2024

3. Target TPB yang belum dikerjakan dan belum mencapai target (BB)

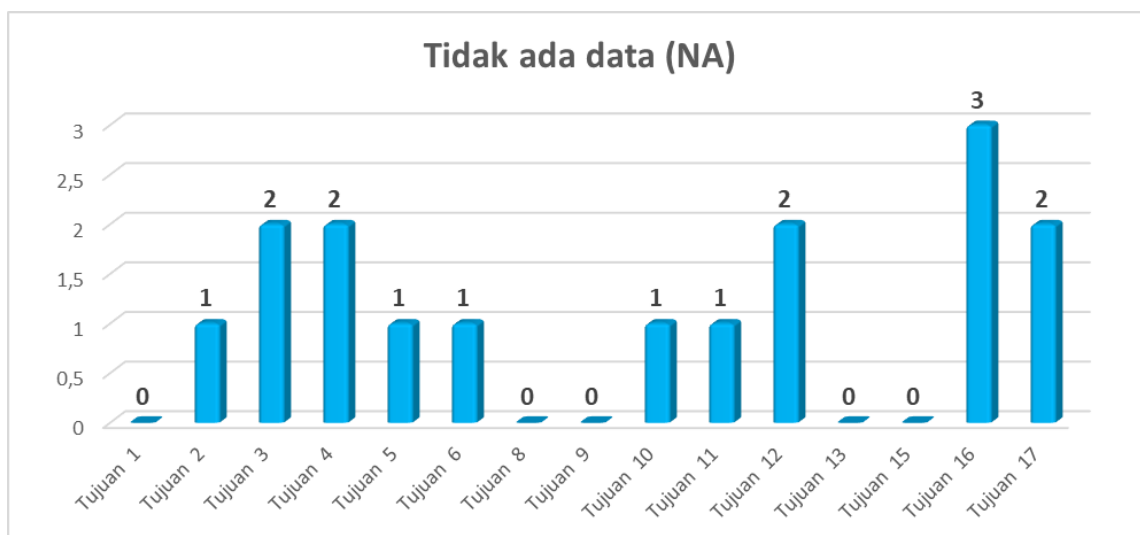
Dalam pengumpulan data TPB, indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target masuk kedalam kelompok tidak ada data/ NA. Hal tersebut mengingat jika dalam pengumpulan data TPB semua indikator yang sudah dilaksanakan terkategori mencapai target/ SS dan belum mencapai target/TS. Sedangkan untuk yg belum dilaksanakan dan belum mencapai target adalah 1 indikator.



Gambar 4.7 Capaian TPB Kategori Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)
Sumber: Hasil analisis, 2024

4. Target TPB yang belum ada data (NA)

Indikator ini tidak ada data yang dapat mendukung penjelasannya. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 16 indikator atau 7,62% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah Kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai target TPB yang belum ada data (NA) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.8 Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA)
Sumber: Hasil analisis, 2024

Hasil rekap Capaian TPB Tahun 2024 terdapat sekitar 92,38% atau 193 indikator data yang sudah dapat diisi dari 210 indikator yang relevan di Kota Bogor, dan sekitar 7,62% atau sekitar 16 indikator yang belum terisi. dimana 144 indikator atau sekitar 68,57% telah mencapai target nasional. Sedangkan 49 indikator atau sekitar 23,3% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 16 indikator atau 7,62% belum ada datanya. Untuk capaian TPB yang paling tinggi adalah TPB 8 dan TPB9. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel Rekap Hasil Capaian TPB Tahun 2024

TPB	Jumlah Indikator	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)	Total	Capaian	Pilar
Tujuan 1	25	20	4	0	1	25	80,00	Sosial
Tujuan 2	11	8	2	1	0	11	72,73	Sosial
Tujuan 3	29	18	9	2	0	29	62,07	Sosial
Tujuan 4	14	9	3	2	0	14	64,29	Sosial
Tujuan 5	14	10	3	1	0	14	71,43	Sosial
Tujuan 6	16	10	5	1	0	16	62,50	Lingkungan
Tujuan 8	19	16	3	0	0	19	84,21	Ekonomi
Tujuan 9	11	9	2	0	0	11	81,82	Ekonomi
Tujuan 10	6	4	1	1	0	6	66,67	Ekonomi
Tujuan 11	18	12	5	1	0	18	66,67	Lingkungan
Tujuan 12	5	2	1	2	0	5	40,00	Lingkungan
Tujuan 13	2	1	1	0	0	2	50,00	Lingkungan
Tujuan 15	4	2	2	0	0	4	50,00	Lingkungan
Tujuan 16	21	11	7	3	0	21	52,38	Hukum
Tujuan 17	15	12	1	2	0	15	80,00	Ekonomi
Total	210	144	49	16	1	210	68,57	

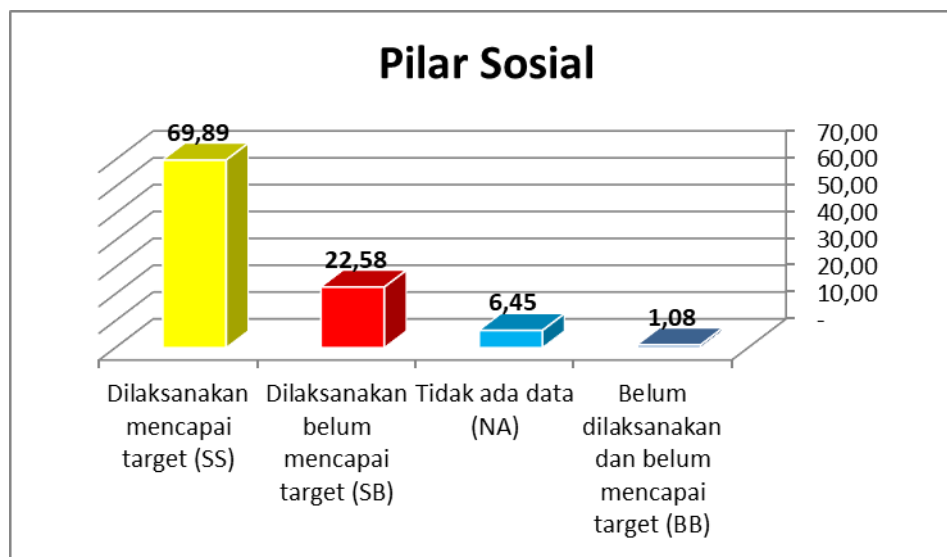
Sumber: Hasil analisis, 2024



4.2. Capaian TPB Berdasarkan Pilar

4.2.1. Capaian Indikator TPB Pilar Sosial

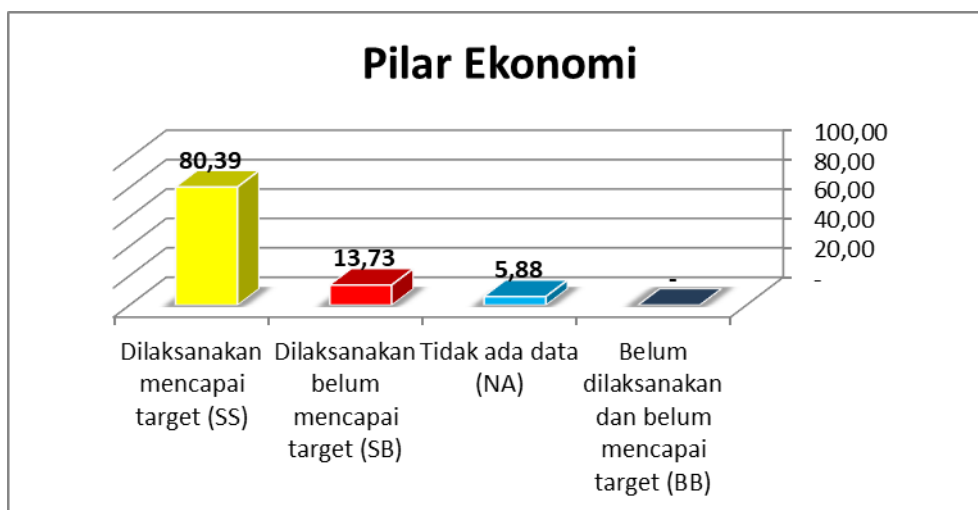
Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 01, TPB 02, TPB 03, TPB 04, dan TPB 05. Total indikator untuk pilar sosial adalah sebanyak 93 indikator. Persentase capaian indikator pilar sosial disajikan pada gambar 4.7. Dari total 93 indikator pilar sosial, terdapat 65 indikator atau 69,89% telah mencapai target, 21 indikator atau 22,58% belum mencapai target, 6 indikator atau 6,45% tidak ada data, dan 1 indikator atau 1,08%.



Gambar 4.9 Persentase status ketercapaian TPB Pilar Sosial
Sumber: Hasil analisis, 2024

4.2.2. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

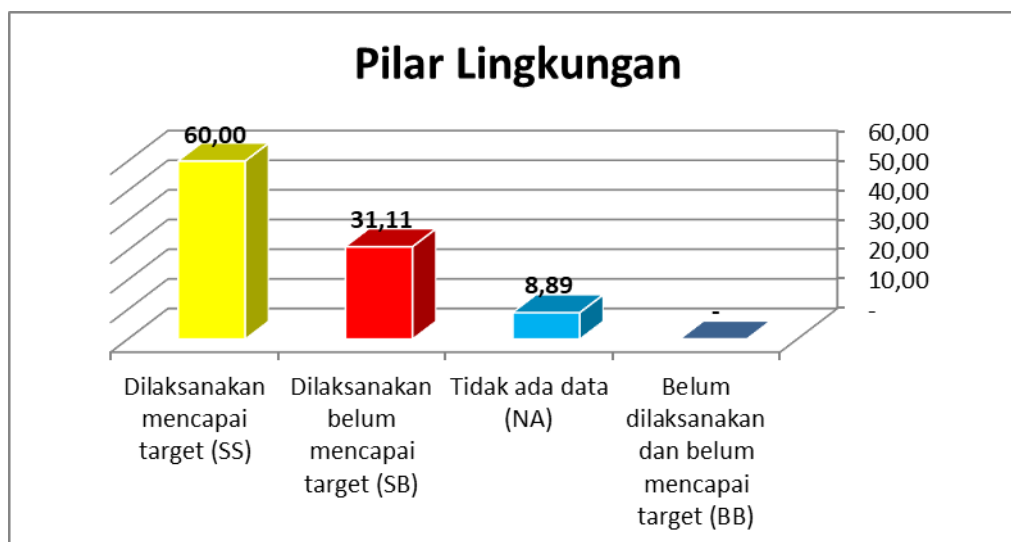
Pilar Ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 08, TPB 09, TPB 10, dan TPB 17. Total indikator untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 51 indikator. Persentase capaian indikator pilar ekonomi disajikan pada gambar 4.8. Dari total 51 indikator, terdapat 41 indikator atau 80,39% telah mencapai target, 7 indikator atau 13,73% belum mencapai target, dan 3 indikator atau 5,88% tidak ada data.



Gambar 4. 10 Persentase status ketercapaian TPB Pilar Ekonomi
Sumber: Hasil analisis, 2024

4.2.3. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan hidup mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 06, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB 15. Total indikator untuk pilar lingkungan hidup adalah sebanyak 45 indikator. Persentase capaian indikator pilar lingkungan hidup disajikan pada gambar 4.9. Dari total 45 indikator pilar lingkungan, terdapat 27 indikator atau 60,00% telah mencapai target, 14 indikator atau 31,11% belum mencapai target, dan 4 indikator atau 8,89% tidak ada data.



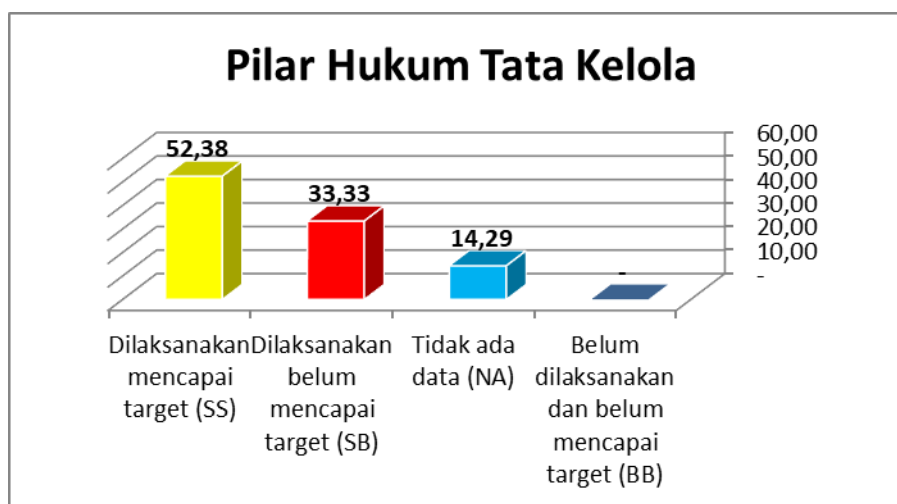
Gambar 4. 11 Persentase status ketercapaian TPB Pilar Lingkungan
Sumber: Hasil analisis, 2024

4.2.4. Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar Hukum dan Tata Kelola mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 16. Total indikator untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. Persentase capaian indikator pilar hukum dan tata kelola disajikan pada gambar 4.10. Dari total 21 indikator, terdapat 11 indikator atau 52,38% telah



mencapai target, 7 indikator atau 33,33% indikator yang belum mencapai target, dan 3 indikator atau 14,29% tidak ada data.



Gambar 4. 12 Persentase status ketercapaian TPB Pilar Hukum dan tata Kelola
Sumber: Hasil analisis, 2024

4.2.5. GAP Capaian TPB

Analisis capaian TPB dilakukan dengan menghitung selisih antara capaian indikator TPB di Kota Bogor terhadap target capaian nasional. Semakin besar selisih/gap capaian indikator (belum mencapai target nasional), maka semakin berpotensi menjadi isu prioritas. Secara lengkap hasil analisis capaian TPB di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Analisis GAP Capaian TPB di Kota Bogor

TPB	Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Jumlah Indikator	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	Ketercapaian (%)	Pilar
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	25	4	16,00	Sosial
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	2	18,18	Sosial
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	29	9	31,03	Sosial
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	14	3	21,43	Sosial
TPB 5	Kesetaraan Gender	14	3	21,43	Sosial
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	16	5	31,25	Lingkungan
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	3	15,79	Ekonomi
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	11	2	18,18	Ekonomi
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	6	1	16,67	Ekonomi
TPB 11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	18	5	27,78	Lingkungan
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	1	20,00	Lingkungan
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim	2	1	50,00	Lingkungan
TPB 15	Ekosistem Daratan	4	2	50,00	Lingkungan



TPB	Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Jumlah Indikator	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	Ketercapaian (%)	Pilar
TPB 16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	21	7	33,33	Hukum & Tata Kelola
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	15	1	6,67	Ekonomi
Total		210	49	23,33	

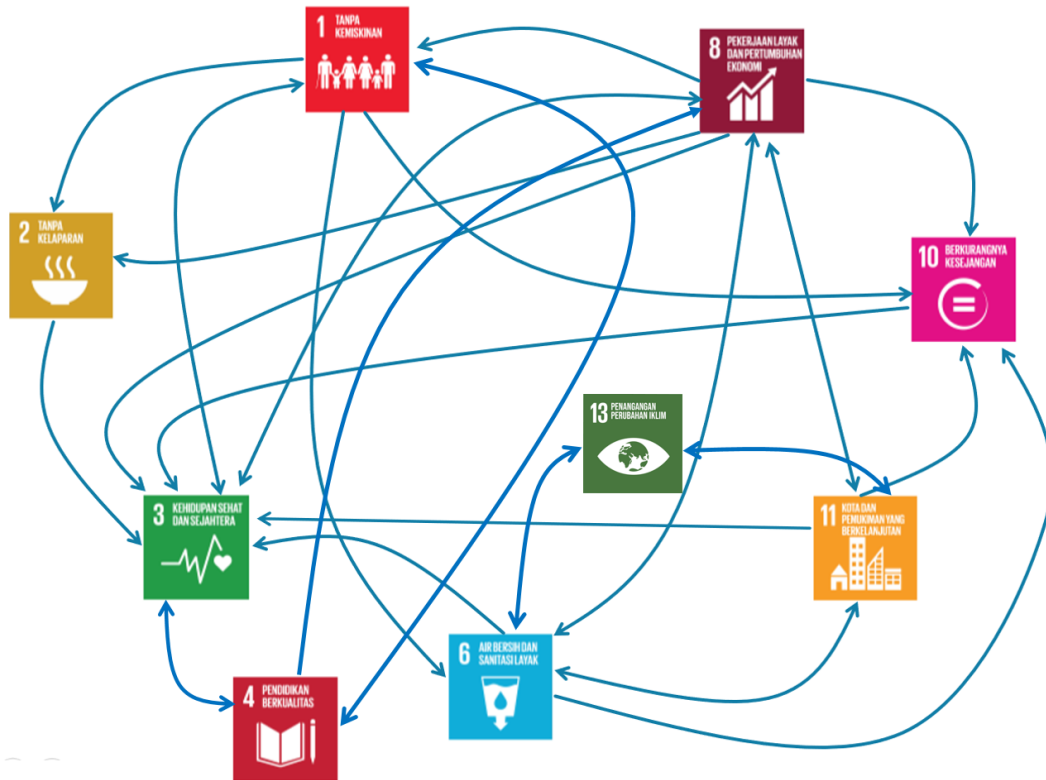
Sumber: Hasil analisis, 2024

4.3. Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Analisis TPB strategis dilakukan dengan menelaah TPB yang dinilai strategis pada dokumen KLHS RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045. TPB yang ditetapkan sebagai TPB strategis pada dokumen tersebut digunakan kembali dalam penyusunan dokumen ini dikarenakan dokumen KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari implementasi tahap I pada pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Berikut merupakan TPB strategis yang ditetapkan dalam KLHS RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045:

1. TPB 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. TPB 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. TPB 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
6. TPB 8 : Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
7. TPB 10 : Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
8. TPB 11 : Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
9. TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim

Adapun keterkaitan antar TPB yang menjadi isu strategis di Kota Bogor disajikan pada tabel dan gambar berikut:



Gambar 4. 13 Keterkaitan antar TPB strategis di Kota Bogor

Berdasarkan skema diatas, dapat dilihata hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi antar TPB. Sebagai contoh pada TPB 1, dimana TPB 1 mempengaruhi terhadap TPB 2, 6 dan 10, sedangkan disisi lain TPB 1 juga dipangaruhi oleh TPB 8. Adapun secara lebih jelas mengenai hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari setiap TPB dapat dilihat pada tabel berikut.

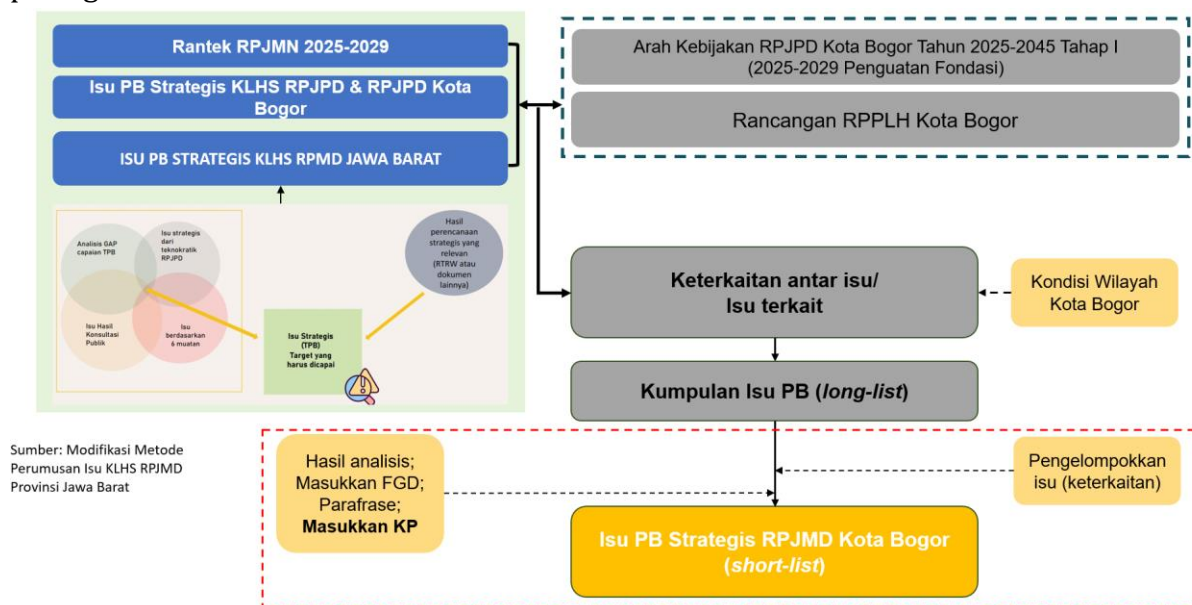
Tabel 4. 2 Hubungan/ keterkaitan antar TPB di Kota Bogor

TPB	Mempengaruhi Terhadap	Dipengaruhi Oleh
TPB 1	TPB 2, TPB 6, TPB 10	TPB 8
TPB 2	TPB 3	TPB 1, TPB 8,
TPB 3	TPB 1, TPB 8	TPB 1, TPB 2, TPB 6, TPB 8, TPB 10, TPB 11
TPB 4	TPB 1, TPB 3, TPB 8	TPB 1, TPB 3
TPB 6	TPB 3, TPB 11, TPB 10	TPB 1, TPB 8, TPB 11
TPB 8	TPB 1, TPB 2, TPB 10 TPB 11	TPB 3, TPB 6, TPB 11
TPB 10	TPB 3	TPB 1, TPB 6, TPB 8, TPB 11
TPB 11	TPB 3, TPB 8, TPB 10	TPB 6, TPB 8
TPB 13	TPB 6, TPB 11	TPB 11



4.4. Perumusan Isu PB Strategis dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029

Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 diawali dengan telaah dari berbagai dokumen perencanaan, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat hingga Kota Bogor. Hasil telaah tersebut kemudian menjadi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan yang kemudian diperkaya dalam proses FGD dan konsultasi publik. Selanjutnya isu yang terhimpun di kelompokkan berdasarkan kesamaan isu untuk mendapatkan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029. Untuk memfokuskan isu dalam analisis capaian SDGs, selanjutnya turut dilakukan analisis keterkaitan isu terhadap SDGs. Skema perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kota Bogor dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.14 Metode Perumusan Isu Strategis KLHS RPJMD

Berikut merupakan hasil identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan untuk KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029:



Tabel 4.3 Pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan

Kategori	Sumber Isu	Definisi Isu		Long List Isu	
Ekonomi	Rantek RPJMD	1	Bogor sebagai tujuan wisata dan MICE Ibukota	1	Optimalisasi sektor-sektor ekonomi potensial
	Rantek RPJMD	2	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial		
	Analisis TPB	3	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		
	Analisis TPB	4	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		
	Analisis TPB	5	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		
	Rantek RPJMD	6	Dampak pemindahan ibukota negara terhadap perekonomian Kota Bogor		
	Analisis TPB	7	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		
	Rantek RPJMD; Analisis TPB	8	Masih tingginya ketimpangan ekonomi	2	Tingginya ketimpangan
	Rantek RPJMD	9	Masih tingginya angka pengangguran	3	Tingginya angka pengangguran
	Rantek RPJMD	10	Pemanfaatan Ipteks dan teknologi informasi dibidang ekonomi yang perlu ditingkatkan	4	Peningkatan ekonomi melalui IPTEKS
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	11	Penguatan struktur ekonomi yang strategis seperti sektor industri jasa yang berbasis inovasi, riset dan teknologi		
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	12	Pemanfaatan IT dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing		
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	13	Penciptaan iklim usaha yang kondusif		
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	14	Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif		
	Rantek RPJMD	15	Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal	5	Peningkatan nilai tambah
	Rantek RPJMD, analisis 6 muatan KLHS & RPPLH	16	Penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan	6	Ketersediaan dan keterjangkauan pemenuhan kebutuhan pangan
	Analisis TPB	17	Pemenuhan kebutuhan kalori		
	Analisis TPB	18	skor PPH		



Kategori	Sumber Isu	Definisi Isu		Long List Isu		
	Rantek RPJMD	19	Citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains bertaraf nasional belum dimanfaatkan secara optimal	7	Peningkatan daya tarik Kota Bogor	
	Rantek RPJMD	20	Daya saing tenaga kerja yang perlu ditingkatkan	15	Kualitas tenaga kerja	
	Analisis TPB	21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	16	pertumbuhan PDB per tenaga kerja	
Sosial-Budaya	Rantek RPJMD	22	Kualitas dan Akses pendidikan yang belum merata	8	peningkatan akses pendidikan	
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	23	Peningkatan kualitas pendidikan bagi sumberdaya manusia di Kota Bogor			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	24	Pemerataan pendidikan formal maupun non formal			
	Analisis TPB	25	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	9	Angka partisipasi kasar pada jenjang PAUD, SMP dan SMA	
	Analisis TPB	26	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.			
	Analisis TPB	27	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).			
		Rantek RPJMD	28	Perlindungan bagi kelompok rentan termasuk ibu dan anak yang perlu ditingkatkan	10	perlindungan kelompok rentan dan anak
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	29	Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat			
Kesehatan	Rantek RPJMD	30	Belum optimalnya upaya peningkatan pelayanan dan akses kesehatan masyarakat	11	Pelayanan dan akses kesehatan	
	Analisis TPB	31	Unmet need pelayanan kesehatan.			
	Analisis TPB	32	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	33	Peningkatan kualitas kesehatan di Kota Bogor			
	Analisis TPB	34	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	12	Kesehatan bayi	
	Analisis TPB	35	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.			
	Analisis TPB	36	Pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada bayi			
		Analisis TPB	37	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	13	Jaminan kesehatan
		Analisis TPB	38	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	14	Pola hidup sehat
Infrastruktur	Rantek RPJMD	39	Penyediaan utilitas dasar pendukung permukiman yang belum optimal	17	Penyediaan infrastruktur permukiman dan perkotaan	



Kategori	Sumber Isu	Definisi Isu		Long List Isu	
	Analisis TPB	40	Belum meratanya akses terhadap air minum yg layak dan berkelanjutan		
	Analisis TPB	41	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.		
	Analisis TPB	42	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	43	Peningkatan pemenuhan sarana prasarana dan utilitas umum permukiman		
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	44	Pengembangan perkotaan yang cerdas lestari dan berkelanjutan		
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	45	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan		
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	46	Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (<i>global city</i>)		
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	47	Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan		
	Rantek RPJMD	48	Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	18	Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	49	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi		
	Rantek RPJMD	50	Peningkatan volume pengguna kendaraan yang belum diimbangi infrastruktur jalan yang memadai (infrastruktur ekonomi)	19	Kemacetan di Kota Bogor
	Rantek RPJMD	51	Kemacetan kota Bogor		
	Rantek RPJMD	52	Sistem transportasi yang belum terintegrasi	20	Sistem transportasi yang belum terintegrasi
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	53	Pengembangan transportasi hijau perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi		
Lingkungan	Rantek RPJMD, analisis 6 muatan KLHS & RPPLH	54	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan	21	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan



Kategori	Sumber Isu	Definisi Isu		Long List Isu		
	Rantek RPJMD, analisis 6 muatan KLHS & RPPLH	55	Tingkat kesadaran para pihak terhadap perubahan dan kelestarian lingkungan yang masih rendah			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	56	Peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	57	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis			
	Rantek RPJMD, analisis 6 muatan KLHS & RPPLH; Analisis TPB	58	Kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim	22	Bencana dan perubahan iklim	
	Analisis TPB	59	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).			
	Analisis TPB	60	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	61	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	62	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	63	Penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	64	Kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	65	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim			
	Rantek RPJMD, analisis 6 muatan KLHS & RPPLH	66	Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ditingkat rumah tangga yang perlu ditingkatkan	23		Belum optimalnya pengelolaan persampahan
	Rantek RPJMD, analisis 6 muatan KLHS & RPPLH	67	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang belum optimal akibat terbatas lahan			



Kategori	Sumber Isu	Definisi Isu		Long List Isu		
	Rantek RPJMD, analisis 6 muatan KLHS & RPPLH; Analisis TPB	68	Kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	69	Peningkatan pelayanan pengelolaan serta pemilahan sampah			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	70	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat			
	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	71	Integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>			
	RPPLH, Analisis TPB	72	Penurunan Kualitas dan Kuantitas sumberdaya air	24		Penurunan Kualitas dan Kuantitas sumberdaya air
	Analisis 6 muatan KLHS	73	Peningkatan potensi beban pencemar			
	RPPLH	74	Pengelolaan keanekaragaman hayati	25		Perlindungan keanekaragaman hayati
	Analisis TPB	75	Ketersediaan RTH yang masih minim	26		Ketersediaan RTH yang masih minim
Tata Kelola	Rantek RPJMD, Arah Kebijakan RPJPD Tahap I	76	Belum optimalnya kinerja smart city	27	Belum optimalnya kinerja smart city	
		77	Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan	28	Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan	
		78	Kinerja aparatur dan pelayanan publik yang perlu dioptimalkan	29	Kinerja aparatur dan pelayanan publik yang perlu dioptimalkan	
		79	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis IT			
		80	Pelayanan publik didukung oleh kualitas ASN yang berintegrasi, inovatif dan profesional			
		81	Optimalisasi pembiayaan			
		82	Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi	30	Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi	
		83	Kerjasama multihelix (filantropi, akademisi, NGO, horizontal (antar daerah), vertikal (Prov dan pusat))	31	Kerjasama multihelix (filantropi, akademisi, NGO, horizontal (antar daerah), vertikal (Prov dan pusat))	



Hasil dari pengumpulan isu yang telah menjadi daftar panjang isu strategis kemudian dikelompokkan untuk melihat keterkaitan dan kesamaan isu. Dari hasil pengelompokan isu, terdapat 6 isu strategis dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029. Lebih lanjut guna melakukan analisis pencapaian TPB maka turut dilakukan penelaahan terhadap TPB yang berkaitan dengan isu strategis. Selengkapnya mengenai pengelompokan dan penelaahan long list isu menjadi isu strategis dan bagaimana keterkaitannya dengan TPB yang dinilai strategis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Perumusan Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029

No	Long List Isu	Isu PB Strategis	TPB Terkait
1	Optimalisasi sektor-sektor ekonomi potensial	Masih minimnya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera	TPB 1, TPB 8, TPB 10
2	Peningkatan ekonomi melalui IPTEKS		
3	Peningkatan nilai tambah		
4	Tingginya ketimpangan		
5	Tingginya angka pengangguran		
6	Peningkatan daya tarik Kota Bogor		
7	Kualitas tenaga kerja	Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing	TPB 2, TPB 3, TPB 4
8	pertumbuhan PDB per tenaga kerja		
9	peningkatan akses pendidikan		
10	Angka partisipasi kasar pada jenjang PAUD, SMP dan SMA		
11	Ketersediaan dan keterjangkauan pemenuhan kebutuhan pangan		
12	perlindungan kelompok rentan dan anak		
13	Pelayanan dan akses kesehatan		
14	Kesehatan bayi		
15	Jaminan kesehatan		
16	Pola hidup sehat		
17	Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Akses terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai	TPB 9
18	Kemacetan di Kota Bogor		
19	Sistem transportasi yang belum terintegrasi		
20	Penyediaan infrastruktur permukiman dan perkotaan	Belum terpenuhi dan meratanya terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh	TPB 6, TPB 11
21	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan		
22	Belum optimalnya pengelolaan persampahan		
23	Penurunan Kualitas dan Kuantitas sumberdaya air		
24	Perlindungan keanekaragaman hayati		
25	Ketersediaan RTH yang masih minim	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	TPB 11, TPB 13
26	Bencana dan perubahan iklim		
27	Belum optimalnya kinerja smart city	Belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelambagaan pemerintah dan non-pemerintah di Kota Bogor	TPB 16, TPB 17
28	Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan		
29	Kinerja aparatur dan pelayanan publik yang perlu dioptimalkan		



No	Long List Isu	Isu PB Strategis	TPB Terkait
30	Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi		
31	Kerjasama multihelix (filantropi, akademisi, NGO, horizontal (antar daerah), vertikal (Prov dan pusat))		



Dari hasil identifikasi TPB yang menjadi isu strategis kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan isu. Hasil pengelompokan ini kemudian dirumuskan sebagai isu strategis yang ditetapkan dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil pengelompokan isu, terdapat 6 isu strategis yang ditetapkan dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Masih minimnya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera.
- b. Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing
- c. Akses terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai
- d. Belum terpenuhi dan meratanya terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh
- e. Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- f. Belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelambagaan pemerintah dan non-pemerintah di Kota Bogor



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
TAHUN 2024



BAB 5

ANALISIS CAPAIAN

INDIKATOR TPB PADA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHSI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029**



BAB 5 Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah

5.1. Hasil Analisis Capaian TPB pada Perangkat Daerah

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai dinas di pemerintah daerah. Setiap dinas memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ini, dengan fokus pada aspek-aspek spesifik yang relevan dengan bidang tugas dari dinas masing-masing.

Dinas yang memiliki capaian terbanyak atau TPB yang sudah sesuai target nasional (SS) adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Berdasarkan kewenangannya, berikut merupakan capaian indikator TPB pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bogor.

Tabel 5. 1 Analisis Capaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah di Kota Bogor

No	Dinas Kota Bogor	Sudah Sesuai target (SS)	Belum Sesuai Target (SB)	tidak ada/belum ada data (NA)	belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)	Total
1	Dinas Sosial	11	4	1	0	16
2	Dinas Kesehatan	29	5	3	0	37
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	5	1	0	17
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	2	2		0	4
5	Dinas Pendidikan	12	3		0	15
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4			0	4
7	UPTD ESDM Wilayah II	1			0	1
8	Kepolisian	10	3	3	0	16
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	1		0	4
10	Dinas Tenaga Kerja	8	3	2	0	13
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	1	2	0	8
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2	3	0	8
13	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	7	4	2	0	13
14	Badan Pusat Statistika (BPS)	6	2	2	0	10
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2	4		0	6
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3	1		0	4
17	DPMPSTP	1		1	0	2
18	Dinas Perhubungan	4			0	4

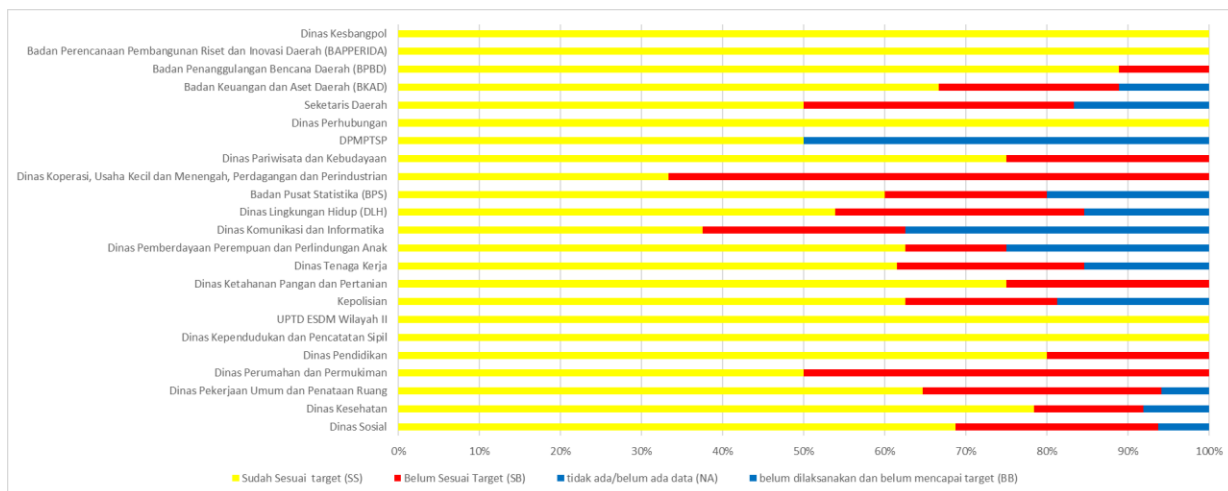


No	Dinas Kota Bogor	Sudah Sesuai target (SS)	Belum Sesuai Target (SB)	tidak ada/belum ada data (NA)	belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)	Total
19	Sekretaris Daerah	3	2	1		6
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	6	2	1	0	9
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	8	1		0	9
21	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	2			0	2
23	Dinas Kesbangpol	2				2
Total		143	45	22	0	210

Sumber: hasil analisis, 2024

Kota Bogor, sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan yang pesat, telah berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG) sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Setiap dinas di pemerintah kota berperan penting dalam mencapai tujuan-tujuan ini, dengan fokus yang spesifik sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dinas Kesehatan Dengan berbagai program kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah mencapai sekitar 78% dalam SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan). Ini mencakup peningkatan cakupan imunisasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta program kesehatan masyarakat yang proaktif. Dinas Pendidikan mencatat capaian sekitar 50% untuk SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan guru, dan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, terutama di daerah terpencil, telah memberikan dampak positif.

Capaian Dinas Sosial dalam mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan) tercatat sekitar 70%. Program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi telah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan. Secara keseluruhan, capaian SDG di Kota Bogor menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat antar dinas, masyarakat, dan pemangku kepentingan, diharapkan Kota Bogor dapat terus bergerak menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara optimal. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar berikut



Gambar 5. 1 Presentase Capaian TPB Setiap Dinas di Kota Bogor

5.2. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

5.2.1. Peran Pemangku Kepentingan dar unsur Pemerintah

Pembangunan berkelanjutan adalah tantangan global yang memerlukan kolaborasi efektif antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Di Indonesia, khususnya di tingkat daerah, pemerintah dan dinas memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya ini mencakup berbagai bidang, dari kesehatan hingga lingkungan hidup, dan melibatkan banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Berikut peran pemerintah dalam upaya pencapaian TPB per indikator.

Tabel 5. 2 Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pencapaian TPB

No	Perangkat Daerah	Keterlibatan dalam Pencapaian TPB	
1	Dinas Sosial	TPB 1, 8, 4	1.2.1.* 1.3.1.(d) 1.3.1.(b) 1.3.1.(c) 1.5.1.(b) 1.5.1.(c) 1.a.1* 1.a.2* 8.5.2* 10.4.1.(b)
2	Dinas Kesehatan	TPB 1,2.3.7	1.3.1.(a) 2.2.1* 1.4.1.(d) 1.4.1.(c) 1.4.1.(b) 1.4.1.(a) 2.1.1* 2.1.1.(a) 2.1.2.(a) 2.2.1* 2.2.1.(a) 2.2.2* 2.2.2.(a) 2.2.2.(b) 3.1.1*



No	Perangkat Daerah	Keterlibatan dalam Pencapaian TPB		
			3.1.2* 3.1.2.(a) 3.3.5* 3.4.1.(a) 3.4.1.(b) 3.4.1.(c) 3.4.2* 3.4.2.(a) 3.5.1.(e) 3.5.2*	3.b.1.(a) 3.c.1* 5.3.1.(b) 5.6.1.(a) 5.6.1.(b)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPB 6,9,11	6.5.1.(f) 9.1.1.(b) 11.3.2.(b)	
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	TPB 1,6,11	1.4.1.(d) 1.4.1.(f) 1.4.1.(e) 6.1.1.(a) 6.1.1.(b) 6.1.1.(c) 6.2.1.(a) 6.2.1.(b) 6.2.1.(c) 6.2.1.(d) 6.2.1.(f) 6.3.1.(a) 6.3.1.(b) 11.1.1.(a) 11.1.1.(b) 11.1.1.(c) 11.3.2.(a) 11.7.1.(a)	
5	Dinas Pendidikan	TPB 1,4	1.4.1.(g) 1.4.1.(h) 1.5.1.(d) 4.1.1.(a) 4.1.1.(b) 4.1.1.(d) 4.1.1.(e) 4.1.1.(f) 4.1.1.(g) 4.2.2.(a) 4.5.1* 4.6.1.(a) 4.6.1.(b) 4.a.1* 4.c.1*	
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPB 1	1.4.1.(j)	
7	UPTD ESDM Wilayah II	TPB 1	1.4.1.(k)	
8	Kepolisian	TPB 16	16.1.1.(a) 16.1.2.(a) 16.1.3.(a) 16.1.4*	
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	TPB 2 dan TPB 8	2.1.2* 2.3.1* 2.2.2.(c) 8.3.1.(b)	



No	Perangkat Daerah	Keterlibatan dalam Pencapaian TPB		
10	Dinas Tenaga Kerja	TPB 8	8.2.1* 8.3.1* 8.3.1.(a) 8.5.1* 8.5.2.(a) 8.6.1*	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TPB 5 dan TPB 16	5.1.1* 5.6.1* 5.2.1.(a) 5.2.1* 5.2.2* 5.2.2.(a) 5.3.1* 5.3.1.(a) 5.5.1* 5.5.2* 16.2.1.(a) 16.2.1.(b) 16.2.3.(a)	16.7.1.(a) 16.9.1* 16.7.1.(b) 16.9.1.(a) 16.9.1.(b)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPB 4,9,16,17	4.4.1* 5.b.1* 9.c.1* 9.c.1.(a) 9.c.1.(b) 16.10.2.(c) 17.6.2.(c)	
13	Dinas Lingkungan Hidup	TPB 6,11,12,15	6.3.2.(a) 6.5.1.(c) 6.5.1.(g) 11.6.1.(a) 11.6.1.(b) 12.4.2.(a) 12.5.1.(a) 12.6.1.(a) 12.7.1.(a) 12.8.1.(a) 15.1.1.(a) 15.3.1.(a) 15.9.1.(a)	
14	Badan Pusat Statistika	TPB 4,17,16	4.1.1* 17.18.1.(a) 16.5.1.(a) 17.18.1.(b) 17.18.1.(c) 17.19.2.(b) 17.19.2.(c) 17.19.2.(d)	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	TPB 8,9	8.3.1.(c) 9.2.1.(a) 9.2.1* 9.2.2* 9.3.1* 9.3.2* 9.5.1*	
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	TPB 8,11	8.9.1* 8.9.1.(a) 8.9.1.(b) 8.9.1.(c)	



No	Perangkat Daerah	Keterlibatan dalam Pencapaian TPB	
			8.9.2* 11.4.1.(a)
17	DPMPTSP	TPB 8,15	8.10.1* 8.10.1.(a) 15.6.1*
18	Dinas Perhubungan	TPB 9,11	9.1.1.(c) 9.1.1.(b) 11.2.1.(a) 11.2.1.(b)
19	Sekretaris Daerah	TPB 8,16	8.10.1.(b) 16.6.1.(b) 16.6.1.(a) 16.6.1.(c) 16.6.1.(d) 16.6.2.(a)
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPB 17	17.1.1* 17.1.1.(a) 17.1.2* 17.17.1.(a) 17.17.1.(b)
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TPB 1,10,11,13	1.5.1* 1.5.1.(e) 1.5.1.(a) 1.5.2.(a) 1.5.3* 10.3.1.(d) 11.5.1* 11.5.1.(a) 11.5.1.(b) 11.5.1.(c) 11.5.2.(a) 11.b.1* 11.b.2* 13.1.1* 13.1.2*
22	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	TPB 8,10	8.1.1* 8.1.1.(a) 10.1.1*
23	Dinas Kesbangpol	TPB 10,6	10.3.1.(a) 16.b.1.(a)

Sumber : Hasil analisis, 2024

5.2.2. Peran Pemangku Kepentingan dari unsur Pemerintah

Peran para pihak diluar pemerintah sangatlah berkontribusi dalam berbagai kegiatan di Kota Bogor. Pelaporan TJSLP/CSR di Kota Bogor sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan nilai yang terlapor setiap tahunnya sebagaimana tertulis dalam Tabel. Data dibawah didapat dari kegiatan yang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi TJSLP/CSR dan dari laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha di setiap tahunnya.



Tabel 5. 3 Laporan Pendanaan TJSPL 2016-2023

No.	Tahun	Nilai (Rp)
1	2016	Rp1.563.602.550*
2	2017	Rp7.080.452.580*
3	2018	Rp4.676.746.338*
4	2019	Rp4.531.798.335*
5	2020	Rp4.131.009.717
6	2021	Rp4.117.740.424
7	2022	Rp13.244.462.668
8	2023	Rp9.412.335.120

Sumber: Laporan TJSPL Kota Bogor Tahun 2023

Realisasi pelaporan kegiatan CSR Kota Bogor yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp9.412.335.120,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2022, angka tersebut turun sebesar Rp3.832.127.548 atau 28,93%. Pada tahun 2023 ada 43 pelaku usaha yang terdata melaksanakan TJSPL di Kota Bogor. Data tersebut didapat dari laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha dan perangkat daerah.

Tabel 5. 4 Laporan Pendanaan Kegiatan TJSPL Tahun 2023

No	Pelaku Usaha	Nilai TJSPL
1	Bank BJB	Rp3.361.931.040
2	PT. Mayora Indah Tbk.	Rp1.056.200.000
3	PT. Nutrifood	Rp956.226.370
4	Perumda Tirta Pakuan	Rp809.015.350
5	PT. Grab	Rp800.000.000
6	PT. Anggana Cendekia	Rp294.943.974
7	PT. Astra Daihatsu	Rp250.000.000
8	PT. KAI	Rp230.000.000
9	PT. Tirta Investama	Rp200.000.000
10	Perumda BPR Bank Kota Bogor	Rp162.238.000
11	Grand Savero Hotel	Rp144.050.000
12	Bogor Raya Basketball Club	Rp130.000.000
13	PT. Asuransi Kita Bisa	Rp120.000.000
14	PT. GoTo Gojek Tokopedia, Tbk.	Rp113.480.000
15	PT. Surveyor Indonesia	Rp104.969.000
16	Bank BCA	Rp103.000.000
17	PT. Adira	Rp90.634.000
18	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Rp81.362.500
19	PT. PEGADAIAN	Rp50.000.000
20	The 101 Hotel	Rp44.230.000
21	CV. NUTRIMA SEHAT ALAMI	Rp38.250.000
22	BIOFAL	Rp28.800.000
23	PT.Sejahtera Eka Graha (SEG)	Rp25.527.500
24	PLN	Rp25.000.000
25	RS. Marzuki Mahdi	Rp22.800.000
26	PT. Propan Raya	Rp22.500.000
27	Bank BNI	Rp20.000.000

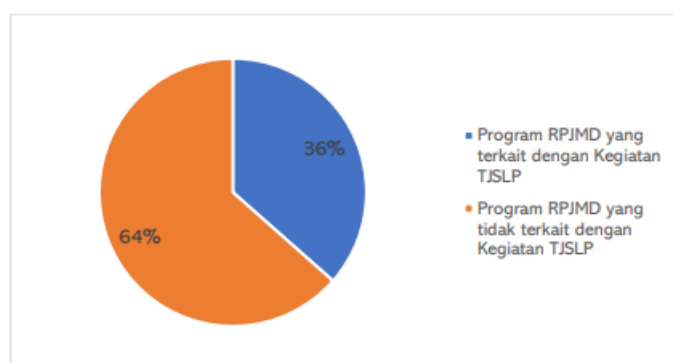


No	Pelaku Usaha	Nilai TJSPL
28	Royal Pajajaran Hotel	Rp19.873.000
29	PT. Iindosat	Rp15.000.000
30	PT. Dahana	Rp15.000.000
31	UPZ Kota Bogor	Rp15.000.000
32	BRI	Rp13.544.000
33	BAZNAS	Rp10.000.000
34	TASPEN	Rp10.000.000
35	PT. Nawa Agna	Rp8.640.000
36	Tokopedia	Rp7.000.000
37	RS. UMMI	Rp5.700.000
38	Yamaha	Rp4.000.000
39	PT.Intralab Ekatama	Rp1.820.386
40	UNILEVER DAN IPB	Rp900.000
41	Al Hasbi (toko alat ibadah)	Rp600.000
42	Ayam Goreng Maulagi	Rp100.000
TOTAL		Rp9.412.335.120

Sumber: Laporan TJSPL Kota Bogor Tahun 2023

Angka diatas belum mencakup bantuan yang berupa barang dan tidak diketahui nilai rupiahnya, karena beberapa pelaku usaha memberikan TJSPL/CSR dalam bentuk barang dan tidak menyebutkan nilai barang yang diberikan dalam rupiah.

Dari 137 program yang ada dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, terdapat 50 program atau 36,50% yang memiliki keterkaitan dengan kegiatankegiatan TJSPL Kota Bogor yang dilaksanakan tahun 2023



Gambar 5. 2 Persentase kegiatan TJSPL yang berkaitan dengan RPJMD

Pada tahun 2023 percepatan ODF dan pengentasan stunting menjadi dua program yang menjadi program unggulan TJSPL di Kota Bogor. Hal tersebut didasari oleh masih tingginya angka buang air besar sembarangan (BABS) di Kota Bogor yang menyebabkan belum adanya kecamatan yang berpredikat Open Defecation Free (ODF) pada awal tahun 2023. Pengentasan stunting juga sedang menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bogor di Tahun 2023. Selain kedua program tersebut, TJSPL di Kota Bogor juga dilaksanakan dalam berbagai bidang lain diantaranya adalah pemberdayaan UMKM, pemberdayaan



masyarakat, pembangunan sarana prasarana publik, sosial, dan lain-lain sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Dukungan Para Pihak Non Pemerintah Pada Tahun 2023

No	Pihak yang Berperan	Kontribusi yang Diberikan	Alokasi Anggaran	Indikator TPB Terkait	Dukungan Ke OPD Terkait	
1	PT. Adira	PERCEPATAN ODF 1. Pembangunan Sanimas IPAL; 2. Pelaksanaan Pembangunan Septictank Komunal	90.634.000,00	6.2.1.(c)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	PT. Pegadaian		50.000.000,00	6.2.1.(d)	Dinas Perumahan dan Permukiman	
3	PT. Surveyor Indonesia		104.969.000,00	6.2.1.(f)	Dinas Lingkungan Hidup	
4	PT. Sejahtera Eka Graha		25.527.500,00	6.3.1.(a)		
5	PT. Indosat		15.000.000,00	6.3.1.(b)		
6	UPZ Kota Bogor		15.000.000,00	6.3.2.(a)		
7	PT. Taspen		10.000.000,00	6.3.2.(b)		
8	Perumda BPR Bank Kota Bogor		81.362.500,00			
9	PT. Nutrifood Indonesia		956.226.370,00			
10	Baznas		10.000.000,00			
11	CV. Nutrimea Sehat Alami	PENGENTASAN STUNTING 1. Pemberian bantuan makanan berupa telur, makanan tambahan, susu, dan vitamin untuk anak dan ibu hamil	38.250.000,00	3.2.1*	Dinas Sosial	
12	RS. Marzuki Mahdi		22.800.000,00	3.2.2*	Dinas Kesehatan	
13	Perumda Tirta Pakuan		81.362.500,00	3.2.2.(a)		
16	PT. Dahana		15.000.000,00	3.2.2.(b)		
17	Biofal		28.800.000,00	5.3.1.(b)		
18	PT. Nawa Agna		8.640.000,00	5.6.1.(a)		
19	RS. Ummi		5.700.000,00			
20	Perumda BPR Bank Kota Bogor		162.238.000,00			
21	Intralab Ekatama		1.820.386,00			
22	Unilever & Institut Pertanian Bogor		900.000,00			
23	Al Hasbi		600.000,00			
24	The 101 Hotel		44.230.000,00			
25	Ayam Goreng Maulagi		100.000,00			
26	PT. Mayora Indah Tbk		PEMBERDAYAAN UMKM 1. Kantin Balaikota (KABITA) 2. Sentra Kuliner Sukasari 3. Pusat Kuliner Rangga Gading	1.056.200.000,00	8.3.1.(c)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
27	PT. Tirta Investama			200.000.000,00	8.10.1.(b)	Dinas Tenaga Kerja
28	Grab	800.000.000,00			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
					Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
29	PT. Astra Daihatsu	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
		Program Kampung Binaan Astra Daihatsu	250.000.000,00	8.3.1.(a)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	



No	Pihak yang Berperan	Kontribusi yang Diberikan	Alokasi Anggaran	Indikator TPB Terkait	Dukungan Ke OPD Terkait
		di Katulampa dengan membuka Wahana Ngalun yang dikelola oleh komunitas binaan yang bernama komunitas SARADA (Sahabat Remaja Astra Daihatsu)			Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pembinaan kelompok untuk kewirausahaan,		8.3.1.(b)	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Bantuan alat untuk posyandu		8.3.1.(c)	Dinas Kesehatan
		Bantuan sarana pertanian			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Sarana prasarana untuk pengembangan wahana Ngalun			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Alat pengolahan sampah			Dinas Lingkungan Hidup
		Bibit tanaman			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30	PT. GoTo Gojek Tokopedia, Tbk.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA UMUM Revitalisasi Taman Lansia	113.480.000,00	15.1.1.(a)	Dinas Lingkungan Hidup
31	Tokopedia	Pembangunan MCK Umum	7.000.000,00	8.9.1*	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman
32	Bogor Raya Basketball Club	Perbaikan GOR Pajajaran	130.000.000,00	8.9.1.(c)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
33	Bank BJB	PEMBANGUNAN GALERI BUMI PARAWIRA	3.361.931.040,00	8.1.1* 8.1.1.(a) 8.9.1.(c)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah



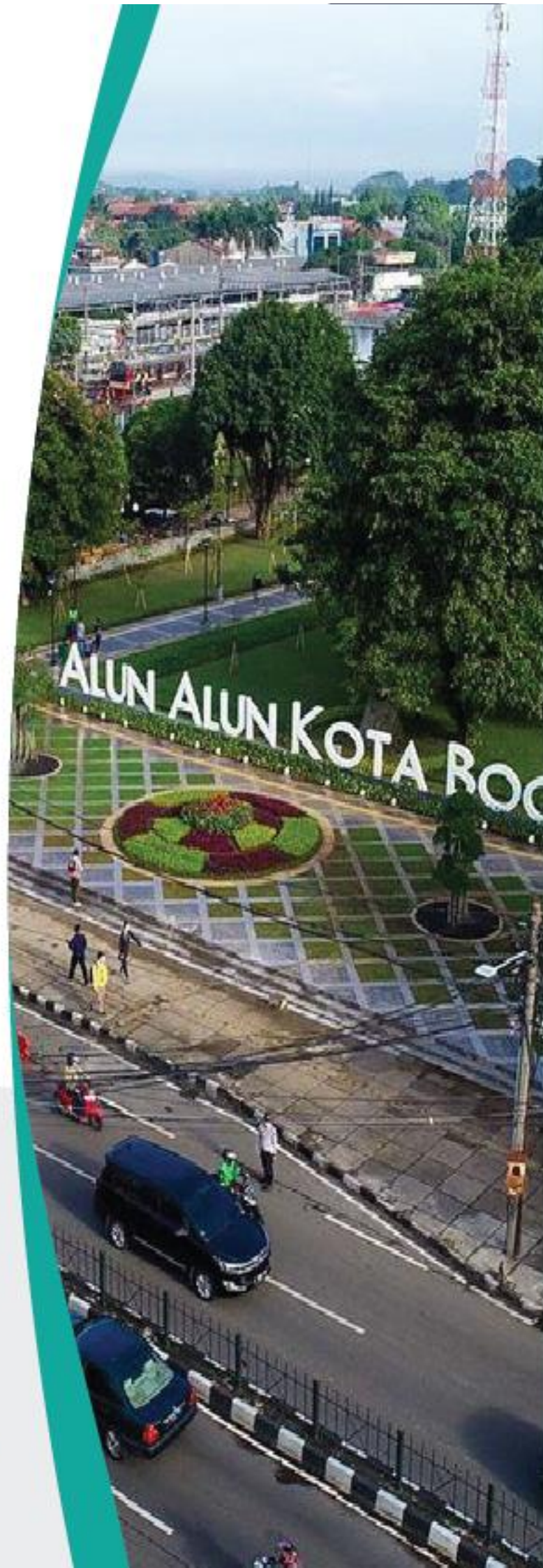
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
TAHUN 2024

BAB 6

ALTERNATIF SKENARIO PENCAPAIAN TPB

LAPORAN AKHIR

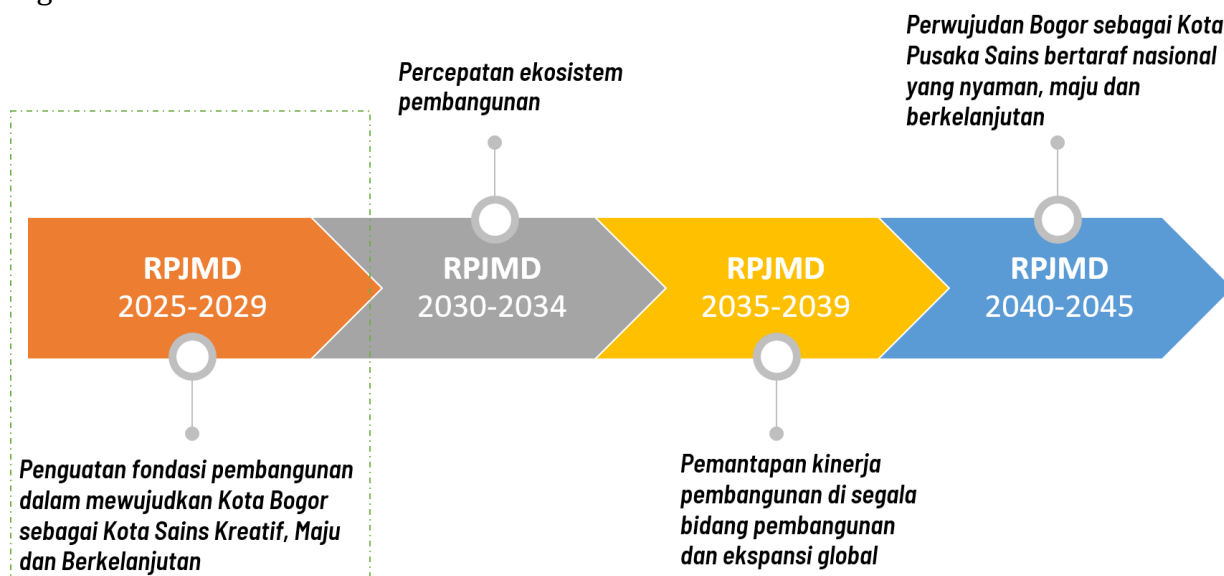
**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHSI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029**





BAB 6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Dalam analisis alternatif proyeksi dan skenario ini dilakukan terhadap indikator TPB yang berkaitan dengan isu strategis. Dalam menjaga konsistensi dan relevansi antara KLHS RPJMD terhadap amanat dari Rancangan Akhir RPJPD, turut dilakukan telaah terlebih dahulu terhadap tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, khususnya pada periode I. berikut merupakan Tahapan Pembangunan dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045:



Gambar 6. 1 Tahapan Pembangunan Pada Rancangan Akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045

Jika dilihat dari gambar diatas, fokus pembangunan pada tahapan awal (2025-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor adalah berfokus pada penguatan fondasi pembangunan dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai kota sains kreatif, maju dan berkelanjutan. Maka dari itu peran dari KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah memberikan penguatan dalam upaya pencapaian tersebut. Lebih lanjut dalam melihat bagaimana KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 ini memiliki relevansi terhadap Rancangan Akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, dilakukan Sintesa keterkaitan isu RPJPD, Rantrek RPJMD dan KLHS RPJMD Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Sintesa keterkaitan isu RPJPD, Rantrek RPJMD dan KLHS RPJMD Kota Bogor

Isu Strategis Rancangan Akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045	Isu Strategis Rantrek RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029
Sumberdaya Manusia yang Berbudaya, Kreatif dan Berdaya Saing	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing
Citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains	Citra Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah	-

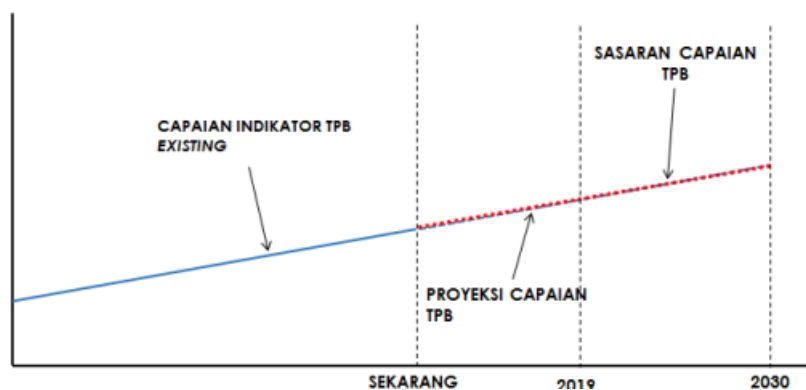


Isu Strategis Rancangan Akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045	Isu Strategis Rantek RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029
Transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi potensial. Sistem ekonomi sirkuler perkotaan	Transformasi Ekonomi dan Masyarakat	Perlunya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang sejahtera
Optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan berkelanjutan	Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan	Peningkatan akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
Infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi		Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim global	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global	Peningkatan terhadap upaya pembangunan berketahanan iklim
Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kinerja dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan non pemerintah di Kota Bogor

Secara garis besar alternatif skenario terdiri atas: a) skenario tanpa upaya tambahan, dan b) skenario dengan upaya tambahan. Dalam proses analisis terhadap isu strategis TPB, difokuskan pada indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target saja. Sehingga pada indikator tersebut diperlukan adanya upaya tambahan yang disampaikan dalam bentuk strategi, kebijakan dan program.

a) Skenario tanpa upaya tambahan

Skenario tanpa upaya tambahan dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB mencapai atau melampaui target yang ditentukan secara nasional atau regional. Pencapaian indikator TPB dilaksanakan dengan upaya yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (business as usual).



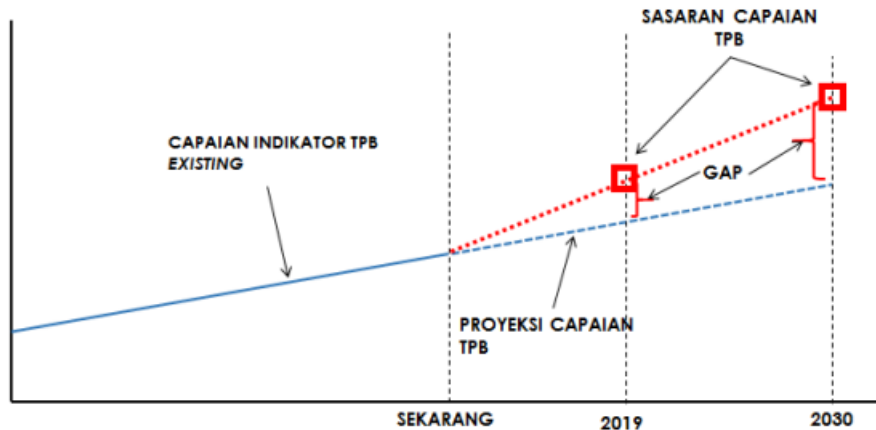
Gambar 6. 2 Skenario tanpa upaya tambahan

b) Skenario dengan upaya tambahan

Skenario dengan upaya tambahan dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB belum mencapai target yang ditentukan secara nasional atau regional.



Skenario pencapaian TPB dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target TPB. Upaya tambahan disusun dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: a) pencapaian target tanpa upaya tambahan; b) pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; c) potensi, daya saing dan inovasi daerah; d) daya dukung dan daya tampung daerah; dan e) peran para pihak; dan f) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.



Gambar 6.3 Skenario dengan upaya tambahan

6.1. Alternatif Skenario terhadap Daya Dukung Lingkungan

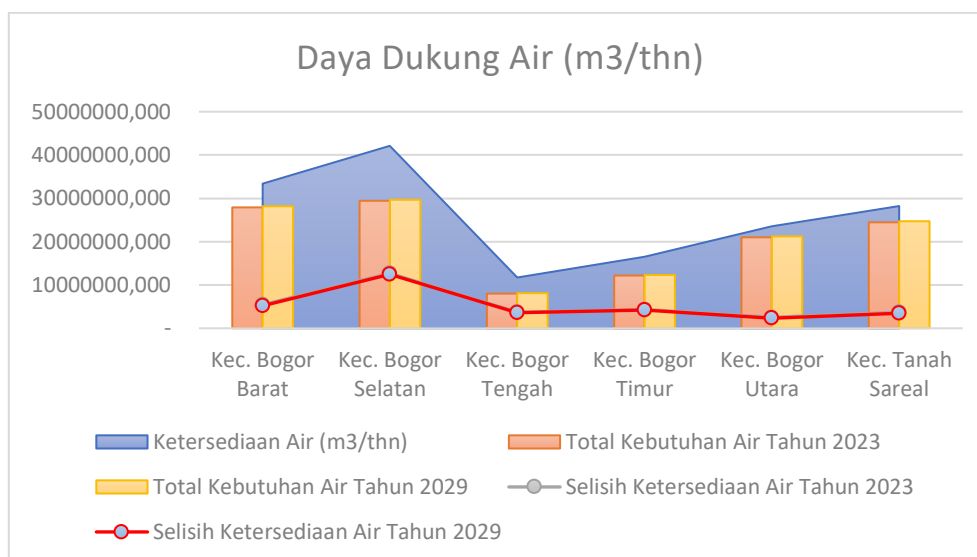
6.1.1. Skenario Daya Dukung Air

Total kebutuhan air di Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 122.955 ribu m³/thn, untuk ketersediaan air di Kota Bogor sebesar 155.399 ribu m³/thn dengan selisih status daya dukung air di Kota Bogor pada tahun 2023 mengalami defisit atau sudah terlampaui sebesar 32.403 ribu m³/thn. Perkembangan Kota Bogor merupakan bagian dari Wilayah Jabodetabek akan terus mengalami perkembangan baik dari kawasan terbangun ataupun jumlah penduduk dalam 5 tahun kedepan sehingga kebutuhan air akan terus mengalami peningkatan. Hasil prediksi kebutuhan air tahun 2029 di Kota Bogor mencapai 124.190 ribu m³/thn, sehingga daya dukung air semakin mengalami penurunan meskipun masih belum terlampaui 31.208 ribu m³/thn dengan asumsi ketersediaan air di Kota Bogor tidak menurun dengan mempertahankan kebijakan-kebijakan saat ini seperti kebijakan terkait upaya pemeliharaan Sungai, Danau dan Situ di Kota Bogor dan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air.

Kebijakan-kebijakan dalam upaya mempertahankan kondisi ketersediaan air di Kota Bogor perlu di lakukan dalam 5 tahun ke depan, mengingat perkembangan Kota Bogor sangat pesat hal itu diakibatkan karena daya tarik sektor-sektor jasa di Kota Bogor. Ketersediaan air jika dilakukan upaya tambahan untuk mempertahankan dan meningkatkan kuantitas sumber daya air, seperti Rehabilitasi Kawasan Badan Air, Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Air, Penyusunan Mekanisme Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Mengembangkan dan Menjaga RTH di Daerah Resapan Air dan Sempadan Sungai, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



(SPAM), dan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air Minum, sehingga daya dukung air sampai tahun 2029 masih belum terlampaui.



Gambar 6.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Bogor tahun 2029

Dalam upaya menjaga daya dukung air diperlukan strategi berupa Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pengembangan system penyediaan air minum yang diwujudkan melalui kebijakan Pengelolaan pengelolaan sumberdaya air dan pembangunan sarana prasarana air minum layak. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 2 Rekomendasi program dalam mempertahankan daya dukung air Kota Bogor

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
1302. Program Pengelolaan sumberdaya air	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan SPAM Kota Bogor Perlindungan terhadap sumber-sumber air baku peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) air minum yang layak Penanaman vegetasi yang memiliki kemampuan tinggi dalam peresapan air 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor
10303. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		
50103 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		

6.1.2. Skenario Daya Dukung Pangan

Kebutuhan pangan tahun 2029 di Kota Bogor yaitu 415.005 juta Kkal/thn. Peningkatan dari tahun 2023 – 2029 sebesar 5.731 juta Kkal. Secara keseluruhan dari hasil analisis 2023 kondisi daya dukung pangan Kota Bogor telah terlampaui, sehingga jika diproyeksikan hingga tahun 2029 kebutuhan akan semakin tinggi



seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kota Bogor. Ketersediaan pangan strategis di Kota Bogor hampir seluruhnya dipasok dari kabupaten kota yang ada diluar Kota Bogor. Sebagai kota dengan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa, Kota Bogor perlu menjaga kestabilan pasokan pangan dan kestabilan harga pangan pokok dan strategisnya, agar tidak terjadi inflasi. Dengan demikian kebutuhan pangan pokok dan strategis penduduk dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

6.2. Alternatif Skenario Capaian TPB

6.2.1. Perlunya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera

Dalam isu Pelunya peningkatan optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera., terdapat 3 TPB strategis yang berkaitan dengan isu ini, yakni TPB 1, TPB 8 dan TPB 10. Analisis alternatif proyeksi dan skenario pada TPB 1, 8 dan 10 dilakukan terhadap indikator yang belum mencapai target sebagaimana disajikan pada gambar dan tabel berikut.

Isu Strategis 1 "Perlunya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera"



Gambar 6.5 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis Ke-1 (Pelunya peningkatan optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera)

Tabel 6.3 Analisis Gap indikator yang belum mencapai target pada TPB 1, TPB 8 dan TPB 10

Target TPB		Gap/ masalah	Outcome
TPB 1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun		
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Ketercapaian target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan pada belum mencapai target 100%, dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 75,57%	Terpenuhinya kebutuhan air minum layak dan berkelanjutan di Kota Bogor secara kuantitas dan kualitas
1.2.1.*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Ketercapaian target persentase penduduk dibawah garis kemiskinan belum mencapai target yang ditetapkan, dimana target sebesar 6-7%, sedangkan	Menurunnya jumlah penduduk miskin secara signifikan



Target TPB		Gap/ masalah	Outcome
		ketercapaian pada tahun 2023 sebesar 6,67%	
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua		
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 masih berdampak terhadap laju pertumbuhan PDB per Kapita, dimana pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,57%. Kondisi tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, yakni 5,50%	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sektor unggulan
TPB 10	<u>Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara</u>		
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini di Kota Bogor Tahun 2023 sebesar 0,43. Kondisi tersebut masih perlu diturunkan untuk mencapai target nasional 0,36 dan target kota 0,31	Menurunnya tingkat kesenjangan di Kota Bogor Secara Signifikan

6.2.1.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

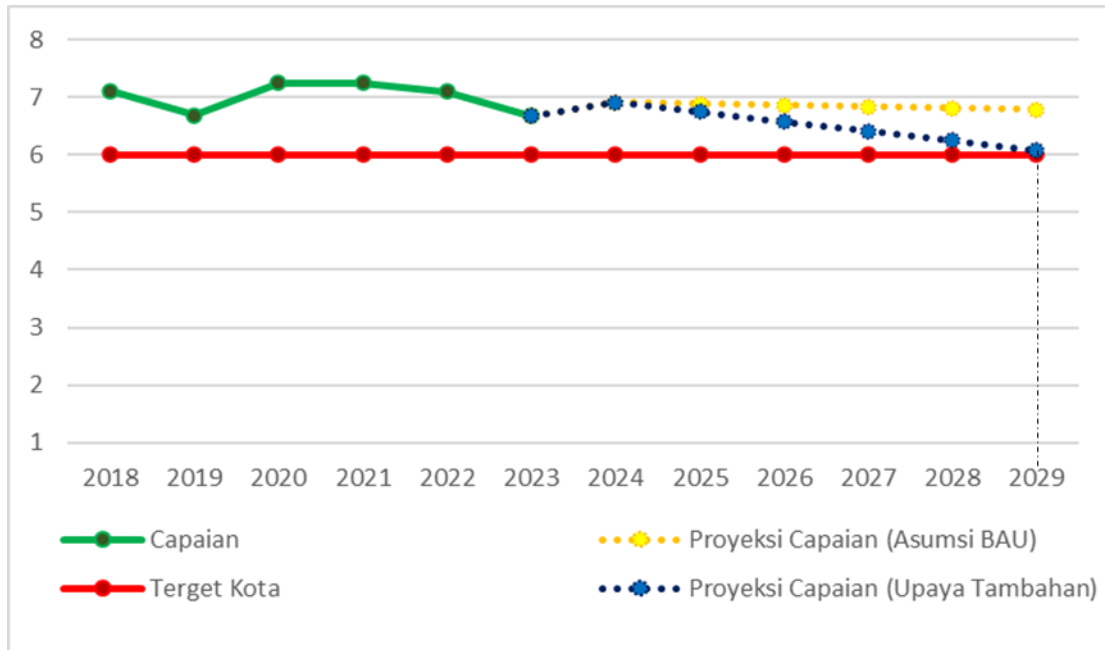
Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai kota, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2029 masih merupakan fokus utama. Berdasarkan evaluasi dan monitoring pencapaian TPB, salah satu indikator dengan kategori belum tercapai adalah penurunan kemiskinan. Target pencapaian penurunan Kota Bogor, yang seharusnya diakhir periode SDGs berada pada 6%, pada kenyataannya hanya turun pada angka 6,67% di tahun 2023. Maka, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bogor, dalam rangka mencapai Tujuan 1 TPB Tanpa Kemiskinan, menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 6% sampai akhir periode RPJMD Kota Bogor Tahun 2024-2029.

Berdasarkan Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 persentase penduduk dibawah garis kemiskinan menurun menjadi 7-8%. Secara capaian nasional Kota Bogor sudah tercapai namun berdasarkan target Kota Bogor yang menurun menjadi 6% belum tercapai. **Berdasarkan data** dari tahun **2018 hingga tahun 2023** diproyeksikan secara BAU (*Business as usual*) **belum mencapai target** pada tahun **2029 (6,78%)**. Maka, **diperlukan upaya tambahan berupa pengentasan penduduk miskin** (dapat dilihat pada biru) agar pada tahun 2029 (tahun akhir RPJMD) capaian indikator dapat mencapai target.



Tabel 6. 4 Skenario pencapaian target pada indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	6,89	6,86	6,83	6,81	6,78	Tanpa Upaya Tambahan
	6,75	6,58	6,41	6,24	6,08	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6. 6 Skenario pencapaian target penurunan penduduk miskin

Catatan:

- Capaian Tahun 2023 sebesar 6,67%;
- Dengan target capaian <7% maka target nasional telah tercapai;
- Capaian sebelum pandemic covid- 19 th 2018-2019 menurun 0,43% dan meningkat lagi setelah terjadi covid menjadi 7,24%.

Persoalan kemiskinan perlu ditempatkan dalam kerangka multidimensi. Artinya melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebabnya dari berbagai sisi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal lain, yaitu: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang/kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Dalam upaya menjaga menurunkan persentase jumlah penduduk miskin diperlukan strategi berupa Pengurangan persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang diwujudkan melalui kebijakan Peningkatan pembinaan dan pelatihan kompetensi terhadap masyarakat miskin pada kelompok usia produktif dan



Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 5 Rekomendasi program pencapaian target penurunan penduduk miskin

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
Program Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan; • Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan manula berupa Bantuan Kebutuhan Pokok • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; • Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat; • Pembinaan kemampuan Potensi pekerja masyarakat miskin. <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan masyarakat miskin dan rentan; • Pelatihan Pemberdayaan UMKM • Melakukan fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; • Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. • Penyelenggaraan pemantapan atau capacity building Pendamping Sosial untuk masyarakat miskin. 	Seluruh Kecamatan

6.2.1.2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 68,68% dari target sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non-perpipaan dan perpipaan. Namun demikian kaitan dengan indikator persentase rumah tangga yang terlayani air bersih, belum terdapat data yang spesifik mengenai masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan akses terhadap layanan air minum yang layak. Sehingga dalam analisis digunakan data layanan air bersih secara total.

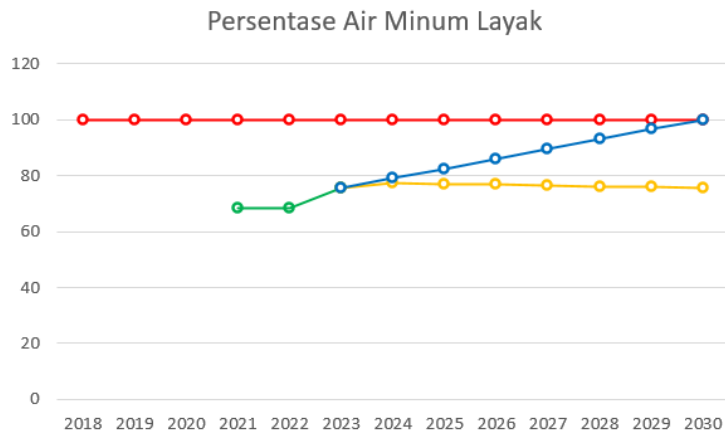
Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 68,68%, sehingga terdapat gap dengan target sebesar 31,32%. Upaya tambahan berupa peningkatan layanan, peningkatan efisiensi, serta pelestarian terhadap ekosistem penyedia air perlu dilakukan. Melalui upaya tersebut ditargetkan terjadi peningkatan persentase cakupan air bersih sebesar 2,27% per tahun. Sehingga pada target pemenuhan dapat tercapai secara lebih cepat.

Adapun mengenai bagaimana proyeksi kedepan jika melihat kondisi dengan adanya tambahan upaya dan dengan tambahan upaya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Tabel 6. 6 Skenario pencapaian target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	76,99	76,72	76,43	76,15	75,88	Tanpa Upaya Tambahan
	82,55	86,04	89,53	89,53	96,51	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6. 7 Alternatif skenario pemenuhan air minum layak

Catatan:

- Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 meningkat menjadi 100%.
- Capaian pada tahun 2023 adalah **75,57%**
- Proyeksi capaian (BAU) **belum mencapai target** pada tahun 2029 (**75,60%**).
- Maka, **diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target air minum layak dan berkelanjutan 100%**.

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan air minum layak diperlukan strategi berupa peningkatan akses terhadap air minum yang layak yang diwujudkan melalui kebijakan Perencanaan dan pembangunan sarana prasarana air minum layak yang terintegrasi. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 7 Rekomendasi program pencapaian target air minum layak

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
1302. Program Pengelolaan sumberdaya air	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan SPAM Kota Bogor • Perlindungan terhadap sumber-sumber air baku • Peningkatan layanan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah • peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) air minum yang layak 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor
10303. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum		
10307. Program pengembangan permukiman		
50103 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		

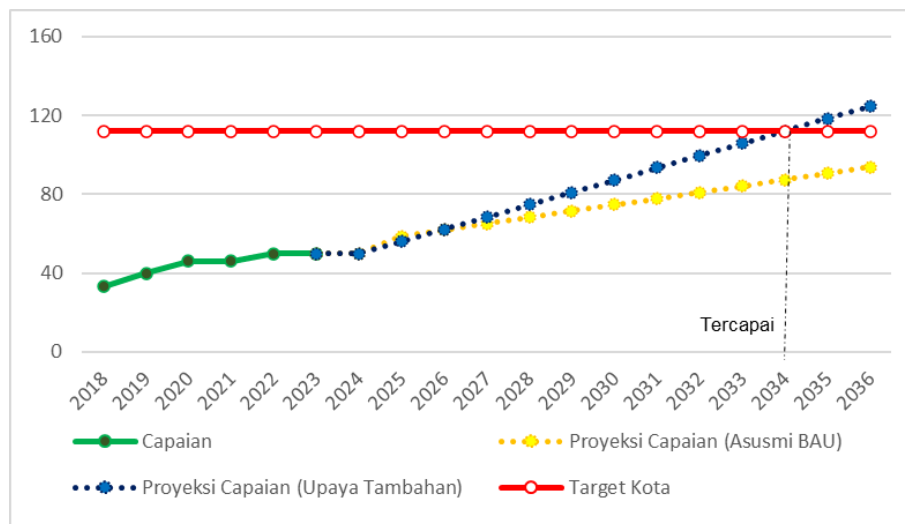


6.2.1.3. PDB Per Kapita (TPB 8 pada Indikator 8.1.1(a))

Perekonomian Daerah Kota Bogor berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi. Selama lima tahun terakhir, perekonomian tumbuh rata-rata sebesar 5,10 persen per tahun. Kondisi ekonomi Kota Bogor, dari sudut pandang pertumbuhan produksi lapangan usaha atau kategori ekonomi, termasuk membanggakan. Tahun 2020 landasan ekonomi Kota Bogor cukup baik, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB Kota Bogor. Sektor tersebut antara lain perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi & makan minum, real estate, jasa Pendidikan, kesehatan, dan konstruksi. Terdapat data capaian pada tahun 2018 hingga 2023 yang mencapai 49,76 juta/kapita, jika dilakukan proyeksi secara BAU (*business as usual*) terjadi peningkatan namun belum mencapai target untuk kota Bogor dan gap ketercapaian masih sangat jauh sebesar 40,63 juta/kapita dan akan tercapai pada tahun 2045. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 6. 8 Skenario pencapaian target laju pertumbuhan PDB per Kapita

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	4,32	4,88	5,44	6	6,56	Tanpa Upaya Tambahan
	6,35	7,55	8,72	9,86	10,98	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6. 8 Skenario pencapaian PDB per Kapita

Catatan:

- Capaian Tahun 2023 sebesar 49,76 juta/kapita
- Dengan target capaian 112 juta/kapita target Kota Bogor maka tahun 2024 belum tercapai; dan
- Jika dilihat dari data 2018-2023, terjadi peningkatan pendapatan 16,51 juta/kapita.

Tujuan 8 berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi;



menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (*NEET*); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan. Untuk mencapai target sampai akhir tahun RPJMD diperlukan upaya tambahan berupa peningkatan PDB Per kapita setiap tahun, agar pada tahun 2029 (tahun akhir RPJMD) gapnya tidak terlalu besar dan berdasarkan proyeksi capaian indikator dapat mencapai target pada tahun 2034 mencapai pendapatan perkapita penduduk 112 juta/tahun.

Dalam upaya meningkatkan PDB per kapita diperlukan strategi berupa percepatan peningkatan pendapatan per kapita yang diwujudkan melalui kebijakan Peningkatan ekonomi kreatif dan produktivitas tenaga kerja. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 9 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan PDB per kapita

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5- 3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM • Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif. • Pengembangan pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan UMKM Non Kreatif. • Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital • Pengembangan Sistem Pemasaran Bagi UMKM • Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif • Fasilitasi bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif (Banper) dan UMKM Non Kreatif 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi; • Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif dan UMKM Non Kreatif. • Pelatihan tenaga kerja di bidang pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja. • Pelatihan Teknologi Terapan dan Kewirausahaan • Sosialisasi terkait Strategi Pemasaran Melalui Aplikasi SOLUSI (Sistem Operasional Layanan dan Sarana Promosi) • Penambahan LPK 	

Keterangan:

Sektor ekonomi yang potensial dikembangkan berdasarkan analisis adalah 7 sektor menjadi sektor basis (mantap):

1. Pengadaan Listrik dan Gas
2. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang
3. Konstruksi
4. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
5. Transportasi & Pergudangan
6. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum



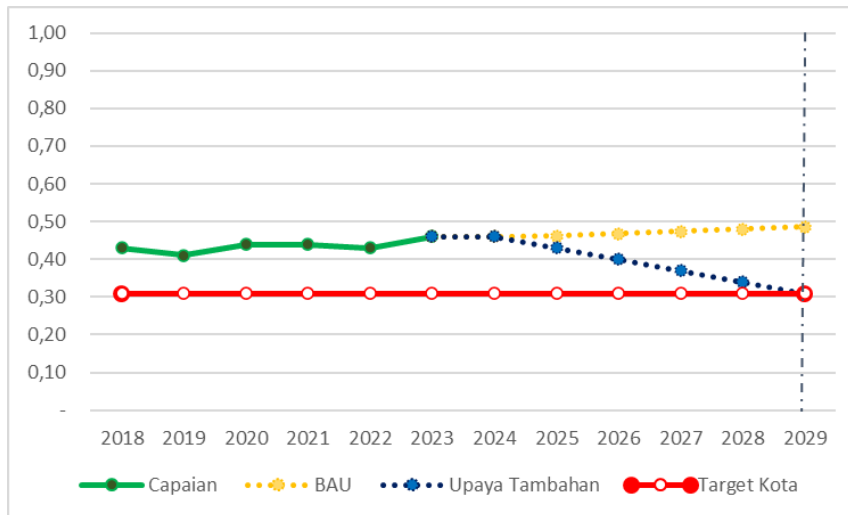
7. Jasa Lainnya

6.2.1.4. Gini Ratio (TPB 10 pada Indikator 10.1.1*)

Pemerintah daerah Kota Bogor mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Kecamatan di Kota Bogor. Capaian pada tahun 2023 untuk gini ratio adalah 0,46. Capaian dilakukan proyeksi secara BAU (*business as usual*) akan terjadi peningkatan jika melihat trend dari tahun 2018 sampai 2023. Target capaian diperoleh dari target dalam Perpres 111/2022 yaitu menurun menjadi 0,378 dan Target Kota 0,31. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 6. 10 Skenario pencapaian target koefisien gini

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Koefisien Gini.	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49	Tanpa Upaya Tambahan
	0,43	0,4	0,37	0,34	0,31	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6. 9 Skenario pencapaian target Koefisien Gini

Berdasarkan diagram di atas secara BAU, pada tahun 2025 (tahun awal RPJMD), terdapat gap capaian sebesar 0,15% terhadap target dan pada tahun 2029 (tahun akhir RPJMD), Maka, diperlukan upaya tambahan berupa penurunan koefisien gini per tahun (dapat dilihat pada garis biru) agar pada tahun 2029 (tahun akhir RPJMD) capaian indikator dapat mencapai target mencapai 0,31. Kebijakan Tujuan 10 untuk menurunkan tingkat gini rasio dengan upaya peningkatan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pelayanan infrastruktur. Secara lebih jelas dapat di lihat pada Tabel berikut.



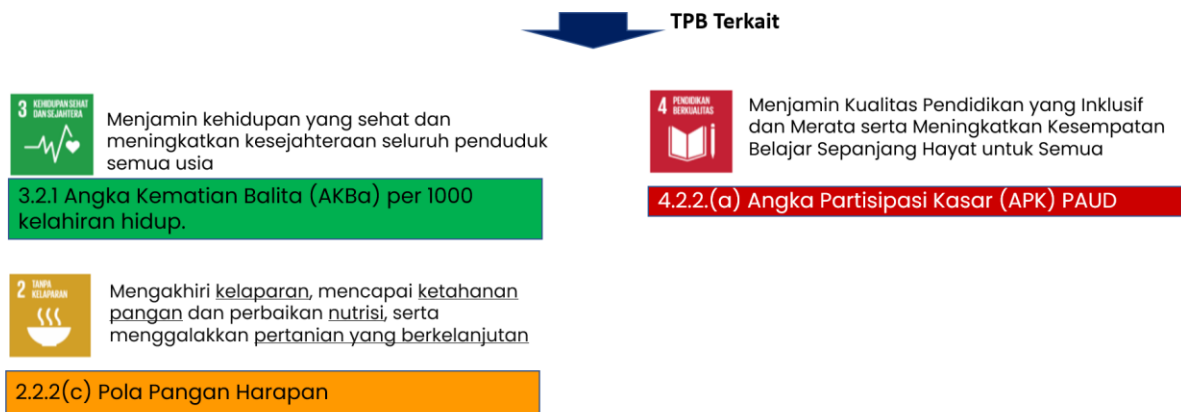
Tabel 6. 11 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target koefisien gini

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5- 3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
Program Perekonomian Dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota • Pengendalian dan Distribusi Perekonomian • Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil • Fasilitasi Kerja Sama Daerah • Pengembangan kualitas SDM manusia yang merata dan berkeadilan; • Pemerataan pelayanan Infrastruktur pelayanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan • Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik • Pelatihan keterampilan berbasis masyarakat 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor

6.2.2. Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing

Dalam isu peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing, terdapat 3 TPB strategis yang berkaitan dengan isu ini, yakni TPB 3, TPB 2 dan TPB 4. Analisis alternatif proyeksi dan skenario pada TPB 2, TPB 3 dan TPB 4 dilakukan terhadap indikator yang belum mencapai target sebagaimana disajikan pada gambar dan tabel berikut.

Isu Strategis 2 “Peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing”



Gambar 6. 10 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis 2 (Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing)

Tabel 6. 12 Analisis Gap indikator yang belum mencapai target pada TPB 2, TPB 3 dan TPB 4

	Target TPB	Gap/ masalah	Outcome
TPB 2	Mengakhiri <u>kelaparan</u> , mencapai <u>ketahanan pangan</u> dan perbaikan <u>nutrisi</u> , serta menggalakkan <u>pertanian yang berkelanjutan</u>		
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup diharapkan/ ditargetkan	Menurunnya prevalensi di Kota



Target TPB		Gap/ masalah	Outcome
	pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	menurun, namun kondisi capaian pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana kondisi pada tahun 2023 sebesar 7,1/ 1000 kelahiran hidup dan kondisi pada tahun 2022 sebesar 4/ 1000 kelahiran hidup	Bogor secara signifikan
2.2.2(c)	Pola Pangan Harapan	Pola pangan harapan pada tahun 2023 sebesar 84,61 masih belum mencapai target yang ditetapkan yakni 92,5.	
TPB 3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia		
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup diharapkan/ ditargetkan menurun, namun kondisi capaian pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana kondisi pada tahun 2021 sebesar 3,58 dan kondisi pada tahun 2022 sebesar 3,89	Meningkatnya kualitas dan layanan terhadap kesehatan ibu dan anak di Kota Bogor
TPB 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka partisipasi kasar pada jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat ditargetkan meningkat menjadi 77,2%, namun kondisi ketercapaian pada tahun 2023 sebesar 51,5%	Meningkatnya angka partisipasi kasar PAUD secara signifikan

6.2.2.1. Skor Pola Pangan Harapan (TPB 2 pada Indikator 2.2.(c))

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

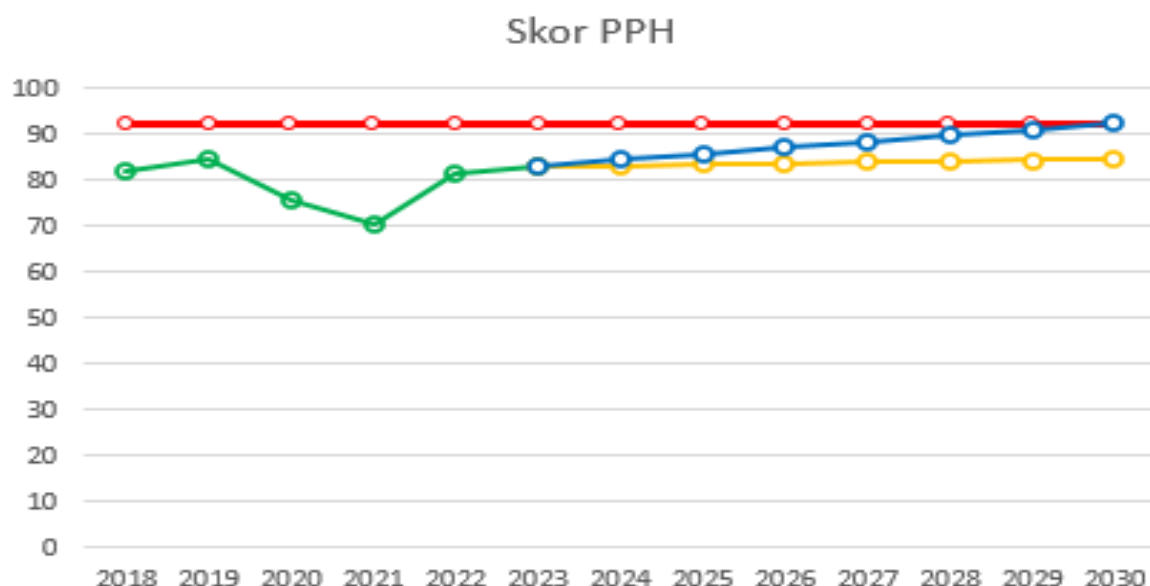
Data menunjukkan, skor PPH Kota Bogor tahun 2018 sebesar 82,02, meningkat menjadi 84,90 pada 2019. Namun pada tahun-tahun berikutnya menurun mencapai 70,56 di tahun 2021. Lalu pada 2022 skor ini meningkat kembali ke angka 81,70 dan terakhir pada tahun 2023 meningkat ke angka 83,1. Skor PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Kota Bogor. Pada bidang ketahanan pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan.



Proyeksi peningkatan pola pangan harapan dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan melalui peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas, peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan, serta urban farming. Disamping itu, peningkatan nilai tambah juga diperlukan melalui inovasi dan IPTEK dibidang pertanian. Upaya tersebut dilakukan mengingat sangat terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk produksi pangan karena padatnya pemanfaatan lahan di Kota Bogor, serta arah perkembangan kota sebagai kota jasa. Melalui upaya tersebut di targetkan terjadi peningkatan pola pangan harapan sebesar 0,47 poin setiap tahun, sehingga pada akhir periode RPJPD dapat mencapai target PPH. Adapun mengenai bagaimana proyeksi kedepan jika melihat kondisi dengan adanya tambahan upaya dan dengan tambahan upaya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 6. 13 Skenario pencapaian target pola pangan harapan

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Pola Pangan Harapan	83,53	83,75	83,96	84,18	84,4	Tanpa Upaya Tambahan
	85,79	87,13	88,47	89,91	91,16	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6. 11 Alternatif skenarip peningkatan skor PPH

Catatan:

- Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 skor meningkat menjadi 92,5.
- Capaian pada tahun 2023 adalah **83,1**
- Proyeksi capaian (BAU) **belum mencapai target** pada tahun **2029 (84,61%)**.
- Maka, **diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target skor PPH sebesar 92,5**.

Dalam upaya meningkatkan skor PPH diperlukan strategi berupa Meningkatnya Pola Pangan Harapan Kota Bogor yang diwujudkan melalui kebijakan Penguatan ketahanan, keamanan dan keterjangkauan pangan, serta diversifikasi pangan. Lebih



teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 14 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan skor PPH

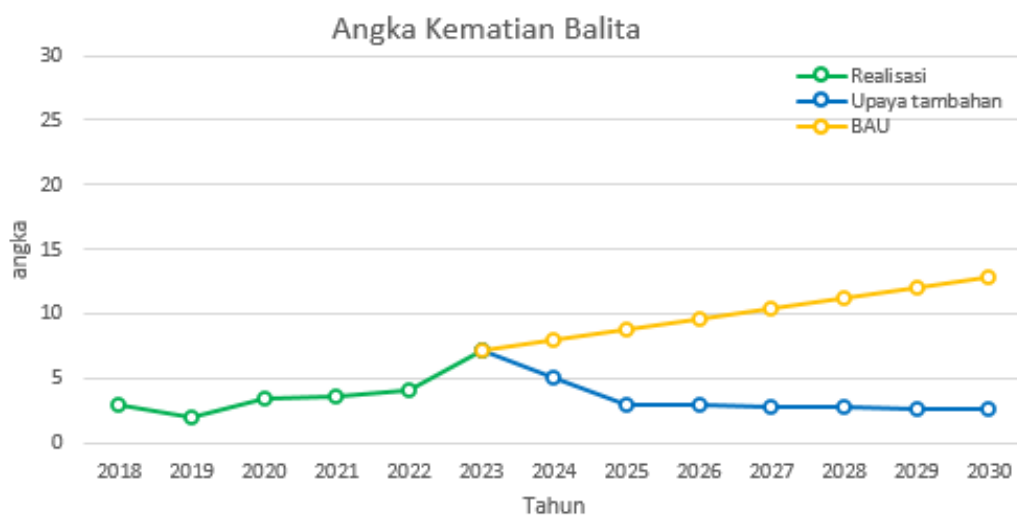
Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
20903. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan 20905. Program pengawasan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan terhadap ketahanan pangan • Diversifikasi terhadap jenis-jenis pangan • Pengawasan terhadap keamanan pangan 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor

6.2.2.2. AKBa Per 1000 Kelahiran Hidup (TPB 3 pada Indikator 3.2.1)

Angka Kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka kematian bayi di Kota Bogor tahun 2023 mengalami peningkatan dari 4 tahun kebelakang ini. Pada tahun 2022, jumlah kematian bayi sebesar 3,9 /1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2023 sebesar 7,1 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab Kematian tersebut didominasi oleh kondisi Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan prematuritas. Adapun mengenai bagaimana proyeksi kedepan jika melihat kondisi dengan adanya tambahan upaya dan dengan tambahan upaya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 6. 15 Skenario pencapaian target Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	8,74	9,56	10,39	11,21	12,03	Tanpa Upaya Tambahan
	5,09	2,99	2,92	2,85	2,77	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6. 12 Alternatif skenario penurunan Angka Kematian Balita

Catatan:



- Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 target terhadap AKB adalah menurun.
- Capaian pada tahun 2023 adalah **7,1 per 1000 Kelahiran Hidup**
- Proyeksi capaian (BAU) **cenderung mengalami peningkatan.**
- Maka, **diperlukan upaya tambahan untuk menurunkan Angka Kematian balita.**

Pada proyeksi diatas, apabila tidka dilakukan upaya tambahan maka tren angka kematian bayi cenderung meningkat. Maka dari itu diperlukan upaya pengurangan angka kematian bayi melalui peningkatan cakupan layanan kesehatan balita, peningkatan pelayanan pemantauan pertumbuhan anak usia 12-59 bulan, stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita serta peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dengan upaya tersebut maka di proyeksikan angka kematian balita dapat terus ditekan dan semakin menurun.

Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Balita diperlukan strategi berupa Menurunnya angka kematian balita yang diwujudkan melalui kebijakan Perlindungan Kesehatan terhadap ibu dan anak. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 16 Rekomendasi program pencapaian target penurunan angka kematian balita

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
(10202) Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan kesehatan balita rentang 12-59 bulan • Peningkatan layanan pemantauan pertumbuhan anak usia 12-59 bulan 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor
(21404) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita 	

6.2.2.3. TPB 3 Lainnya yang berkaitan dengan SPM Kesehatan

Terdapat 4 aspek/ indikator TPB yang sudah mencapai target namun dirasa perlu untuk tetap dimasukkan dalam alternatif skenario yang mencakup:

a. Pelayanan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan (Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual).

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan.

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi 1 (satu) kali pada trimester pertama, 2 (dua) kali pada trimester kedua, dan 3 (tiga) kali pada trimester ketiga. Pelayanan Kesehatan



Masa Hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada trimester pertama dan ketiga.

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis termasuk pelayanan ultrasonografi (USG). Pelayanan Kesehatan Masa Hamil wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal sesuai standar dan secara terpadu.

Berdasarkan data pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar, dari data evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor menunjukkan bahwa capaian dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 93,61% dan 2022 sebesar 97,36%. Dengan target capaian yang ditetapkan sebesar 100%, maka diperlukan upaya tambahan dalam pencapaian target. Berikut merupakan skenario pencapaian target pelayanan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standari di Kota Bogor.

b. Pelayanan Ibu Bersalin

Keberhasilan pelayanan kesehatan ibu bersalin diukur dengan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan dan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Cakupan tersebut menggambarkan tingkat penghargaan masyarakat terhadap tenaga penolong persalinan dan manajemen persalinan KIA dalam memberikan pertolongan persalinan secara profesional. Berdasarkan data, tahun 2022 cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang, yaitu tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, di tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari 99,1% di tahun 2019 menjadi 93,1%. Capaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 94,9% dan terus meningkat di tahun 2022 menjadi 96,1%. Dengan target yang ditetapkan secara nasional sebesar 100%, maka diperlukan upaya untuk pencapaian target tersebut. Berikut merupakan skenario pencapaian target pelayanan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dimulai segera setelah bayi lahir sampai 28 hari. Pelayanan pasca persalinan pada bayi baru lahir dimulai sejak usia 6 jam sampai 28 hari, meliputi:

- a. menjaga bayi tetap hangat;
- b. pemeriksaan neonatus menggunakan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
- c. bimbingan pemberian ASI dan memantau kecukupan ASI;
- d. perawatan metode Kangguru (PMK);
- e. pemantauan pertumbuhan neonatus;
- f. masalah yang paling sering dijumpai pada neonatus

Pelayanan neonatal esensial dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan, yang meliputi:

- 1 (satu) kali pada umur 6-48 jam; (KN 1)
- 1 (satu) kali pada umur 3-7 hari (KN 2); dan
- 1 (satu) kali pada umur 8-28 hari. (KN 3)



Berdasarkan data evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2022, diketahui bahwa pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kota Bogor terus mengalami peningkatan dimana pada kondisi awal periode 2018-2019 ialah sebesar 90,10% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 99,69%. Namun demikian dengan target yang ditetapkan sebesar 100% diperlukan sedikit upaya tambahan untuk mencapai target tersebut. Berikut merupakan skenario pencapaian target untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kesehatan bayi baru lahir di Kota Bogor.

- d. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Cakupan pelayanan kesehatan pada anak balita dilakukan dalam rentang usia anak 12 bulan – 59 bulan dengan cakupan pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali setahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal delapan kali dalam setahun);
 - b. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus;
 - c. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita minimal dua kali dalam setahun;
 - d. Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Berdasarkan data evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2022, diketahui bahwa pelayanan kesehatan balita di Kota Bogor terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 ialah sebesar 78,84% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 94,42%. Namun demikian dengan target yang ditetapkan sebesar 100% diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target tersebut. Berikut merupakan skenario pencapaian target untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kesehatan balita di Kota Bogor.

Adapun proyeksi terhadap keempat aspek tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Dalam upaya mempertahankan keempat aspek diatas diperlukan strategi berupa Pelayanan kesehatan yang professional dan inklusif yang diwujudkan melalui



kebijakan Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi dan balita. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 17 Rekomendasi program mempertahankan target pelayanan kesehatan

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahkan Lokasi Prioritas
(10202) Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil • Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin • Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 	RSUD, Puskesmas & Fasyankes di Kota Bogor
(21404) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan kesehatan balita • Pencegahan dan deteksi dini penyakit 	

6.2.2.4. APK PAUD (TPB 4 pada Indikator 4.2.2.(a))

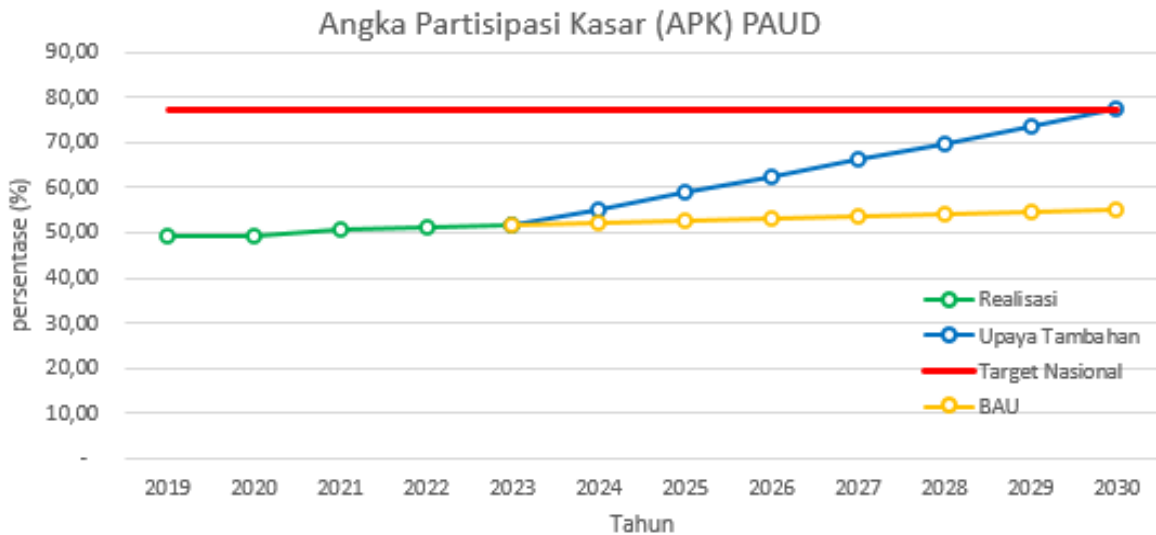
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun). Berdasarkan data 2021-2023, diketahui bahwa APK pendidikan anak usia dini di Kota Bogor sebesar 51,5%, sedangkan target yang ditetapkan untuk APK PAUD sebesar 77,2%. Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan upaya tambahan untuk pencapaian target tersebut.

Upaya tambahan yang dimaksud berupa peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik. Melalui upaya tersebut maka ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 1,26% setiap tahunnya, sehingga target dapat tercapai di akhir tahun rencana.

Adapun mengenai bagaimana proyeksi kedepan jika melihat kondisi dengan adanya tambahan upaya dan dengan tambahan upaya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 6. 18 Skenario pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	52,5	53	53,5	54	54,5	Tanpa Upaya Tambahan
	58,84	62,51	66,19	69,86	73,53	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6.13 Alternatif skenario peningkatan APK PAUD

Catatan:

- Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 target terhadap APK PAUD adalah 77,2%.
- Capaian pada tahun 2023 adalah **51,5%**.
- Proyeksi capaian (BAU) cenderung mengalami peningkatan namun belum mencapai target pada 2029.
- Maka, diperlukan upaya tambahan untuk pencapaian target APK Paud 77,2%.

Dalam upaya meningkatkan APK PAUD diperlukan strategi berupa Peningkatan kualitas Pendidikan dasar yang diwujudkan melalui kebijakan Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan dasar. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6.19 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target peningkatan APK PAUD

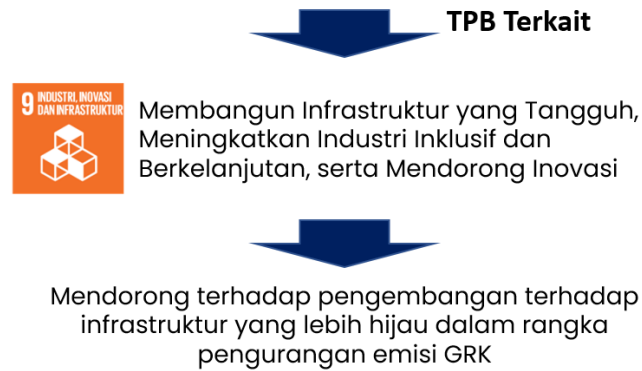
Program (Nomenklatur Permendagri Kemendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahkan Lokasi Prioritas
(10102) Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana PAUD • Peningkatan kualitas SDM 	Seluruh PAUD di Kota Bogor
(10103) Program pengembangan kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kurikulum • Pengembangan model-model Pendidikan inovatif 	

6.2.3. Akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai

Dalam isu Akses terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai, terdapat 1 TPB strategis yang berkaitan dengan isu ini, yakni TPB 9. Dalam analisisnya dilakukan dengan pendekatan dorongan terhadap pengembangan infrastruktur hijau untuk pengurangan emisi.



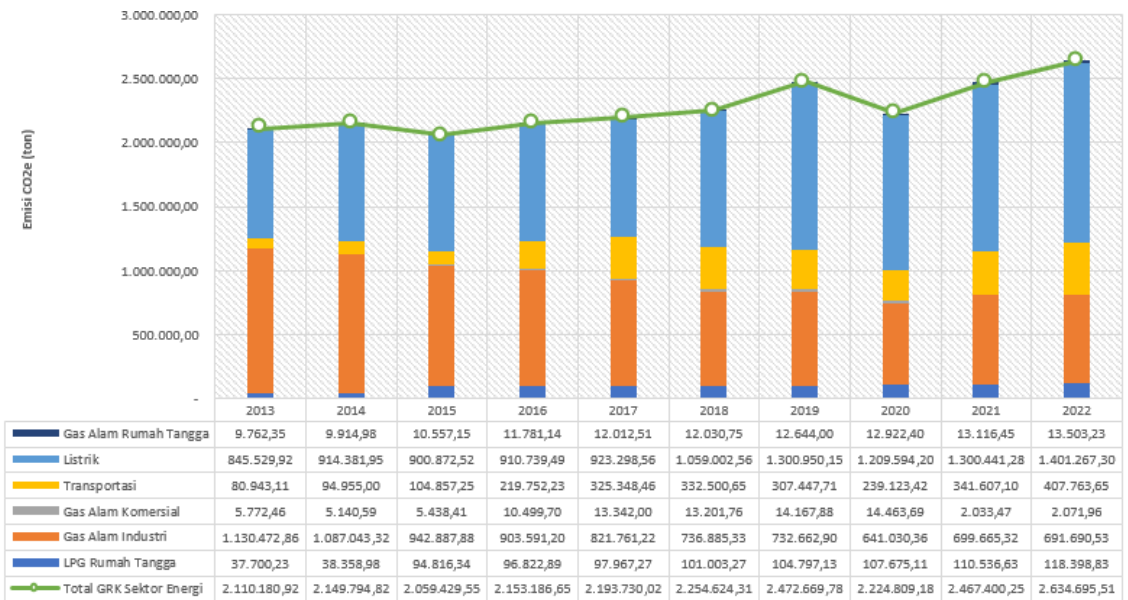
Isu Strategis 3 “Peningkatan akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”



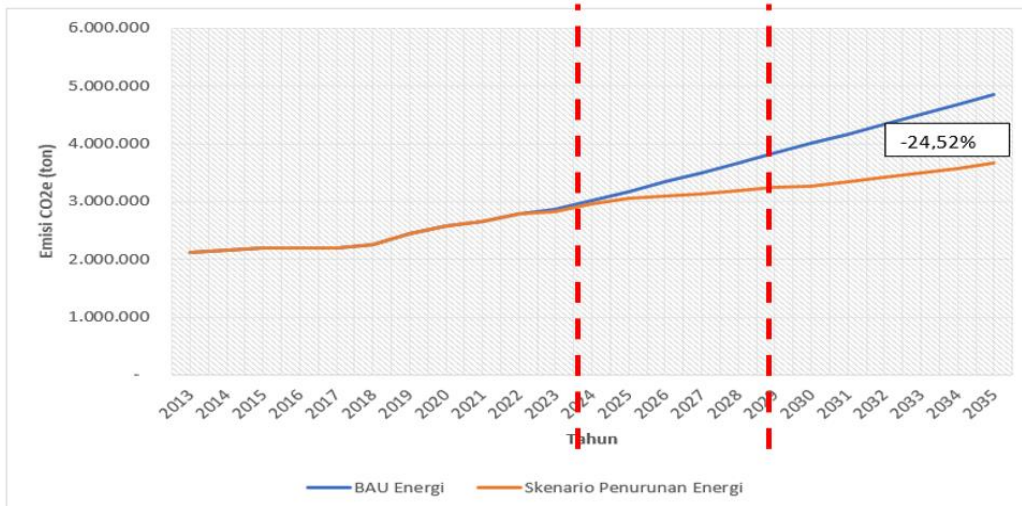
Gambar 6. 14 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis 3 (Akses terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai)

6.2.3.1. Alternatif scenario terhadap upaya penurunan GRK dari sektor energi melalui pembangunan infrastruktur

Berdasarkan hasil inventarisasi GRK di Kota Bogor, pada tahun 2022 total emisi GRK adalah 2.871.481,97 ton CO₂e. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 6,3% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 2.701.324,46 ton CO₂e. Adapun pada Sektor energi adalah sekitar 2.634.695,51 ton CO₂e atau sekitar 91,77% dari total emisi.



Dari gambar diatas terlihat bahwa total emisi CO₂e dari sektor energi tahun 2022 di Kota Bogor adalah sekitar 2.634.695,51 ton.



Gambar 6. 15 Alternatif skenario penurunan emisi GRK hingga 2029 dari sektor energi

Pada gambar diatas terlihat bahwa target penurunan emisi GRK dari sektor energi pada th 2029 sebesar 16,32% dari BAU. Penurunan emisi dilakukan dengan mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung thd upaya pengurangan emisi. Dalam upaya penurunan emisi GRK Kota Bogor diperlukan strategi berupa meningkatkan upaya pembangunan rendah karbon yang diwujudkan melalui kebijakan meningkatkan upaya pembangunan rendah karbon. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 20 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target penurunan GRK dari sektor energi

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
(21502) Program penyelenggaraan lalulintas & angkutan jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah jumlah layanan transportasi publik • Efisiensi energi fosil/ BBM 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor
(32905) Program pengelolaan energi baru terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi energi melalui penggunaan peralatan hemat listrik • Waste to energy 	

6.2.4. Belum terpenuhinya pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi

Dalam isu belum terpenuhinya pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh, terdapat 2 TPB strategis yang berkaitan dengan isu ini, yakni TPB 6 dan TPB 11. Analisis alternatif proyeksi dan skenario pada TPB 6 dan TPB 11 dilakukan terhadap indikator yang belum mencapai target sebagaimana disajikan pada gambar dan tabel berikut.



Isu Strategis 4 “Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi”

TPB Terkait



Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.



Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Gambar 6. 16 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis 4 (Belum terpenuhinya pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh)

Tabel 6. 21 Analisis Gap indikator yang belum mencapai target pada TPB 6 dan TPB 11

	Target TPB	Gap/ masalah	Outcome
TPB 6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua		
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Ketercapaian target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan pada belum mencapai target 100%, dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 76,79%	Terpenuhinya kebutuhan air minum layak dan berkelanjutan di Kota Bogor secara kuantitas dan kualitas
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Ketercapaian target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak pada belum mencapai target 100%, dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 76,17%	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar sanitasi yang layak secara signifikan
TPB 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan		
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Kondisi capaian tahun 2023 sebesar 70% telah belum memenuhi target sampah perkotaan tertangani, yakni 80%.	Terciptanya kota bogor yang hijau, bersih dan nyaman

6.2.4.1. Persentase Air Minum Aman (TPB 6 pada Indikator 6.1.1.(a))

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 76,79% dari target sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non-perpipaan dan perpipaan. Namun demikian kaitan dengan indikator persentase rumah tangga yang terlayani air bersih, belum terdapat data yang spesifik mengenai masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan akses terhadap layanan air minum yang layak. Sehingga dalam analisis digunakan data layanan air bersih secara total.

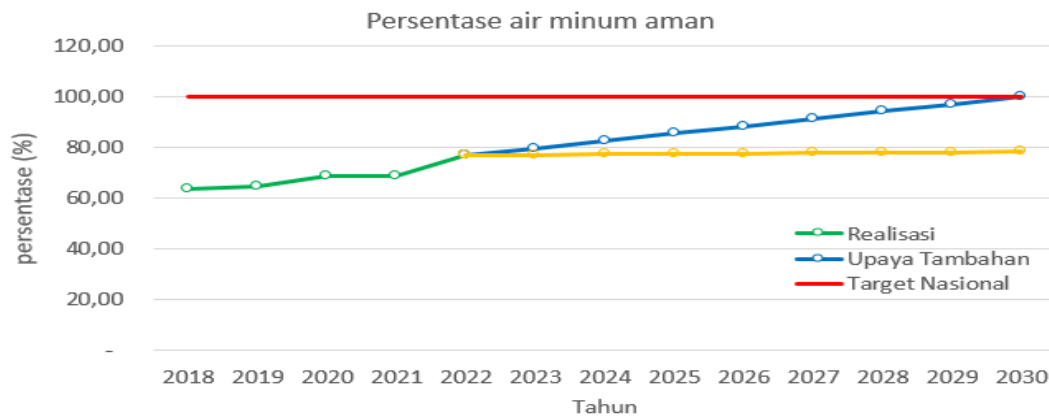


Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 76,79%, sehingga terdapat gap dengan target sebesar 23,21%. Upaya tambahan berupa peningkatan layanan, peningkatan efisiensi, serta pelestarian terhadap ekosistem penyedia air perlu dilakukan. Melalui upaya tersebut ditargetkan terjadi peningkatan persentase cakupan air bersih sebesar 2,90% per tahun. Sehingga pada target pemenuhan dapat tercapai secara lebih cepat.

Adapun mengenai bagaimana proyeksi kedepan jika melihat kondisi dengan adanya tambahan upaya dan dengan tambahan upaya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 6. 22 Skenario pencapaian target Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	77,36	77,55	77,74	77,93	78,12	Tanpa Upaya Tambahan
	85,49	88,4	91,3	94,2	97,1	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6. 17 Alternatif skenario peningkatan persentase air minum aman

Catatan:

- Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 target terhadap Akses Air Minum Aman adalah 100%.
- Capaian pada tahun 2023 adalah 76,79%.
- Proyeksi capaian (BAU) cenderung mengalami peningkatan namun belum mencapai target.
- Maka, diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target akses air minum aman 100% melalui peningkatan sebesar 2,90% per th.

Dalam upaya meningkatkan akses air minum aman diperlukan strategi berupa peningkatan terhadap akses air minum aman yang diwujudkan melalui kebijakan Peningkatan layanan dan jangkauan terhadap akses air minum aman. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

Tabel 6. 23 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan persentase air minum aman

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas



(10302) Program pengelolaan sumberdaya air	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan SPAM Kota Bogor • Perlindungan terhadap sumber-sumber air baku • Peningkatan layanan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah • peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) air minum yang layak 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor
(1303) Program pengelolaan dan pengembangan system pengelolaan air minum		
(10307) Program pengembangan permukiman		

6.2.4.2. Persentase sanitasi layak (TPB 6 pada indikator 6.2.1.(b))

Hasil analisis yang telah dilakukan melalui instrumen SSK, diperoleh gambaran kondisi sanitasi untuk sub sektor air limbah di Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Capaian Akses Aman Air Limbah Domestik Kota Bogor baru mencapai 3,8% sedangkan Akses Layak sudah mencapai 76,17%. Rendahnya akses aman, disebabkan karena jumlah rumah tangga yang melakukan penyedotan terhadap tangki septik masih sangat rendah, walaupun sebenarnya jumlah rumah tangga yang telah memiliki fasilitas sanitasi dengan konstruksi yang sesuai serta dilengkapi dengan tangki septik sudah tinggi.

Dalam mendukung pelayanan air limbah, Kota Bogor memiliki beberapa fasilitas air limbah skala perumahan. Dalam skala yang lebih besar, terdapat IPAL dan IPLT di Kota Bogor yang terletak di Kecamatan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara dengan luas sekitar 1,4 ha. IPAL dirancang dengan kapasitas 270 m³/hari untuk melayani 600 rumah tangga. Saat ini melayani sekitar 538 sambungan rumah tangga. Sedangkan IPLT dirancang dengan kapasitas 30 m³/hari. IPLT yang ada mengoperasikan beberapa unit pengolahan seperti biodigester dan kolam pengeringan lumpur. Hingga saat ini, volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT adalah sekitar 20 m³/hari. Untuk pengangkutan air limbah yang telah disedot, Kota Bogor memiliki 5 unit truk vakum penyedotan dengan kapasitas unit 2-3 m³, 2 unit sepeda motor tangki dengan kapasitas unit 0,4 m³ yang melayani kawasan permukiman padat dan 1 unit mobil pick up. mobil dengan kapasitas unit 1 - 1,5 m³ untuk menyedot air limbah yang berasal dari 4 rumah tangga.

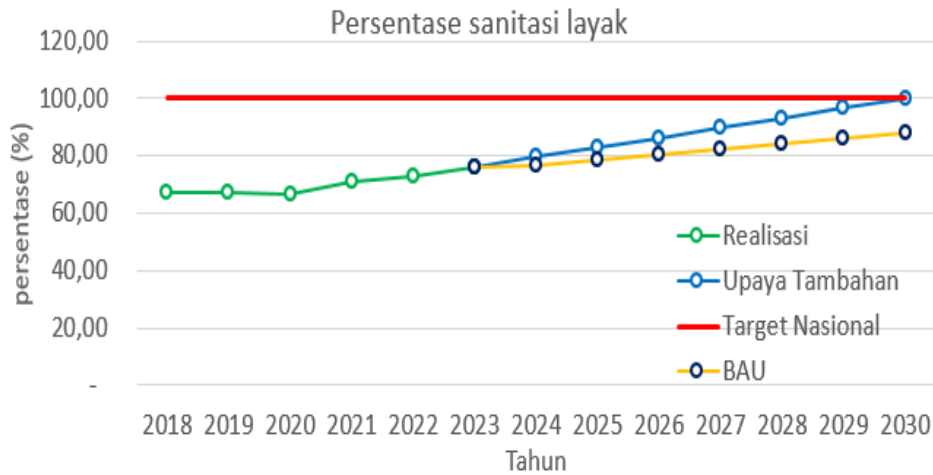
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman yang dimiliki Kota Bogor sampai dengan Tahun 2023 terdapat 159 unit yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor. SPALD-T skala permukiman melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan operasional pemeliharaan, sehingga menuntut peran pemerintah daerah dalam pembinaan, baik teknis maupun non teknis.

Adapun mengenai bagaimana proyeksi kedepan jika melihat kondisi dengan adanya tambahan upaya dan dengan tambahan upaya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:



Tabel 6. 24 Skenario pencapaian target Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian					Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	78,63	80,53	82,43	84,33	86,23	Tanpa Upaya Tambahan
	82,98	86,38	89,79	93,19	96,6	Dengan Upaya Tambahan



Gambar 6. 18 Alternatif skenario persentase sanitasi layak

Catatan:

- Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 target terhadap Akses rumah tangga dgn sanitasi layak adalah 100%.
- Capaian pada tahun 2023 adalah 76,17%.
- Proyeksi capaian (BAU) cenderung mengalami peningkatan namun belum mencapai target.
- Maka, diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target akses saniitasi layak 100% melalui peningkatan sebesar 3,40% per th.

Dalam upaya meningkatkan akses sanitasi layak diperlukan diwujudkan melalui kebijakan Peningkatan cakupan terhadap layanan akses sanitasi layak. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut

Tabel 6. 25 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan sanitasi layak

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
(10305) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah (10402) Program pengembangan perumahan (10205) Program perumahan dan Kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan infrastruktur sanitasi yg layak • Pengelolaan sumber-sumber pencemar sebelum masuk ke badan air penerima • Penurunan jumlah BABS/ODF • Peningkatan jumlah kelurahan bebas BABS • Penurunan kawasan kumuh 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor



6.2.4.3. Persentase sampah tertangani (TPB 6 pada Indikator 11.6.1.(a))

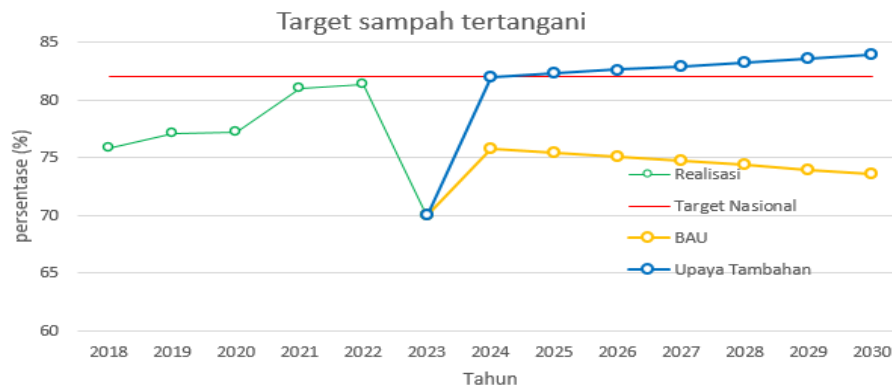
Timbulan sampah juga merupakan permasalahan pelik yang dihadapi Kota Bogor, namun secara progres terus mengalami peningkatan dan nilainya sudah lebih tinggi dari yg ditetapkan secara nasional. Sehingga dalam hal ini, target menggunakan angka 82% yang mana nilai tersebut merupakan Tingkat pengumpulan sampah untuk negara berpenghasilan menengah ke atas (worldbank).

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk. Pada tahun 2020 persentase jumlah sampah yang ditangani 77.2%, pada tahun 2021 nilainya meningkat menjadi 81%, tahun 2022 sebesar 81,32%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 70%. Dalam upaya pengelolaan sampah, selain difokuskan pada sampah terangkut juga perlu diikuti dengan upaya pengurangan sampah dari sumber melalui upaya 3R, mengingat terbatasnya kapasitas TPA dimasa mendatang. Adapun mengenai bagaimana proyeksi kedepan jika melihat kondisi dengan adanya tambahan upaya dan dengan tambahan upaya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 6. 26 Skenario pencapaian target Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Deskripsi Indikator	Target Pencapaian				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	75,42	75,06	74,7	74,34	73,98
	82,28	82,6	82,92	83,24	83,88



Gambar 6. 19 Skenario target sampah tertangani

Catatan:

- Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 target terhadap persentase sampah tertangani adalah 82%.
- Capaian pada tahun 2023 adalah 70% (menurun dr tahun sebelumnya).
- Proyeksi capaian (BAU) cenderung mengalami peningkatan namun belum mencapai target.



- Maka, diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target akses sanitasi layak 82% melalui peningkatan sebesar 1,71% per th.

Dalam upaya Peningkatan terhadap sampah tertangani diperlukan kebijakan Peningkatan terhadap cakupan layanan pengangkutan, serta upaya-upaya pengurangan dari sumber. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

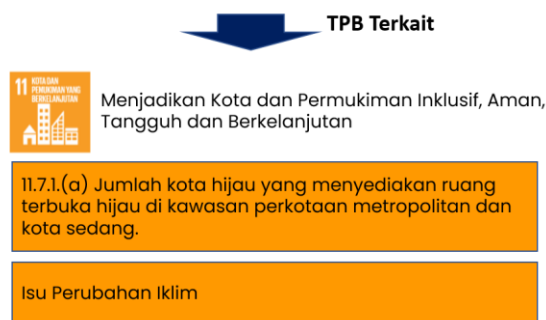
Tabel 6. 27 Rekomendasi program pencapaian target peningkatan sampah tertangani

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahkan Lokasi Prioritas
(21111) Program pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah plastik • Optimalisasi kelembagaan dalam pengelolaan sampah • Penerapan pengelolaan sampah secara 3R • Peningkatan sarana dan prasarana persampahan • Peningkatan teknologi persampahan 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor & TPA Galuga

6.2.5. Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam isu belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terdapat 1 TPB strategis yang berkaitan dengan isu ini, yakni TPB 11. Pada TPB 11 tersebut juga diikuti dengan indikator yang belum mencapai target untuk selanjutnya dianalisis dalam alternatif skenario.

Isu Strategis 5 “Peningkatan terhadap upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan”



Gambar 6. 20 TPB Strategis dan Indikator yang belum mencapai target yang berkaitan dengan isu strategis 5 (Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan)

Tabel 6. 28 Analisis Gap indikator yang belum mencapai target pada TPB 11

Target TPB	Gap/ masalah	Outcome
TPB 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 4,24 %, Terciptanya kota bogor yang hijau bersih dan nyaman



Target TPB		Gap/ masalah	Outcome
	hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	kondisi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yg sebesar 4,20%. Dengan target yg ditetapkan 20% ketercapaiannya masih perlu ditingkatkan	
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim		
-	Masukan terhadap aspek pembangunan rendah karbon	Hasil perhitungan total emisi dari tahun 2013-2022 menunjukkan rata-rata kenaikan emisi GRK di Kota Bogor adalah 2,50 per tahun	Terwujudnya pembangunan rendah karbon
-	Potensi dampak perubahan iklim di Kota Bogor	Hasil kajian ICLEI th 2020 menyebutkan bahwa Kota Bogor akan mengalami kenaikan suhu rata-rata berkisar 0,47°C - 0,91°C dan peningkatan frekuensi suhu udara ekstrim di masa mendatang (> 32°C dan >35°C). Potensi kejadiannya mencapai sekitar 202 - 278 hari dalam 30 tahun ke depan.	Terwujudnya pembangunan berketahanan iklim

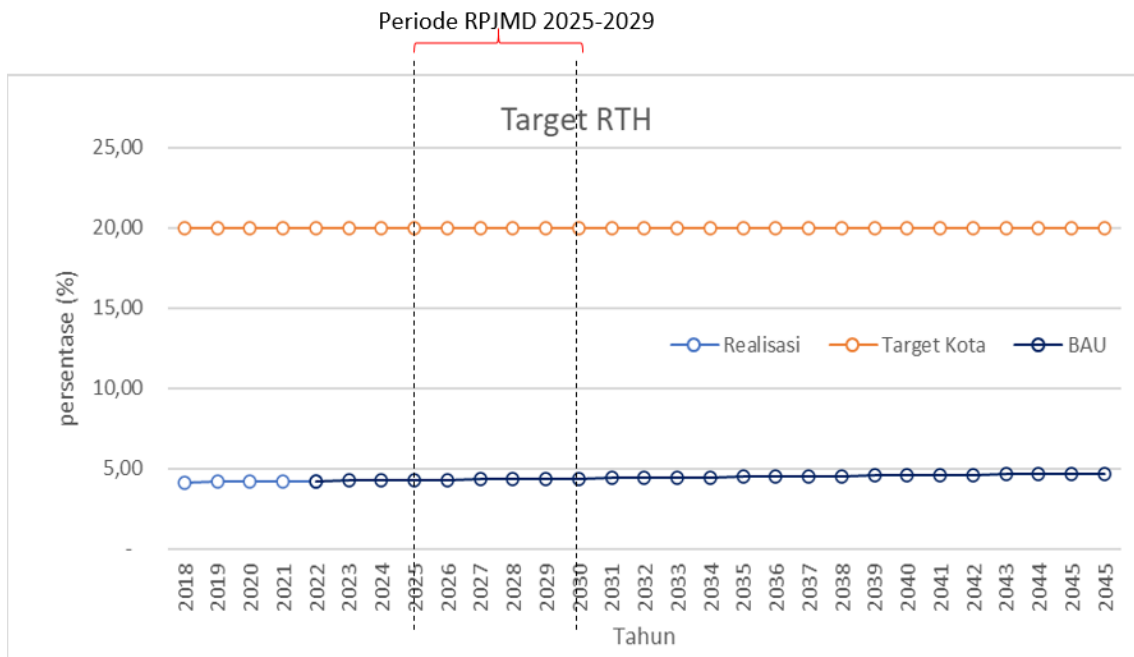
6.2.5.1. Persentase RTH (TPB 11 pada Indikator 11.7.1.)

Dalam melakukan perencanaan tata ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan informasi kondisi lahan Kota Bogor yang telah ada sebelumnya. Perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang meningkat akibat dari penambahan penduduk dan perkembangan perkotaan.

Perubahan tutupan lahan menjadi ruang terbangun juga memiliki kaitan erat dengan perubahan iklim mikro di Kota Bogor. Perubahan iklim mikro Kota Bogor seharusnya dapat dicegah dengan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Perubahan iklim mikro yang terjadi berupa peningkatan suhu udara dan penurunan tingkat kelembaban. Kota Bogor memiliki tag line yaitu "Kota Sejuta Taman". Saat ini Kota Bogor terus melakukan pembenahan taman-taman dan menambah taman-taman baru untuk meningkatkan luas RTH demi terwujudnya "green city for better life". Pemerintah Kota Bogor telah mencanangkan pembangunan taman sebanyak 32 taman. Pembangunan tamantaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah RTH dan menjaga kualitas udara di Kota Bogor. Selain itu keberadaan taman-taman yang ada di Kota Bogor menjadi tempat rekreasi keluarga yang murah, namun memiliki manfaat yang besar.



Jika dilihat dari realisasi RTH di Kota Bogor pada tahun 2023, ketersediaan RTH Publik di Kota Bogor sebesar 4,23%. Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan target kota, masih perlu ditingkatkan. Berikut merupakan proyeksi RTH hingga 2045.



Gambar 6. 21 Alternatif skenario peningkatan RTH

Catatan:

- Target capaian Kabupaten/Kota pada Pepres 111/2022 target terhadap RTH Adalah Meningkatkan, namun dalam RTRW Kota Bogor menargetkan 20%.
- Capaian pada tahun 2023 adalah 4,23% (meningkat 0,03% dr tahun sebelumnya).
- Proyeksi capaian (BAU) cenderung mengalami peningkatan namun belum mencapai target.
- Maka, diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target RTH 20%.

Dengan melihat kondisi diatas, masih sangat jauh gap antara target dengan pencapaian, maka diperlukan upaya masih dalam menciptakan kondisi kota bogor yang nyaman melalui peningkatan jumlah dan kualitas RTH, optimalisasi lahan, kerjasama pengelolaan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH, hingga pemanfaatan terhadap aset kota yang belum termanfaatkan. Dalam upaya Peningkatan RTH diperlukan kebijakan Pengelolaan ruang terbuka dan optimalisasi terhadap lahan-lahan potensial untuk RTH. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:

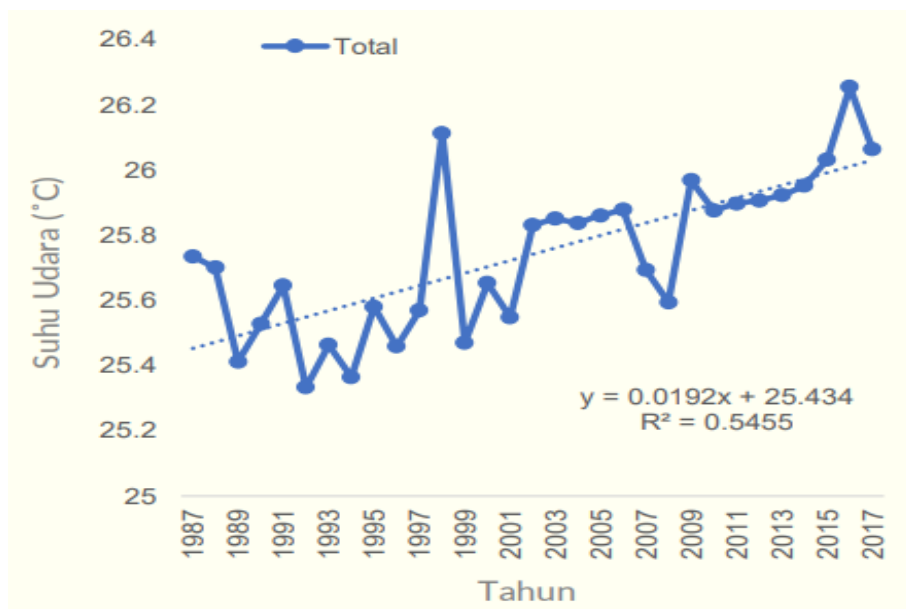
Tabel 6. 29 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target peningkatan RTH

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
(21010) Program penatagunaan tanah (21104) Program pengelolaan keanekaragaman hayati)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualits dan kuantitas RTH • Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk RTH • Peningkatan kejasama dalam pemanfaatan lahan untuk RTH • Pemanfaatan aset kota • Land banking 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor

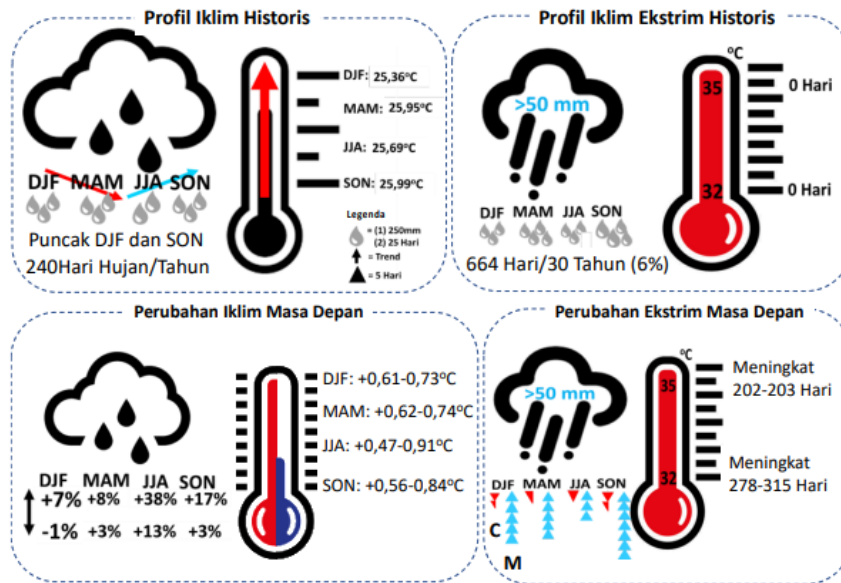


6.2.5.2. Skenario terhadap isu perubahan iklim

Kota bogor berpotensi mengalami trend perubahan iklim berdasarkan kajian yang dilakukan dengan 2 metodologi berbeda yaitu CSIRO dan MIROC. Kedua metodologi ini menggunakan sumber data yang sama (Cordex data), dengan skenario yang sama yaitu skenario RCP.4.5. Berdasarkan hasil akhir dari kedua metodologi ini menunjukkan bahwa kota bogor akan mengalami trend perubahan iklim, walaupun masing-masing metodologi menunjukkan nilai perubahan trend yang berbeda. Dari data tren iklim, Suhu udara Kota Bogor meningkat menjadi sekitar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ selama periode 1987-2017. Kondisi selanjutnya dari perubahan masa depan (berdasarkan model iklim CSIRO (C) dan MIROC (M) pada skenario RCP 4.5). Potensi peningkatan curah hujan tertinggi terjadi pada periode Juni-Juli-Agustus (JJA) dan September-Oktober-November (SON) (musim kemarau). Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut Kota Bogor akan mengalami peningkatan jumlah curah hujan, dan potensi kejadian curah hujan ekstrim ($>50\text{ mm}$) diperkirakan terjadi pada Desember-Januari-Februari (DJF) dan September-Oktober-November (SON). Berdasarkan klasifikasi curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika, curah hujan $>50\text{mm/hari}$ termasuk kategori hujan lebat.



Gambar 6. 22 Rata-Rata Suhu Udara Tahunan 30 Tahun 1987-2017 Di Stasiun Meteorologi Dramaga, Bogor
Sumber: ICLEI, 2020



Gambar 6. 23 Proyeksi Perubahan Iklim Masa Depan Untuk Periode 2021-2050 Yang Dimulai Oleh CSIRO Dan Model Iklim MIROC Berdasarkan Skenario RCP4.5

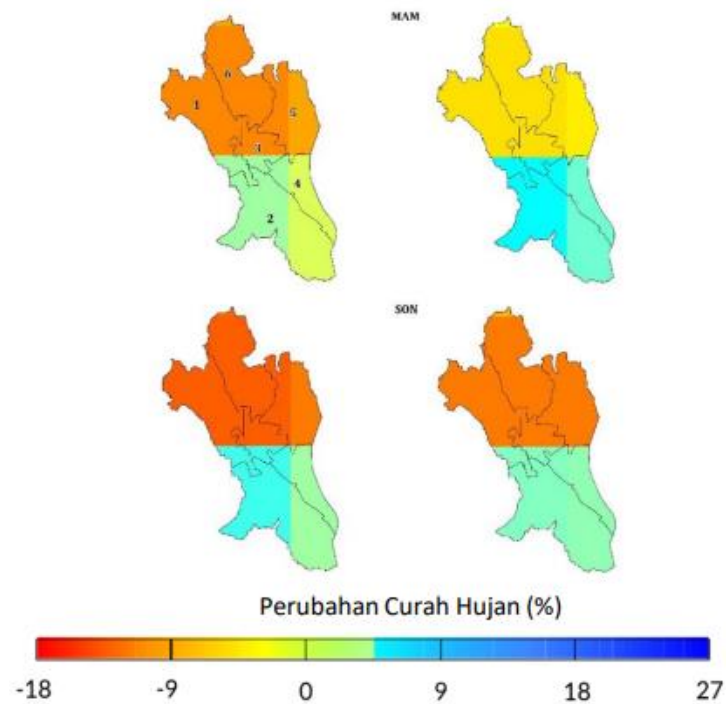
Sumber: ICLEI, 2020

Keterangan: Desember-Januari-Februari (DJF); Maret-April-Mei (MAM); Juni-Juli-Agustus (JJA); September-Oktober-November (SON).

Sumber: ICLEI, 2020

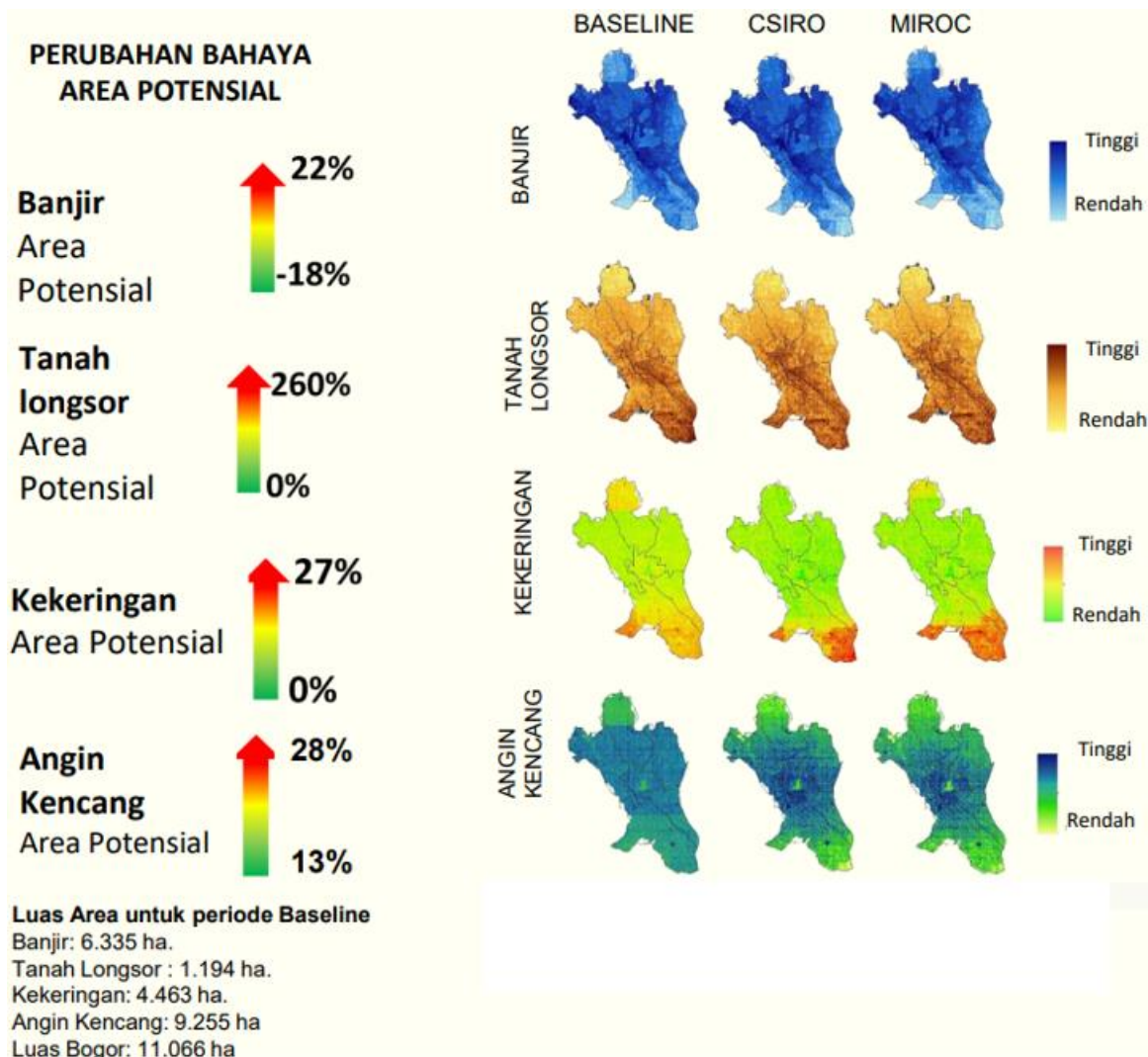
Dari gambar diatas, terlihat bahwa Kota Bogor akan mengalami kenaikan suhu rata-rata berkisar 0,470C - 0,910C dan peningkatan frekuensi suhu udara ekstrim di masa mendatang (> 32°C dan >35°C). Potensi kejadiannya mencapai sekitar 202 - 278 hari dalam 30 tahun ke depan.

Proyeksi iklim menunjukkan bahwa Kota Bogor akan mengalami penurunan curah hujan hingga 18% untuk kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal, dan peningkatan curah hujan sebesar 27% di Kecamatan Bogor Timur dan Selatan. Sementara itu, diperkirakan seluruh wilayah kota mengalami peningkatan suhu udara hingga 3°C.



Gambar 6. 24 Distribusi Spasial Perubahan Curah Hujan Hasil Simulasi Model Iklim CSIRO (Kiri) Dan MIROC (Kanan) Periode 2021-2050
Sumber: ICLEI, 2020

Adapun proyeksi secara keseluruhan berkaitan dengan dampak perubahan iklim yakni daerah rawan bahaya terkait iklim di Kota Bogor diproyeksikan akan diperluas dari kondisi baseline, dan kemungkinan besar akan bervariasi tergantung bahayanya. Wilayah yang diproyeksikan rawan terjadinya bencana berada di Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Bogor Timur.



Gambar 6. 25 Distribusi Spasial Yang Diproduksi Dari Bahaya Terkait Iklim Untuk Periode Dasar (1991-2020) Dan Masa Depan (2021-2050)
Sumber: ICLEI, 2020

Dalam upaya Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diwujudkan melalui kebijakan Penurunan emisi GRK, serta peningkatan mitigasi perubahan iklim. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut

Tabel 6. 30 Rekomendasi strategi, kebijakan dan program pencapaian target adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
(21103) Program pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Mitigasi perubahan iklim Pelatihan tanggap bencana Pencegahan dan penanggulangan bencana Bantuan terhadap korban bencana 	Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Bogor Timur



6.2.6. Belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelambagaan pemerintah dan non-pemerintah di Kota Bogor

Dalam isu belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan non pemerintah di Kota Bogor, terdapat 1 TPB strategis yang berkaitan dengan isu ini, yakni TPB 17. Pada bagian ini analisis dilakukan dengan melihat tren dan proyeksi terhadap kontribusi dari mitra pembangunan dalam hal CSR.

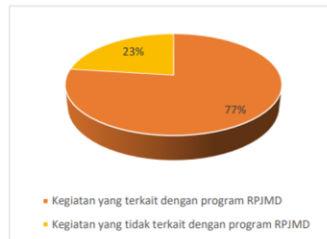


Isu Strategis 5 “Peningkatan kinerja dan kolaborasi kelambagaan pemerintah dan non-pemerintah di Kota Bogor”

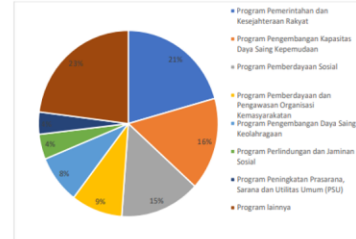
Laporan Pendanaan TJSPL 2016-2021

No.	Tahun	Nilai (Rp)
1	2016	1.563.602.550*
2	2017	7.080.452.580*
3	2018	4.676.746.338*
4	2019	4.531.798.335*
5	2020	4.131.009.717
6	2021	4.117.740.424
7	2022	13.244.462.668

Tren Meningkat



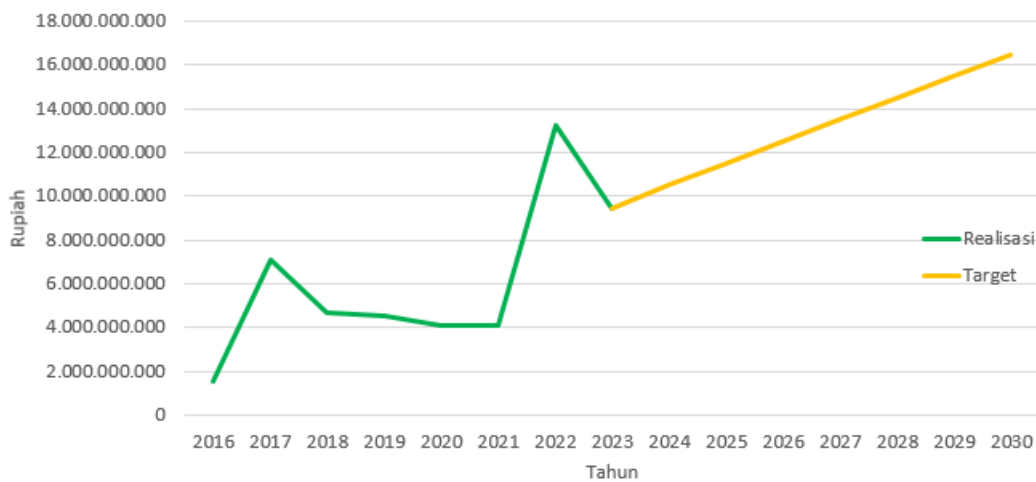
Persentase kegiatan TJSPL yang berkaitan dengan RPJMD



Program-Program RPJMD yang Terkait Dengan Kegiatan TJSPL Tahun 2022

Gambar 6. 26 Tren pendanaan TJSPL dan proporsi terhadap keegiatan yang berkaitan dengan RPJMD

Dari data diatas, terlihat bahwa tren cenderung meningkat. Data tersebut kemudian di proyeksikan terhadap perkiraan pendanaan dari mitra pembangunan hingga periode 2030.



Gambar 6. 27 Skenario kontribusi mitra pembangunan melalui kegiatan TJSPL

Dalam upaya peningkatan kontribusi mitra pembangunan diwujudkan melalui kebijakan Optimalisasi potensi-potensi keterlibatan mitra (non pemerintah) dalam pembangunan. Lebih teknis dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut ditempuh melalui program-program berikut:



Tabel 6. 31 Rekomendasi program pencapaian target kontribusi mitra pembangunan melalui kegiatan TJSLP

Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024)	Keterangan Program	Arahan Lokasi Prioritas
(21802) Program pengembangan iklim penanaman modal Program-Program kemitraan sesuai dengan sektor/ bidang	<ul style="list-style-type: none">• Menjalin kemitraan dalam pembangunan Kota Bogor• Peningkatan peran serta mitra pembangunan dalam program-program pembangunan Kota Bogor• Optimalisasi pendanaan dari kegiatan TJSLP	Seluruh Kecamatan di Kota Bogor



6.3. Rekomendasi KLHS Terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029

Pemberian rekomendasi KLHS terhadap RPJMD ditujukan terhadap Strategi, Kebijakan dan program yang diikuti dengan deskripsi terhadap keterangan program dan arahan lokasi, serta pihak terkait. Penyusunan rekomendasi ini didasarkan pada hasil analisis capaian, serta alternatif skenario yang dilakukan pada sub bab 6.1. Rekomendasi terhadap target yang menjadi isu strategis dengan upaya tambahan dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan pencapaian target sebelum berakhirnya tahun rencana pada 2029, sedangkan rekomendasi terhadap target yang menjadi isu yang dapat dilakukan secara BAU ditujukan untuk mempertahankan upaya yang selama ini telah berjalan di Kota Bogor. Serta terdapat juga rekomendasi berdasarkan hasil telaah terhadap daya dukung dan daya tampung untuk lebih meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut merupakan rekomendasi KLHS terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Tabel 6. 32 Rekomendasi terhadap KLHS arah kebijakan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode I)	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 1: Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing		
Peningkatan kualitas pendidikan bagi sumberdaya manusia di Kota Bogor	Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan dasar	Peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing
Pemerataan pendidikan formal maupun non formal	Peningkatan pembinaan dan pelatihan kompetensi terhadap masyarakat miskin pada kelompok usia produktif	Optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat kota bogor yang sejahtera
Peningkatan kualitas kesehatan di Kota Bogor	Perlindungan Kesehatan terhadap ibu dan anak Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi dan balita	Peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing
Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera
Misi 2: Mewujudkan Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan.		



Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode I)	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Peningkatan pemenuhan sarana prasarana dan utilitas umum permukiman		
Pengembangan perkotaan yang cerdas lestari dan berkelanjutan		
Peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota	Pengelolaan ruang terbuka dan optimalisasi terhadap lahan-lahan potensial untuk RTH	Pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Peningkatan pelayanan pengelolaan serta pemilahan sampah	Peningkatan terhadap cakupan layanan pengangkutan, serta upaya-upaya pengurangan dari sumber	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Pengembangan transportasi hijau perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi	Peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur, serta pemberian insentif terhadap upaya-upaya pembangunan rendah karbon	Peningkatan terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
Misi 3: Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif.		
Penguatan struktur ekonomi yang strategis seperti sektor industri jasa yang berbasis inovasi, riset dan teknologi	Peningkatan ekonomi kreatif dan produktivitas tenaga kerja	Optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat kota bogor yang sejahtera
Pemanfaatan IT dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing		
Penciptaan iklim usaha yang kondusif	Optimalisasi potensi-potensi keterlibatan mitra (non pemerintah) dalam pembangunan	Eningkatan kinerja dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan non pemerintah di kota bogor
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola yang Baik.		
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis IT		
Pelayanan publik didukung oleh kualitas ASN yang berintegrasi, inovatif dan profesional		
Optimalisasi pembiayaan		



Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode I)	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi.		
Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat		
Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan		
Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia		
Peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan		
Peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota	Pengelolaan ruang terbuka dan optimalisasi terhadap lahan-lahan potensial untuk RTH	Pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Pengelolaan pengelolaan sumberdaya air dan pembangunan sarana prasarana air minum layak	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak	Peningkatan cakupan terhadap layanan akses sanitasi layak	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat	Peningkatan terhadap cakupan layanan pengangkutan, serta upaya-upaya pengurangan dari sumber	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Peningkatan terhadap cakupan layanan pengangkutan, serta upaya-upaya pengurangan dari sumber	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan	Perencanaan dan pembangunan sarana prasarana air minum layak yang terintegrasi Peningkatan layanan dan jangkauan terhadap akses air minum aman	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan	Penurunan emisi GRK, serta peningkatan mitigasi perubahan iklim	Pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan



Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode I)	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini	Penurunan emisi grk, serta peningkatan mitigasi perubahan iklim	Pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural	Penurunan emisi grk, serta peningkatan mitigasi perubahan iklim	Pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Penurunan emisi GRK, serta peningkatan mitigasi perubahan iklim	Pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Penguatan ketahanan, keamanan dan keterjangkauan pangan, serta diversifikasi pangan	Peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing
Misi 6: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif.		
Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (<i>global city</i>)		
Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif		
Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri	Peningkatan terhadap cakupan layanan pengangkutan, serta upaya-upaya pengurangan dari sumber	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi	Peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur, serta pemberian insentif terhadap upaya-upaya pembangunan rendah karbon	Peningkatan terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
Penyediaan infrastruktur penunjang sains kreatif		
Pembangunan inkubator bisnis industri kreatif		



Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode I)	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan		
Pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat pertama	Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan dasar	Peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing
Misi 7: Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas.		
Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman.		
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata.		
Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa;		
Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa		
Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Pengelolaan pengelolaan sumberdaya air dan pembangunan sarana prasarana air minum layak	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	Peningkatan terhadap cakupan layanan pengangkutan, serta upaya-upaya pengurangan dari sumber	Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi
Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.		
Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pengelolaan ruang terbuka dan optimalisasi terhadap lahan-lahan potensial untuk RTH	Pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Penurunan emisi GRK, serta peningkatan mitigasi perubahan iklim	Pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan



Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 (Periode I)	Rekomendasi Arah Kebijakan KLHS RJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Penguatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan		



Tabel 6.33 Rekomendasi KLHS terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
Optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Pengurangan tingkat persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan	Peningkatan pembinaan dan pelatihan kompetensi terhadap masyarakat miskin pada kelompok usia produktif	Program Pemberdayaan Sosial	576.392.681,28	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan; • Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan manula berupa Bantuan Kebutuhan Pokok • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; • Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat; • Pembinaan kemampuan Potensi pekerja masyarakat miskin. 	Seluruh Kecamatan	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas KUKMDAGIN, Setda, DP3A, Disdukcapil, BPS, Mitra Pembangunan
			Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan					



Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
						Penanggulangan Kemiskinan. • Penyelenggaraan pemantapan atau capacity building Pendamping Sosial untuk masyarakat miskin.		
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Peningkatan akses terhadap air minum yang layak	Perencanaan dan pembangunan sarana prasarana air minum layak yang terintegrasi	1302. Program Pengelolaan sumberdaya air 10303. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum 10403. Program kawasan permukiman	34.953.898.979,10 1.003.666.851,37 32.917.184.622,70	• Perencanaan SPAM Kota Bogor • Perlindungan terhadap sumber-sumber air baku • Peningkatan layanan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah • peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) air minum yang layak	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	Dinas PUPR, Dinas Perumkim, Bapperida, DLH dan PDAM
	PDB per kapita	Percepatan peningkatan pendapatan per kapita	Peningkatan ekonomi kreatif dan produktivitas tenaga kerja	3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3.26.05 Program	12.542.882,94 683.310.627,95	• Fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM • Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif. • Pengembangan pendanaan dan	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	Bapperida, Dinas KUKM DAGIN, Bappenda, SETDA, DPMPSTSP, Dinas Tenaga Kerja, Mitra Pembangunan;



Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan UMKM Non Kreatif. <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital • Pengembangan Sistem Pemasaran Bagi UMKM • Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. • Fasilitasi bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif (Banper) dan UMKM Non Kreatif. • Program pengembangan sumberdaya pariwisata pariwisata dan ekonomi kreatif. 		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.644.288.615,68	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi; • Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif dan UMKM Non Kreatif. • Pelatihan tenaga kerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	Bapperida, SETDA, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas KUKM DAGIN, Mitra Pembangunan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
						sesuai kebutuhan lapangan kerja. <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknologi Terapan dan Kewirausahaan • Sosialisasi terkait Strategi Pemasaran • Penambahan LPK 		
	Koefisien Gini	Penurunan Gini Ratio	Peningkatan Pemerataan dan Distribusi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Infrastruktur	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.468.938.897,02	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota • Pengendalian dan Distribusi Perekonomian • Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil • Fasilitasi Kerja Sama Daerah • Pengembangan kualitas SDM manusia yang merata dan berkeadilan; • Pemerataan pelayanan Infrastruktur pelayanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan • Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	Bapperida, SETDA, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas KUKM DAGIN, Mitra Pembangunan, Dinas Sosial Kota Bogor, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Filantropi



Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
						<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan keterampilan berbasis masyarakat. • Program perlindungan sosial; • Program Pembiayaan Ultra Mikro; • Kartu Prakerja; • Program peningkatan jamkesmas; • Program kolaborasi terkait peningkatan pendapatan masyarakat melalui Lembaga filantropi. • Program penurunan beban pengeluaran (bantuan sosial). 		
Peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Kota Bogor	Penguatan ketahanan, keamanan dan keterjangkauan pangan, serta diversifikasi pangan	20903. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan 20905. Program pengawasan keamanan pangan	567.350.894,02 51.006.719,46	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan terhadap ketahanan pangan • Diversifikasi terhadap jenis-jenis pangan • Pengawasan terhadap keamanan pangan • Kegiatan penyelamatan pangan • Pengurangan sampah organik makanan 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	DKPP, BULOG, Perumda Pasar
	Angka Kematian Balita	Menurunnya angka kematian balita	Perlindungan Kesehatan terhadap ibu dan anak	(10202) Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan	119.015.132.012,76	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan kesehatan balita rentang 12-59 bulan 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	Dinas Kesehatan, Puskesmas & RSUD, BPJS



Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
				upaya Kesehatan masyarakat (21404) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	3.401.327.218,46	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan pemantauan pertumbuhan anak usia 12-59 bulan • Peningkatan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita 		
	SPM Kesehatan yg menjadi indikator TPB	Pelayanan kesehatan yang professional dan inklusif	Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi dan balita	(10202) Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat (21404) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	119.015.132.012,76 3.401.327.218,46	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil • Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin • Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir • Peningkatan pelayanan kesehatan balita • Pencegahan dan deteksi dini penyakit 	RSUD, Puskesmas & Fasyankes di Kota Bogor	Dinas Kesehatan, Puskesmas & RSUD, BPJS
	APK PAUD	Peningkatan kualitas Pendidikan dasar	Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan dasar secara kualitas dan kuantitas	(10102) Program Pengelolaan Pendidikan (10103) Program pengembangan kurikulum	248.288.569.696,98	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana PAUD • Peningkatan kualitas SDM • Pengembangan kurikulum • Pengembangan model-model Pendidikan inovatif • Pendidikan non formal 	Seluruh PAUD di Kota Bogor	Dinas Pendidikan



Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
Peningkatan akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Penurunan GRK dari sektor energi melalui pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pembangunan rendah karbon	Peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur, serta pemberian insentif terhadap upaya-upaya pembangunan rendah karbon	(21502) Program penyelenggaraan lalulintas & angkutan jalan (LLAJ) (32905) Program pengelolaan energi baru terbarukan	41.859.585.347,50	<ul style="list-style-type: none"> Menambah jumlah layanan transportasi public Peningkatan konektivitas Efisiensi energi fosil/BBM Efisiensi energi melalui penggunaan peralatan hemat listrik Waste to energy Bangunan hijau 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan & Mitra Pembangunan
Peningkatan dan pemerataan terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi	Persentase Air Minum Aman	Peningkatan terhadap akses air minum aman	Peningkatan layanan dan jangkauan terhadap akses air minum aman	(10302) Program pengelolaan sumberdaya air (1303)Program pengelolaan dan pengembangan system pengelolaan air minum	34.953.898.979,10 1.003.666.851,37	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan SPAM Kota Bogor Perlindungan terhadap sumber-sumber air baku Peningkatan layanan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) air minum yang layak 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida, PDAM, Mitra Pembangunan
	Akses sanitasi layak	Peningkatan terhadap akses sanitasi layak	Peningkatan cakupan terhadap layanan akses sanitasi layak	(10305) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah	11.848.319.293,81 14.160.657.707,21	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan infrastruktur sanitasi yg layak Pengelolaan sumber-sumber pencemar 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor, IPAL Tegal Gundil, IPAL Kayu Manis	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida,



Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
			Mengurangi kawasan kumuh	(10402) Program pengembangan perumahan (10405) Program kawasan permukiman (10205) Program perumahan dan Kawasan kumuh	32.917.184.622,70	<ul style="list-style-type: none"> sebelum masuk ke badan air penerima • Penurunan jumlah BABS/ODF • Peningkatan jumlah kelurahan bebas BABS • Penurunan kawasan kumuh • Peningkatan hunian layak 		Mitra Pembangunan
Peningkatan terhadap upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase sampah tertangani	Peningkatan terhadap sampah tertangani	Peningkatan terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan	(10304) Program pengelolaan persampahan regional (2.11.11) Program pengelolaan persampahan	10.717.592.054,24 11.773.872.645,94	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah plastik • Optimalisasi kelembagaan dalam pengelolaan sampah • Penerapan pengelolaan sampah secara 3R • Peningkatan sarana dan prasarana persampahan • Peningkatan teknologi persampahan 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor & TPA Galuga	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida, Bank Sampah, Mitra Pembangunan
	Jumlah Kota Hijau yg Menjadikan RTH di Kawasan Perkotaan	Peningkatan tutupan hijau	Pengelolaan ruang terbuka dan optimalisasi terhadap lahan-lahan potensial untuk RTH	(21010) Program penatagunaan tanah (21104) Program pengelolaan keanekaragaman hayati)	22.532.835.838,96	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualiatas dan kuantitas RTH • Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk RTH • Percepatan kejasama dalam pemanfaatan lahan untuk RTH 	Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bogor	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida, Bank Sampah, Mitra Pembangunan



Isu Strategis	Target yg Menjadi Isu Strategis	Strategi	Kebijakan	Program (Nomenklatur Permendagri Kepmendagri 900/2023)	Anggaran per th (Rp)	Keterangan Program	Arahan Lokasi	Pihak Terkait
						<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas RTH Publik kawasan lindung • Meningkatkan ketersediaan RTH kawasan budidaya sesuai RTRW 		
	Perubahan Iklim	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Penurunan emisi GRK, serta peningkatan mitigasi perubahan iklim	(21103) Program pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	824.100.016,00	<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi perubahan iklim • Pelatihan tanggap bencana • Pencegahan dan penanggulangan bencana • Bantuan terhadap korban bencana • Peningkatan manajemen mitigasi bencana • Penguatan kapasitas masyarakat 	Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Bogor Timur	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, DLH, Bapperida, BPBD, Mitra Pembangunan
Peningkatan kinerja dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah di Kota Bogor	Peningkatan kontribusi mitra pembangunan	Peningkatan kemitraan Lembaga pemerintah dan non pemerintah	Optimalisasi potensi-potensi keterlibatan mitra (non pemerintah) dalam pembangunan	(21802) Program pengembangan iklim penanaman modal (21803) Program promosi penanaman modal Program-Program kemitraan sesuai dengan sektor/ bidang	108.649.168,65 144.597.191,19	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kemitraan dalam pembangunan Kota Bogor • Peningkatan peran serta mitra pembangunan dalam program-program pembangunan Kota Bogor • Optimalisasi pendanaan dari kegiatan TJSLP 	Mitra Pembangunan di Kota Bogor	DPMPTSP, Bapperida, Setda, Dinas KUKMDAGIN, Mitra Pembangunan



BAB 7 Kesimpulan

Simpulan hasil Analisis DDDT-LH

Hasil analisis terhadap daya dukung dan daya tampung dengan pendekatan air dan pangan di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- Status DDDTLH Penyedia Pangan
Berdasarkan jumlah penduduk dan ambang batas pangan di setiap kecamatan di Kota Bogor maka diperoleh bahwa seluruh kecamatan telah memiliki status daya dukung pangan terlampaui.
- Status DDDT-LH Air
status daya dukung air di Kota Bogor adalah belum terlampaui untuk setiap kecamatannya pada tahun 2023 hingga tahun 2029.

Simpulan Analisis capaian daerah thd indikator TPB Kota Bogor

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian TPB pada tahun 2023, kondisi terhadap analisis capaian TPB Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 68,57% indikator telah mencapai target nasional.
- 23,33% indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional,
- 0,48% indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai.
- 7,62% indikator belum ada datanya.

Simpulan terhadap Isu Strategis

Berdasarkan proses yang telah dilakukan, disepakati bahwa Kota Bogor memiliki enam isu strategis yang meliputi:

- Masih minimnya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera.
- Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing
- Akses terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai
- Belum terpenuhi dan meratanya terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh
- Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelambagaan pemerintah dan non-pemerintah di Kota Bogor

Simpulan terhadap Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis yang ditetapkan, serta rumusan alternatif skenario. Rekomendasi terhadap KLHS terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 berupa Strategi, Kebijakan dan Program yang juga dilengkapi dengan lokasi,



serta stakeholder terkait. Rekomendasi diberikan terhadap target yang menjadi isu dengan dan tanpa upaya tambahan sebagai berikut:

Rekomendasi dengan upaya tambahan diberikan terhadap indikator/ permasalahan:

- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak
- Pola Pangan Harapan
- Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
- Laju pertumbuhan PDB per kapita.
- Koefisien Gini.
- Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
- Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
- Penurunan emisi GRK
- Peningkatan upaya pembangunan rendah karbon
- Potensi dampak perubahan iklim di Kota Bogor

Rekomendasi tanpa upaya tambahan diberikan terhadap indikator:

- Pelayanan ibu hamil
- Pelayanan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Kontribusi mitra pembangunan melalui kegiatan TJSLP



Daftar Pustaka

- BPS Kota Bogor. Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2017-2024.
- Bapperida Kota Bogor. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031.
- Bapperida. 2023. Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Bogor.
- DKPP. 2023. Neraca Bahan Pangan Kota Bogor Tahun 2023.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. 2024. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Bogor Tahun 2023.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bogor.
- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) (2019): Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Millennium Ecosystem Assessment (2005): Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.* Washington DC.
- Muta'ali, L. (2012). Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nengsih, S. R. (2015). Pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi untuk wilayah Indonesia dengan menggunakan sistem grid skala ragam. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 21(1), 31-36.
- Norvyani, D. A. (2016). Pemetaan status daya dukung lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota menggunakan sistem grid skala ragam (studi kasus: wilayah administratif Cekungan Bandung). Institut Teknologi Bandung: Tugas Akhir.
- Riqqi, A. (2014). Rancangan Konsep Teknik Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional Dan Pulau/Kepulauan Serta Provinsi. Focus Group Discussion (FGD) Daya Dukung dan Daya Tampung. Bali.
- Riqqi, A., Hendaryanto, H., Safitri, S., Mashita, N., Sulistyawati, E., Norvyani, D. A., & Afriyanie, D. (2019). Pemetaan Jasa Ekosistem. Seminar Nasional Geomatika, 237-246.



LAMPIRAN 1. METODE PENYUSUNAN KLHS

TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Untuk mengurai teknis pelaksanaan Permendagri nomor 7 tahun 2018, diperlukan sebuah pedoman. Dengan memperhatikan RAD TPB 5 (lima) tahunan sebagai pencapaian sasaran TPB Daerah, pedoman ini disusun oleh Gubernur bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya, sesuai pengaturan dalam Perpres 111/2022.

Berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2018 tersebut, Pedoman Pembuatan KLHS-RPJMD disusun dengan lingkup pembahasan berikut ini:

Permendagri 7/2018	Lingkup Pembuatan
Pembentukan Tim Pembuat KLHS-RPJMD ♣Pasal 3 ♣Pasal 4 (pembentukan)	1.Persiapan Proses sebelum dilakukan Pembuatan KLHS-RPJMD, yaitu pembentukan Timdan pembekalan Materi.Persiapan Tim mencakup pengor-ganisasian, struktur, tusi, dan kapasitas. Pembekalan Materi bagi Tim mencakup pemahaman kerangka pikir, konsep dan implementasi tujuan dan indikator pembangunan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan perwu-judan dari pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah
♣Pasal 5/2 (identifikasi, pengumpulan dan analisis data)	2.Identifikasi, Pengumpulan dan Analisis Data Dimulainya Perumusan KLHS-RPJMD oleh Tim. Identifikasi data yang dibutuhkan



Permendagri 7/2018	Lingkup Pembuatan
	pembentukan TPB atas ketersediaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengumpulan dan Analisis data, hasil identifikasi untuk digunakan pada pengkajian.
Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan ♣ Pasal 5 (pengkajian) ♣ Pasal 6 (lanjutan pasal 5 (2))	3. Pengkajian Pengkajian yang dilakukan oleh Tim mencakup rencana pembangunan dengan TPB, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pembiayaan pembangunan daerah, mitra-pemerintah.
Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan ♣ Pasal 8 (perumusan) ♣ Pasal 9-11 (alternatif proyeksi)	4. Perumusan Skenario Skenario pembangunan merupakan rencana target pembangunan menggunakan asumsi dengan atau tanpa upaya tambahan. Asumsi ini diperoleh dari hasil analisis atas proyeksi pertumbuhan capaian TPB Daerah, proyeksi keuangan, potensi daerah dan DDT-LH, dan potensi dukungan mitra-pemerintah, diperbandingkan dengan target daerah.
Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi ♣ Pasal 12 (pelaporan) ♣ Pasal 13 (penjaminan) ♣ Pasal 14 (pendokumentasian & validasi)	5. Penulisan Laporan Sekurangnya mencakup pendahuluan, dasar teori, kondisi umum daerah, analisis TPB, analisis capaian indikator TPB pada OPD, alternatif skenario, rekomendasi, dan kesimpulan serta lampiran.
	6. Penjaminan Kualitas Memastikan proses pembuatan telah didukung dengan bukti-bukti tiap tahapan proses (untuk tujuan akuntabilitas dan bukti publik), dan kualitas substansi telah mendukung pembangunan berkelanjutan. Penjaminan ini didokumentasikan dalam bentuk laporan dan kemudian divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

L1.1. Pembentukan Tim

Untuk menghasilkan KLHS-RPJMD yang berkualitas, perlu melibatkan berbagai komponen pemerintahan maupun mitra-pemerintah, yang mensinergikan fungsi penyusunan dan fungsi pelaksanaan, dalam sebuah Tim kerja.

Fungsi penyusunan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembuatan KLHS-RPJMD dengan tahapan yang jelas dan terdokumentasi, serta menghasilkan keluaran berupa rekomendasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan.



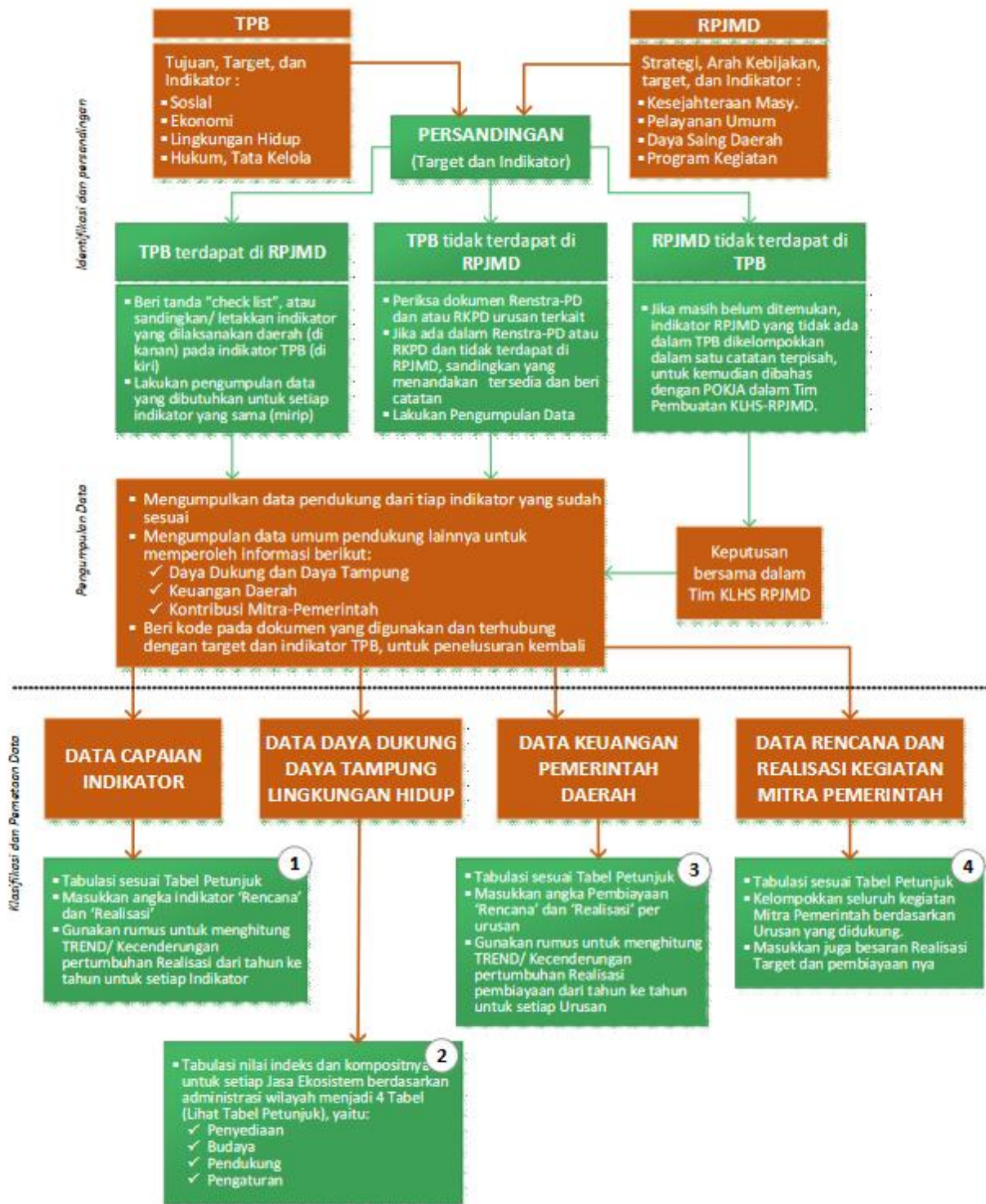
Fungsi pelaksanaan bertugas memastikan bahwa rekomendasi yang disusun sudah masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Di dalam fungsi pelaksanaan, terdapat fungsi monitoring dan evaluasi yang sekaligus berfungsi sebagai lembaga otorisasi secara legal atas hasil kerja KLHS-RPJMD.

Struktur organisasi dibawah ketua dan wakil ketua tim, terdiri paling sedikit 4 (empat) kelompok kerja (Pokja), yaitu sebagai berikut.

- Pokja I, Pembangunan Sosial; Pokja dengan anggota berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, ketahanan pangan, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan atau keluarga berencana.
- Pokja II, Pembangunan Ekonomi; Pokja dengan anggota berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, keuangan daerah, statistik, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, tenaga kerja, perdagangan, perindustrian, Pekerjaan umum, perhubungan, koperasi dan UKM, dan atau komunikasi informatika.
- Pokja III, Pembangunan Lingkungan; Pokja upaya pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, dengan anggota berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral, pertanian, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, agraria dan tata ruang, penanggulangan bencana, perindustrian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
- Pokja IV, Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; Pokja penegakan hukum dan azas pemerintahan, dengan anggota berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, sumberdaya manusia, dan kesatuan bangsa/politik, serta dapat berasal dari institusi pusat (vertikal) yang berada di Daerah yaitu kejaksaan, kehakiman, dan/atau kepolisian.

L1.2. Identifikasi, Pengumpulan dan Analisis Data

Identifikasi, pengumpulan dan analisis data dilakukan oleh TIM, dengan alur pikir berikut ini:



Gambar L1. 1 Alur Pikir Identifikasi, Pengumpulan dan Analisis Data

L1.1.1. Identifikasi

Identifikasi, yaitu (1) temukenali target dan indikator TPB yang relevan (diperoleh dari Perpres no. 111 tahun 2022) dan (2) temukenali target dan indikator rencana pembangunan (diperoleh dari Permendagri No.86 tahun 2017), untuk disesuaikan dan mempunyai relevansi dengan target dan indikator yang terdapat



dalam dokumen RPJMD. Karena dalam KLHS-RPJMD tidak seluruh daerah memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pelaksanaan indikator TPB. Adanya batasan kewenangan, karakteristik geografis dan demografi daerah menimbulkan kekhususan beberapa indikator untuk dilaksanakan di daerah. Perlunya identifikasi terhadap relevansi indikator TPB bagi masing-masing daerah, dimaksudkan agar visi, misi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang dirumuskan di dalam RPJMD tidak bertentangan dengan kewenangan serta kondisi wilayahnya masing-masing.

L1.1.2. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dari tiap indikator yang sesuai (relevan antara indikator rencana pembangunan daerah dengan TPB), dengan data yang dikumpulkan sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) RPJPD yang berlaku.
- 2) RPJMD yang berlaku.
- 3) RKPD tahun 2017 dan 4 tahun sebelumnya.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 dan 3 tahun sebelumnya.
- 5) Daya Dukung dan Daya Tampung.
- 6) Data kegiatan Mitra-Pemerintah dalam pembangunan (kontribusi)
- 7) Data Pendukung lainnya.

L1.1.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memetakan berikut ini:

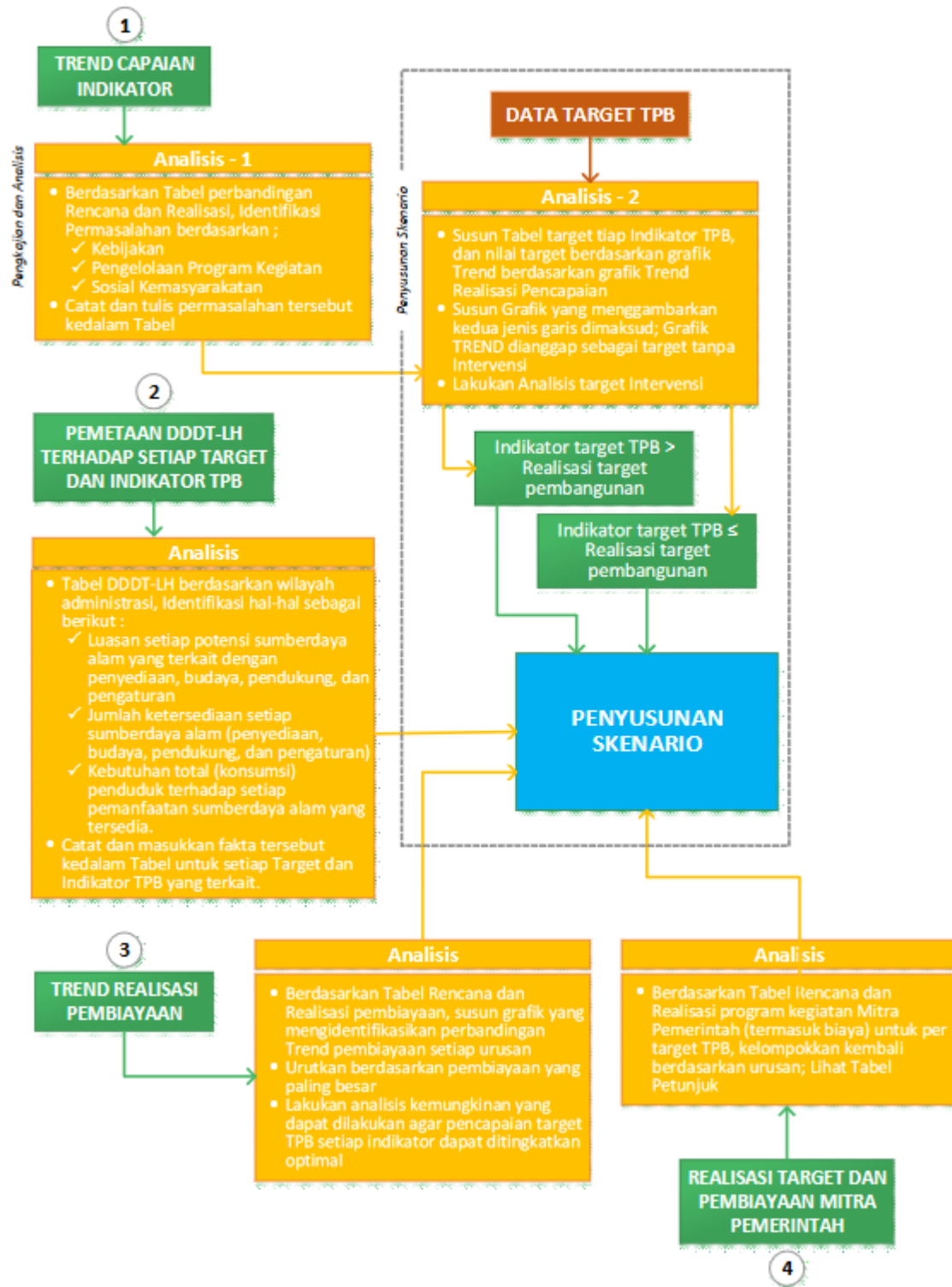
- 1) Pemetaan indikator capaian rencana pembangunan terhadap target TPB
- 2) Pemetaan daya dukung dan daya tampung LH terhadap target TPB
- 3) Pemetaan keuangan daerah
- 4) Pemetaan Mitra Pemerintah

Pemetaan Indikator Capaian Rencana Pembangunan terhadap Target TPB, dilakukan dengan membandingkan Target dan Indikator TPB terhadap realisasi capaian, target, gap/kesenjangan, dan penjelasan kesenjangan selama periode 5 tahun.

Dengan melakukan analisis data dalam bentuk pemetaan indikator rencana pembangunan terhadap indikator TPB, maka dapat dilakukan kajian rencana pembangunan daerah terhadap target dan indikator TPB.

L1.2. Pengkajian

Pengkajian dilakukan menurut alur pikir berikut ini.



Gambar L1. 2 Alur Pikir Pengkajian

L1.2.1. Kajian Rencana Pembangunan dengan Target TPB

Berdasarkan gap dan permasalahan kesenjangan capaian rencana pembangunan selama 5 tahun berjalan dari hasil analisis data, dilakukan perhitungan proyeksi tren historis rencana pembangunan, kemudian diperbandingkan terhadap sasaran



target/indikator TPB dengan metode Statistik, yang menghasilkan grafik seperti dibawah ini.



Gambar L1. 3 Grafik Perbandingan Indikator Tren Target Rencana Pembangunan dan Target TPB

Memperhatikan kondisi existing base line indikator rencana pembangunan daerah (capaian dan target periode tahun $n-4$ s/d tahun n) dibandingkan dengan target/indikator TPB yang relevan dengan rencana daerah, diperoleh gap/kesenjangan. Terdapat 3 kondisi Gap, yaitu: lebih atau sama atau kurang dari target/indikator TPB. Kondisi gap lebih atau sama, maka Daerah tidak perlu melakukan intervensi tetapi “mempertahankan” kondisi tersebut. Sedangkan untuk kondisi gap kurang, maka Daerah perlu melakukan intervensi.

L1.2.2. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT-LH) dilakukan untuk mendapatkan gambaran indikatif potensi sumberdaya alam beserta jasa ekosistem yang terdapat dalam suatu wilayah, termasuk pembatas atas potensi sumberdaya alam dimaksud. Selanjutnya, untuk melengkapi kajian tersebut, perlu tambahan data dan informasi yang terkait dengan kebutuhan konsumsi penduduk diwilayah tersebut yang mampu disediakan oleh potensi sumberdaya alamnya.

L1.2.3. Kajian Pembiayaan pembangunan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (beserta peraturan perubahannya), kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dilihat dari sumber pendapatan daerah dan komposisi belanja daerah (belanja



langsung, dan belanja tidak langsung), serta analisis kondisi keuangan daerah (neraca daerah yang mencerminkan perkembangan aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah, serta ekuitas dana tersedia).

Kinerja keuangan daerah untuk menjalankan rencana pembangunan daerah tentunya dengan mudah dapat dilihat dengan menghubungkan pendapatan dan belanja daerah terhadap capaian indikator rencana pembangunan daerah. Dengan syarat tersedianya data keuangan program pembangunan terpilah menurut indikator TPB, untuk dapat dicatatkan dalam tabel yang telah disediakan di bawah ini. Namun jika tidak tersedia data keuangan terpilah maka perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan model Keynesian. Sebuah model persamaan, yaitu total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran (pendapatan dipersamakan dengan PDRB, dan pengeluaran dihitung berdasarkan komponen: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dengan impor).

L1.3. Perumusan Skenario

Perumusan Skenario Pembangunan dilakukan dengan alur pikir berikut ini.



Gambar L1. 4 Diagram Perumusan Skenario Pembangunan

Dilakukan dengan langkah berikut ini:

- 1) Proyeksi Kemampuan Keuangan.
Menentukan rata-rata pertumbuhan keuangan daerah dan melakukan proyeksi untuk 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode RPJMD. Proyeksi difokuskan pada pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan belanja modal daerah.
- 2) Proyeksi Pertumbuhan capaian TPB Daerah
Proyeksi berdasarkan rata-rata pertumbuhan data capaian TPB untuk periode:
 - 20 tahun sesuai dengan periode RPJPD
 - Proyeksi sampai tahun 2029 (periode akhir RPJMD)
 - Proyeksi untuk tahun 2030 sesuai masa akhir TPB.



Berdasarkan hasil proyeksi didapatkan perbandingan antara proyeksi capaian TPB daerah dan target pencapaian TPB secara nasional dan internasional.

3) Potensi Daerah

Berdasarkan analisis jasa ekosistem, termukan potensi daerah yang dapat dioptimalkan untuk mempercepat pencapaian target TPB daerah

4) Daya Dukung dan Daya Tampung LH

Pahami DDT-LH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui jasa ekosistem sebagai “sinyal” pendukung dan/atau pembatas penentuan skenario, “dengan atau tanpa” upaya tambahan. Pemahaman tersebut mencakup tidak kurang terhadap kondisi pemenuhan gap antara indikator target rencana pembangunan dengan target TPB, yaitu: $TPB > \text{rencana pembangunan}$, kondisi “intervensi”. $TPB \leq \text{rencana pembangunan}$, kondisi “mempertahankan”.

5) Potensi Dukungan Mitra-Pemerintah

Analisis program dan kegiatan non pemerintah serta kontribusinya terhadap pencapaian TPB. Target capaian TPB daerah merupakan gabungan antara target capaian TPB oleh Pemda dan kontribusi non pemerintah.

6) Perbandingan

Proyeksi capaian TPB dibandingkan dengan target di RPJMD dan target pencapaian TPB tahun 2030. Hasil perbandingan memperlihatkan:

- TPB sudah pada posisi mempertahankan jika proyeksi pertumbuhan target TPB sama atau lebih besar dari target nasional dan target 2030.
- TPB membutuhkan upaya tambahan jika proyeksi pertumbuhan target TPB lebih kecil dari target nasional dan target 2030

7) Penentuan Target Berdasarkan Skenario

- Target skenario tanpa upaya tambahan diambil dari hasil proyeksi capaian TPB
- Target skenario dengan upaya tambahan memperhatikan potensi keuangan daerah, dukungan mitra serta DDDT.

L1.4. Perumusan Rekomendasi

Berdasarkan skenario pembangunan, Tim KLHS RPJMD menentukan skenario mana yang dapat dijalankan selama 5 tahun ke depan. Pilihan skenario tersebut menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan KLHS baik dalam RPJMD maupun untuk dokumen lain seperti Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)

L1.5. Penjaminan Kualitas

Kepala Daerah secara mandiri memastikan bahwa seluruh tahapan proses pembuatan telah dilakukan dan kualitas substansi KLHS-RPJMD (isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis) telah mendukung pembangunan berkelanjutan. Kepastian dimaksud dengan didukung oleh bukti-bukti yang telah dilakukan dalam tiap



tahapan proses KLHS-RPJMD tersebut secara akuntabel dan dapat dibuktikan kepada publik.

Tahapan proses pembuatan KLHS-RPJMD dibuktikan oleh Kepala Daerah dengan mencakup berikut ini:

- 1) Ketersediaan Surat Keputusan Pembentukan TIM Pembuat KLHS-RPJMD (ditandatangani oleh kepala daerah)
Tim pembuat KLHS RPJMD ditetapkan dengan surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh kepala daerah. SK tersebut menjelaskan mengenai pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD beserta tugas dan kewajiban tim pembuat KLHS RPJMD, serta lampiran yang memuat daftar susunan tim pembuat KLHS RPJMD.
- 2) Proses kajian pembangunan berkelanjutan, dijamin sekurangnya dengan:
 - a) Jadwal pelaksanaan kegiatan pembuatan KLHS-RPJMD
 - b) Berita acara hasil setiap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan
 - c) Daftar Kehadiran dan Foto dokumen pelaksanaan kegiatan pembuatan KLHS-RPJMD
 - d) Laporan KLHS-RPJMD



LAMPIRAN 2. REKAPITULASI CAPAIAN TPB DI KOTA BOGOR

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
1	1,2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	7,24	7,1	6,67	Menurun menjadi 7-8%	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	91,11	96,11	99,7	Meningkat menjadi 95%	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	orang	975.532 orang	1.029.068 Orang	1.067.507 Orang	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,3	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	59,41	100	100	Meningkat menjadi 17,12%	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Orang		101.078	129.854	Menurun menjadi 2,8 juta	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	94,14%	96,28	92,15	Meningkat menjadi 70%	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,4	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	89,2	96,7	96,9	Meningkat menjadi 63%.	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,4	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	82%	69,18	74,5	Meningkat menjadi 65%	Belum Sesuai Target (SB)
1	1,4	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	68,49	68,49	76,57	Meningkat menjadi 100%	Belum Sesuai Target (SB)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
1	1,4	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	75,12	5,42	5,49	Meningkat menjadi 100%	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,4	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Ha	1,84	1,46	1	Meningkat menjadi 18,6 juta	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,4	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	99,66	99,67	99,64	Meningkat menjadi 94,78%	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,4	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		86	87	84,95	Meningkat menjadi 82,2%	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,4	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		96,43	94,21	94,21	Meningkat menjadi 77,4%.	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,4	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		100%	100%	100%	Meningkat menjadi 100%	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,5	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang	4 orang meninggal	15 orang meninggal	15 orang meninggal	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
1	1,5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	daerah	Nihil	3 Kelurahan total 19 kelurahan	4 Kelurahan total 19 kelurahan	Meningkat menjadi 39 daerah	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,5	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	orang	2.000 jiwa (500 paket)			Meningkat menjadi 151 ribu	Belum Sesuai Target (SB)
1	1,5	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	orang		100%	100%	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,5	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	daerah	16	10 Sekolah	10 Sekolah	Meningkat menjadi 450	Sudah Sesuai target (SS)
1	1,5	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	indeks resiko	Nihil	Nihil	Nihil	Menurun menjadi 118,6	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
1	1,5	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Rp. 2.104.775.000	Rp. 3.952.900.000	Rp. 3.952.900.000	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
1	1,5	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dokumen	1 Dokumen (Renas PB)	1 Dokumen (Renas PB)	1 Dokumen (Renas PB)	ada	Sudah Sesuai target (SS)
1	1.a	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	Belanja Bantuan SosialRp. 56,709,150,000	Belanja Bantuan SosialRp. 52,247,724,000	Belanja Bantuan SosialRp. 52,247,724,000	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
1	1.a	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%		Kesehatan: 695.619.378.796 Pendidikan: 663.721.055.652	Kesehatan: 695.619.378.796 Pendidikan: 663.721.055.652	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
2	2,1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	%	3,08	5,35	4,86	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
2	2,1	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	4,77	4,82	4,15	Menurun menjadi 17%	Sudah Sesuai target (SS)
2	2,1	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	5,46	5,18	4,9	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
2	2,1	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	7,81	13,95	14,84	Menurun menjadi 8,5 %	Sudah Sesuai target (SS)
2	2,2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	5,33	3,25	2,59	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
2	2,2	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	5,13	3,12	1,99	Menurun menjadi 28%	tidak ada/belum ada data (NA)
2	2,2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%	3,89	2,43	2,32	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
2	2,2	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	8,52	9,01	8,05	Menurun menjadi 28%	Sudah Sesuai target (SS)
2	2,2	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	61,16%	76,31%	73,00%	Meningkat menjadi 50%	Belum Sesuai Target (SB)
2	2,2	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	skor	70,56	81,7	83,1	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Belum Sesuai Target (SB)
2	2,3	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Point				Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
3	3,1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Kalahiran Hidup	102,4 / 100.000	73,26/ 100.000	59,8/100.000	Menurun menjadi 306	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,1	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	94,9	96,1	96,1	Meningkat menjadi 95%	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,1	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	94,14	96,28	92,15	Meningkat menjadi 85 %	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	/1000 kelahiran hidup	3,58/1000 KH	4//1000 KH	7,1/1000	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
3	3,2	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	angka	2,9/ 1000 KH	3,3/ 1000 KH	5,4/1000 KH	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
3	3,2	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	kasus/ kelahiran hidup	3,4/1000 KH	3,8/ 1000 KH	6,7/ 1000 KH	Menurun menjadi 24	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,2	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	44,12	98,53	85,2	Meningkat menjadi 95%	Belum Sesuai Target (SB)
3	3,3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,44	0,46	0,47	Menurun menjadi <0,5%	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	477,30	801,51	994,59	Menurun menjadi 245	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		12	18	25	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,4	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%		27,14	27,14	Menurun menjadi 5,4%	Belum Sesuai Target (SB)
3	3,4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	6,6	7,25	9,66	Menurun menjadi 24,3%	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,4	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	7,79	10,52	12,85	Menurun	tidak ada/belum ada data (NA)
3	3,4	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	orang				Menurun	tidak ada/belum ada data (NA)
3	3,4	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	-	25	25	25	Meningkat menjadi 280	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,5	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	angka	0,001	0,001	0,001	Menurun menjadi angka 0,02%	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
3	3,5	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	per Kapita				Menurun	tidak ada/belum ada data (NA)
3	3,7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	78,63	78,66	78,66	Meningkat menjadi 66%	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,7	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	78,64	78,66	78,66	Meningkat menjadi 65%	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,7	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	21,13	20,36	20,36	Meningkat menjadi 23,5%	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,7	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	per seribu remaja	12,09	12,9	12,9	Menurun menjadi 38	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,7	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	%	2,13	2,13	2,13	Menurun menjadi 2,28	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,8	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	11,41	11,4	11,4	Menurun menjadi 9,91%	Belum Sesuai Target (SB)
3	3,8	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	%	90,46%	96,11%	99,70%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
3	3,8	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	90,31	93	93	Meningkat menjadi minimal 95%	Belum Sesuai Target (SB)
3	3,9	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	%	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
3	3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%	1,82	11,77	12,25	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
3	3.b	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%		94.2	96	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
3	3.c	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	per satuan penduduk	Nakes 5988	Nakes 5680	Nakes 5680	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
4	4,1	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%		99,69	99,69	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
4	4,1	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	19,57	97	98	Meningkat menjadi 84,2%	Belum Sesuai Target (SB)
4	4,1	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	21,26	95	96	Meningkat menjadi 81%	Belum Sesuai Target (SB)
4	4,1	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	113,05	113,08	114	Meningkat menjadi 114,09%	Belum Sesuai Target (SB)
4	4,1	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	104,8	105	105,5	Meningkat menjadi 106,94%	Sudah Sesuai target (SS)
4	4,1	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat.	%		82,8	82,8	Meningkat menjadi 100%	Belum Sesuai Target (SB)
4	4,1	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	tahun	10,54	10,63	10,64	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Sudah Sesuai target (SS)
4	4,2	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	50,5	51	51,5	Meningkat menjadi 77,2%	Belum Sesuai Target (SB)
4	4,4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	Index Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi 2,33	Index Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi 2,34	Index Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi 2,34	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
4	4,5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3)	%	(1) SD/MI/ sederajat Laki - Laki :103,03	(1) SD/MI/ sederajat Laki - Laki : 100,62	(1) SD/MI/ sederajat Laki - Laki : 1-1,53	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
			SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		(2) SMP/MTs/sederajat Laki-Laki;100,78 (3) SD/MI/sederajat Perempuan : 103,03 (4) SMP/MTs/sederajat Perempuan;100,78	(2) SMP/MTs/sederajat Laki-Laki;100,24 (3) SD/MI/sederajat Perempuan : 101,53 (4) SMP/MTs/sederajat Perempuan;100,62	(2) SMP/MTs/sederajat Laki-Laki;100,65 (3) SD/MI/sederajat Perempuan :114 (4) SMP/MTs/sederajat Perempuan;105,5		
4	4,6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	%	99,69	99,98	99,98	Meningkat menjadi 96,1%	Sudah Sesuai target (SS)
4	4,6	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.					Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
4	4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	%				Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
4	4.c	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	TK;21 SD;55 SMP;55	TK;23 SD;56 SMP;56	TK;25 SD;57 SMP;57	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
5	5,1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	-	ada 1 Kebijakan	ada 1 Kebijakan	ada 1 Kebijakan	bertambah sebanyak 16	Sudah Sesuai target (SS)
5	5,2	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	kasus	93	64	57	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
5	5,2	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan.	%	0,01%	0,02%	0,02%	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	Sudah Sesuai target (SS)
5	5,2	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,01%	0,01%	0,01%	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
5	5,2	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100	100	Meningkat menjadi 70%	Sudah Sesuai target (SS)
5	5,3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
5	5,3	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	tahun	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Meningkat menjadi 21 tahun	Sudah Sesuai target (SS)
5	5,3	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	angka fertilitas total (jiwa)	12,09%	12,09%	12,09%	Menurun menjadi 38 tahun	Sudah Sesuai target (SS)
5	5,5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	22	22	22	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
5	5,5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%				Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
5	5,6	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	%	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi 78,64%	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi 78,66%	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi 78,66%	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
5	5,6	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	12,44	12,45	12,45	Menurun menjadi 9,9%	Belum Sesuai Target (SB)
5	5,6	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	78,64	78,66	78,66	Meningkat menjadi 85%	Belum Sesuai Target (SB)
5	5.b	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%	86,73	84,77	88,25	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
6	6,1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	83,83	68,68	99,61	Meningkat menjadi 100%	Belum Sesuai Target (SB)
6	6,1	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3				Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	tidak ada/belum ada data (NA) TIDAK RELEVAN
6	6,1	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	68,49	68,68	76,79	Meningkat menjadi 100%	Belum Sesuai Target (SB)
6	6,2	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	100	100	100	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
6	6,2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	Sanitasi layak 70,9	Sanitasi layak 73,02	Sanitasi layak 76,17	Meningkat menjadi 100%	Belum Sesuai Target (SB)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
6	6,2	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	68	68	68	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Sudah Sesuai target (SS)
6	6,2	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	0	2	68	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
6	6,2	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	69,91	73,72	75,12	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
6	6,3	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Kab/Kota	Memiliki 1 IPLT	Memiliki 1 IPLT	Memiliki 1 IPLT	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	Sudah Sesuai target (SS)
6	6,3	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%		73,72	73,72	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
6	6,3	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	-	Indeks Kualitas Air 64,72	Indeks Kualitas Air 51,39	Indeks Kualitas Air 46,67	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
6	6,3	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	Indeks Kualitas Air 64,72	Indeks Kualitas Air 51,39	Indeks Kualitas Air 46,67	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
6	6,4	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-				ada	tidak ada/belum ada data (NA)
6	6,5	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	-	1	1	1	ada	Sudah Sesuai target (SS)
6	6,5	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	-	Masuk dalam WS Ciliwung	Masuk dalam WS Ciliwung	Masuk dalam WS Ciliwung	8 WS	Sudah Sesuai target (SS)
6	6,5	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam	-	Terdapat beberapa	Terdapat beberapa	Terdapat beberapa	10 WS (skala nasional)	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
			pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		komunitas peduli DAS, yakni komunitas peduli ciliwung, ciliwung sinstitut, ecovillage sungai ciliwung dan ciliwung merdeka	komunitas peduli DAS, yakni komunitas peduli ciliwung, ciliwung sinstitut, ecovillage sungai ciliwung dan ciliwung merdeka	komunitas peduli DAS, yakni komunitas peduli ciliwung, ciliwung sinstitut, ecovillage sungai ciliwung dan ciliwung merdeka		
6	6,5	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	Dibawah BBWS Ciliwung-Cisadane	Dibawah BBWS Ciliwung-Cisadane	Dibawah BBWS Ciliwung-Cisadane	ada	Sudah Sesuai target (SS)
7	7,2	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	%				10-16%	tidak ada/belum ada data (NA)
7	7,3	7.3.1*	Intensitas energi primer.	-				Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	tidak ada/belum ada data (NA)
8	8,1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	-1,48%	5,65	5,1	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	46	50	50	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	0,111011597	-0,714449847	-0,714449847	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
8	8,3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	48,17	48,57	48,57	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
8	8,3	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	58,83%	59,37%	59,37%	51%	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,3	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	89,19	88,05	87,89	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,3	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	11,70%	11,70%	11,70%	25%	Belum Sesuai Target (SB)
8	8,5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	4.330.249	4.634.429	4.634.429	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,5	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	11,79%	10,78%	9,39%	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,5	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	%	11,37%	11,23%	11,23%	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,6	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	Laki - Laki : 3,63% Perempuan : 3,09%	Laki - Laki : 3,63% Perempuan : 3,09%	Laki - Laki : 3,63% Perempuan : 3,09%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,9	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	4,94%	4,87%	4,87%	Meningkat menjadi 8%	Belum Sesuai Target (SB)
8	8,9	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	orang	42.968	48.922	57.703	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,9	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	orang	3.691.372	5.125.405	5.592.934	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,9	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp	185.661.140.961	287.860.632.150	328.823.584.610	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,9	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	orang	30 (Pelaku)	32 (Pelaku)	32 (Pelaku)	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,10	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	unit	0,01826772	0,01826772	0,01826772	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
8	8,10	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	%	Terdekat : 180 Meter	Terdekat : 180 Meter	Terdekat : 180 Meter	Menurun (mendekat)	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
					Menengah : 780 Meter Terjauh : 1.599 Meter	Menengah : 780 Meter Terjauh : 1.599 Meter	Menengah : 780 Meter Terjauh : 1.599 Meter		
8	8,10	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	20%	19%	19%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
9	9,1	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Persen (%)	64,32 Km	64,32 Km	64,32 Km	1000 Km (skala nasional)	Sudah Sesuai target (SS)
9	9,1	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Lokasi	56,65 Km	56,65 Km	56,65 Km	Bertambah 3.258 km	Sudah Sesuai target (SS)
9	9,2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen (%)	4,46%	5,08%	3,96%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
9	9,2	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen (%)	4,46%	5,08	3,96	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Sudah Sesuai target (SS)
9	9,2	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Orang	14,11%	14,11%	21,39%	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
9	9,3	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Persen (%)	19,16%	18,98%	18,98%	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
9	9,3	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(Juta Rp)	20%	19%	19%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
9	9,5	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(Juta Rp)		2.305.387.540	2.305.387.540	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
9	9.c	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	-	Seluruh wilayah Kota Bogor terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah Kota Bogor terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah Kota Bogor terlayani mobile broadband	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
9	9.c	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	orang	86,73	84,77	88,25	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
9	9.c	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	orang	80,5	81,49	84,01	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
10	10,1	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indeks	0,441	0,43	0,464	Menurun menjadi 0,36	Belum Sesuai Target (SB)
10	10,1	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen (%)	7,24%	7,10%	6,67%	Menurun menjadi 7-8%	Sudah Sesuai target (SS)
10	10,2	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen (%)				paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	tidak ada/belum ada data (NA)
10	10,3	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks	89,71	90,61	87,97	Meningkat menjadi 87	tidak ada/belum ada data (NA)
10	10,3	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan	ada	ada	ada	ada	Sudah Sesuai target (SS)
10	10,4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jiwa	229.729 (Jiwa) atau 21,83%	229.729 (Jiwa) atau 21,83%	229.729 (Jiwa) atau 21,83%	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,1	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen (%)	58	68	77	3,7 juta rumah tangga	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,1	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Persen (%)	97,74%	97,74%	97,74%	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,1	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Persen (%)	10,72	10,72	10,72	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	Belum Sesuai Target (SB)
11	11,2	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persen (%)	23.069.825	23.069.825	23.069.825	Meningkat menjadi 32%	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
11	11,2	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	-	ada	ada	ada	ada	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,3	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Persen (%)				Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
11	11,3	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Bidang	6	6	6	Ada	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,4	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kawasan	6	6	6	ada	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	26	45	45	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
11	11,5	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks	65,38	71,01	63,49	Menurun menjadi 30%	Belum Sesuai Target (SB)
11	11,5	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Kelurahan	16 Kelurahan	19 Kelurahan	23 Kelurahan	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,5	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	Nihil	1 Unit	1 Unit	ada	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,5	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(Juta Rp)	Rp. 2.104.775.000	Rp. 3.952.900.000	Rp. 3.952.900.000	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
11	11,6	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen (%)	81%	81	70	Meningkat menjadi 80%	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,6	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Persen (%)	Persentase sampah tereduksi 7,85	7,8	7,8	Meningkat/ada	Sudah Sesuai target (SS)
11	11,7	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Persen (%)	4,20 (RTH Publik)	4,20 (RTH Publik)	4,23 (RTH Publik)	Meningkat/ada	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
11	11.b	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Dokumen	2 Dokumen (KRB, RPB)	1 Dokumen (RPB)	1 Dokumen (KRB)	Meningkat/ada	Sudah Sesuai target (SS)
11	11.b	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	4 Dokumen Kajian Resiko Bencana(KRB) Rancana Penanggulangan Bencana (RPB Perwali Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) SK Walikota Forum Pengurangan Resiko bencana (F-PRB)	4 Dokumen Kajian Resiko Bencana(KRB) Rancana Penaggulangan Bencana (RPB Perwali Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Pendidikan Aman Bencana (SPAB) SK Walikota Forum Pengurangan Resiko bencana (F-PRB)	4 Dokumen Kajian Resiko Bencana(KRB) Rancana Penaggulangan Bencana (RPB Perwali Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) SK Walikota Forum Pengurangan Resiko bencana (F-PRB)	ada	Sudah Sesuai target (SS)
12	12,4	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Persen (%)	24,5	24,5	24,5	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Belum Sesuai Target (SB)
12	12,5	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persen (%)	7,85	7,8	7,8	20 ton per hari (skala nasional)	Sudah Sesuai target (SS)
12	12,6	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	50,60%	56,60%	56,60%	Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
12	12,7	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk				Meningkat	tidak ada/belum



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
									ada data (NA)
12	12,8	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Unit				Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
13	13,1	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1 Dokumen (Renas PB)	1 Dokumen (Renas PB)	1 Dokumen (Renas PB)	ada	Sudah Sesuai target (SS)
13	13,1	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	26	45	45	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
15	15,1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	ha		38,04	38,04	Meningkat	Belum Sesuai Target (SB)
15	15,3	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	ha		803,81 ha	803,81 ha	5,5 juta ha (skala nasional)	Belum Sesuai Target (SB)
15	15,6	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	-	ada	ada	ada	ada	Sudah Sesuai target (SS)
15	15,9	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	1	1	1	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	7	7	7	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
16	16,1	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kasus	5	5	5	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,1	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Persen (%)	0,08%	0,08%	0,08%	Menurun	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,1	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	99,92%	99,92%	99,92%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
16	16,2	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Persen (%)	51	73	73	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
16	16,2	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kasus	51	64	57	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
16	16,2	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Persen (%)	0,01%	0,02%	0,02%	Menurun	Belum Sesuai Target (SB)
16	16,5	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	91,29%	96,91%	97,56%	Meningkat menjadi 4,0	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,6	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen (%)	96,00%	96,00%	96,00%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,6	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini	WTP	WTP	WTP	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,6	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Point	21,90%	18,65%	17,75%	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Belum Sesuai Target (SB)
16	16,6	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	1,90%	0,07%	2,03%	Menjadi menjadi 80%	tidak ada/belum ada data (NA)
16	16,6	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga	Point	28,51%	34,58%	60,14%	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lemb	tidak ada/belum



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
			dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).					aga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	ada data (NA)
16	16,6	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Point				Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	tidak ada/belum ada data (NA)
16	16,7	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen (%)	22%	22%	22%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,7	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Orang	17%	17%	17%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen (%)	100%	100%	100%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,9	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Persen (%)	91,17%	91,17%	91,17%	Meningkat menjadi 77,4%	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,9	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen (%)	95%	100%	100%	Meningkat menjadi 85%	Sudah Sesuai target (SS)
16	16,10	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Sertifikat				Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
16	16.b	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan	kebijakan				ada	tidak ada/belum



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
			pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						ada data (NA)
17	17,1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Juta Rp	2.644.780.935.777,11	2.575.186.007.572,92	2.966.607.056.081,00	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,1	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen (%)	1,29	1,41	1,57	Di atas 12%	Belum Sesuai Target (SB)
17	17,1	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Rupiah	19,90%	26,83%	28,32%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,6	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	-	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,6	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	%	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,8	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	%	80,5	81,49	84,01	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,17	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	proyek	141 Proyek	132 Proyek	105 Proyek	ada	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,17	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Juta Rupiah				ada	tidak ada/belum ada data (NA)
17	17,18	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen (%)	98,36%	96,97%	100,00%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KETERANGAN
17	17,18	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen (%)	72,73%	94,12%	94,12%	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,18	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Metadata	ada	ada	ada	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,18	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	%				Meningkat	tidak ada/belum ada data (NA)
17	17,19	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Metadata	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,19	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Pengunjung	57202	60804	86337	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)
17	17,19	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen (%)	92,42%	97,06	100	Meningkat	Sudah Sesuai target (SS)

Tabel Indikator TPB Tidak Relevan

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 111/2022)	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KEWENANGAN KOTA	KETERANGAN
3	3,3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Menurun	Kota	Tidak Relevan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 111/2022)	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KEWENANGAN KOTA	KETERANGAN
3	3,3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Meningkat menjadi 300	Kota	Tidak Relevan
3	3,3	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Meningkat	Kota	Tidak Relevan
3	3,3	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Meningkat menjadi 34 provinsi	Kota	Tidak Relevan
3	3,3	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Meningkat menjadi 35.	Kota	Tidak Relevan
6	6,2	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Kota	Tidak Relevan
7	7,2	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	10-16%	Kota	Tidak Relevan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 111/2022)	TARGET (PERPRES 111/2022) - ringkasan	KEWENANGAN KOTA	KETERANGAN
7	7,3	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	Kota	Tidak Relevan
9	9,1	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	Meningkat	Kota	Tidak Relevan
9	9,1	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	24 pelabuhan (skala nasional)	Kota	Tidak Relevan



LAMPIRAN 3. REKAPITULASI CAPAIAN TPB BERDASARKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi TPB Per Dinas

Dinas Sosial

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	7,24	7,1	6,67	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial
1	1,3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	orang	975.532 orang	1.029.068 Orang	1.067.507 Orang	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial
1	1,3	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	59,41	100	100	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial
1	1,3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Orang		101.078	129.854	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,5	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	orang	2.000 jiwa (500 paket)			Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Sosial
1	1,5	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	orang		100%	100%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial
1	1.a	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	Belanja Bantuan Sosial Rp. 56,709,150,000	Belanja Bantuan Sosial Rp. 52,247,724,000	Belanja Bantuan Sosial Rp. 52,247,724,000	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial
1	1.a	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%		Kesehatan: 695.619.378.796 Pendidikan: 663.721.055.652	Kesehatan: 695.619.378.796 Pendidikan: 663.721.055.652	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial
8	8,5	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	11,79%	10,78%	9,39%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
10	10,1	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen (%)	7,24%	7,10%	6,67%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial
10	10,2	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen (%)				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Sosial
10	10,4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jiwa	229.729 (Jiwa) atau 21,83%	229.729 (Jiwa) atau 21,83%	229.729 (Jiwa) atau 21,83%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Sosial

Dinas Kesehatan

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	91,11	96,11	99,7	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya di fasilitas kesehatan.	%	94,14%	96,28	92,15	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
1	1,4	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	89,2	96,7	96,9	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
1	1,4	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	82%	69,18	74,5	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan
2	2,1	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	4,77	4,82	4,15	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
2	2,1	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	7,81	13,95	14,84	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
2	2,2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	5,33	3,25	2,59	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
2	2,2	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	5,13	3,12	1,99	tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Kesehatan
2	2,2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%	3,89	2,43	2,32	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan
2	2,2	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	8,52	9,01	8,05	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
2	2,2	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	61,16%	76,31%	73,00%	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan
3	3,1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Kalahiran Hidup	102,4 / 100.000	73,26/ 100.000	59,8/100.000	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
3	3,1	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	94,9	96,1	96,1	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,1	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	94,14	96,28	92,15	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	/1000 kelahiran hidup	3,58/1000 KH	4//1000 KH	7,1/1000	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan
3	3,2	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	angka	2,9/ 1000 KH	3,3/ 1000 KH	5,4/1000 KH	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan
3	3,2	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	kasus/ kelahiran hidup	3,4/1000 KH	3,8/ 1000 KH	6,7/ 1000 KH	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
3	3,2	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	44,12	98,53	85,2	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan
3	3,3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,44	0,46	0,47	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	477,30	801,51	994,59	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		12	18	25	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,4	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%		27,14	27,14	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
3	3,4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	6,6	7,25	9,66	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,4	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	7,79	10,52	12,85	tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Kesehatan
3	3,4	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	orang				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Kesehatan
3	3,4	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	-	25	25	25	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,5	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	angka	0,001	0,001	0,001	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,5	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun	per Kapita				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			dalam satu tahun terakhir.						
3	3,7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	78,63	78,66	78,66	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,7	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	78,64	78,66	78,66	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,7	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	21,13	20,36	20,36	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
3	3,7	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	per seribu remaja	12,09	12,9	12,9	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,7	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	%	2,13	2,13	2,13	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,8	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	11,41	11,4	11,4	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan
3	3,8	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	%	90,46%	96,11%	99,70%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3,8	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	90,31	93	93	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
3	3,9	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	%	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%	1,82	11,77	12,25	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3.b	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%		94.2	96	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
3	3.c	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	per satuan penduduk	Nakes 5988	Nakes 5680	Nakes 5680	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan
5	5,3	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	angka fertilitas total (jiwa)	12,09%	12,09%	12,09%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kesehatan
5	5,6	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	12,44	12,45	12,45	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
5	5,6	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	78,64	78,66	78,66	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Kesehatan



Dinas Pendidikan

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,4	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	99,66	99,67	99,64	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pendidikan
1	1,4	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		86	87	84,95	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pendidikan
1	1,5	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	daerah	16	10 Sekolah	10 Sekolah	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pendidikan
4	4,1	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	19,57	97	98	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pendidikan
4	4,1	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	21,26	95	96	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pendidikan
4	4,1	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	113,05	113,08	114	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pendidikan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
4	4,1	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	104,8	105	105,5	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pendidikan
4	4,1	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat.	%		82,8	82,8	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pendidikan
4	4,1	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	tahun	10,54	10,63	10,64	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pendidikan
4	4,2	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	50,5	51	51,5	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pendidikan
4	4,5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	%	(1) SD/MI/ sederajat Laki - Laki : 103,03 (2) SMP/MTs/ sederajat Laki-Laki; 100,78 (3) SD/MI/ sederajat Perempuan : 103,03 (4) SMP/MTs/ sederajat Perempuan; 100,78	(1) SD/MI/ sederajat Laki - Laki : 100,62 (2) SMP/MTs/ sederajat Laki-Laki; 100,24 (3) SD/MI/ sederajat Perempuan : 101,53 (4) SMP/MTs/ sederajat Perempuan; 100,62	(1) SD/MI/ sederajat Laki - Laki : 1-1,53 (2) SMP/MTs/ sederajat Laki-Laki; 100,65 (3) SD/MI/ sederajat Perempuan : 114 (4) SMP/MTs/ sederajat Perempuan; 105,5	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pendidikan



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
4	4,6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	%	99,69	99,98	99,98	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pendidikan
4	4,6	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.					tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Pendidikan
4	4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	%				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Pendidikan
4	4.c	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	TK;21 SD;55 SMP;55	TK;23 SD;56 SMP;56	TK;25 SD;57 SMP;57	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pendidikan



Dinas Perumahan dan Permukiman

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,4	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	68,49	68,49	76,57	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	1,4	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	75,12	5,42	5,49	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	1,4	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Ha	1,84	1,46	1	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	6,1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	83,83	68,68	99,61	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	6,1	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,	m3				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Perumahan dan Permukiman



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.					TIDAK RELEVAN	
6	6,1	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	68,49	68,68	76,79	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	6,2	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	100	100	100	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	6,2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	Sanitasi layak 70,9	Sanitasi layak 73,02	Sanitasi layak 76,17	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	6,2	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	68	68	68	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Perumahan dan Permukiman



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
6	6,2	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	0	2	68	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	6,2	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	69,91	73,72	75,12	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	6,3	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Kab/Kota	Memiliki 1 IPLT	Memiliki 1 IPLT	Memiliki 1 IPLT	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	6,3	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%		73,72	73,72	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Perumahan dan Permukiman



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
11	11,7	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Persen (%)	4,20 (RTH Publik)	4,20 (RTH Publik)	4,23 (RTH Publik)	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,4	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		96,43	94,21	94,21	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,5	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang	4 orang meninggal	15 orang meninggal	15 orang meninggal	Belum Sesuai Target (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1,5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	daerah	Nihil	3 Kelurahan total 19 kelurahan	4 Kelurahan total 19 kelurahan	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1,5	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	indeks resiko	Nihil	Nihil	Nihil	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1,5	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Rp. 2.104.775.000	Rp. 3.952.900.000	Rp. 3.952.900.000	Belum Sesuai Target (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	1,5	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dokumen	1 Dokumen (Renas PB)	1 Dokumen (Renas PB)	1 Dokumen (Renas PB)	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
10	10,3	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan	ada	ada	ada	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11,5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	26	45	45	Belum Sesuai Target (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11,5	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks	65,38	71,01	63,49	Belum Sesuai Target (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11,5	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Kelurahan	16 Kelurahan	19 Kelurahan	23 Kelurahan	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
11	11,5	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	Nihil	1 Unit	1 Unit	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11,5	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(Juta Rp)	Rp. 2.104.775.000	Rp. 3.952.900.000	Rp. 3.952.900.000	Belum Sesuai Target (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11.b	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Dokumen	2 Dokumen (KRB, RPB)	1 Dokumen (RPB)	1 Dokumen (KRB)	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	11.b	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	4 Dokumen Kajian Resiko Bencana(KRB) Rancana Penanggulangan Bencana (RPB Perwali Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) SK Walikota Forum Pengurangan	4 Dokumen Kajian Resiko Bencana(KRB) Rancana Penanggulangan Bencana (RPB Perwali Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) SK Walikota Forum Pengurangan Resiko bencana (F-PRB)	4 Dokumen Kajian Resiko Bencana(KRB) Rancana Penanggulangan Bencana (RPB Perwali Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) SK Walikota Forum Pengurangan	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					Resiko bencana (F-PRB)		Resiko bencana (F-PRB)		
13	13,1	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1 Dokumen (Renas PB)	1 Dokumen (Renas PB)	1 Dokumen (Renas PB)	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	13,1	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	26	45	45	Belum Sesuai Target (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
5	5,1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung	-	ada 1 Kebijakan	ada 1 Kebijakan	ada 1 Kebijakan	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			pemberdayaan perempuan.						
5	5,2	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	kasus	93	64	57	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5	5,2	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan.	%	0,01%	0,02%	0,02%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5	5,2	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64	%	0,01%	0,01%	0,01%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
5	5,2	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100	100	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5	5,3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5	5,3	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	tahun	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Rata-Rata Usia Kawin Pertama 21 th	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
5	5,5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	22	22	22	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5	5,5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5	5,6	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	%	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi 78,64%	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi 78,66%	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi 78,66%	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
16	16,2	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Persen (%)	51	73	73	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
16	16,2	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kasus	51	64	57	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
16	16,2	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Persen (%)	0,01%	0,02%	0,02%	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
16	16,7	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan	Persen (%)	22%	22%	22%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).						
16	16,7	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Orang	17%	17%	17%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
16	16,9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen (%)	100%	100%	100%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
16	16,9	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Persen (%)	91,17%	91,17%	91,17%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
16	16,9	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen (%)	95%	100%	100%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
2	2,1	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	5,46	5,18	4,9	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	2,2	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan	skor	70,56	81,7	83,1	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			tingkat konsumsi ikan.						
2	2,3	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Point				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,4	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		96,43	94,21	94,21	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil



UPTD ESDM Wilayah II/ PLN

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
1	1,4	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		100%	100%	100%	Sudah Sesuai target (SS)	UPTD ESDM Wilayah II/ PLN



Badan Pusat Statistika

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
4	4,1	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%		99,69	99,69	Sudah Sesuai target (SS)	BPS
17	17,18	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen (%)	98,36%	96,97%	100,00%	Sudah Sesuai target (SS)	BPS
17	17,18	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan	Persen (%)	72,73%	94,12%	94,12%	Sudah Sesuai target (SS)	BPS



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.						
17	17,18	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Metadata	ada	ada	ada	Sudah Sesuai target (SS)	BPS
17	17,19	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Metadata	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Sudah Sesuai target (SS)	BPS
17	17,19	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan	Pengunjung	57202	60804	86337	Sudah Sesuai target (SS)	BPS



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			informasi statistik melalui website.						
17	17,19	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen (%)	92,42%	97,06	100	Sudah Sesuai target (SS)	BPS

Dinas Lingkungan Hidup

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
6	6,3	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	-	Indeks Kualitas Air 64,72	Indeks Kualitas Air 51,39	Indeks Kualitas Air 46,67	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Lingkungan Hidup
6	6,3	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	Indeks Kualitas Air 64,72	Indeks Kualitas Air 51,39	Indeks Kualitas Air 46,67	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Lingkungan Hidup



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
6	6,5	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	-	1	1	1	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Lingkungan Hidup
6	6,5	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	-	Masuk dalam WS Ciliwung	Masuk dalam WS Ciliwung	Masuk dalam WS Ciliwung	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Lingkungan Hidup
6	6,5	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	Dibawah BBWS Ciliwung-Cisadane	Dibawah BBWS Ciliwung-Cisadane	Dibawah BBWS Ciliwung-Cisadane	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Lingkungan Hidup
11	11,6	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen (%)	81%	81	70	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Lingkungan Hidup
11	11,6	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Persen (%)	Persentase sampah tereduksi 7,85	7,8	7,8	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Lingkungan Hidup



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
12	12,4	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Persen (%)	24,5	24,5	24,5	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Lingkungan Hidup
12	12,5	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persen (%)	7,85	7,8	7,8	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Lingkungan Hidup
12	12,6	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	50,60%	56,60%	56,60%	tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Lingkungan Hidup
12	12,7	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Lingkungan Hidup
12	12,8	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Unit				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Lingkungan Hidup



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
15	15,1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	ha		38,04	38,04	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Lingkungan Hidup
15	15,3	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	ha		803,81 ha	803,81 ha	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Lingkungan Hidup
15	15,9	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	1	1	1	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
4	4,4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	Index Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi 2,33	Index Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi 2,34	Index Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi 2,34	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
5	5.b	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%	86,73	84,77	88,25	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	9.c	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	-	Seluruh wilayah Kota Bogor terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah Kota Bogor terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah Kota Bogor terlayani mobile broadband	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	9.c	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	orang	86,73	84,77	88,25	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	9.c	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	orang	80,5	81,49	84,01	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	16,10	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan	Sertifikat				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			perundang-undangan.						
17	17,6	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	-	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	17,6	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	%	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Seluruh wilayah terlayani mobile broadband	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	17,8	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	%	80,5	81,49	84,01	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Komunikasi dan Informatika



Dinas Tenaga Kerja

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
8	8,2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	0,111011597	-0,714449847	- 0,714449847	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Tenaga Kerja
8	8,3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	48,17	48,57	48,57	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Tenaga Kerja
8	8,3	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	58,83%	59,37%	59,37%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Tenaga Kerja
8	8,5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	4.330.249	4.634.429	4.634.429	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Tenaga Kerja
8	8,5	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	%	11,37%	11,23%	11,23%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Tenaga Kerja



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
8	8,6	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	Laki - Laki : 3,63% Perempuan : 3,09%	Laki - Laki : 3,63% Perempuan : 3,09%	Laki - Laki : 3,63% Perempuan : 3,09%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Tenaga Kerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
17	17,1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Juta Rp	2.644.780.935.777,11	#####	#####	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
17	17,1	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen (%)	1,29	1,41	1,57	Belum Sesuai Target (SB)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
17	17,1	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Rupiah	19,90%	26,83%	28,32%	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Keuangan dan Aset Daerah



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
17	17,17	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	proyek	141 Proyek	132 Proyek	105 Proyek	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
17	17,17	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Juta Rupiah				tidak ada/belum ada data (NA)	Badan Keuangan dan Aset Daerah

DPMPTSP

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
6	6,4	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-				tidak ada/belum ada data (NA)	DPMPTSP



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
8	8,10	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	unit	0,01826772	0,01826772	0,01826772	Sudah Sesuai target (SS)	DPMPTSP
8	8,10	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	%	Terdekat : 180 Meter Menengah : 780 Meter Terjauh : 1.599 Meter	Terdekat : 180 Meter Menengah : 780 Meter Terjauh : 1.599 Meter	Terdekat : 180 Meter Menengah : 780 Meter Terjauh : 1.599 Meter	Sudah Sesuai target (SS)	DPMPTSP
15	15,6	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	-	ada	ada	ada	Sudah Sesuai target (SS)	DPMPTSP

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
8	8,1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	-1,48%	5,65	5,1	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
8	8,1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	46	50	50	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
9	9,5	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(Juta Rp)		2.305.387.540	2.305.387.540	Sudah Sesuai target (SS)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
10	10,1	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indeks	0,441	0,43	0,464	Belum Sesuai Target (SB)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
17	17,18	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	%				tidak ada/belum ada data (NA)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Sekretaris Daerah

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
8	8,10	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	20%	19%	19%	Sudah Sesuai target (SS)	Sekretaris Daerah



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
16	16,6	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen (%)	96,00%	96,00%	96,00%	Sudah Sesuai target (SS)	Sekretaris Daerah
16	16,6	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini	WTP	WTP	WTP	Sudah Sesuai target (SS)	Sekretaris Daerah
16	16,6	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Point	21,90%	18,65%	17,75%	Belum Sesuai Target (SB)	Sekretaris Daerah
16	16,6	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	1,90%	0,07%	2,03%	tidak ada/belum ada data (NA)	Sekretaris Daerah
16	16,6	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Point	28,51%	34,58%	60,14%	tidak ada/belum ada data (NA)	Sekretaris Daerah



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
16	16,6	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Point				tidak ada/belum ada data (NA)	Sekretaris Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
8	8,3	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	11,70%	11,70%	11,70%	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	9,2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen (%)	4,46%	5,08%	3,96%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian



NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
9	9,2	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen (%)	4,46%	5,08	3,96	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	9,2	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Orang	14,11%	14,11%	14,11%	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	9,3	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Persen (%)	19,16%	18,98%	18,98%	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	9,3	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(Juta Rp)	20%	19%	19%	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
8	8,9	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	4,94%	4,87%	4,87%	Belum Sesuai Target (SB)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	8,9	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	orang	42.968	48.922	57.703	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	8,9	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	orang	3.691.372	5.125.405	5.592.934	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	8,9	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp	185.661.140.961	287.860.632.150	328.823.584.610	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	8,9	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	orang	30 (Pelaku)	32 (Pelaku)	32 (Pelaku)	Sudah Sesuai target (SS)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Dinas Perhubungan

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
9	9,1	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Persen (%)	64,32 Km	64,32 Km	64,32 Km	Sudah Sesuai target (SS)	Perhubungan
9	9,1	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Lokasi	56,65 Km	56,65 Km	56,65 Km	Sudah Sesuai target (SS)	Perhubungan
11	11,2	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persen (%)	23.069.825	23.069.825	23.069.825	Sudah Sesuai target (SS)	Perhubungan
11	11,2	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	-	ada	ada	ada	Sudah Sesuai target (SS)	Perhubungan



Kepolisian

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
16	16,1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	7	7	7	Belum Sesuai Target (SB)	Kepolisian
16	16,1	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kasus	5	5	5	Sudah Sesuai target (SS)	Kepolisian
16	16,1	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Persen (%)	0,08%	0,08%	0,08%	Sudah Sesuai target (SS)	Kepolisian
16	16,1	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	99,92%	99,92%	99,92%	Sudah Sesuai target (SS)	Kepolisian



Dinas Kesbangpol

NO. TPB	NO. TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
10	10,3	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks	89,71	90,61	87,97	tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Kesbangpol
16	16.b	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	kebijakan				tidak ada/belum ada data (NA)	Dinas Kesbangpol



Lampiran 4. Tabel D1, D2 dan D3 Berdasarkan Pedoman Permendagri 7/2018

Tabel D1. Rekomendasi Target Pencapaian TPB

Target TPB	Indikator TPB	Deskripsi Indikator	Tahun Dasar (2023)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
TPB 1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	75,57	82,55	86,04	89,53	89,53	96,51	Dinas PUPR, Dinas Perumkim, Bapperida, DLH dan PDAM
	1.2.1.*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	6,67	6,75	6,58	6,41	6,24	6,08	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas KUKMDAGIN, Setda, DP3A, Disdukcapil, BPS
TPB 2	2.2.2.(c)	Pola Pangan Harapan	83,1	85,79	87,13	88,47	89,91	91,16	DKPP, BULOG, Perumda Pasar
TPB 3	3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7,1	5,09	2,99	2,92	2,85	2,77	Dinas Kesehatan, Puskesmas & RSUD, BPJS
TPB 4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	51,5	58,84	62,51	66,19	69,86	73,53	Dinas Pendidikan
TPB 6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	76,79	85,49	88,4	91,3	94,2	97,1	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida, PDAM
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	76,17	82,98	86,38	89,79	93,19	96,6	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida
TPB 8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	5,1	6,35	7,55	8,72	9,86	10,98	Bapperida, Dinas KUKM DAGIN, Bappenda, SETDA, DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Mitra Pembangunan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Target TPB	Indikator TPB	Deskripsi Indikator	Tahun Dasar (2023)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
TPB 9	-	Pendekatan dorongan terhadap pengembangan infrastruktur hijau untuk pengurangan emisi (% penurunan GRK)	1,05	5,35	8,59	11,63	14,14	16,32	Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan
TPB 10	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,46	0,43	0,4	0,37	0,34	0,31	Bapperida, SETDA, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas KUKM DAGIN, Mitra Pembangunan, Dinas Sosial Kota Bogor, Dinas Kesehatan
TPB 11	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	4,25	4,29	4,31	4,33	4,35	4,37	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	70	82,28	82,6	82,92	83,24	83,88	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida
TPB 13		Potensi dampak perubahan iklim di Kota Bogor	-	-	-	-	-	-	BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, DLH, Bapperida
Diluar TPB	-	Daya dukung dan daya tampung	-	-	-	-	-	-	DLH, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel D2. Rekomendasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah

Target yg Menjadi Isu Strategis	Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 th (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029				
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Program Pemberdayaan Sosial	%	6,75	6,58	6,41	6,24	6,08	2.881.963.406	APBD	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas KUKMDAGIN, Setda, DP3A, Disdukcapil, BPS	Dengan upaya tambahan
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Program Pengelolaan sumberdaya air	%	82,55	86,04	89,53	89,53	96,51	174.769.494.896	APBD/APBN	Dinas PUPR, Dinas Perumkim, Bapperida, DLH dan PDAM	Dengan upaya tambahan
	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum							5.018.334.257			
	Program kawasan permukiman							164.585.923.114			
Pola Pangan Harapan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	skor	85,79	87,13	88,47	89,91	91,16	2.836.754.470	APBD	DKPP, BULOG, Perumda Pasar	Dengan upaya tambahan
	Program pengawasan keamanan pangan							255.033.597			
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	per 1000 kelahiran hidup	5,09	2,99	2,92	2,85	2,77	595.075.660.064	APBD	Dinas Kesehatan, Puskesmas & RSUD, BPJS	Dengan upaya tambahan
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera							17.006.636.092			
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan Program pengembangan kurikulum	%	58,84	62,51	66,19	69,86	73,53	1.241.442.848.485	APBD	Dinas Pendidikan	Dengan upaya tambahan
Persentase rumah tangga yang memiliki akses	Program pengelolaan sumberdaya air	%	85,49	88,4	91,3	94,2	97,1	174.769.494.896	APBD/APBN	Dinas PUPR, DLH, Dinas	Dengan upaya tambahan



Target yg Menjadi Isu Strategis	Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 th (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029				
terhadap layanan sumber air minum aman.	Program pengelolaan dan pengembangan system pengelolaan air minum							5.018.334.257		Perumahan dan Permukiman, Bapperida, PDAM	
Akses sanitasi layak	Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah	%	82,98	86,38	89,79	93,19	96,6	59.241.596.469	APBD/ APBN	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida	Dengan upaya tambahan
	Program pengembangan perumahan							70.803.288.536			
	Program kawasan permukiman										
	Program perumahan dan Kawasan kumuh							164.585.923.114			
Persentase sampah tertangani	Program pengelolaan persampahan regional	%	82,28	82,6	82,92	83,24	83,88	53.587.960.271	APBD	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida	Dengan upaya tambahan
	Program pengelolaan persampahan							58.869.363.230	APBD		
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	6,35	7,55	8,72	9,86	10,98	62.714.415	APBD	Bapperida, Dinas KUKM DAGIN, Bappenda, SETDA, DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Mitra Pembangunan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dengan upaya tambahan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif							3.416.553.140	APBD		



Target yg Menjadi Isu Strategis	Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 th (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029				
Koefisien Gini	Program Perekonomian Dan Pembangunan	-	0,43	0,4	0,37	0,34	0,31	7.344.694.485	APBD	Bapperida, SETDA, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas KUKM DAGIN, Mitra Pembangunan, Dinas Sosial Kota Bogor, Dinas Kesehatan	Dengan upaya tambahan
Penurunan GRK dari sektor energi melalui pembangunan infrastruktur	Program penyelenggaraan lalulintas & angkutan jalan (LLA)	%	5,35	8,59	11,63	14,14	16,32	209.297.926.738	APDB/ APBN	Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	Dengan upaya tambahan
Perubahan Iklim	Program pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	4.120.500.080	APDB/ APBN	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, DLH, Bapperida, BPBD	Tanpa Upaya Tambahan
Jumlah Kota Hijau yg Menjadikan RTH di Kawasan Perkotaan	Program penatagunaan tanah Program pengelolaan keanekaragaman hayati)	% RTH	4,29	4,31	4,33	4,35	4,37	112.664.179.195	APBD	Dinas PUPR, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida	Tanpa Upaya Tambahan



Target yg Menjadi Isu Strategis	Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 th (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029				
Peningkatan kontribusi mitra pembangunan	Program pengembangan iklim penanaman modal	% peningkatan	11,5	12,5	13,5	14,59	15,49	543.245.843	APBD	DPMPTSP, Bapperida, Setda, Dinas KUKMDAGIN	Tanpa Upaya Tambahan
	Program promosi penanaman modal							722.985.956	APBD	DPMPTSP, Bapperida, Setda, Dinas KUKMDAGIN	Tanpa Upaya Tambahan



Tabel D3. Rekomendasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pembangunan

Tema	Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 th (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
Percepatan ODF	Pembangunan Sanimas IPAL	Rp	1.514.972.098	1.704.343.610	1.934.429.997	2.216.663.334	2.560.024.484	9.930.433.522	Mitra Pembangunan	PT Adira, PT Penggadaian, PT Surveyor Indonesia, PT Indosat, PT, UPZ Kota Bogor, PT Taspen, Perumda BPR Bank Kota Bogor, PT Nutrifood, Baznas
	Pelaksanaan Pembangunan Septictank Komunal									
Pengentasan Stunting	Pemberian bantuan makanan	RP	1.972.613.685	2.219.190.396	2.518.781.100	2.886.271.262	3.333.354.681	14.699.371.380	Mitra Pembangunan	CV Nutrimea Sehat, RS Marzuki Mahdi, Perumda Tirta Pakuan, PT Dahana, Biofal, PT Nawa Agna, RS Ummi, Perumda BPR Bank Kota Bogor, Intralab Ekatama, Unilever & IPB, Al Hasbi, The 101 Hotel, Ayam Goreng Maulagi
Pemberdayaan UMKM	Kantin Balai Kota	RP	2.292.663.000	2.579.245.875	2.927.444.068	3.354.558.158	3.874.179.216	17.084.290.317	Mitra Pembangunan	PT Mayora Indah Tbk, PT Tirta Investama, Grab
	Sentra Kuliner Sukasari Pusat Kuliner Rangga Gading									
Pemberdayaan masyarakat	Program Kampung Binaan Astra Daihatsu	Rp	278.750.000	313.593.750	355.928.906	407.858.934	471.036.282	1.827.167.872	Mitra Pembangunan	PT. Astra Daihatsu



Tema	Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 th (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
	di Katulampa dengan membuka Wahana Ngalun yang dikelola oleh komunitas binaan yang bernama komunitas SARADA (Sahabat Astra Daihatsu)									
	Pembinaan kelompok untuk kewirausahaan									
	Bantuan alat untuk posyandu									
	Bantuan sarana pertanian									
	Sarana prasarana untuk pengembangan wahana Ngalun									
	Alat pengolahan sampah									
	Bibit tanaman									
Pembangunan Sarana Prasarana Umum	Revitalisasi Taman Lansia	RP	279.285.200	314.195.850	356.612.290	408.642.023	471.940.672	2.081.156.035	Mitra Pembangunan	PT. GoTo Gojek Tokopedia, Tbk, Tokopedia, Bogor Raya basketball club
	Pembangunan MCK Umum									
	Perbaikan GOR Pajajaran									
Pembangunan Galeri	Pembangunan Galeri Parawira	Rp	3.748.553.110	4.217.122.248	4.786.433.752	5.484.774.436	6.334.365.996	27.933.180.582	Mitra Pembangunan	Bank BJB

Keterangan: Proyeksi target tahunan didasarkan pada tren pertumbuhan secara TJSI Kota Bogor Tahun 2016-2023